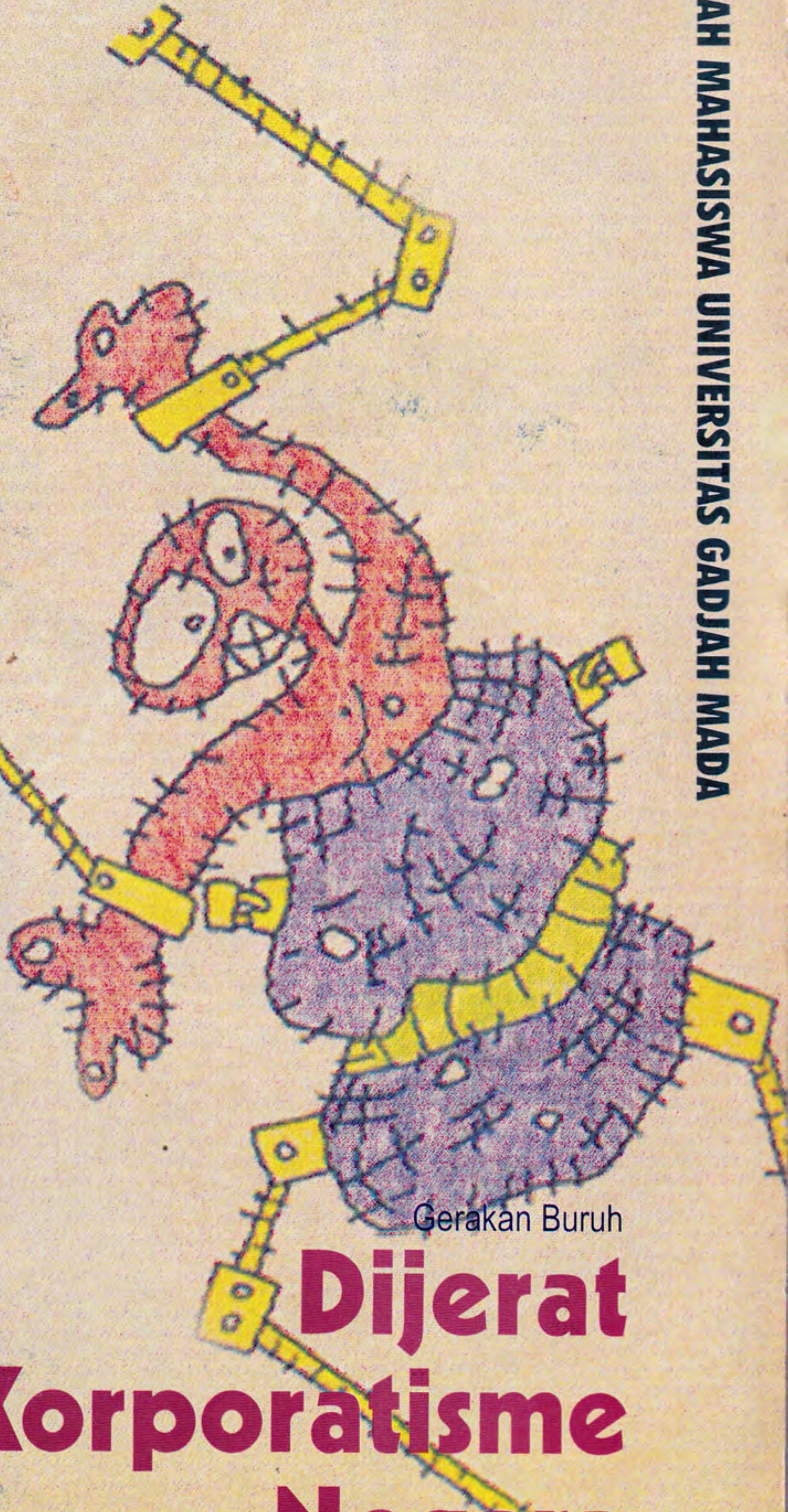
EDISI NO. 26/TH. XII/1997

BALAIRUNG

MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA



Gerakan Buruh

Dijerat Korporatisme Negara

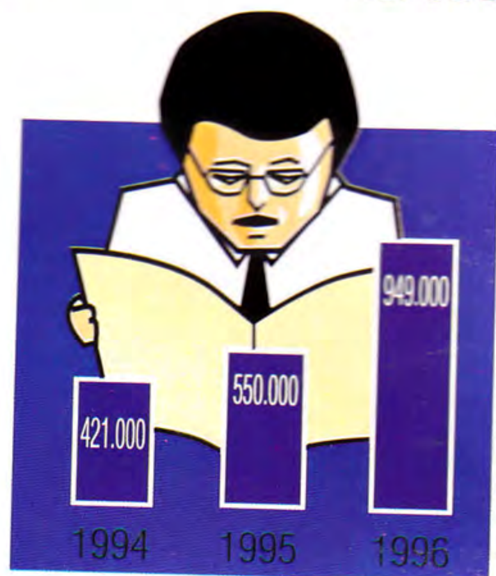
ISSN : 0215 - 076X

Rp. 3.500,00

MENANG DENGAN STRATEGI BARU



PERTUMBUHAN PEMBACA REPUBLIKA



Memenangkan pertempuran tak hanya bergantung pada kekuatan pasukan dan kecanggihan teknologi. Ada yang lebih esensial, yakni perencanaan dan strategi. Ini berlaku pula dalam perang pemasaran. Manakala produk "me-too" berhamburan, waspadalah dengan pangsa pasar Anda. Sedikit lengah, lawan berkuasa. Ciptakan strategi baru dalam pemasaran atau ubahlah strategi komunikasi dan strategi media. Republika berarti sinergi baru untuk meluncurkan strategi Anda. Sebuah media yang efektif dan efesien guna menggempur pasar di mana pun, atau di wilayah khusus seperti Botabek, Bandung, dll.

Bila Anda ingin memenangkan pertempuran, hubungi : 7944493 - 94 , 7944692 - 93

HARIAN UMUM

REPUBLIKA

KORAN MASYARAKAT BARU

koleksi: Lais Abid

DAPUR

Pembaca, tanggal 7 Juni 1997 yang lalu Majalah *Balairung* bersama sebuah lembaga pendidikan pengembangan diri dan bisnis di Yogyakarta mengadakan Work-, shop Marketing. Acara ini dilaksanakan sebagai upaya menciptakan 'profesionalisme' khususnya awak perusahaan.

Berkat fleksibilitas kepala bagian iklan kami, F. Ika Yuniarti beserta tim panitia acara ini tetap bisa melintas dengan pas.

Restrukturisasi, itulah yang dipilih pengurus Badan Penerbit Pers Mahasiswa (BPPM) UGM. Berawal dari sebuah diskusi yang diadakan Litbang *Balairung* bekerjasama dengan SKM *Bulaksumur*, yang diberi label: *BPPM UGM; restrukturisasi, revitalisasi atau bubarisasi?* Dihadiri oleh pengurus Majalah *Balairung*, SKM *Bulaksumur* dan beberapa penerbitan mahasiswa fakultas di lingkungan UGM menghasilkan sejumlah catatan untuk Musyawarah Pengurus BPPM UGM.


DESTI/BAMBANG

Kru Balairung *di depan Hotel Sri Wedari Yogya, setelah Workshop Marketing berakhir*

Musyawarah pengurus BPPM UGM 5-6 April 1997 pun mengalami *deadlock*. Dan Musyawarah Lanjutan di wisma *Kalioerang*, 19-20 April 1997 akhirnya mencapai kesepakatan bahwa departemen Pemberdayaan Penerbitan Fakultas -- sebuah departemen yang bernaung di bawah BPPM dan forum bertemunya penerbitan fakultas/jurusan/khusus se-UGM-- harus hilang. Itulah akhirnya yang menjawab *ke-waguan* organisasi yang bernama BPPM UGM selama ini. Ada yang pro dan kontra memang.

BPPM UGM yang menaungi *Balairung* selama ini memang telah berubah. Kini lembaga ini hanya terdiri Majalah *Balairung* dan SKM *Bulaksumur*. Struktur dewan pimpinan pun berganti dengan struktur yang disebut sebagai presidium. Inilah usaha maksimal agar BPPM benar-benar bisa memfungsikan dirinya sebagai badan atau organisasi penerbitan.

Pada *Balairung* edisi No. 14 tahun 1991 kami mengabarkan bahwa struktur BPPM UGM Balairung berubah menjadi BPPM UGM dan diiringi terbentuknya tiga departemen di bawahnya, Departemen Penerbitan Majalah, Departemen Penerbitan Surat Kabar, dan Departemen Pelatihan Pengkajian yang kemudian diubah menjadi Pemberdayaan Penerbitan Fakultas. Kini tepat 5 tahun kemudian, kami harus mengubur kesepakatan itu. Namun, kami akan tetap berkomunikasi dan bekerjasama dengan teman-teman fakultas dan atau jurusan.

Balairung sendiri dalam perjalanannya tidak luput dari kritik. Salah satu kritik itu adalah adanya anggapan bahwa tema-tema yang diangkat *Balairung* selama ini kurang membumi dengan UGM. Maka untuk menjawab itu semua, mulai edisi ini kami menambah rubrikasi; yakni **INFO SEKILAS UGM** (isinya memuat berita-berita kampus) dan **SISIPAN** (bertujuan memberi ruang ekspresi bagi kawan-kawan fakultas untuk menuangkan ide-idenya yang selama ini tidak ter*ekspose*.

Kini hampir 80% pengurus *Balairung* adalah muka-muka baru, diikuti oleh 'menghilangnya' beberapa pengurus lama. Kebanyakan mereka memang telah habis masa pengabdiannya di *Balairung*. Itulah kenyataan yang harus dihadapi. Kinerja organisasi memang menghendaki demikian. Tetapi harapan kami dengan banyaknya muka baru itu justru akan meningkatkan kualitas *Balairung* itu sendiri. Mereka mempunyai semangat baru, visi serta kreativitas yang lebih baru pula.

Pembaca, tak ketinggalan untuk menumbuhkan minat pelajar pada dunia jurnalistik, *Balairung* mengadakan Pendidikan dan Pelatihan Jurnalistik Pelajar SLTA se-DIY pada 28 sampai 31 Juli 1997 di gedung UC UGM. Peserta kegiatan ini tidak dipungut biaya dan disediakan perlengkapan praktek pembuatan media. Diklat ini kerja sama *Balairung* dengan KOMPAS didukung keuletan seluruh awak *Balairung*.

Penjaga dapur

BALAIRUNG
MAJALAH MAHASISWA UNIVERSITAS GADJAH MADA

❑**Diterbitkan oleh** Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) ❑ **Ijin Terbit:** SK MENPEN RI No. 1039/DIRJEN PPG/STT/1986, SK Rektor No. UGM/82/7789/UM/01/37, *International Standard Series Number* (ISSN): 0215-076X ❑**Pelindung:** Prof. Dr. Soekanto Reksohadiprodjo, M.Com (Rektor UGM)❑ **Penasehat:** Ir. Bambang Kartika(Pembantu Rektor III UGM), Drs. Amir Effendi Siregar, M.A., Prof. Dr. Koesnadi Harjasumantri, S.H., Ir. Abdul Hammid Dipopramono ❑**Pemimpin Umum:** Aris Purnomo ❑**Sekretaris Umum:** Muhammad Sri Sadono ❑**Pemimpin Redaksi:** Khoirul Rosyadi ❑**Sekretaris Redaksi:** Nur Hidayati ❑**Ka. Litbang:** Mashudi ❑**Staf Litbang:** Hary Prabowo, Moh. Mustajab, Agus Riyanto, Risdiyanto, Eriyanto ❑**Pemimpin Perusahaan:** A. Kun Anggoro EY ❑**Sekretaris Perusahaan:** Setiati ❑**Kabag. Keuangan:** Daryanti ❑**Kabag. Iklan:** F. Ika Yuniarti ❑**Kabag. Distribusi/ Publikasi:** Priyo Sudarmo ❑**Kabag. Promosi:** Nenden Novianti Fathiastuti ❑**Staf Perusahaan:** A. Ali Fridi, Ristiana Kadarsih, Tri Rahayu Susanti, Sri Wahyuni ❑ **Redaktur Bahasa:** Among Kurnia Ebo, Lais Abid ❑ **Redaktur Pelaksana:** Dirmawan Hatta, Asep Mulyana ❑ **Penjaga Rubrik:** Melani Wahyu Wulandari, Sarwo Wibowo, Irma Hidayana, Wuwun Widiawati, Irfan Muktiono, Nining Sunartiningsih, Kusen Alipahadi, M. Arifin❑**Staf redaksi:** A. Kunto Anggoro, M.A Fitrianto, Imam Risdiyanto, Aprilina Prastari, Sholahuddin Ghozali, Nurul Wibawa CB, Ajianto Dwi Nugroho, Hery Trianto, Radyah Maharastri, B. Nursanti R.R, Kukuh Siswoyo, Endi Sepkendarsyah ❑ **Redaktur Artistik:** Eka Kurniawan ❑**Staf Artistik:** Agung Arief Budiman, Moh. Gandhi Amanullah, Andy Seno Aji, Riza Afifi, Zuhrotun Muniroh, Leily Fakhrina, Fanie Indrian Mustofa ❑**Redaktur Foto:** Fernando Bestral❑**Fotografer:** Destianto, Bambang Pamungkas ❑**Alamat Redaksi:** Bulaksumur B-21 Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 901703 Faks. (0274) 566171❑ **E-mail:** balairung@for-president.com ❑**Rekening:** Tabungan MITRA BAPINDO No. Rekening 22 1 504115 9 dan TAPLUS BNI No. 780 731 167 a.n. R. Daryanti ❑**Percetakan:** Liberty Offset, Jl. Jayengprawiran 21 Yogyakarta. Telp. (0274) 512908. **Isi diluar tanggungjawab percetakan**

***Balairung* Interaktif home page: http://www.thepentagon.com/balairung e-mail: balairung@ for-president .com**

Redaksi menerima tulisan dan foto tentang dunia mahasiswa. Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya. Tulisan diketik rangkap 2-6 halaman kuarto. Atau dalam bentuk file disket dengan menyebutkan program pengolah katanya sebanyak 6-36 kilobyte. Tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan jika disertai perangko balasan secukupnya.

BALAIRUNG

ISI

Laporan Utama 12

Meskipun angka pemogokan dan demonstrasi buruh sejak awal 90-an cukup tinggi, namun gerakan buruh dengan amat gampang dilumpuhkan oleh kekuatan represif dan koersi negara. Adakah state corporatism memang berperan di sana? Lantas strategi apa yang perlu dikembangkan agar buruh bisa melepaskan diri dari state corporatism? Simak pula ulasan khusus tentang RUU Ketenagakerjaan yang kontroversial itu.



Budaya 96

Sebagai counter culture terhadap generasi sebelumnya, generasi X ternyata belum mampu memberikan nilai-nilai baru bagi kehidupan. Namun demikian, generasi ini telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan kebudayaan di penghujung abad ini. Begitu juga di Indonesia, the X generation telah dianut sebagai gaya hidup oleh sebagian generasi mudanya. Sayangnya, gaya ini masih pada taraf fashion saja. Kehadirannya belum didasari sebagai alternatif dari perombakan nilai-nilai yang dianut oleh generasi sebelumnya. Bahkan, boleh dikata bahwa generasi X di sini hanyalah sebatas peniruan "appearance" semata dari apa yang terjadi di Barat.



ISI

Insan Wawasan 87

Mungkin orang tidak banyak yang mengira kalau buku Menjadi Indonesia menjadi buku teks sejarah yang unik. Buku setebal 875 halaman itu akhirnya lebih banyak catatan kakinya dibanding tulisan utamanya. Orang pun tentu akan menghubung-hubungkan dengan penulisnya. Parakitri T. Simbolon, itulah orangnya. Sarjana Hubungan internasional UGM ini bercerita tentang proses panjang terbentuknya kebangsaan, lengkap dengan penggalian fakta historis melalui riset yang mendalam. Lewat wawancaranya dengan Balairung dia mengatakan,"Makanya hati-hatilah pemerintah?"



Laporan Daerah 76



Sasak adalah sebuah mozaik kehidupan. Benturan nilai dan kultur dari berbagai etnis mengharuskannya melakukan metamorfosis. Ada tradisi animis, mitologis, Islam Jawa, dan Hindu Bali yang kemudian menyusun struktur nilai dan membentuk identitasnya.

Kelik Supranto



Demokrasi knalpot

Demokrasi Indonesia keras suaranya, kosong isinya

Menanggapi tulisan Joao Mota itu

Saya adalah pembaca setia *Balairung*, yang bagi saya sangat mengesankan, dan kadang memuat tentang perkembangan politik Indonesia. Berkaitan dengan *Balairung* No. 25/TH. XII/1997 Saya ingin menanggapi tulisan Joao Mota dan Octavio Soares (**Memburu Horta Sampai ke Oslo**).

Saya adalah pemuda Timor Leste teman sekelas Joao ketika SD. Tulisan mereka sangat mengecewakan. Karena dengan tulisan dan petualangan mereka ke Oslo itu berarti telah mengkhianati perjuangan rakyat Maubere (Timor-Timur) yang sebenarnya, apalagi mereka hanya pemuda Timor Leste yang lebih dikenal sebagai intel ABRI.

Bayangkan saja, mereka bermodalkan 1000 dollar per orang berangkat ke Oslo dan itupun masih belum cukup menurut mereka, lantas biaya tiket pesawat Jakarta-Amsterdam-Oslo pergi pulang dari mana uang itu mesti didapat? dari rakyat Timor Timur. Juga cerita bahwa adik dan keponakan Oktavio sedang diuruskan visa-nya belajar di AS tampaknya ingin menunjukkan bahwa dia berasal dari kelas elit masyarakat Timor Leste, yang artinya mereka hanyalah segelitir orang oportunis yang takut kehilangan hak-hak istimewa.

Kedekatannya dengan pihak KBRI Oslo dan mendapat banyak kemudahan dan hubungan yang begitu akrab tentulah karena ada referensi khusus dari petinggi Indonesia. Sementara saya pernah berurusan dengan pihak imigrasi ataupun KBRI dan saya menemui kesulitan yang begitu luar biasa bagi seorang pemuda Timor Leste, karena kami selalu dicurigai, suatu hal yang tidak ditemui oleh keduanya.

Dengan penganugerahan Nobel perdamaian kepada dua tokoh Timor-Timur itu Pemerintahan Indonesia telah kehilangan akal untuk mencegah para penerima Nobel itu. Barangkali kepergian Joao Mota dan Octavio Soares beserta beberapa orang intel itu adalah untuk membunuh Horta.

Di *Balairung* mereka menyudutkan Horta yang pengkhianat bangsa dan komunis yang memproklamirkan kemerdekaan Timor Leste tanggal 28 November 1975 serta menangkap semua politikus termasuk ayahnya. Padahal itu semua tidak benar.

Sementara seminar di Sidney Juni 1996 itu bukanlah atas prakarsa Freetilin, melainkan disponsori oleh Sidney University, University Technology of Sidney dan Oporto University Portugal. Disitu Joao bertemu Liem Soei Liong saya hadir pula di sana.

Keberanian mereka menantang Horta berdebat justru saya pertanyakan, kenapa ketika di Sydney itu mereka tidak berani melakukan hal tersebut dan tidak mau menghancurkan foto-foto yang mereka buat diam-diam selama seminar. Juga pernyataan bahwa mereka orang Timor Timur asli sehingga Horta karena tidak tahu tentang Tim-Tim sehingga kalah kalau berdebat. Padahal orang sudah tahu latar belakang Horta. Jadi kedua orang itu sangat oportunis. Dan sebenarnya yang mewakili Indonesia bukan Uskup Belo, sebab Uskup Belo mewakili Timor Leste. Apakah mereka sudah membaca naskah pidato Uskup Belo.

Sebaiknya saudara Joao dan Oktavio harus belajar banyak lagi untuk membela orang yang tertindas, seperti halnya PRD yang berani membela rakyat Maubere yang ingin merdeka. Apakah mereka tidak malu bila orang lain membela rakyat kita, sedangkan kita tidur nyeyak untuk menikmati uang haram. Kata-kata terakhir Joao yang mengatakan akan berjuang sampai "Tumbangkan Ramos Horta", maka akan saya lihat betapa hebatnya Anda berdua di masa yang akan datang. Kami sebagai rakyat kecil akan menyaksikan pertunjukan kalian. Semoga kesadaran mereka dapat tumbuh dari hati nurani mereka sendiri betapa dosanya bila kita menjual nyawa kita sendiri seperti Judas terhadap Yesus.

Peter Rate Laek
Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Pancasila
Lenteng Agung Jakarta Selatan

** *Catatan redaksi: Dengan dimuatnya surat pembaca ini maka polemik yang berkaitan dengan tulisan Joao Mota dan Penganugerahan Nobel kepada Ramos Horta serta segala kaitannya di Majalah Balairung ditutup sampai di sini dan dianggap selesai. red*

Kalau tidak salah...

Saya adalah pembaca *Balairung*, berkaitan dengan Laporan edisi No. 24/TH. X/1996 saya ingin memberi tanggapan.

1. Pada halaman 17, kolom 3, alinea 2, terdapat kata *playwood*, yang berarti kayu untuk mainan. Mungkin yang dimaksud redaksi adalah *plywood* yang berasal dari kata *ply* dan *wood*. *ply* bisa berarti kata benda dan

kata kena yaitu lapisan atau dilapis. Jadi *plywood* kalau saya tidak salah berarti lembaran kayu yang pada proses pembuatannya dibuat berlapis dengan dilem atau lapisan bahan lainnya. Mohon redaksi memeriksa lagi.

2. Menurut saya kritik besar yang diajukan oleh *Balairung* untuk kebijakan Habibie itu karena persepsi psikologis redaksi terhadap tokoh yang diwawancarai atau minimnya perolehan informasi *up to date* yang berkaitan dengan situasi dan kondisi IPTN. Berkaitan dengan informasi yang tidak relevan ini terkesan bahwa laporan *Balairung* itu menjatuhkan IPTN.

3. Untuk pernyataan Sdr. Tony A. Prasetyantono (Temu Wicara) yang mengatakan bahwa: (Hal. 27, kolom 1, alinea2.)"*...pesawat produk IPTN hanya mampu ditukar dengan beras ketan Thailand...*", kalau saya tidak salah imbal beli *counter-trade* IPTN dengan Thailand tersebut tidak jadi. Perlu diketahui pula bahwa Negara Malaysia melakukan hal yang sama dengan Rusia yaitu menukar pesawat tempur MIG-29 buatan Rusia dengan kelapa sawit. Juga pembelian F-16 (yang kini tinggal 10 itu) adalah dengan sistem *offset*, IPTN membuat ratusan komponen-komponen sayapnya (sehingga IPTN berarti telah menyerap teknologi canggihnya). Menurut saya mekanisme pembelian ini wajar-wajar saja. Selain itu nilai jual beras ketan tersebut tentu nilainya *ekuivalen* dengan penukaran pesawat produk IPTN. Sebab tidak mungkin pemerintah RI melakukan negosiasi tanpa berfikir masak-masak. Kemudian berkaitan dengan penyataan: "*...Nyatanya produk-produk nya susah dijual, padahal pabriknya terlanjur besar...*", bukankah dalam IAS '96 yang lalu penjualan N-250 sudah melewati titik impas (*break event point, BEP*), siapa bilang susah?. Saya kira tidak banyak masyarakat yang tahu bahwa penjualan N-250 yang sudah melewati BEP, dan pesawat N-2130 sudah puluhan buah dipesan. Bahkan pembelinya bukan dari pasar domestik saja. AS dan Jerman telah membelinya lebih 30 buah untuk N-250. Juga perlu diketahui pula bahwa sudah beberapa bulan yang lalu ada tender penggantian pesawat skuadron tertentu di Australia, dan sedang dijajaki pula penjualan CN-235 ke Australia. Ini berarti bahwa bila tender itu menang, maka puluhan CN-235 terjual. Kans IPTN untuk memenangkan tender itu sangat besar mengingat kebijaksanaan Australia kini lebih meng-Asia.

4. Bila redaksi *Balairung* memang mempermasalahkan industri berbasis high-tech, mari kita menengok persoalan yang benar-benar menyentuh masyarakat, yaitu tentang pengentasan kemiskinan, yang konon sekarang jumlah penduduk miskin tinggal tersisa 15%. Berkaitan dengan ini, perlu diketahui bahwa Indosat dengan SLI 001-nya telah menyisihkan Rp 25,00 untuk setiap pelanggan yang menelpon ke luar negeri. Dan menurut Indosat, ini dapat menghimpun puluhan bahkan ratusan juta rupiah. Saya kira hal serupa bukan hanya dilakukan Indosat. Dengan demikian saya kira negara kita cukup mampu mengatasi permasalahan tertentu.

5. Penggunaan tabel data penjualan pesawat produksi IPTN di halaman 21, saya kira tidak relevan jika melihat masa terbit *Balairung* yang tahun 1996. Ini berarti data itu telah berumur 3 tahun. Bagi dunia industri dirgantara, waktu 3 tahun bukan basi lagi tapi jauh dari busuk! Buktinya juga adanya majalah *Aviation Week & Space Technology* dan *Flight* yang keduanya merupakan majalah mingguan yang khusus mengupas persoalan dirgantara. Ini jelas bahwa berita dunia dirgantara sangat dinamis dan selalu hangat. Bisa jadi berita dirgantara hari ini besoknya sudah sangat basi. Bila tabel itu direvisi maka akan muncul angka 260-an pesawat N-250 yang sudah dipesan. Dan konon N-2130 yang masih diatas kertas juga sudah dipesan puluhan buah.(lihat berita IAS '96).

6. Halaman 21 kolom 3, bukankah seminggu atau sebulan (kalau tidak salah) setelah berita penggunaan dana reboisasi(peremajaan hutan) yang dipinjamkan pemerintah ke IPTN untuk N-250 (kalau tidak salah), keputusan itu dibatalkan?Jadi tidak memakai dana reboisasi itu. Tetapi kalau laporan *Balairung* ini dilanjutkan, berita itu memang perlu dicek.

7. Berkaitan dengan pernyataan Halaman 24 kolom 2 baris terakhir alinea 1, setahu saya pabrik pesawat di AS itu bernama *Lockheed* bukan *Lockhead*, saya ingin juga mempertanyakan kebangkrutannya di tahun 1981, data dari mana itu? Sebab berita terakhir *Lockheed* sekitar tahun 1994-1995 berubah nama menjadi *Locheed Martin*, oleh karena merger dengan *Martin Marietta*, dan setahu saya *Lockheed Martin* adalah perusahaan yang teramat sehat, terbukti selama 5 tahun terakhir ia menjadi top 5 ranking pemegang pasar dirgantara di AS, bersaing dengan Boeing. Bahkan kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu menempati rangking penjualan nomer 1. Jadi kalau *Balairung* mengatakan bangkrut saya jadi tertawa!. Bayangkan Lockheed Martin sama sekali tidak membuat pesawat penumpang sipil. Justru di tahun 1981 berhasil membuat pesawat serang siluman pertama dan satu-satunya di dunia. Untung *Balairung* tidak beredar di AS kalau iya, bisa-bisa dituntut Lockheed Martin.

8. Dalam industri perkapalan mungkin PT PAL merugi dan kurang sehat, namun perlu diketahui bahwa kalau tidak salah PT Kodja Bahari yang dibimbing PT PAL telah menerima pesanan kapal puluhan atau ratusan (saya lupa) oleh perusahaan luar negri.

9. Halaman 15, kolom 1, alinea 2. Tentang pembuatan N-2130, banyak media mengatakan bahwa setiap kepala rakyat yang jumlahnya sekitar 200 juta orang hanya dibebani Rp 5000,00. Setelah saya mengikuti beritanya sampai sekarang, ternyata cukup lucu juga karena N-2130 ini dipegang oleh PT DSTP dan sahamnya dilempar ke pemda di seluruh Nusantara. Dan ternyata dana pembuatan N-2130 yang sama sekali tidak memakai dana dari pemerintah, jadi pemerintah tidak mengeluarkan dana 1 rupiah pun untuk itu. Jadi seakan-akan swasta penuh. PT DSTP


□Badan Penerbit Pers Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BPPM UGM) □Ketua Presidium, merangkap anggota:Aris Purnomo(Pemimpin Umum MM *Balairung*)**□Anggota presidium**: Hidayatullah (Pemimpin Umum SKM *Bulaksumur*), Ahmad Nasir (Sekretaris Umum SKM *Bulaksumur*), Muhammad Sri Sadono (Sekretaris Umum Majalah *Balairung*)

dipegang tokoh-tokoh penting nasional dan konglomerat. Di antaranya (kalau tidak salah) Presiden HM Soeharto sebagai ketua/ komisarisnya (saya lupa), Bob Hasan, Sudwikatmono, P. Pangestu sebagai anggota. Jadi Rp 5000,00 per kepala penduduk Indonesia itu hanya isapan jempol. Jadi barangkali yang dimaksud adalah Rp 5000,00 per kepala di "masyarakat" (dalam tanda kutip-sebuah pengertian khusus).

Saya menangkap bahwa tampaknya *Balairung* kurang setuju dengan kebijakan Habibie. Dalam hal ini prosentase keberpihakan saya mungkin 51% terhadap Habibie. Berkaitan dengan ini serta industri otomotif secara umum, saya berpendapat; kalau tidak dimulai sekarang kapan lagi?

Di era perdagangan bebas (sekitar tahun 2003-2010), saya kira kita harus benar-benar jago dalam sektor industri. Sebab bukan tidak mungkin pada saat itu nanti jeruk Pontianak dijual dengan harga Rp 2000,00 per kg bersebelahan dengan jeruk Sunkist Bangkok Rp 2200,00. Nah kalau sudah begini kan masalah nasionalisme yang mencuat. Analogi dengan itu bagaimana kalau nanti ada mobil buatan Thailand 95% komponen lokal Thailand terjual lebih banyak dinading lawannya; Timor yang saat ini baru 80% komponen lokal dan tidak laku? Jadi semua industri itu harus dimulai sekarang! tidak bisa diganngu gugat.

Besarnya dana yang dikucurkan ke IPTN yang terlalu besar dan dipermasalahkan, bagi saya ada fenomena yang lebih besar lagi yaitu korupsi, kolusi, pengentasan kemiskinan, GNP yang harus dinaikkan, serta utang luar negri yang selalu besar.

Bila *Balairung* membutuhkan data yang lebih akurat silahkan hubungi saya.

GB Rachmadi
Mahasiswa Jurusan Teknik Mesin UGM '94, Jl Grafika 2 Yogya
staf redaksi Mading *Propellan* dan Majalah *Propulsi* Yogyakarta

Terima kasih atas informasinya-red

IKUT BERBELASUNGKAWA ATAS MENINGGALNYA

Ayahanda dari rekan kami
Moh Fatah Yasin
Lamongan Jawa Timur 19 Mei 1997
Mantan Pemimpin Umum
SKM ***Bulaksumur***

Ayahanda dari rekan kami
Hury Anggoro S
Madiun Jawa Timur
Mantan redaktur artistik
SKM ***Bulaksumur***

Pesantren At-Thohiriah butuh bantuan

Mempermaklumkan dengan hormat, bahwa bangunan anak terlantar/anak yatim (Pondok pesantren) yang dibangun tahun lalu saat ini kami menemui jalan buntu untuk menyelesaikannya. Sebab bangunan tersebut persis berdiri ditengah masyarakat desa berekonomi lemah. Sehingga kami bersama masyarakat hanya mampu menyelesaikan 54% dari rencana anggaran biaya Rp 65.350.000,00. Untuk itu melalui surat pembaca ini kami mohon bantuan pembaca untuk menafkahkan sebagian rizkinya baik berupa uang atau alat bangunan. Berapa pun besarnya bantuan pembaca sangat besar nilainya bagi kami. Karena kami yakin tanpa bantuan dari pembaca, bangunan tersebut terlantar.

Bantuan berupa uang dapat dikirim melalui Bank BNI Capem Prenduan Sumenep Madura, nomer rekening: **2767-0-905** atau BCA Cabang Pamekasan Madura nomer rekening: **1920057345 a.n. Hamidi Zainuddin, S.Ag.** Bantuan berupa barang dan yang akan diantar sendiri kami akan memberi route yang mesti dilalui. Silahkan kontak alamat dibawah.

Atas amal bantuannya kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga amal kebajikan Anda mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT. Amien...

K. Rohmatullah Rija'ie
Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren At Thohiriyah Aengpanas Prenduan Sumenep Madura 69465

Hadiah angket itu...

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pada pertengahan bulan April lalu kebetulan karena cuti pulang ke Kebumen(Jawa Tengah), saya mampir ke Yogya tiada lain untuk mendapatkan Majalah *Balairung* yang sudah lebih dari dua tahun saya kenal sewaktu masih kuliah dan juga "kebetulan" ikut berkiprah di media kampus (STAN Prodip Keuangan Jakarta). Bahkan majalah ini menjadi semacam salah satu referensi bagi saya tentang bagaimana mengelola dan menerbitkan sebuah media (mahasiswa).

Pada edisi 25 yang lalu saya mencoba mengirimkan angket yang ditawarkan dan Alhamdulillah mendapatkan kenang-kenangan (*Balairung* edisi No. 26) yang tidak tahu apa bentuknya karena memang belum diterima dan inilah salah satu alasan mengapa menulis surat ini.

Apapun bentuknya tidak peduli, tetapi tentunya tetap saya harapkan, karena itu adalah "kenang-kenangan" dan selebihnya memang itu hak saya.

Saya berharap dapat segera dikirimkan dan juga mohon informasi bagaimana cara mendapatkan *Balairung* ini secara tetap (berlangganan) tanpa harus selalu pulang ke Yogyakarta terlebih dahulu dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Teguh Sri W
d.a. Karipka Mataram
Jl Arif Rahman Hakim 49 Mataram
NTB 83126

Maaf, tolong bersabar saja, sudah kami kirim. Untuk berlangganan Anda bisa mengirim wesel sebesar Rp10.000,00 untuk tiga edisi-red

Sebagai bahan perbandingan...

Pertama saya membaca *Balairung* lewat teman yang kebetulan aktif di SKK *Indentitas* Universitas Hasanuddin. Setelah membaca saya sangat tertarik mengikuti *Balairung* untuk edisi-edisi berikutnya. Sebagai bahan perbandingan bagi media kami yang bernama Buletin *Vigor*, disamping menambah koleksi perpustakaan Himagro Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Lewat kesempatan ini saya mohon dikirmkan satu eksemplar untuk edisi perkenalan, sekaligus dikirimkan bagaimana syarat untuk berlangganan.

Atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Rudy Tanriaman
Litbang Buletin *Vigor*. Himpunan Mahasiswa Agronomi (Himagro) Unhas
Jl Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea Ujung Pandang 90245

Terima kasih perhatiannya. Untuk Buletin Vigor, *kita bisa saling tukar-menukar media!.-red*

Bimbingan Jurnalistik Gratis

Guna menjaring penulis pemula di seluruh Indonesia dan memperkenalkan lebih jauh dunia jurnalistik (penulisan artikel, cerpen, dan puisi) di kalangan remaja, maka "Ash-Shiddiq Intellectual Forum" Bandung mengadakan bimbingan jurnalistik gratis bagi pemula dan yang ingin lebih memantapkan.

Bimbingan ini terbuka bagi siapa saja terutama kawula muda di seluruh Indonesia. Bimbingan dilakukan via pos dan bagi yang memiliki telepon bisa dilakukan via telepon. Kami telah mempersiapkan tim untuk mengelola bimbingan ini secara intensif. Juga kami telah menyediakan buku panduan khusus bagi peserta.

Segera kirim surat permohonan, tulis nama, tanggal lahir, dan alamat yang jelas. Peserta yang diterima antara usia 12 hingga 35 tahun. Setiap surat akan dibalas (untuk memastikan diterima atau tidaknya bagi peserta). Segera kirim ke: **Ash-Shiddiq Intellectual Forum. Kantor Pusat Divisi Jurnalistik. Kotak Pos 11 Banjaran Bandung 40377**.

Ketua Divisi Jurnalistik
Toha Nasrudin Ash

Dari Impian Hingga Paradoks

Berangkat dari sebuah acara reuni SMA saya jadi mempunyai sedikit pemikiran.

Diantara kami yang satu SMA ada yang melanjutkan ke perguruan tinggi dan ada juga yang melanjutkan ke perseroan terbatas. Bagi saya yang kebetulan dapat masuk perguruan tinggi menganggap bahwa mereka yang masuk perseroan terbatas (memasuki dunia kerja), telah memasuki dunia nyata, dunia yang bukan lagi impian, seperti dunia saya. Lalu apa yang harus dilakukan agar kita tidak terlena oleh mimpi yang indah tersebut?

Menurut saya ada banyak hal yang perlu dilakukan. Misalnya dengan bersungguh-sungguh dalam belajar atau sering melakukan konsultasi kedalam diri kita sendiri atau banyak bertanya dan bergaul dengan orang-orang yang sudah berada di dalam 'dunia nyata', serta selalu memotivasi diri kita untuk melakukan hal-hal yang bisa membangunkan mimpi kita.

Di samping itu ada fenomena bahwa segala aktivitas dan pemikiran mahasiswa bertumpu pada studi saja. Mereka ingin bagaimana agar bisa kuliah dengan tenang, cepat lulus dan memperoleh Indeks Prestasi tinggi serta langsung dapat kerja.

Sementara di sisi lain ada fenomena juga, yaitu aktivitas dan pemikiran mahasiswa yang selalu mencoba peduli kepada kondisi rakyat dan lingkungan sekitarnya. Dengan selalu melihat sekelilingnya yang cenderung berubah maka akan timbul inspirasi yang inovatif. Mereka yang berada di kutub ini memang sangat istimewa, karena selain belajar mereka masih sempat memikirkan negri ini. Mereka aktif di organisasi politik, kemasyarakatan atau kegiatan ekstra kurikuler. Tetapi banyak dari mereka yang aktif kemudian indeks prestasi-nya jatuh. Ini sebuah ironi, di satu sisi mereka selalu memikirkan rakyat dan di sisi lain mereka mengorbankan studinya. Yang ideal tentunya aktif di kegiatan tapi juga bagus prestasi akademiknya. Mana mahasiswa yang benar-benar ideal bagi bangsa dan negri ini. Untuk penghuni kampus, mari kita jawab bersama-sama.

Imam Wahyudi
Mahasiswa Teknik Mesin UGM

Kritik Pelepasan KKN UGM

Saya, peserta KKN-UGM smt. II/th. 1996-1997 merasa perlu "mengkritisi" acara pelepasan KKN-UGM oleh Pangdam IV Diponegoro, 30 Juni 1997. Terdapat *item* acara laporan pelaksanaan KKN oleh Ketua LPM kepada Pangdam. Pemakaian term "laporan" ini mengesankan (bahkan secara semiotik bisa menandakan) adanya hubungan struktural antara UGM dan KODAM IV Diponegoro. Jadi *item* acara seharusnya bukan "laporan" tetapi "penjelasan", "pemaparan", dlsb, sebab kandungan maknanya lain. Terima kasih.

A. Supriyanto
Mahasiswa Filsafat UGM

redaksi banyak menerima surat senada-red

Requiring Balairung Magazine

Is Volume/ edition th.10: ed. 25, 26, etc. available? Please send or advise:

Thank You.
Sincerely,

Ben Abel,
Serial Assistant
Echols Collection
Cornell University Libr/1aka5121
180 Kroch Library
Ithaca, NY 14853-5301
USA

Yes, We will send it in the near future, and thanks for your interest to this magazine.

Segenap pengurus Majalah Mahasiswa Balairung *UGM*
mengucap[illegible] kasih kepada:
. Bp. Drs. H.Gusti Hasan [illegible]an(Banjarmasin)
2. Pembantu Rektor III Universitas Gadjah Mada
3. Sdr. Rizal Hasan Aman(FT UGM)
4. Lembaga Pengembangan Diri dan Bisnis ABHISEKA College Yogyakarta
5. Pimpinan Hotel Sriwedari Yogyakarta
dan semua pihak yang telah membantu suksesnya acara

Workshop MARKETING

di Hotel Sriwedari-Yogyakarta, 7 Juni 1997
kerjasama Majalah Balairung *UGM dengan ABHISEKA College*

SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS GADJAH MADA 1997

... Seorang anak agaknya tak perlu ditakut-takuti dengan nonsens untuk bisa menemukan sebuah gambaran tentang realitas. Kecuali kalau kita setuju bahwa sekolah sama dengan rumah sakit dan penjara.

(Goenawan Mohammad)






RUUK
Nha, gimana?? Masih kuat kan, .. Tambah lagi ya! ..atu.. ..dua.. ..ti...
KORPORATISME NEGARA
REPRESI APARAT
DEPOLITISASI-STATISASI ORGANISASI
DEMO!
BURUH
pertunjukan akrobatik buruh Indonesia
ndy

Meredam Gejolak Buruh



Pada zaman klasik (sebelum revolusi Borjuis datang) orang memahani kerja sebagai hal yang tanpa pamrih, tulus dan penuh kepercayaan. Kerja, seperti yang ditulis **Manuel Kaisiepo** (1981), senantiasa diberi makna yang sama: *pengabdian*. Bekerja adalah pengabdian! Bahkan kerja sering kali di beri makna religius: *Beruf* (panggilan). Karena mengabdi maka kegiatan bekerja merupakan kewajiban yang dilakukan tampa pamrih. Sebelum alat industri pertama ditemukan, kewajiban kerja dihayati sebagai kewajiban bersama dengan hasil yang dimiliki dan dinikmati bersama, untuk kepentingan semua. Tetapi begitu perkembangan industri mencapai puncaknya, makna kewajiban itu pun berubah. Kerja itu kini tidak harus dihayati, namun harus dipenuhi guna mendapatkan *upah* dan bahkan guna *kepentingan orang lain*.



Kondisi demikian pada muara akhir membentuk hubungan ketergantungan diantara dua kelompok, yakni kelas pemilik modal dan buruh. Namun hubungan ketergantungan itu senantiasa berlangsung berat sebelah, karena atas prinsip maksimasi keuntungan —yang menekankan efesiensi dan produktivitas— maka buruh sering dipekerjakan bak sapi perah; kerja lembur, gaji murah, serta dikungkung gerak-gerak bebasnya. *Dus,* buruh tidak mempunyai daya tawar untuk menentukan aturan main yang ditetapkan perusahaan. Kebebasan buruh berada pada kerangkeng cengkraman sang pemilik uang. Posisi marjinal ini pada akhirnya membawa buruh untuk melakukan resistensi, melawan, dan memberontak.

Namun, dalam logika Orde Baru penetrasi dan sekuritas modal sebagai motor pembangunan harus dipertahankan. Karenanya, pengendalian terhadap segala gejolak perlawanan kaum buruh harus diredam. Untuk upaya ini Orde Baru telah melakukan berbagai tindakan; *Pertama,* merampingkan jumlah serikat buruh yang marak pada era Orde Lama. Melalui proses politik yang panjang, Orde Baru terhitung sukses meyakinkan serikat-serikat buruh yang ada untuk disatukan dalam sebuah serikat buruh yang bersifat tunggal —dan negara memiliki otoritas yang cukup untuk mengendalikannya. Alfred Stepan menyebut restrukturisasi semacam ini sebagai korporatisme eksklusioner.

Kedua, melakukan represi terhadap setiap gejolak buruh yang muncul. Alat represi tersebut salah satunya adalah militer (baca: ABRI), yang selama ini dianggap mempunyai wewenang untuk menggunakan cara kekerasan secara legal. Maka jangan heran jika dalam setiap sengketa perburuhan, ABRI selalu ikut campur meski tanpa landasan yuridis yang memadai. Jargon stabilitas sampai hari ini nampaknya masih hegemonik. Kendati di sisi lain, mogok dan demonstrasi buruh yang umumnya menuntut hak normatif dalam sengketa perburuhan, sebenarnya juga sah dan legal.

Ketiga, melakukan restriksi terhadap ruang gerak buruh melalui instrumen legal formal. Keluarnya Rancangan Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan (RUUK) mengisyaratkan hal ini. RUUK yang kontroversial itu dalam banyak sisi dianggap justru memperlemah posisi tawar menawar buruh. Pengaturan mengenai hak mogok dan hak berorganisasi bagi buruh misalnya, dinilai justru menutup ruang gerak buruh.

Untuk menutupi niat itu semua, penguasa Orde Baru berlagak meningkatkan kesejahteraan kaum buruh lewat menaikkan UMR. Mereka seolah memberikan keadilan sosial bagi kaum buruh, tetapi sesungguhnya, seperti yang ditulis Manuel Kaisiepo, dalam kenyataanya justru telah menempatkan para pekerja dalam suatu status di mana jerih payahnya semakin memperkaya penghisapnya dan terus menempatkan mereka dalam *perbudakan kapital*. Dengan demikian, para kaum borjuis dan rejim itu menyerupai sipir penjara dari masa silam yang mengulurkan sesuap nasi kepada para budak agar tetap hidup sehingga kereta kerajaan dapat ditarik. Dan bukankah sipir zaman dahulu itu juga berkata kepada para budak: "Berbanggalah kamu, karena jerih payahmu adalah partisipasi dalam membangun kerajaan?"

Menghadapi represi yang demikian, Karl Marx pernah mengumandangkan, bahwa sudah saatnya kaum buruh menciptakan persatuan, bergandeng tangan membentuk serikat untuk menuntut dan melawan. Karena dengan serikatlah kekuatan kaum kapital borjuis serta penguasa bisa terpatahkan. Dan menangnya partai buruh di Inggris dapat dijadikan rujukan dari keberhasilan itu ❐

Khoirul Rosyadi

Gerakan Buruh di Indonesia:

Terjerat Jaring-Jaring Korporatisme Negara?

Pemogokan buruh sejak awal 90-an meningkat cukup tajam. Beberapa kalangan menilai fenomena tersebut juga mengindikasikan menguatnya gerakan buruh di Indonesia. Benarkah?



"Jasmerah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah". Begitu kata Soekarno di tengah suasana *euforia* revolusi pasca kemerdekaan.

Dalam konteks gerakan buruh, idiom itu memang tak bisa diabaikan begitu saja. Sebab bicara tentang gerakan buruh, maka tak bisa tidak, kita mesti membuka kembali lembaran-lembaran sejarah pergerakan nasional pada akhir dua dasawarsa awal abad 20. Tidak banyak memang kalangan yang memahami gerakan buruh sebagai bagian integral dari perjuangan rakyat melawan pemerintah kolonial. Padahal sejarah pergerakan nasional kita tak bisa dilepaskan dari gerakan buruh.

Budiman Sudjatmiko yang ditemui *Balairung* di LP Salemba mengungkapkan bahwa sebenarnya gerakan buruh di Indonesia memiliki akar sejarah perlawanan yang sangat panjang dan heroik. "Sejarah pergerakan nasional Indonesia sangat diwarnai oleh aksi-aksi dari kalangan bawah terutama buruh dan petani. Bahkan proses kemerdekaannya pun sangat revolusioner. Ada perang gerilya, pemberontakan petani di Banten, dan pemogokan buruh tahun 20-an," ungkap ketua PRD ini.

Seperti ditulis **Vedi Hadiz** dalam *Prisma* (1994), sejak awal abad 20 di Indonesia telah muncul kaum buruh sebagai kelas baru yang lahir dari proletarisasi akibat penetrasi kapitalisme tahap awal yang dijalankan pemerintah kolonial Belanda. Lantaran proletarisasi tersebut, muncul bentuk-bentuk resistensi buruh berupa pemogokan-pemogokan di perkebunan teh dan pabrik gula. Dan itu semakin menghebat sampai awal tahun 20-an. Takashi Shiraishi menyebut masa ini sebagai *The Age of Strike*. Bahkan sampai tahun 1926, menurut Vedi, gerakan buruh merupakan *avant garde* perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah.

Gelombang gerakan buruh memang mengalami pasang surut. Setelah reda digebuk Belanda tahun 1926, gerakan buruh kembali menggelembung pada tahun 50-an. Kemudian surut lagi sejak Orde Baru berkuasa. Tapi buruh

REPRO SINAR



Gerakan buruh
Membentur represi negara

kemudian kembali bergolak sejak awal 90-an yang ditandai dengan mekarnya angka demonstrasi dan pemogokan di sejumlah kantong industri seperti Jabotabek, Surabaya, Bandung dan Medan (lihat tabel).

Namun tingginya statistik pemogokan dan demonstrasi buruh baik pada masa penjajahan maupun awal 90-an tak bisa secara gegabah disimpulkan bahwa gerakan buruh telah solid. Fakta empirik justru menunjukkan, gerakan buruh dengan amat gampang dilumpuhkan oleh kekuatan represif dan koersi negara.

> MESKIPUN ANGKA PEMOGOKAN DAN DEMONSTRASI BURUH SANGAT TINGGI, KEKUATAN BURUH TAK KUNJUNG TERANGKAT KE PERMUKAAN SECARA SIGNIFIKAN.

Lantas, kondisi apa yang dibutuhkan sebuah gerakan buruh agar solid? Secara implisit, Vedi Hadiz mensinyalir setidaknya ada dua prakondisi munculnya gerakan buruh yang kokoh. *Pertama,* adanya proletarisasi yang meluas di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi industrialisasi. *Kedua,* munculnya serikat buruh yang kuat dan kohesif. Kehilangan salah satu dari keduanya tidak akan memberi peluang bagi hadirnya gerakan buruh yang kuat.

Betapapun organisasinya cukup solid, sambung Vedi, gerakan buruh pada masa kolonial mudah dibungkam karena proses kapitalisasinya masih "bayi". Sebaliknya pada awal 90-an, ketika tingkat proletarisasi --sebagai konsekuensi industrialisasi-- cukup tinggi, organisasi buruh yang kohesif tak pernah juga ditemukan. Akibatnya, meskipun angka pemogokan dan demonstrasi buruh sangat tinggi, kekuatan buruh tak kunjung terangkat ke permukaan secara signifikan.

Ketika ribuan buruh di beberapa pusat industri melakukan unjuk rasa menuntut hak-haknya, toh negara seakan tak bergeming. Atau, ketika ribuan buruh mogok --yang dengannya, bisa mengganggu proses akumulasi modal dan proses produksi--negara seperti tak pernah gentar. Ini tampak dari kecilnya tingkat kompromi negara terhadap tuntutan buruh. Reaksi balik negara terhadap resistensi buruh biasanya berbentuk represi militer.

Dari sini terlihat negara seolah tak berminat mengembangkan basis dukungan dari kaum buruh. Padahal buruh, secara strategis, menopang sektor industri (manufaktur) yang

selama ini justru menjadi ujung tombak pembangunan.

Dari ilustrasi di atas terlihat bagaimana buruh memang tak pernah mampu untuk, secara setara, berhadapan dengan negara, bahkan dengan pengusaha sekalipun.

Harga Murah dan Patuh

Menarik untuk ditelusuri, mengapa pada masa Orde Baru tak pernah muncul organisasi buruh yang kuat dan kohesif?

Jika kita menapak tilas ke belakang, maka pangkal sebab tidak hadirnya gerakan buruh yang solid bisa dilacak sejak penataan politik perburuhan di awal Orde Baru. Penataan politik ini sejalan dengan diadopsinya paradigma pertumbuhan ekonomi yang pada tingkat praksis, diwujudkan lewat pembangunan ekonomi. Dan untuk melempangkan tujuan pembangunan itu, proses industrialisasi kemudian menjadi penting.

Miskinnya modal akibat krisis ekonomi warisan rezim sebelumnya, membuat Orde Baru mempersilahkan penetrasi modal dan investasi asing untuk melicinkan proses industrialisasi. Tak pelak lagi, peran dan posisi buruh dalam proses yang terakhir ini sangat strategis.

Oleh karenanya, serikat-serikat buruh yang memang masih marak waktu itu, menurut Vedi Hadiz, diarahkan untuk secara sinergis mendukung pembangunan. Penertiban serikat buruh dimulai dengan penunggalan organisasi buruh. Serikat buruh dan gabungan serikat buruh yang ada disatukan dalam wadah tunggal yang disebut Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).



Budiman Sujatmiko

Adapun serikat buruh yang menandatangani penyatuan tersebut di antaranya Gasbiindo-Masyumi, SOB-Pantjasila, Sarbumusi-NU, KBM-Nasionalis, SOBRI-Murba dan SOKSI-Golkar. Wadah tunggal ini berganti nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) pada pertengahan 80-an, lalu terakhir berubah menjadi Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI).

Menurut Koordinator Divisi Perburuhan Yayasan Lapera, **Imam Baskara**, ketika Negara Orde Baru (NOB) melakukan industrialisasi, ia merasa perlu untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjaminnya keamanan investasi.

"Untuk itu diciptakanlah wadah tunggal SPSI. Itu untuk menekan upah buruh dan mengendalikan buruh," ujarnya.

Hal senada juga dikatakan **Selma Widhi Hayati**. Staf divisi perburuhan YLBHI ini mengutarakan, kehadiran SPSI sebagai wadah tunggal sektor buruh lebih menunjukkan niat negara untuk mengendalikan buruh. "Mengakui SPSI sebagai satu-satunya organisasi buruh selain melanggar hak berorganisasi buruh, juga lebih diarahkan untuk mengontrol buruh," katanya.

Dalam logika negara, kelancaran industrialisasi memang akan sangat bergantung pada bagaimana menciptakan kondisi buruh yang murah dan patuh secara politik. Secara ekonomi, kondisi buruh semacam itu secara pragmatis akan lebih mudah menarik investor asing. Atau ketika pola industri yang diterapkan industri berorientasi ekspor, buruh murah dipahami sebagai keunggulan komparatif bagi peningkatan daya saing. Sedangkan secara politis, buruh yang patuh akan mampu meredam gejolak buruh demi terjaminnya sekuritas akumulasi modal.

Kasus Perburuhan

Tahun	1995						1996			
Reaksi buruh	Jn-Mar	Apr-Jun	Jul-Sep	Okt-Des	Jumlah	%	Jan-Mar	Apr-Jun	Jumlah	%
1. Unjuk rasa	151	129	86	66	432	64,6	129	242	371	66,6
Mengadu ke:										
2. DPR	24	11	18	19	72	10,8	21	28	49	8,8
3. Depnaker	16	19	12	16	63	9,4	24	2	53	9,5
4. LSM/Laws Firm	3	12	6	4	25	3,7	8	8	16	2,0
5. Komnas HAM	2	3	3	2	10	1,5	3	3	6	1,1
6. SPSI	0	9	6	2	17	2,5	22	8	30	5,4
7. P4D/P4P	0	6	5	4	15	2,2	1	2	3	0,5
9. Polisi/Militer	0	4	4	4	12	1,8	2	3	5	0,9
10. Pemda	0	3	7	5	15	2,2	1	2	3	0,5
11. Kotak Pos 5000	0	3	0	0	3	0,4	0	0	0	0,0
12. Lain-lain	0	3	2	0	5	0,7	2	3	5	0,9
Total	**196**	**202**	**149**	**122**	**669**	**100,0**	**224**	**333**	**557**	**100,0**

Sumber : Yapusham.

gandhi's collection

Korporatisme Negara

Jika dilacak secara teoritis, pemberian wadah tunggal ini umumnya diterapkan di negara Dunia Ketiga yang melakukan industrialisasi. Philippe C. Schmitter menyebut strategi ini sebagai korporatisme negara.

Lebih lanjut, Schmitter dalam *Still the Century of Corporatism?* mendefinisikan korporatisme negara sebagai mekanisme perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya terbatas, bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan), tidak saling bersaing, dan diatur secara fungsional.

Organisasi korporatis, tulis Schmitter, diakui atau diberi izin (jika tidak diciptakan) negara serta diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan bidang masing-masing. Hak ini diberikan sebagai imbalan atas kesediaan organisasi korporatis mematuhi pengaturan-pengaturan tertentu dalam pemilihan pimpinan

[illegible] dalam artikulasi [illegible] dukungan mereka. Tujuannya tak lain kecuali untuk [illegible] konflik kelas dan kelompok kepentingan serta menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat.

Secara transparan, korporatisme negara di Indonesia, ditampakkan dengan dibentuknya wadah-wadah tunggal pada hampir semua sektor masyarakat. Seperti untuk petani disediakan HKTI, di sektor nelayan terdapat HNSI, KNPI untuk organisasi pemuda, PWI sebagai wadah tunggal wartawan dan lain-lain.

Pada sektor buruh sendiri, negara telah menyediakan organisasi korporatis FSPSI sebagai wadah tunggal kaum buruh.

Muhammad AS Hikam kepada *Balairung* mengatakan, korporatisme negara tidak lepas dari sifat negara Otoriter Birokratik (OB) yang selama ini kerap ditempelkan di jubah kekuasaan Orde Baru. "Negara OB berkecenderungan untuk selalu memperkuat negara dan melemahkan sektor populer. Dalam konteks buruh, buruh yang kuat dianggap akan menghambat proses produksi dan akumulasi kapital. Jika buruh mau diberi ruang untuk berpolitik maka ia harus masuk dalam kerangka korporatisme negara. Maka dibikinlah wadah tunggal SPSI," paparnya.

Dari perspektif lain, Vedi memahami awal mula korporatisme Orde Baru dalam konteks perseteruan yang cukup kuat antara PKI dan Angkatan Darat sejak tahun 1957. Pada waktu itu AD mengambil alih perusahaan-perusahaan swasta asing yang dinasionalisasi. "Sebagai manajer perusahaan, AD seringkali berhadapan dengan SOBSI (serikat buruh underbouw PKI-red) yang militan. Jadi memang sudah ada sejarah mengapa Orde Baru yang dibidani AD memiliki *phobia* terhadap munculnya organisasi buruh yang independen dan militan. Karena pengalamannya dengan SOBSI dulu itu," jelasnya.

Setelah SOBSI hancur bersama PKI, lanjut Vedi, serikat-serikat buruh yang ada dan dulunya bersaing dengan SOBSI menjalin hubungan dengan AD. "Jadi memang sangat mudah bagi Orde Baru kemudian untuk menggiring organisasi buruh menyetujui wadah korporatis itu. Dan yang menggiring bukannya Menaker atau semacamnya, tapi Opsus-nya Ali Moertopo," tambah Vedi.

Tidak Hegemonik

Seperti diakui Hikam, dilihat dari kacamata negara, korporatisme ini memang berhasil. "Lha, buktinya, selama tiga puluh tahun ini kita tidak punya serikat buruh yang sistematis," katanya.


Selma Widhi Hayati

"Munculnya serikat-serikat buruh alternatif macam SBSI, SBMK, dan PPBI, sampai sejauh ini belum bisa dikatakan berhasil karena terbentur aturan perundang-undangan yang ada bahwa yang diijinkan sebagai wadah kaum buruh itu SPSI," lanjut peneliti senior LIPI tersebut ketika ditanya perihal munculnya serikat buruh alternatif.

Hal senada diungkap Vedi Hadiz. Korporatisasi sektor buruh ini pada tingkat tertentu menurutnya memang berhasil. "Ya bisa dikatakan berhasil. Sampai saat ini organisasi-organisasi yang berbasis di masyarakat termasuk buruh begitu lemah. Meskipun demikian, adanya pemogokan menunjukkan hegemoninya agak tertantang," ujarnya.

> "KORPORATISME TIDAK MENIADAKAN PERLAWANAN. KEMENANGAN KORPORATISME NEGARA ADALAH MENCEGAH MUNCULNYA PERLAWANAN YANG TERORGANISIR. NEGARA PUNYA HAK UNTUK MELEGITIMASI APA YANG DILAKUKAN BURUH DI LUAR SPSI SEBAGAI TINDAKAN LIAR, MENGGANGGU KETERTIBAN, DI LUAR SISTEM, DAN SEBAGAINYA..."

Sementara itu Budiman menilai, walaupun sebagai sebuah dominasi korporatisme cukup berhasil, namun tidak berhasil menghegemoni. "Korporatisme tidak meniadakan perlawanan. Kemenangan korporatisme negara adalah mencegah munculnya perlawanan yang terorganisir. Negara punya hak untuk melegitimasi apa yang dilakukan buruh di luar SPSI sebagai tindakan liar, mengganggu ketertiban, di luar sistem, dan sebagainya. Tujuan korporatisme 'kan itu. Menjinakkan, mengendalikan, dan mengawasi setiap potensi perlawanan buruh," paparnya.

Pada gilirannya, korporatisme negara membawa implikasi luas pada lemahnya posisi buruh. Sebab, buruh tidak memiliki instrumen tawar menawar berupa organisasi yang cukup solid dan independen serta benar-benar mampu mengartikulasikan kepentingan mereka.

Pemogokan dan aksi unjuk rasa buruh menuntut hak-haknya dianggap masih sporadis dan belum terorganisasi secara rapi. Lebih jauh, resistensi buruh tersebut belum dapat mengangkat posisi tawar buruh baik secara ekonomi maupun politik. Kasus unjuk rasa dan pemogokan di Medan yang disponsori Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) malah berakhir dengan kerusuhan.

Kasus ini bukan saja menggambarkan kegagalan SPSI mengartikulasikan kepentingan buruh, tapi juga menunjukkan belum kuatnya infrastruktur, dalam hal ini konsolidasi intern kaum buruh sendiri.

Mengomentari munculnya pemogokan buruh yang berakhir dengan kerusuhan seperti kasus Medan, Budiman melihat ada vakum ideologi di masyarakat (baca: buruh). Di satu sisi, proyek ideologi pemerintah seperti harmoni, kekeluargaan dan HIP (Hubungan Industrial Pancasila) tidak lagi kena bagi buruh, di sisi lain gerakan pro-demokrasi juga belum memberikan ideologi alternatif. "Pemerintah nampaknya sudah kehilangan strategi untuk mensosialisasikan HIP, kekeluargaan dan segala macam. Tapi kelompok pro-demokrasi belum juga memiliki *flatform* ideologi dan program gerakan yang jelas," lanjutnya.

Mencairkan Korporatisme

Meskipun korporatisme negara dinilai "berhasil" mengendalikan buruh, tapi itu bukan jaminan negara

...mampu membungkam buruh. ...rut Vedi, masyarakat saat ini ... berubah, sementara institusi ...ratisme tetap dipertahankan. ...ada waktu industrialisasi masih ...ap awal mungkin (korporatisme-...d) bisa berjalan baik. Tapi setelah ...a puluh tahun, telah muncul buruh ...rkotaan dengan pendidikan relatif ...bih tinggi. Akibatnya, muncul ...emogokan-pemogokan yang secara ...ualitatif terus meningkat," papar Vedi ...ang saat ini menjadi *research fellow* pada *Asia Research Center* Universitas Murdoch Australia.

Maraknya pemogokan sejak awal ...-an, menurut Budiman, menunjukkan negara telah gagal mengkampanyekan nilai-nilai dan ideologinya. "Negara sudah kehilangan demagogi-demagogi untuk meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah satu keluarga yang harmonis ataupun ada kemitraan antara buruh dan pengusaha," kata Budiman yang saat ini mendekam di penjara Salemba.

"Belum lagi, pemerintah juga harus memperhitungkan tekanan internasional yang selalu menuntut perbaikan penegakkan hak kebebasan berserikat buruh di Indonesia," sambung Selma Widhi Hayati, yang juga anggota Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan.



Pemogokan buruh
Menuntut hak normatif

Strategi Aliansi

Selain mekarnya resistensi buruh lewat aksi demonstrasi dan pemogokan buruh, sebenarnya ada beberapa kasus yang menarik untuk dicatat. Yaitu aksi aliansi buruh dengan kelompok lain (PPBI-PRD dan SBSI-red), yang menuntut pencabutan 5 paket UU politik dan dwifungsi ABRI.

Kasus-kasus di atas, diakui atau tidak, telah memberi nuansa baru bagi dinamika gerakan buruh di negeri ini. Setidaknya kasus di atas mengindikasikan beberapa hal. *Pertama*, adanya pergeseran tuntutan buruh dari tuntutan normatif ke tuntutan yang lebih politis. *Kedua*, adanya aliansi aksi yang menggambarkan munculnya kesadaran untuk merintis hubungan buruh dengan sektor lain. Ketiga, munculnya organisasi buruh alternatif yang mendampingi aksi buruh.


ISTIMEWA

Vedi Hadiz

Urgensi aliansi aksi ini terutama terkait dengan gerakan penyadaran buruh ke dalam. Setidaknya ini disinyalir AS Hikam yang menunjukkan pentingnya gerakan penyadaran internal dengan menciptakan *networking* dan *linkage* dengan kelompok-kelompok di luar buruh. Itupun menurutnya, tak bisa dilakukan secara terbuka dan radikal karena akan berhadapan dengan kontrol dari pihak pengusaha dan negara.

"Perlawanan yang frontal dari buruh sangat sulit dilakukan karena untuk itu, bukan saja dibutuhkan organisasi buruh yang solid, tapi juga situasi politik makro di mana negara membiarkan itu terjadi. Cara-cara perlawanan frontal saya pikir hanya akan membentur represi negara," papar Hikam.

Sebelum sampai pada gerakan penyadaran dengan membangun jaringan sosial yang lebih luas, pengorganisasian buruh agaknya memang menjadi penting. Setidaknya hal ini diungkap Vedi Hadiz. Strategi pertama yang harus dikembangkan buruh dalam menghadapi korporatisme adalah pengorganisasian. Masyarakat (baca: buruh), menurut Vedi, harus terorganisasi agar menjadi kekuatan yang diperhitungkan dalam proses negosiasi politik dengan elit.

"Elit ini punya kekuatan negosiasi. Militer misalnya punya senjata, birokrat punya birokrasi, pengusaha punya uang. Nah kalau masyarakat tidak terorganisir, apa sumber kekuatannya?" tanya Vedi.

Dalam konteks buruh, lontaran Vedi ini mengisyaratkan perlunya organisasi serikat buruh yang bebas, independen dan, terutama, solid. Tujuannya tentu saja agar buruh mampu beradu tawar secara seimbang dengan kelompok-kelompok kepentingan yang lain, terutama dengan elit. Dalam kondisi seperti ini, boleh jadi buruh akan sanggup tampil sebagai kekuatan yang diperhitungkan dan karenanya, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan negara.

Dalam kerangka ini, kemunculan serikat-serikat buruh alternatif seperti PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia) dan SBSI perlu disambut baik. Kemunculan serikat buruh semacam itu, diam-diam bisa dipahami sebagai upaya masyarakat sipil untuk melepaskan dirinya dari jaring-jaring korporatisme negara. Pada tingkat tertentu, lepasnya sebuah organisasi buruh dari korporatisme negara akan menjadi pelopor lahirnya serikat buruh bebas yang mandiri dan kohesif.

Lebih jauh, hal ini bisa mendorong kelompok-kelompok lain di masyarakat --yang juga terbelenggu oleh jaringan korporatisme-- untuk membangun organisasi-organisasinya secara mandiri dan independen. Dan ini menjadi penting dalam konteks pembangunan sebuah tatanan Masyarakat Madani□

Asep Mulyana
Ajianto, Melanie, Heri Kusno

Belajar dari Negeri Ginseng

Jika ingin melihat gerakan buruh yang solid, tengoklah Korea Selatan. Indikasi kekuatannya tidak saja terlihat pada kemampuannya memobilisasi pemogokan besar-besaran menentang regulasi baru di bidang perburuhan, tapi juga sanggup mendorong terjadinya percepatan proses demokratisasi dan keterbukaan di negeri itu. Mampukah kita memetik pelajaran berharga dari sana?



Masih jelas dalam memori kita, bagaimana pemogokan besar-besaran yang dilakukan buruh Korea Selatan (Korsel) menentang undang-undang baru perburuhan. Pemogokan tersebut dimobilisasi terutama oleh *Korean Confenderation of Trade Union* (KCTU), serikat buruh ilegal, yang mampu menggerakkan buruh di beberapa sektor strategis. Bahkan pada hari-hari terakhir, pemogokan juga menular pada sektor publik yang notabene sangat vital.

Aksi buruh yang heroik itu kemudian berkembang lebih luas. Bahkan aksi ini mampu menggiring opini publik untuk sampai pada pengungkapan berbagai praktek penyelewengan pemerintah.

Peristiwa ini, diakui atau tidak, telah mampu mengilustrasikan secara sekilas betapa gerakan buruh di Korsel cukup kuat. Kekuatannya bukan saja mampu menempatkan posisi buruh setara dengan elit, tapi juga berhasil mendorong terjadinya akselerasi proses demokratisasi. Ini terlihat ketika mantan-mantan penguasa Korea yang dinilai korup diseret ke meja hijau.

Fenomena Korea tersebut semakin memperkuat asumsi bahwa buruh adalah elemen yang tak bisa diabaikan dalam proses demokratisasi. Di negara yang basis materialnya semakin tergantung pada industrialisasi, buruh adalah sektor masyarakat yang potensial melakukan perubahan. Sebab, sukses tidaknya akselerasi industrialisasi akan sangat bergantung pada buruh.

REPRO TIME



Pemogokan buruh di Korea Selatan
bermarkas di Kathedral Myongdong

Maka ketika negara kuat dan korup, sementara kontrol masyarakat begitu lemah --karena dilumpuhkan negara lewat korporatisme, misalnya-- buruh masih menyisakan posisi tawarnya. Sebab, ketika negara yang semakin tergantung pada industrialisasi, secara tak langsung negara *dependent* terhadap buruh. Maka jika buruh resisten secara rapi dan terorganisir untuk mogok nasional misalnya, perekonomian negara bisa *collaps*. Legitimasi bisa cair. Dan karenanya, tidak ada pilihan lain bagi negara kecuali kompromi dengan buruh.

Itu --sekali lagi-- jika gerakan buruhnya kokoh dan kohesif seperti di Korea.

Buruh Murah

Jika kita menoleh situasi buruh di Korsel, solidnya kekuatan buruh di sana memang telah dibangun dengan susah payah dalam jangka waktu yang cukup lama.

Munculnya ruat-ruat gerakan buruh di Korsel tercatat sejak kudeta militer tahun 1961. Kudeta tersebut adalah titik kulminasi kegagalan Industri Substitusi Impor (ISI) rezim sebelumnya. Rejim yang baru kemudian mengubah pola industrialisasi dengan mencanangkan Industrialisasi Berorientasi Ekspor (EOI) pada tahun 1962.

Pola Industrialisasi yang baru ini (EOI) mensyaratkan tingginya tingkat

daya saing produk. Maka untuk bisa bersaing di pasar internasional, diperlukan upaya untuk menekan biaya produksi sekaligus keunggulan komparatif berupa tenaga buruh yang produktif, relatif murah, serta berdisiplin.

Penekanan negara akan pentingnya keunggulan komparatif itu pada gilirannya memang mengorbankan hak-hak ekonomi buruh. Negara kemudian melakukan penghematan biaya produksi untuk akumulasi kapital dengan memotong fasilitas sosial berupa jaminan sosial kaum buruh.



Muhammad As Hikam

Di samping itu, negara juga sengaja menyingkirkan buruh dari dunia politik untuk menciptakan kondisi yang menjamin keamanan proses produksi. Untuk keperluan ini, negara menciptakan jaringan korporatisme berupa pemberian wadah tunggal serikat buruh yaitu *Korean Federation of Trade Union* (KFTU). Organisasi korporatis ini diciptakan juga untuk memobilisasi dukungan buruh pada rejim tanpa harus memunculkan kesadaran kelas di kalangan buruh.

Namun, seperti juga di negara-negara lain, korporatisasi sektor buruh ini tidak meniadakan perlawanan. Kondisi obyektif Buruh Korea yang diam-diam mengalami proletarisasi kemudian melahirkan resistensi yang terus meningkat (lihat tabel).

Padat Karya - Padat Teknologi

Pada perkembangannya kemudian, di Korea terjadi pula pergeseran bidang garapan dari industri ringan yang padat karya ke industri kimia dan berat yang padat teknologi. Menurut **Alexander Irwan**, pergeseran itu diam-diam telah mendongkrak kekuatan buruh. Buruh pada industri manufaktur yang padat karya tak punya kekuatan tawar menawar dengan pengusaha. Apalagi jika angka pengangguran cukup tinggi.

"Pengusaha dengan amat gampang memecat buruh karena calon tenaga kerja masih banyak, sehingga buruh tidak berpeluang mendirikan serikat buruh. Sedangkan pada industri berat yang padat teknologi, buruh yang memang berpendidikan dan keahlian lebih tinggi yang juga perlu training lebih lama, posisinya cukup kuat. Pengusaha akan berpikir ulang untuk memecat buruhnya. Tuntutan buruh lebih mudah diakomodir dan pendirian embrio serikat buruh yang kuat juga dimungkinkan," paparnya.

Triple Aliansi

Menurut AS Hikam, ada dua prakondisi di mana sebuah gerakan buruh akan kuat. Pertama, adanya serikat buruh yang solid. Kedua, adanya situasi politik makro yang memungkinkan pengorganisasian itu terjadi. Jika syarat kedua tidak terpenuhi, maka pengorganisasian buruh akan membentur represivitas negara.

Namun, fenomena di Korea justru membalik logika ini. Ketika negara menerapkan korporatisme dan represi yang ketat terhadap buruh, toh buruh tetap mampu membangun organisasi yang kokoh serta membasis hingga ke akar rumput.

Mengapa itu terjadi? Hikam menuturkan, untuk membangun gerakan buruh yang kokoh, perlu membangun jaringan sosial yang lebih luas dengan menciptakan *linkage* dan *networking*. Hal ini dilakukan untuk melakukan penyadaran internal kaum buruh.

Nampaknya apa yang diungkapkan Hikam sudah lama dipraktekkan buruh Korea. Ruang gerak yang sempit akibat korporatisme negara yang tidak menyisakan tempat bagi serikat buruh bebas, telah menyadarkan buruh untuk tidak bergerak sendirian. Buruh kemudian membuat semacam jaringan-jaringan sosial ke luar lingkungan produksi. Mereka beraliansi dengan komunitas gerakan mahasiswa radikal dan gereja.

Menurut Teten Masduki, mahasiswa dan gereja Korea memegang peran yang penting dalam menyokong gerakan buruh. "Bersama gereja, mahasiswa men*training* buruh tentang teknik berorganisasi dan pemahaman tentang hak-hak buruh. Bahkan mahasiswanya ada yang berhenti kuliah 1-2 tahun, masuk pabrik dengan sembunyi-sembunyi menjadi buruh sambil bikin organisasi buruh," tuturnya.

Pada bagian lain, bersatunya gerakan buruh dengan mahasiswa dan Gereja di Korsel bukannya tanpa kesamaan visi. Menurut **Wahyu Susilo** dari *Solidaritas Perempuan*, di Korea terdapat Teologi Minjung yang memungkinkan gereja berpihak pada kaum buruh yang marginal. "Di sana terdapat Teologi Minjung, semacam teologi pembebasan di Amerika Latin, yang membuat gereja berpihak dan membantu kaum buruh," katanya.

Teologi Minjung (=teologi kerakyatan) memang menjadi determinan keberpihakan gereja Korea terhadap buruh. Menurut Nikaulas Loy (1995) dalam skripsinya *"Strategi Buruh Korea Menghadapi Korporatisme Negara"*, Teologi Minjung adalah teologi yang mengelaborasi perasaan tertindas yang secara kolektif tumbuh di masyarakat. Perasaan kolektif ini disebut *Han*. *Han* ini juga digambarkan sebagai daya tahan orang-orang Korea terhadap ketertindasan. Di kalangan masyarakat Korea, *Han* ini mewujudkan dirinya lewat puisi, tari-tarian maupun ceritera-ceritera rakyat tentang



KUNTO

Wahyu Susilo

penderitaan kaum tertindas.

Menurut teologi ini, *Han* akan bisa disembuhkan jika struktur sosial dan budaya yang menindas diubah. Dalam kerangka penyembuhan inilah, konsep *salvation* (penyelamatan) dalam ajaran Kristen, tidak hanya punya makna transenden, tapi juga sangat membumi karena terkait langsung dengan pembebasan manusia dari ketertindasan.

Selain itu, pada tingkat praksis gereja membentuk organisasi-organisasi payung bagi serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengannya. Seperti *Urban Industrial Mission* (UIM), payung bagi serikat buruh yang afiliasi dengan gereja protestan. Dan *Jeuness Ouvnere Chretiene* (JOC), untuk serikat buruh yang beraliansi dengan gereja katholik.

Sementara itu, gerakan mahasiswa di Korea juga memiliki tradisi perlawanan yang tak kalah heroik. Gerakan mahasiswa di sana memiliki basis yang kuat di kampus. Selain itu, mereka relatif lebih homogen sehingga langkah-langkah untuk mengintegrasikan kekuatan mahasiswa relatif lebih mudah.

Ketika aliansi terbentuk, telah terjadi semacam pembagian tugas antara gereja dan mahasiswa dalam menyokong gerakan buruh. Gereja selain berperan meningkatkan solidaritas di antara kaum buruh, juga memberi tekanan moral dan politik pada negara untuk memperbaiki kondisi perburuhan.

Di sisi lain, mahasiswa mengambil posisi sebagai penjalin hubungan sosial yang lebih luas antara buruh dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Di samping itu, mahasiswa Korea juga memberi semacam penyadaran politik dengan mencoba menanamkan kesadaran kelas pada buruh.

Untuk keperluan strategi penyadaran itu, mahasiswa Korea menjadi *Wonjang Chunep Hakseang*. Itu adalah sebutan lain bagi mahasiswa Korea yang menyamar jadi buruh. Pada musim libur, mahasiswa Korea lebih memilih untuk melamar masuk pabrik dan menjadi pekerja samaran, untuk kemudian mendirikan benih-benih organisasi buruh.

Demikianlah aliansi itu terjadi. Secara perlahan namun pasti, jaringan mereka semakin kokoh. Dari situlah lahir pengorganisasian buruh secara lebih sistematis, yang kemudian mampu melahirkan serikat buruh alternatif yang mandiri dan kohesif. Pemogokan buruh besar-besaran menentang RUU perburuhan beberapa bulan lalu adalah sebagian dari kreativitas serikat buruh alternatif yang mendapat dukungan luas dari buruh, gereja, dan mahasiswa.

Asal tahu saja, ketika pemogokan dilancarkan, para pemimpin serikat buruh ilegal KCTU menjadikan gereja sebagai markasnya. Demikian pula ketika mahasiswa Korea yang selama sepuluh hari berdemonstrasi digebuk, mereka melarikan diri dan bersembunyi di gereja.

Year	cases of disputes	working day lost
1970	4	9.013
1971	10	11.323
1972	0	0
1973	0	0
1974	58	16.831
1975	52	13.557
1976	49	17.046
1977	58	8.294
1978	102	13.230
1979	105	16.366
1980	206	61.269
1981	186	30.948
1982	88	11.504
1983	98	8.671
1984	114	19.900
1985	265	64.300
1986	276	72.000
1987	3617	6.946.900
1988	1873	6.351.400
1989	616	-
1990	309	-

Sumber :
ILO,"Year Book Of Labor Statistic" dalam Nikaulas Loy (1995)

Pada pertengahan 80-an, gerakan buruh Korea mampu mendorong lahirnya aliansi kelompok-kelompok masyarakat yang makin luas. Pada waktu itu, lahir aliansi yang hampir mencakup semua sektor masyarakat. Ini ditandai dengan dibentuknya *Citizen' Coalition for Economic Justice* (CCEJ). Anggotanya meliputi kaum profesional, seperti ahli hukum, kaum akademisi, pemimpin gereja, mahasiswa dan pekerja kasar. Mereka bergerak untuk memperjuangkan distribusi kemakmuran dan keadilan ekonomi.

Menurut Nikaulas Loy, puncak gerakan buruh Korea adalah dibentuknya *National Council of Labor Union* (NCLU) pada tahun 1990 yang beranggotakan 200.000 aktivis dari 450 serikat buruh. Gerakannya cukup radikal dan mendesak terjadinya perubahan iklim sosial-politik.

Bagaimana Indonesia ?

Fenomena yang terjadi di Korea memaksa kita untuk melirik kondisi gerakan buruh di "kampung" kita. Sejak awal 90-an tingkat resistensi buruh cukup tinggi. Ini ditengarai dengan meningkatnya statistik pemogokan dan demonstrasi buruh di beberapa kantong industri. Penyebabnya bisa beraneka ragam. Dari tuntutan perbaikan upah (UMR, bonus, jamsostek), PHK, kondisi kerja yang tidak layak sampai gugatan terhadap pengawasan dan pelarangan menjadi anggota serikat buruh.

Namun beberapa kalangan yang ditemui *Balairung* menyatakan sikap yang kurang optimis. Alexander Irwan menuturkan, prakondisi untuk munculnya gerakan buruh adalah adanya organisasi buruh yang kuat. Untuk itu, dibutuhkan transisi garapan industri dari padat karya ke padat teknologi. "Kondisi di sini mirip Korea tahun 70-an. Padat karya, pemogokan tinggi, tapi posisi buruh tetap lemah. Kita harus lihat pemogokan yang terus meningkat ini secara hati-hati. Ini tidak mengindikasikan gerakan buruh sudah kuat. Buruh akan kuat jika ada transisi tadi. Dan untuk Indonesia masih tanda tanya, apakah transisi itu akan lancar karena kekuatan *bisnis confidence*-nya di sini kurang kuat," katanya.

Dari perspektif lain, Teten Masduki menyoroti masih lemahnya kelompok masyarakat yang mencoba menyokong buruh seperti LSM dan kelompok mahasiswa. "LSM belum punya kekuatan politik sehingga ia tidak mampu menjadi *pressure group* yang efektif. Sementara mahasiswa yang mencoba melibatkan diri masih berupa personil-personil, belum kelompok mahasiswa yang berbasis di

kampus. Gereja di sini minoritas, dan masjid (kalangan Islam-red) tidak punya tradisi berafiliasi dengan buruh," ujar Teten.

Ini menurut Wahyu diperburuk oleh suasana yang belum nyaman di kalangan pro-demokrasi sendiri. Wahyu menunjuk masih terfragmentasinya kelompok mahasiswa dan kalangan pro-demokrasi ke dalam pengelompokan primordial dan fanatisme yang tidak perlu. "Kalangan pro-demokrasi masih belum terintegrasi, belum terorganisir dan bersatu," tandasnya.

Teologi Transformatif?

Di Korea, dukungan Gereja memang terbukti berhasil mendorong kebangkitan kaum buruh. Selain punya Teologi Minjung, Gereja --pada tingkat aksi-- telah menjadi bemper atau pelindung buruh ketika represi terjadi. Bahkan Gereja Korea secara terang-terangan berani berhadapan dengan negara yang dinilai telah menginjak-injak kemanusiaan dalam hubungan industrial.

Di Indonesia, aliansi antara buruh dengan kalangan agamawan yang selalu menganjurkan untuk membantu kaum marginal belum bisa diharapkan. Kalangan agamawan boleh jadi belum membumi. Hal ini setidaknya disinyalir AS Hikam. Menurutnya, sangat sulit menyandarkan harapan kebangkitan kaum buruh hanya dari kalangan agamawan.

"Di Indonesia sangat sulit karena di sini gereja minoritas dan tidak punya teologi semacam itu. Sementara di kalangan Islam sendiri belum ada teologi transformatif yang bisa mentransendir kepentingan-kepentingan buruh," ungkapnya.

Lontaran Hikam tentang teologi transformatif ini cukup menarik. Pada satu sisi, di kalangan Islam --dalam wacana praksis-- memang belum memiliki rumusan teologi yang mentransendir kepentingan kaum buruh. Kalaupun ada, sifatnya masih embrionik sekali. Padahal sebenarnya tidak ada alasan bagi kalangan Islam untuk tidak membantu kaum buruh sebagai kaum marginal.

Sementara itu, menurut **Sandyawan Sumardi, SJ**, Gereja di Indonesia adalah minoritas sehingga tidak realistik mengharapkan peran Gereja untuk menyokong gerakan buruh. Romo ini lebih percaya pada Islam yang memang mayoritas, meskipun, menurutnya, hal itu tidak gampang. Sebab, wajah Islam sendiri juga cukup majemuk.

"Kalau di sini, saya kira kelompok-kelompok Islam yang demokratis dan obsesif dengan kemajuan, bisa melakukan peran-peran seperti Gereja di Korea. Persoalannya, mereka harus siap untuk menghadapi interaksi konfliktual dengan pemerintah. Mereka harus siap melindungi buruh dengan prinsip-prinsip keagamaan yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip kemanusiaan di lingkungan perburuhan," papar romo yang juga Direktur Institut Sosial Jakarta (ISJ) ini.

Pada bagian lain, peran mahasiswa juga tak bisa dilihat sebelah mata. Korea telah mengajarkan bahwa julukan *agent of change* yang inheren dengan mahasiswa bukan sekedar mitos dan slogan kosong. Mahasiswa Korea bersatu dalam satu perjuangan membebaskan kaum tertindas. Mereka mengorganisir diri, menjadikan kampus mereka sebagai *base camp*, lalu mengorganisir buruh. Mereka beraliansi untuk mendesak terjadinya percepatan demokratisasi.

Nah, mampukah kita menarik pelajaran berharga ini? Mudah-mudahan❑

Asmoel

Heri, Kunto, Ajianto, Melani

■ RUU Ketenagakerjaan:

Restriksi Baru buat Buruh

RUU Ketenagakerjaan baru saja dibahas di DPR. Secara transparan, terlihat antusiasme pemerintah untuk menggolkan RUU ini sebelum masa bakti DPR 1992-1997 berakhir. Di sisi lain, kandungan dan materi RUU ini memancing kontroversi karena dianggap semakin meminggirkan posisi buruh.



Berbondong-bondong ke DPR
Untuk sebuah kesia-siaan?



Beberapa bulan yang lalu, pemerintah cq Menaker menyampaikan Rancangan Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan (RUUK) ke DPR. RUUK ini terdiri atas 18 bab, 159 pasal dan akan menghapus 8 undang-undang dan 6 ordonansi peninggalan kolonial bidang perburuhan.

Pada perkembangannya, RUU ini menimbulkan kontroversi di masyarakat Bahkan protes pun bermunculan. Kelompok-kelompok buruh dan kalangan LSM bergantian mendatangi gedung wakil rakyat di Senayan untuk menyampaikan tuntutan agar RUUK ini ditolak.

Sekitar 45 orang wakil Perkumpulan Buruh Pabrik Sepatu misalnya, mendesak DPR mengambil hak inisiatif untuk membuat UU perlindungan buruh yang lebih adil. Mereka juga menggugat pemotongan fungsi serikat buruh dan dipersulitnya buruh untuk mendirikan serikat buruh.

Bahkan belakangan ini, kalangan LSM yang cukup *concern* pada masalah perburuhan tengah menyatukan sikap dan langkah menentang diberlakukannya RUUK. LSM seperti YLBHI, Elsam, LBH APIK, Sisbikum, Akatiga, CPSM, Solidaritas Perempuan, Infid, ISJ, Kalyanamitra, LBH Bandung, dan LBH Jakarta bersatu di bawah payung Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan.

Pasal-Pasal Kontroversial

Pemicu kontroversi RUUK adalah adanya pasal-pasal yang dianggap semakin menempatkan buruh pada posisi marginal.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya pasal 29, 32, 33, 34, 35 tentang serikat buruh. Lalu pasal 77 tentang PHK dan pasal 83, 84,85 tentang mogok.

Pada pasal 29 disebutkan, serikat buruh dibentuk secara demokratis melalui musyawarah dan mufakat secara mayoritas. Menurut salah seorang Ketua FSPSI **Bomer Pasaribu**, angka mayoritas ini akan menyulitkan buruh membentuk organisasi. "Taruhlah perusahaan yang punya karyawan 1000 orang. Mereka harus mengumpulkan minimal 501 orang untuk bermusyawarah mufakat membentuk serikat pekerja. Ini sulit. Apalagi yang punya pekerja 5000 atau 20.000 orang. Padahal peraturan lama dengan 25 orang saja, pekerja sudah bisa bikin serikat pekerja," ujarnya.

Selanjutnya pada pasal 32 disebutkan buruh yang karena jabatan atau fungsinya, dapat menimbulkan pertentangan kepentingan antara pengusaha dan buruh, tidak dapat menjadi anggota serikat buruh. Di sini memang terlihat masuknya kekuasaan pemerintah dalam mengontrol dan menilai setiap *person* beserta fungsinya dalam serikat buruh.

Kemudian pada pasal 33 disebutkan, serikat buruh berhak melakukan perundingan dalam pembuatan kesepakatan kerja dan sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Menurut ketua Divisi Perburuhan YLBHI **Teten Masduki**, hal itu merupakan reduksi fungsi serikat buruh. "Fungsi serikat buruh hanya mengurus masalah kesejahteraan pada level mikro, level perusahaan. Ini jelas ada reduksi peran-peran serikat buruh. Bagaimana kalau ada kebijakan ekonomi yang merugikan buruh?

Serikat buruh jelas nggak bisa berperan," ungkapnya.

Lalu pasal 34 menyatakan, serikat buruh di perusahaan dan gabungan serikat buruh harus mendaftar pada pemerintah. Dan pemerintah juga yang menetapkan tata cara pendaftaran serikat buruh dan gabungan serikat buruh. Secara transparan pasal ini tidak sejalan dengan konvensi ILO No. 98 tahun 1949 yang telah diratifikasi dalam UU No. 18 tahun 1956. Organisasi buruh, menurut Konvensi ini, harus dilindungi dan bebas dari campur tangan pengusaha maupun pemerintah serta tidak dipersyaratkan untuk mendaftarkan diri kepada pemerintah. Selain itu, menurut konvensi yang sama, buruh juga tidak boleh di-PHK hanya karena menjadi anggota serikat buruh pilihannya.

Pada pasal 35 RUUK dinyatakan, ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan pengaturan serikat buruh diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal ini dianggap telah memberikan mandat kosong kepada pemerintah. Artinya, pasal ini akan mendelegasikan ketentuan lebih lanjut kepada otoritas pemerintah untuk secara bebas menafsirkan dan merumuskannya dalam peraturan pemerintah atau menteri. Asal tahu saja, dari 18 Bab, 159 pasal, RUUK ini akan melahirkan 27 peraturan pemerintah.

Tentang PHK

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diatur dalam pasal 77-79. Kalangan LSM yang tergabung dalam Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan menilai pasal 77 RUUK akan semakin memudahkan Pengusaha untuk mem-PHK buruh.

Pada pasal ini dijelaskan, untuk mem-PHK, pengusaha harus merundingkannya dengan serikat buruh atau buruh. Berbeda dengan UU No. 12 tahun 1964 yang menyulitkan pengusaha melakukan PHK. Dalam UU yang terakhir ini ditegaskan, untuk mem-PHK buruh perseorangan, pengusaha harus mendapat ijin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) dan ijin dari Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4P) untuk PHK massal. Tanpa ijin dari P4D dan P4P, masih menurut UU yang sama, adalah batal demi hukum.

Mereduksi Hak Mogok

Mogok selama ini dipandang sebagai cara yang paling efektif bagi buruh untuk mendesakkan tuntutan-tuntutannya pada pengusaha.


REPRO MEDIA

Teten Masduki

Dalam RUUK ini, meskipun hak mogok tidak secara tegas dilarang, tapi menjadi agak sulit bagi buruh untuk melakukan mogok. Memang pada pasal 81 disebutkan, buruh memiliki hak untuk mogok. Namun seperti ditegaskan pada pasal 84, buruh tidak berhak atas upah selama melakukan pemogokan. Mogok kerja, lanjut pasal 85, hanya dilakukan setelah buruh memberitahukan maksudnya secara tertulis 3 hari sebelumnya kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab, serta ditandatangani oleh pengurus Serikat buruh atau pimpinan buruh yang akan mogok.

MOGOK KERJA HANYA DILAKUKAN SETELAH BURUH MEMBERITAHUKAN MAKSUDNYA SECARA TERTULIS 3 HARI SEBELUMNYA KEPADA PENGUSAHA DAN INSTANSI PEMERINTAH YANG BERTANGGUNG JAWAB...

"Pasal-pasal itu jelas telah mereduksi hak mogok. Jika RUU ini sampai disahkan, ini bukan *rule of law* lagi tapi *rule of power*," ungkap **Sunarti**, sekjen SBSI kepada *Balairung*.

Selain itu, pada pasal 83 juga dinyatakan, mogok hanya dapat dilakukan di perusahaan yang bersangkutan. Pasal ini, menurut Teten, akan menyulitkan buruh untuk menggalang solidaritas dan kampanye tuntutan buruh ke luar lingkungan produksi. "Kalau ada buruh pergi ke DPR, Depnaker ataupun Komnas HAM, pasti kena gebuk. Pasti akan melahirkan kewenangan aparat untuk melakukan penangkapan," ujarnya.

Perlindungan Buruh Migran

Selain sorotan terhadap reduksi hak-hak buruh, penggugatan kalangan LSM juga berkaitan dengan perlindungan buruh migran, atau yang lebih dikenal sebagai TKI dan TKW. Sekitar 15 LSM yang menamakan diri Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) menyampaikan resolusi kepada DPR untuk menolak RUUK.

Dari wawancara *Balairung* dengan **Sopiah**, salah seorang mantan TKW yang bekerja di Arab Saudi, memang tersirat kurangnya perhatian pemerintah pada buruh migran. Menurut Sopiah, tidak pernah ada pembekalan dari pemerintah menyangkut hak dan kewajibannya sebagai buruh di luar negeri. "Saya hanya diwajibkan untuk menjaga nama baik bangsa dan negara," katanya.

Ia juga menuturkan, bekerja di Arab tidak seperti apa yang dibayangkannya. "Saya sebagai penjahit di sana juga diperlakukan seperti PRT (Pembantu Rumah Tangga) seperti untuk melayani tamu sampai pagi," ungkapnya.

Dari sini tampak bahwa perlindungan terhadap buruh migran adalah hal yang mendesak, apalagi jika mengingat jumlahnya yang terus meningkat.

Namun menurut Wahyu Susilo dari *Solidaritas Perempuan* yang juga tergabung dalam Kopbumi, RUUK ini sangat minim memuat tentang buruh migran dan sama sekali tidak mencerminkan dimensi perlindungan pemerintah terhadap buruh migran.

"RUUK ini tidak memberikan

...ngan pada buruh migran, ...al mereka sering mendapat ...kuan yang tidak manusiawi. Dan ...nya, buruh migran ini sering luput ... perhatian pemerintah," ujarnya.

Representasi Kepentingan Negara

Menurut Teten Masduki, ...ara umum ada ...berapa cacatan RUUK ...ang patut digarisbawahi. Pertama, proses pembuatannya didominasi oleh pemerintah. "Padahal pembuatan undang-undang yang menyangkut urusan publik seperti UU perburuhan semestinya melibatkan masyarakat terutama dengan kelompok-kelompok sosial yang terkait dengan dunia perburuhan," ujar ketua Divisi Perburuhan YLBHI ini

Hal ini, lanjut Teten, berakibat serius di mana RUUK ini lebih banyak merekomendasikan kepentingan negara. "RUUK ini digarap Depnaker dan Setneg kemudian dilimpahkan ke DPR, sehingga lebih banyak memuat kepentingan pemerintah bukan aspirasi buruh. Bahkan kepentingan pengusaha pun banyak yang terpotong di situ. Ini namanya *bireaucratic law* atau regulasi," tambah Teten.

"Jadi bisa kita lihat *content*nya, peraturan perburuhan ini bukan untuk memperbaiki hukum perburuhan yang lemah tapi untuk melanggengkan politik perburuhan yang memelihara buruh yang murah dan patuh politik," tegasnya.

Mengintegrasikan Kebijakan Perburuhan

Dari perspektif yang berbeda, Bomer Pasaribu melihat ada kerangka makro yang mendasari perumusan RUUK, yaitu keinginan untuk mengintegrasikan politik perburuhan. "Peraturan perundang-undangan baik dalam ordonansi, baik yang terserak dalam KUHAP, ada dalam KUH Dagang, ada dalam ordonansi yang lepas-lepas ataupun undang-undang setelah kemerdekaan. Jadi itu harus diperiksa ulang, direformasi di dalam sistem hukum ketenagakerjaan," ujarnya.

Bomer melihat nilai positif lahirnya RUUK, yaitu tendensinya untuk melakukan beberapa reformasi dalam rangka menghadapi era liberalisasi ekonomi. Yaitu, reformasi politik investasi yang *full employment policy*, reformasi pasar kerja, reformasi hubungan industrial, reformasi hukum ketenagakerjaan, serta reformasi sistem pendidikan dan pelatihan pekerja yang berorientasi kerja.

...AKAN TIMBUL GESEKAN ANTARA ASAS HUKUM PERBURUHAN YANG INGIN MELINDUNGI BURUH DENGAN KEPENTINGAN MENJAMIN PERTUMBUHAN INDUSTRI --YANG MENSYARATKAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA MELALUI PENYEDIAAN BURUH MURAH, TERAMPIL, DAN PATUH.

Namun **Umar Juoro** justru memandang RUUK ini belum merefleksikan persoalan perburuhan di Indonesia. Menurutnya, statemen-statemen dalam RUUK ini masih terlalu gamblang, umum, dan tidak implementatif. "Terlalu banyak yang ingin dicakup tapi tidak jelas tujuan akhirnya," ujar peneliti CIDES ini.

Di satu sisi kita dikondisikan pada peningkatan daya saing, di sisi lain pemerintah juga dihadapkan pada tuntutan dunia internasional yang menuntut perbaikan kondisi perburuhan. Menurut Umar Juoro, RUUK tidak membuat dua kondisi ini berjalan berdampingan. "RUUK ini tidak jelas mau dibawa ke mana. Keduanya, selalu *cross-road*," katanya.


ISTIMEWA

Bomer Pasaribu

Mengomentari banyaknya kandungan RUUK, beberapa bulan lalu kalangan LSM --disponsori oleh *Social Analysis and Research Institute*-- mengadakan seminar yang khusus membahas RUUK. Dalam seminar itu, kalangan LSM memandang perlunya pemisahan kebijakan ketenagakerjaan dengan peraturan hubungan industrial. Kebijakan ketenagakerjaan lebih ditujukan pada bagaimana mengelola pertumbuhan angkatan kerja, pengembangan SDM, dan pasar kerja. Sementara peraturan hubungan industrial lebih menekankan bagaimana membuat perlindungan dalam hubungan kerja buruh, majikan, dan pemerintah.

Penyatuan dua bidang itu, menurut mereka, akan menimbulkan gesekan antara asas hukum perburuhan yang ingin melindungi buruh dengan kepentingan menjamin pertumbuhan industri, yang notabene mensyaratkan perluasan kesempatan kerja melalui penyediaan buruh murah, terampil, dan patuh.

Buruh Tetap Lemah

Menurut ahli perburuhan Universitas Padjadjaran **Koko Kasidin**, RUUK ini tetap menempatkan buruh pada posisi yang lemah. Ini menurutnya dilakukan untuk memenuhi tuntutan globalisasi ekonomi yang mensyaratkan minimnya konflik untuk sekuritas investasi.

Namun, menurut Teten, menekan buruh dengan RUUK agar pemerintah mampu memelihara buruh murah dan patuh akan menjadi tidak laku dalam konteks globalisasi. "Sekarang ini gerakan buruh di dunia sedang gencar mengaitkan isu perdagangan bebas dengan hak buruh. Jadi kalau nanti komoditi Indonesia yang diekspor itu hasil eksploitasi buruh maka kita akan kena blokir atau kena boikot, karena hal itu bisa dianggap *social dumping*," tandasnya.

Selain itu, menekan upah buruh untuk menghemat biaya produksi, ... dicermati justru malah tidak menguntungkan. Menurut Teten, hal

Materi Pokok	Ordonansi/UU sebelumnya	RUU Ketenagakerjaan	Perbandingan
Organisasi/ serikat buruh	UU No. 14 tahun 1956 (ratifikasi Konvensi ILO No. 1 tahun 1956): a. Pembentukan serikat buruh dilakukan secara demokratis. b. Buruh tidak boleh di-PHK karena keanggotaan dalam serikat buruh sesuai pilihannya. b. Organisasi buruh tidak dipersyaratkan untuk melakukan pendaftaran kepada pemerintah.	a. Ps. 28: Serikat pekerja (SP) dibentuk secara demokratis melalui musyawarah para pekerja secara mayoritas. b. Ps. 32: Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan atau yang tugas dan fungsinya dapat menimbulkan pertentangan kepentingan pengusaha-pekerja, tidak dapat menjadi pengurus dan atau anggota SP. c. Ps 34: SP tingkat perusahaan dan gabungan SP harus terdaftar pada pemerintah. d. Pemerintah menetapkan tata cara pendaftaran SP dan gabungan SP (Ps. 34).	a. RUUK telah memberi peluang yang sangat besar bagi pengusaha dan pemerintah untuk mengatur dan terlibat penuh dalam serikat buruh. b. dengan syarat 'mayoritas' RUUK mempersulit terbentuknya SP. c. Perihal pendaftaran SP pada pemerintah, RUUK jelas bertentangan dengan UU No. 14/1956. d. RUUK mengurangi kewenangan dan fungsi serikat buruh hanya dalam lingkup perusahaan.
Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja	UU No. 12 tahun 1964 a. Ps. 3: Ijin PHK melalui P4D bagi PHK perorangan atau P4P bagi PHK massal b. Ps 8. Terhadap penolakan pemberian ijin oleh P4D/P, pengusaha dan buruh berhak mengajukan banding pada P4P dalam jangka waktu 14 hari c. Ps. 10: PHK tanpa ijin adalah batal demi hukum	a. Ps 77 ayat 1: Jika tak tercapai kesepakatan dan menjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja maka penyelesaiannya melalui sarana penyelesaian perselisihan hubungan industrial.	a. RUUK tidak menjelaskan prosedur perijinan mengenai PHK. b. UU No.12/1964 memberikan kepastian hukum mengenai PHK tanpa ijin. c. UU ini juga memberikan batasan waktu yang jelas dalam proses penyelesaian sengketa.
Hak mogok, demonstrasi dan lock out	a. UU No. 14/1964 ps. 1: Penggunaan hak mogok, demonstrasi dan lock out diatur dengan peraturan per-UU-an. b. UUD 1945 ps. 28: Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang.	a. Ps. 83: Mogok kerja hanya dapat dilakukan di perusahaan yang bersangkutan. b. Ps. 84: Pekerja tidak berhak atas upah selama mogok. c. Ps. 85: Mogok hanya dilakukan setelah pekerja memberitahukannya kepada pengusaha dan instansi pemerintah yang terkait secara tertulis yang ditandatangani pimpinan serikat pekerja.	a. RUUK diam-diam memotong hak mogok buruh. b. Lokalisasi pemogokan menambah kesulitan buruh untuk memberikan solidaritas dan dukungan kepada sesama buruh maupun lembaga negara yang berkompeten dan terkait dengan permasalahan mereka, seperti Komnas HAM, DPR, dan Depnaker.

Catatan: Hanya dimuat 3 materi pokok
Sumber: YLBHI/LBH Jakarta/Solidaritas Perempuan/LBH APIK

mendesak untuk dilakukan adalah mengurangi biaya birokrasi berupa pungutan baik resmi maupun tak resmi. Malah disinyalir, ongkos birokrasi ini jauh lebih besar ketimbang bea untuk mengupah buruh. "Inilah sebenarnya yang justru mengakibatkan ekonomi biaya tinggi," jelas Teten.

Penumpukan RUU

RUU yang sempat heboh ini sejatinya akan digodok sebelum Pemilu. Namun aksi-aksi protes yang cukup intensif dari kalangan LSM dan kaum buruh sendiri di satu sisi dan demi kepentingan 'sukses' Pemilu di sisi lain, telah memaksa pemerintah untuk mengundurkan pembahasannya setelah Pemilu.

Kalangan LSM bahkan menyarankan agar pembahasan RUUK ini ditunda sampai terpilihnya muka-muka baru di DPR. Sebab, dalam tenggang waktu yang sempit, karena masa baktinya hampir berakhir, sangat sulit bagi DPR untuk membahas RUUK secara komprehensif, dan tuntas. Apalagi masih ada 21RUU lain yang harus antri di Gedung DPR.

Seperti disinyalir **Yayasan Lapera**, LSM Yogya yang bergerak di bidang perburuhan dan pertanahan, saat ini ada kekhawatiran bahwa dipromosikannya RUUK tak lebih sebagai pengganti instrumen koersi dan represi yang selama ini dipakai negara untuk mengatasi persoalan perburuhan. Dan pada level internasional, RUUK boleh jadi akan menjadi tameng untuk menghadapi tekanan internasional. Apalagi jika mengingat, RUUK sebagai undang-undang disetujui DPR yang dianggap sebagai simbolisasi kedaulatan rakyat.

Kekhawatiran itu agaknya perlu dijawab dengan upaya dari pemerintah sendiri untuk membahas RUUK secara matang. Oleh karenanya, melibatkan publik secara aktif dalam pembahasannya adalah sesuatu yang tak terhindarkan.

Baru-baru ini Menaker Abdul Latief mengajak masyarakat untuk ikut menyumbangkan pikiran guna melengkapi dan mengkritisi RUUK. Akankah ini *political will* yang patut disambut gembira, ataukah itu hanya retorika --seperti biasanya?❐

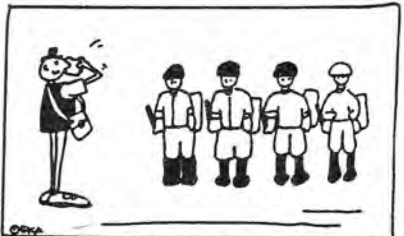
Asmoel
Melani, Ajianto, Heri, Kunto


BALADA IRUNG
© SINDIKAT SKETSA BALAIRUNG



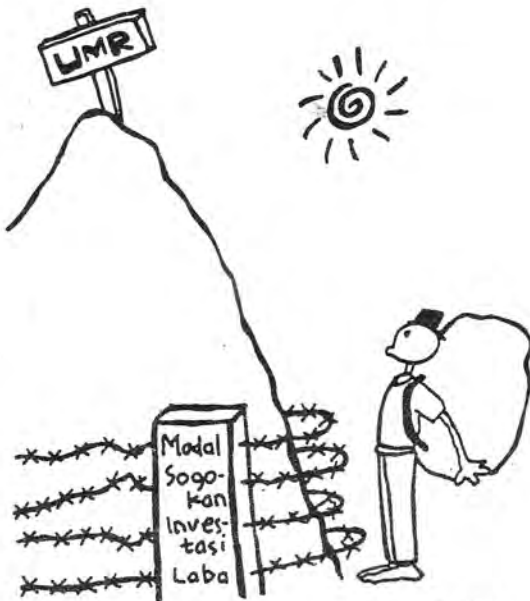

?!






UNDANG UNDANG
©EKA


GAJI BURUH
DIPOTONG :
-TELAT
-IZIN SAKIT
-LALAI
-DSB
PENGUSAHA


UMR
Modal
Sogo-kan
Inves-tasi
Laba
©EKA


KITA TINGGIKAN KEDUDUKAN TENAGA KERJA WANITA
©EKA

■ **Budiman Sudjatmiko:**

Di Masyarakat Terjadi Kevakuman Ideologi

AA KUNTO

Bagaimana Anda memandang korporatisme negara pada sektor buruh ?

Korporatisme negara sangat dilegitimasi oleh strategi pembangunan kapitalistik yang ditempuh negara-negara pasca kolonial. Jadi ini sebenarnya fenomena yang sangat klasik di Dunia Ketiga, seperti terjadi di Amerika Latin yang menerapkan industrialisasi substitusi impor. Saat ini Indonesia sudah menuju tahap industrialisasi serta lambat laun Pendapatan Domestik Brutto-nya sangat bergantung pada industri, terutama industri manufaktur. Maka, dari semua *policy* yang ada, *policy* tentang ketenagakerjaan adalah yang paling mempertaruhkan banyak hal. Artinya, sampai sejauh mana *policy* ini bisa menjamin proses akumulasi modal sekaligus sanggup meredam potensi resistensi dari buruh sendiri.

Dengan korporatisme negara?

Ya, mengingat potensi daya pukul kaum buruh di dunia ketiga sangat tinggi, sehingga untuk mengakumulasi modal di negara-negara tersebut, maka dibutuhkan korporatisme negara yang bisa menjinakkan buruh agar buruh tidak mempunyai perlawanan yang sistematis terhadap proses akumulasi modal yang kapitalistik.

Apakah korporatisme sudah bisa dikatakan berhasil menjinakkan buruh ?

Sebagai suatu dominasi, korporatisme cukup berhasil. Tetapi, tidak berhasil menghegemoni. Karena tantangan pada tingkat minimal, tingkat kesadaran, ada di kalangan buruh. Kalangan buruh sudah sejak lama, sadar atau tidak sadar, tidak mempercayai lagi pada apa yang disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Mereka tiap hari merasakan adanya kesenjangan, sehingga mereka melawan dengan cara cara mereka sendiri.

Jadi secara ideologis, negara tidak mampu lagi mengangkangi pola pikir rakyat. Satu-satunya jalan untuk mempertahankan dominasi kemudian adalah represi. kalau perlu, institusi *extra konstitusional* seperti Bakorstanas pun mereka ciptakan.

Nampaknya, pemerintah sudah kehilangan demagogi-demagogi untuk

meyakinkan banyak orang bahwa kita adalah keluarga yang harmonis ataupun ada kemitraan antara buruh dan pengusaha.

Tapi agaknya resistensi buruh terhadap korporatisme belum kuat --secara kualitatif ?

Korporatisme tidak meniadakan perlawanan, karena perlawanan akan selalu ada. Selama ada kesenjangan. Ia (korporatisme-red) hanya bisa mencegah agar perlawanan tidak sistematis.

...Pemerintah sudah kehilangan demagogi-demagogi untuk meyakinkan banyak orang bahwa kita satu keluarga yang harmonis...

Banyak kalangan menilai gerakan buruh di Indonesia ini lemah. Mengapa ?

Begini, di Indonesia tantangan korporatisme ini belum cukup kuat karena keinginan untuk perubahan lebih dirasakan oleh kalangan kelas bawah, sementara lapisan menengahnya kurang artikulatif sehingga proses demokratisasi tersendat-sendat. Kalaupun toh terjadi gejolak, tidak menghasilkan demokratisasi melainkan hanya menghasilkan perlawanan perlawanan yang sporadis.

Selain itu saat ini terjadi kevakuman ideologi di kalangan rakyat (baca: buruh). Di satu sisi, proyek ideologi pemerintah sudah tidak lagi kena di kalangan rakyat, seperti kekeluargaan, harmoni, HIP. Di lain pihak, gerakan pro-demokrasi juga belum memberikan ideologi alternatif.

Kemarahan, resistensi sudah ada. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi sudah menunjukkan itu. Itu fakta tak terbantahkan. Tapi, ada vakum ideologi. Dan kevakuman ideologi inilah yang nantinya tidak akan bisa membawa potensi-potensi resistensi menjadi suatu gerakan yang sistematis.

Bagaimana supaya sistematis ?

Ada empat syarat sebenarnya sebuah gerakan menjadi sistematis, yaitu ideologi dan program yang jelas, organisasi yang jelas, pimpinan yang jelas dan momentum yang tepat. Dalam strategi gerakan, suatu gerakan bisa menang kalau dia sistematis.

Kalau sekarang ?

Sekarang belum ada. Maka yang harus dilakukan adalah gerilya politik, dalam artian, terus menerus melakukan resistensi. Resistensi-resistensi itu jangan dibiarkan spontan, tetapi lambat laun harus dikonsolidasikan sehingga menjadi sistematis.

Apakah gerakan yang radikal cukup tepat mengingat dalam banyak kasus seperti 27 Juli justru membentur represi negara ?

Begini, rakyat Indonesia ini sebenarnya mempunyai sejarah panjang perlawanan yang hebat, bahkan proses kemerdekaannya pun sangat revolusioner. Dan sejarah pergerakan di Indonesia sangat diwarnai oleh aksi-aksi di kalangan bawah, aksi perlawanan petani di Banten dan pemogokan-pemogokan buruh tahun 20-an. Dan itu terus berlanjut sampai tahun 40-an, 50-an sampai tahun 60-an. Artinya, kita bukan bangsa yang pengecut dilihat dari tradisinya. Kita bangsa yang sangat heroik, rakyat yang sangat heroik, punya rekaman sejarah perlawanan yang panjang.

Di satu sisi, proyek ideologi pemerintah sudah tidak lagi kena di kalangan rakyat, seperti kekeluargaan, harmoni, HIP. Di lain pihak, gerakan pro-demokrasi juga belum memberikan ideologi alternatif.

Mengapa korporatisme negara Orde Baru begitu legitimated *?*

Jika kembali ke UUD 45, korporatisme sebenarnya tidak punya landasan yuridis, karena hak berserikat dan mengeluarkan pendapat dijamin. Artinya, adanya wadah tunggal buruh tidak dapat dibenarkan.

Satu-satunya kemenangan pemerintah dengan korporatisme adalah mempunyai hak untuk melegitimasi bahwa apa yang dilakukan buruh ketika demonstrasi tanpa SPSI, petani protes tanpa HKTI, pemuda demontrasi di luar KNPI sebagai tindakan liar. Liar secara hukum, melanggar ketertiban, menggunakan cara-cara di luar sistem ataupun tanpa bentuk. Itu saja.

Lantas, apa agenda ke depan ?

Saya kira salah satu agenda pokok dari perjuangan demokrasi adalah mempertanyakan terus menerus keabsahan moral dan politis dari produk-produk kebijakan yang ada. Karena selagi pemerintah ini masih menggunakan selubung yuridis sebagai kekuatannya, selagi itu pula pemerintah masih mempunyai hak untuk berbuat apa saja.

Bagaimana prospeknya ke depan, apakah korporatisme ini akan mencair?

Saya kira semuanya akan dihadapkan pada perkembangan globalisasi dan pasar bebas yang akan menghasilkan kekuatan-kekuatan sosial baru, baik yang lahir dari masyarakat domestik maupun dari kekuatan asing yang akan hadir.

Pekerja-pekerja asing yang sudah memiliki tradisi berdemokrasi tidak akan terbiasa berhadapan dengan birokrasi yang cerewet dan korup seperti di Indonesia. Karena pemerintah berkepentingan untuk mendapatkan suntikan modal, maka pemerintah atau birokrasi mau nggak mau harus merubah dirinya. Artinya, korporatisme ini bisa dirubah baik, lewat desakan-desakan dari masyarakat maupun tekanan dunia internasional. Saya kira ini hanya masalah waktu saja.❒

Melani, Aji, Asep

■ Alexander Irwan:

Indonesia Mirip Korea Tahun 70-an



Alexander Irwan

Ketika seminar buruh di Jakarta tempo hari, Anda membandingkan buruh kita saat ini dengan buruh Korea Selatan pada tahun 70-an. Sebenarnya dasarnya apa?

Dasarnya itu mau melihat prospek gerakan buruh di Indonesia. Jadi waktu itu saya mengatakan bahwa jumlah pemogokan meningkat terus. Jadi ada beberapa versi angka pemogokan, tapi dari yang saya gunakan itu, saya mengutip salah seorang pengajar di Atmajaya Jakarta dan itu menunjukkan angka pemogokan meningkat terus thn 90-96. Dan diperkirakan akan menurun kelak, dan memang menurun. Tetapi di tahun 96 meningkat lagi jumlah pemogokannya. Kita kemudian harus berhati-hati dalam melihat fenomena ini. Tingginya jumlah pemogokan buruh bukan berarti gerakan buruh di Indonesia telah kuat.

Kenapa?

Ya itu relevansinya dengan perbandingan dengan Korsel. Kalau dibandingkan dengan gerakan buruh Korsel maka harus dibandingkan dengan gerakan buruh di tahun 70-an. Karena kondisinya mirip gerakan buruh Korea tahun 70-an. Dan gerakan buruh Indonesia saat ini mayoritas sama yakni buruh padat karya. Cirinya adalah kedudukan mereka sangat lemah. Contohnya buruh tekstil, garment, elektronika, sangat lemah karena mereka dapat diganti dengan sangat cepat. Buruh baru masuk ditraining setengah jam bisa.

Dan pada waktu itu di Korsel banyak pemogokan buruh sama persis dengan di Indonesia. Tetapi lemah, indikator kelemahannya apa? Bahwa mereka belum berhasil menuntut serikat buruh bebas. Di Indonesia kan seperti itu. Kenaikan upah juga sulit, kondisi kerja yang layak juga sulit, masih sama dengan Indonesia.

Kemudian terjadi pergeseran perekonomian di Korsel, yaitu industrinya bergeser. Setelah yang padat karya ini kalah bersaing dengan Malaysia, Thailand, Singapura. Mereka lebih memperhatikan industri yang padat teknologi dan modal, keahlian. Ini dimulai akhir 70-an sampai dekade 80-an.

Jadi ketika meletus gerakan buruh tahun 85,86, 87 posisi buruhnya udah jauh lebih kuat, seperti misal tukang las yang membutuhkan keahlian selama berbulan-bulan bahkan satu tahun. Jadi perusahaan kalau mecat susah juga.Seperti tukang las galangan kapal, galangan mobil, elektronika yang membutuhkan keahlian tinggi.

Nah, setelah itu cukup kuat baru tahun 90-an Korsel menyamai gerakan buruh di Barat. Tahun setelah 80-an menuju 90-an baru mereka berhasil menuntut serikat buruh bebas dan semacamnya. Dan untuk ke depan, polanya sama dengan Barat. Lewat negosiasi, *bargaining* antara pemerintah, perusahaan dengan serikat buruhnya.

Di Indonesia baru sampai Korsel tahun 70-an. Gerakan buruh kita sampai saat ini belum berhasil. Lembur nggak dibayar, dituntut masih sulit. Dan di Indonesia masih terperangkap pada industri padat karya. Dominasi industri yang lebih padat modal, padat teknologi itu kendalanya banyak sekali seperti kendala birokrasi.

Gerakan buruh bebas kita tergantung apakah Indonesia bisa melakukan transformasi ekonomi meninggalkan industri padat karya ke padat modal. Kalau *stagnant* sampai disini saja maka gerakan buruh akan lemah.

Jadi kekuatan buruh tergantung pada transisi dari padat karya ke padat teknologi, bukan pada kebebasan berorganisasi ?

Untuk bisa menuntut kebebasan berorganisasi kan harus mempunyai kekuatan. Kekuatan buruh padat karya ini apa? Nggak ada. Buruh Korsel, mereka berhasil menuntut hak untuk berorganisasi bebas ketika posisi mereka udah kuat, buruh-buruh dengan keahlian tinggi. Kalau nggak punya kedudukan posisi yang kuat seperti itu nggak mungkin negara sama modal jauh lebih kuat.

Kita kan akan meninggalkan industri padat karya tetapi ironisnya RUUK justru menyempitkan ruang untuk kebebasan berorganisasi atau mogok dan lain-lain?

Bagi saya sendiri masih menjadi tanda tanya, apakah Indonesia akan

...ncar transisinya daripada karya ke padat modal, teknologi karena kekuatan *bisnis confidence*-nya kurang kuat di Indonesia. Jadi untuk industri yang lebih padat modal dan teknologi itu membutuhkan investasi yang besar yang pengembalian modalnya juga lama sekitar 4,5,6 tahun. Seorang yang punya modal *masa* mau menunggu pengembalian modal 10 tahun lagi. Padahal mungkin presiden Suharto mati, ada perubahan apa-apa, misalnya modal, gimana? Bisa hilang, *dong*. Regulasi ganti-ganti nggak karuan dan ada yang diberi keistimewaan dan ada yang tidak. Adanya hal-hal yang seperti itu yang menghambat proses transisi ekonomi dari padat karya ke padat modal dan teknologi.

Kebijakan makro pembangunan Indonesia tentang perburuhan apakah hanya dipandang sebagi alat produksi atau memang bisa menjadi kekuatan pembanding ?

Kebijakan pembangunan *kan* tetap upah buruh seminimal mungkin supaya produk-produk Indonesia lebih kompetitif di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Yang menjadi masalah adalah bahwa gerakan buruh terus meningkat. Harus diakui meningkat meski intervensi militer kuat, tapi pemogokan jalan terus. Ini cukup mengganggu meski mereka belum berhasil mendirikan serikat buruh bebas. Karena itu untuk meredam gejolak buruh dicoba dengan UMR. UMR dari waktu ke waktu dinaikkan meski belum bisa memenuhi kebutuhan fisik minimum.

Nah, akibatnya banyak pengusaha ekspor menengah sampai kecil melakukan relokasi. Masalahnya tetap itu. Oke, pembangunan tetap mau upah seminimal mungkin, nggak bisa lagi dinaikkan jumlahnya nggak banyak. Tapi pembangunan tetap tidak mau memberantas pungutan liar karena itu merupakan salah satu cara mempertahankan loyalitas politik. Ini sudah diterapkan sejak awal-awal Orde Baru meski Presidennya gembar-gembor pungutannya dihilangkan. Nggak bisa juga.

Apa mungkin Indonesia punya serikat buruh bebas ?

Untuk ke depannya pasti bisa. Tapi itu tergantung pada kesuksesan ekonomi Indonesia. Kalau transisi ekonominya sukses untuk pada yang lebih padat modal dan teknologi, itu akan meningkat. Tapi kalau gagal ekonomi anjlok seperti Argentina, Meksiko, Peru dan lain sebagainya.

Ya kita nggak tahu karena pas ekonomi anjlok pasti ada PHK besar-besaran dan ada gejolak sehingga konflik sosial akan meningkat. Tapi kekuatan buruh itu sendiri sebagai kekuatan yang terorganisasi tetap akan lemah. Tetap modal sama negara lebih kuat.

Apakah globalisasi punya pengaruh kuat terhadap transisi ekonomi ?

Justru sekarang ini kan Indonesia menghadapi liberalisasi dunia. Nah dalam liberalisasi ekonomi, dunia semakin dituntut untuk mengembangkan daya kompetisi. Jadi kalau diperbandingkan dengan perusahaan-perusahaan Korsel dan Taiwan, perusahaan Indonesia terus terang jauh lebih repot. Nggak usah sama Taiwan atau Singapura, sama Malaysia, Thailand *aja* jauh lebih repot karena regulasi disana jelas lebih baik sehingga bisnis *confidence* lebih bagus untuk bisnis padat modal.

Tapi pembangunan tetap tidak mau memberantas pungutan liar karena itu merupakan salah satu cara mempertahankan loyalitas politik.

Untuk Indonesia lebih repot, jadi adanya liberalisasi dan globalisasi lebih merepotkan Indonesia dibandingkan Malaysia dan Thailand. Nah, Kalau lebih repot gerakan transisi untuk maju ini juga lebih repot. Kalau ini gagal maka buruh pun gagal karena ekonominya anjlok. Perubahan punya signifikasi tinggi dalan arti buruh punya posisisi yang kuat. Saya pikir belum, mengenai RUUK ini saja kan cukup banyak pendapat. Satu harus ditolak. Di kalangan LSM berusaha untuk memobilisasi buruh untuk menentang RUU ini. Tapi tetap nggak berhasil.

Tetapi kelibatnya tetap akan digolkan?

Tetap akan gol. Kalau gol bagaimana merevisinya. Strateginya sudah seperti itu. Apakah sekarang Indonesia bisa menjadikan buruh sebagai penyumbang perubahan politik. *Kayaknya* perspektifnya harus dilihat memang untuk jangka panjang. Karena buruh saat ini kan menuntut organisasi secara bebas dengan menciptakan serikat buruh bebas. Dan ini kan perubahan politik yang sangat signifikan, kalau itu terjadi. Nah sekarang ini masih dalam perjalanan itu. Kalau kita mau bilang gerakan buruh tidak ada, artinya tidak bisa juga *dong*. Ini kan masih dalam proses seperti Korsel dulu, sekarang kita sudah tahun 90-an kita melihat ke belakang di Korea.....Oh itu ternyata gerakan buruh tahun 70-an, yang lemah itu ternyata bisa membangun kekuatan sehingga bisa mencapai titik kekuatan di pertengahan dekade 80-an. Nah sekarang ini kita di sini ngomong gerakan buruh begitu-begitu saja, tapi ini kan proses. Apakah itu merupakan sumbangan pasti, merupakan sumbangan besarnya ? Susah kita mau mengukurnya.

Misal industrinya tetap padat karya masihkah mungkin ada serikat buruh bebas ?

Bagaimana mungkin buruh padat karya bisa menuntut kebebasan berorganisasi, nggak ada dalam sejarah.

Itu berarti bargaining position-*nya nggak ada ?*

Lemah, gerakan buruh kan spontan, di sini karena UMR dan upah lembur nggak dibayar tapi kan cuma *gitu-gitu* saja.

RUUK dianggap telah mereduksi hak mogok buruh dan berorganisasi, terus bagaimana implikasinya ?

Ya, itu menggambarkan kekuatan negara dan modal yang kuat. Susah untuk mengontrol hal tersebut. Ini terjadi di setiap negara yang perekonomiannya. Di Taiwan seperti itu, di Korsel seperti itu❐

Melanie, Asep

Gerakan Buruh Indonesia Masa depan:

Melawan Represivitas Pemodal dan Penguasa

Kuatnya tradisi feodalisme negeri ini mengakibatkan perlawanan buruh Indonesia memiliki potensi untuk radikal. Sebagai legitimasi politik, Orde Baru menganggap keradikalan itu sebagai hal yang kiri. Dan celakanya kiri oleh khalayak dianggap sebagai tindakan kriminal.



Revolusi Perancis (Revolusi Borjuis) telah membawa manusia pada sebuah dunia yang semuanya penuh dengan mekanis. Suatu tradisi di mana mesin menjadi segalanya untuk menyisihkan beragam bentuk kerja tangan.

Tampilnya mesin penghasil barang tersebut telah membawa sejumlah kelas baru: kapitalis atau pemilik mesin-mesin dan pekerja sebagai operator yang menjalankan sekaligus terikat pada mesin. Dan dengan mesin itu datanglah suatu cara produksi baru, yang oleh Marx dinamakan Kapitalisme (Eduardo del Rio; 1976).

Memperbincangkan Kapitalisme sesungguhnya menempatkan dua kelas yang mendominasinya, yakni kelas pemilik modal sebagai penguasa dan kelas kaum pekerja atau buruh yang sering dianggap 'rendah'.

Posisi tersebut menjadikan buruh menjadi tidak berharga, meraka selalu dieksploitasi para pemilik modal. Kerja lembur, gaji murah adalah hal biasa dalam negara yang dijalankan oleh logika kapital.

Lantas, betulkah aspirasi kaum buruh selalu tidak mendapat tempat dalam negara yang dikuasai oleh birokrat dan modal? Benarkah buruh memang kelas yang keberadaanya tidak memiliki daya tawar terhadap berlangsungnya proses demokratisasi dalam sebuah negara?

Melihat maraknya aksi buruh dalam akhir-akhir ini, banyak para ahli melihat, sesungguhnya buruh memiliki kekuatan untuk tampil sebagai agen sekaligus aktor aktif dalam percaturan politik dalam sebuah negara. Dan dengan tampilnya kaum buruh dalam kancah politik, maka dengan sendirinya mereka punya kekuatan *bargaining power* ketika berhadapan dengan aktor politik yang lain. *Dus,* tidak menutup kemungkinan buruh akhirnya menjadi sebagai kekuatan dalam proses demokratisasi di suatu negara. Untuk kasus ini kita bisa melihat Inggris, Korea, Belanda, ataupun Italia.

Fakta itulah membuat kita semua yakin bahwa sesungguhnya buruh adalah individu-individu bebas yang memiliki potensi untuk menentukan nasibnya yang lebih laik. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Marx, bahwa dalam melakukan perjuangan melawan penguasa, kelas pekerja atau buruh harus dapat menggerakan dirinya sendiri (partainya sendiri). Karena dengan hanya gerakan persatuanlah kaum buruh bisa menentukan eksistensinya.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia, mungkinkah kaum buruh di Indonesia mampu menciptakan gerakan solid untuk melawan para penguasa? Dengan siapa mereka (baca: buruh) harus beraliansi agar perlawanannya lebih kuat? Atau dengan sedikit berangan-angan, mampukah kaum pekerja kita menentukan nasibnya dengan membikin semacam partai buruh seperti yang ada di Inggris, Australia, Belanda, Italia, dan Korea?



REPRO TEMPO

Demo buruh di Medan
melawan represivitas pemodal dan penguasa

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadikan *Balairung* berusaha untuk mencari jawabnya lewat **Temu Wicara Edisi 26** dengan menghadirkan **Dadang Juliantara** Ketua Lapera Indonesia, **Yussac F**

[illegible] Baswir, dosen Fakultas [illegible] M Supraja, dosen [illegible] kesempatan ini [illegible] oleh **Khoirul [illegible]**

[illegible] Gerakan Buruh

[illegible] kan buruh akhir-[illegible] perhatian [illegible] nakan buruh yang [illegible] sebagai kelas [illegible] m-diam telah [illegible] buah kekuatan [illegible] kekuatan di luar [illegible] salnya, dengan [illegible] ang dipimpin oleh [illegible] mampu [illegible] Partai Konservatif [illegible] dianggap paling [illegible]

[illegible] ng kemudian muncul, [illegible] n-gerakan buruh [illegible] egara feodal -- seperti [illegible] liki potensi radikal [illegible] gan negara kapital?

[illegible] pertanyaan ini kita bisa [illegible] udaya feodalisme [illegible] egara. Karena dalam [illegible] feodalismelah, gerakan [illegible] dinggap mewakili [illegible] tersebut akan banyak [illegible] adi jika suatu negeri akar [illegible] a tidak kuat, gerakan-[illegible] ruh akan [illegible] emah," ungkap [illegible] Ananda.

[illegible] bagaimana [illegible] gerakan kaum [illegible] donesia? [illegible] feodalisme [illegible] terjadi di Indonesia sehingga memicu perlawanan buruh yang radikal?

"Sistem-sistem di Indonesia itu dikatakan kapitalis, di satu sisi kita juga menganggap Indonesia itu masih feodal. Birokrasi kita, saya kira, banyak yang menganggap merupakan birokrasi yang masih feodal," ujar Yussac.

Disadari atau tidak, bahwa dengan budaya feodalisme, suatu negara akan berusaha melakukan represi yang kuat terhadap rakyatnya. Karena dengan itulah kekuasaan yang selama ini dipegang dapat terlanggengkan. *Dus,* tidak heran jika ada kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba kritis dianggap berbahaya. Termasuk ketika buruh berusaha menuntut hak-hak politiknya sebagai warga negara.

Namun, buruh tentu tidak selamanya akan diam. Lambat laun mereka mulai sadar dan menuntut hak dasarnya (baca: hak politik) serta kesejahteraan ekonominya. Dan ketika negara tidak lagi mampu memberinya, maka tidak ada pilihan lain kecuali melakukan gerakan perlawanan.



Dadang Juliantara

Para buruh di Indonesia sendiri bila kita cermati, telah mengalami nasib seperti halnya negara-negara yang tradisi feodalnya kuat. Mereka bukan saja kesempatan-kesempatan politiknya tidak diperhatikan, tapi secara ekonomi juga kurang terpenuhi.

"Sehingga dapat dikatakan gerakan buruh di Indonesia itu sangat potensial radikal, karena disamping feodalismenya sangat kuat, juga kinerja feodalismenya itu, perilaku feodalisme di Indonesia itu sangat buruk," papar Yussac, aktivis mahasiswa ini.



Revrisond Baswir

Namun begitu, lanjut Yussac, meskipun gerakan buruh di Indonesia memiliki potensi radikal yang cukup tinggi, gerakan buruh Indonesia belum mempunyai akar yang kuat.

Problem Gerakan Buruh di Indonesia

Meski gerakan buruh di Indonesia memiliki kecenderungan radikal, namun untuk menjadi suatu kekuatan melawan rejim (penguasa) --untuk saat sekarang-- akan menemui beberapa kesukaran.

Menurut M Supraja, kesulitan gerakan buruh di Indonesia dikarenakan berhasilnya penguasa menjerat kebebasan ekspresi kaum buruh dengan diberlakunya beberapa perundang-undangan yang kebanyakan produk kolonial.

"Posisi buruh sebagaimana diatur dalam undang-undang memang sangat marginal. Sejak dari awal buruh selalu tersudut oleh beberapa undang-undang yang justru itu produk kolonial," ungkapnya.

Lebih lanjut Praja menjelaskan, bahwa hal lain yang menjadikan gerakan buruh di Indonesia sulit untuk bergerak adalah karena pilihan kebijakan ekonomi kita yang mengambil konsep paradigma *developmentalism.*

"Kelemahan yang paling besar dengan paradigma Pembangunanisme adalah sama sekali tidak memberikan ruang bagi perkembangan kedewasaan masyarakat baik dalam kehidupan tatanan sosial, pendidikan, ataupun gerakan buruh," papar dosen muda Sosiologi UGM ini.

Sementara itu Revrisond Baswir melihat, bahwa sulitnya gerakan buruh, dikarenakan adanya dua kekuatan yang selama ini menjadi tantangan kaum buruh Indonesia. Yakni, *developmentalism* yang berkawin dengan *militerism* serta realitas sosial masyarakat dengan ideologis ke-Islam-an dan ke-kiri-an.

Artinya, diakui atau tidak, gerakan buruh sejak semula merupakan suatu bentuk gerakan yang menjadi basis sosialisme. *Dus,* ketika ada perlawanan kaum buruh, maka mereka akan menghadapi tudingan sebagai kaum 'kiri'--yang dalam konotasi politik Indonesia berarti PKI--dari para militer dan masyarakat yang masih kuat menggunakan analisis simbol-simbol bendera keagamaan.

Hal lain yang membuat gerakan buruh Indonesia kurang solid, menurut Revrisond Baswir adalah masih adanya sentimen-sentimen primodialisme, seperti sentimen agama, ras yang selama ini telah masuk menjadi bagian pemikiran dari tindakan masyarakat Indonesia.

"Jadi kalau begitu kehadiran gerakan

buruh di Indonesia menghadapi dua tantangan yang cukup serius, karena bagaimanapun gerakan buruh akhirnya tidak hanya sampai pada persoalan perbaikan nasib buruh, karena dalam praktenya gerakan buruh nembutuhkan aliansi," jelas Sony, panggilan akrab Revrisond Baswir.

Hal senada juga diungkapkan Dadang Juliantara, menurutnya, sukarnya gerakan buruh di Indonesia karena asosiasi masyarakat yang sudah terlanjur buruk terhadap kaum buruh. *Image* masyarakat melihat gerakan kaum buruh sebagai hal yang kiri. Dan celakanya, kiri sudah dianggap kriminal.

"Jadi kalau kiri itu kalau mau dilihat, itu *'kan* suatu pilihan sikap orang, tetapi yang berkembang dalam masyarakat kita, kalau kita mendengar kata 'kiri' dalam pengamatan saya itu kriminal," papar Dadang.

Lebih lanjut, Dadang melihat, bahwa hambatan yang dihadapi untuk memperbaiki nasib buruh di Indonesia tidak hanya datang dari militer, tapi juga dari masyarakat sendiri. "Menyoal siapa kendala pertama, saya kira bukan saja tentara, tetapi mungkin teman-teman di sekitar kita yang mengidentifikasikan kiri sebagai kriminal," katanya.

Peluang dan Aliansi Gerakan

Dalam kondisi di mana intervensi negara begitu kuat serta realitas sosial masyarakat yang masih berpegang teguh pada sentimen keagamaan ini, mungkinkah kita masih berharap gerakan buruh mampu menjadi salah kekuatan pilar demokratisasi?

Melihat kecenderungan global di mana kapitalisme telah mewakili kelas menengah (Amerika), maka gerakan buruh di masa mendatang mempunyai peluang untuk menjadi sebuah kekuatan yang kita harapkan.

Dengan kata lain, untuk memenangkan persaingan dengan partai Konservatif, maka suka atau tidak pemilik modal (kaum kapital) harus menjadikan gerakan kaum buruh sebagai kekuatan. Karena dengan memihak dengan buruh, para pendukung kaum Kapitalis bisa menumbangkan kaum Konservatif seperti yang terjadi di Inggris.

"Karena bagaimanapun kepentingan-kepentingan kelas menengah di USA bersaingan dengan kelompok konservatif di sana, dan itu bisa digunakan sebagai pendorong eksternal untuk gerakan perburuhan Indonesia, " ungkap Yussac.

Kalau dilihat perkembangan akhir tahun 1990-an, maka banyak ditemukan beberapa aksi buruh. Meski secara kualitatif dianggap kurang, namun paling tidak menunjukkan bahwa gerakan buruh di Indonesia sudah memperlihatkan perkembangan sekaligus sebagai awal yang baik.

Pertanyaan kemudian adalah bisakah buruh melakukan gerakan sendiri tanpa melakukan aliansi? Dan seandainya membutuhkan teman berjalan, dengan siapa buruh harus bergandeng tangan membentuk kerja sama?

Menyoal pilihan sebuah aliansi,


BAMBANG

M. Supraja

maka pertama yang mesti diperhatikan adalah kejelihan. Sebab salah memilih kawan untuk bergerak, akan menimbulkan kegagalan atau bahkan sebuah kehancuran. *Dus*, mencari kekuatan yang paling strategis merupakan jawaban untuk memenangkan suatu gerakan.

Dalam konteks kondisi Indonesia (baca; Orde Baru) sekarang kelompok yang strategis dan memiliki kekuatan adalah militer. Namun, buruh beraliansi dengan mereka (militer) guna melakukan sebuah gerakan -- untuk saat sekarang -- sangatlah tidak mungkin.

Sementara itu, beraliansi dengan kelompok mayoritas -- dalam hal ini Islam -- yang cara intepretasinya terhadap ajaran-ajaran kebanyakan masih membawa simbol-simbol bendera keagamaan, sedikit menemui hambatan.

Lantas, dengan kelompok mana buruh mesti melakukan aliansi? "Kecenderungan beraliansi gerakan buruh di Indonesia ini adalah tentu dengan kawan-kawan yang maju dengan organisasi atau partai yang sedikit banyak cenderung sekuler dan lebih eksplisit lagi cenderung kekiri-kirian," papar Revrisond Baswir.

Tapi realitas masyarakat Indonesia (baca: Islam) dalam memahami nilai-nilai agama itulah yang menjadi tantangan bagi gerakan kaum buruh Indonesia, sehingga menurut dosen ekonomi kelahiran Sumatra itu, "Sampai seberapa jauh akhirnya gerakan buruh Indonesia itu bisa diterima dikalangan Islam".

Sementara itu, kalau kita belajar dari pengalaman sejarah di Eropa pengaruh agama Katholik sangatlah kuat. Dan di negara feodal yang keras, biasanya rejim yang berkuasa adalah agama Katholik. Namun, bila kita lihat kemudian di Eropa terjadi perubahan-perubahan yang dramatis, yakni Agama Katholik berkemang menjadi agama Protestan di mana aspek rasionalitasnya lebih kuat.

"Saya kira, justru kalau dalam sosiologi agama para pemeluk agama inilah yang harus mampu bersaing merebut mendukung-pendukungnya, sehingga bagaimana Islam itu bisa ditawarkan agar lebih mendukung gerakan buruh Indonesia yang secara meteriil punya potensi ke depan," ungkap Yussac F Ananda.

"Jadi bukan terbalik, logika itu justru bisa dibalik, bahwa Islam justru akan semakin ditinggalkan jika tidak dapat tepat menawarkan semacam teologi yang mendukung gerakan perburuhan," tambah mahasiswa jurusan Sosiologi tingkat akhir itu.

Jadi, meskipun tanpa para pemuka agama untuk medukung buruh, gerakan buruh itu akan bicara dengan sendirinya, karena lambat laun kaum buruh mulai sadar dan akan menuntut hak-hak dasarnya -- baik hak sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Dan justru keberpihakan agama terhadap buruh inilah menjadi pertaruhan setiap agama di masa depan.

Lain halnya dengan Dadang Juliantara, menurutnya aliansi gerakan buruh di Indonesia janganlah dibenturkan dengan melihat perbedaan ideolgi. Karena setiap agama pada dasarnya mengajarkan

[illegible]kan terhadap kaum [illegible]

Karenanya, kalau dilihat kebanyakan buruh -- dalam artian yang dibayar harian -- sekarang adalah mereka yang muda-muda. Maka kerjasama gerakan kaum buruh di Indonesia bisa membidik para genarasi muda sekarang, khususnya generasi yang lahir setelah tahun 1965. Mengapa harus beraliansi dengan generasi muda? "Karena orang-orang ini tidak kena gesekan ideologis," ujar aktivis Lapera ini.

Format Perubahan Gerakan

Dari sekian fenomena aksi buruh di Indonesia akhir era 1990-an, menandakan bahwa kaum buruh sudah mulai berani untuk menentukan nasibnya sendiri.

Tapi dari sekian gerakan buruh tersebut, harus diakui bahwa bentuk perlawananya mereka belum jelas format, sehingga tidak jarang apa yang dilakukanya sering gagal dan kandas.

Realitas itulah yang perlu menjadi perhatian. Artinya, sudah saatnya dicari perubahan bentuk gerakan buruh yang bisa mengakomodir elemen-lemen kekuatan sehingga menjadi kekuatan yang betul-betul jitu.

Lantas, bagaimana kiranya perubahan gerakan buruh Indonesia di masa mendatang? Haruskah dengan gerakan radikal? Ataukah bentuk perlawanan yang reformis?

Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus melihat sejarah perseturuan politik yang pernah ada di Indonesia. Sejarah telah mencatat, bahwa persaingan keras telah terjadi antara kaum Nasionalis dan kaum Sosialis sejak sekitar tahun 1920-an, 1930-an, serta di tahun 1940-an. Dan pertarungan itu untuk saat ini telah dimenangkan oleh kaum Nasinalis.



BAMBANG

Yussac F Ananda

"Maka potensi gerakan buruh paling banter saya kira adalah gerakan-gerakan reformasi. Dan itu lebih moderat dari pada radikalisme," ujar Yussac.

Tapi buruh-buruh Yussac menambahkan,"Yang jelas perubahan itu secara logis besar kemungkinan akan terjadi . Kalau secara ideologi saya setuju kalau kaum Nasionalis berada di depan, dan kecenderunganya reformis. Tapi dilihat dari sejarah dunia, kalau responya terlambat semacam saat ini, gerakan buruh akan radikal. Dan indonesia punya sejarah radikalisme itu kuat Selama ini kapitalisme berpenampilan modern. Karena feodalisme semacam itu akan muncul gerakan buruh yang reformis."❑

Khoirul Rosyadi
Imam R, Endy S



AA. GN. Ari Dwipayana
Staf pengajar
Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIPOL UGM

Marsinah, Suciati dan seterusnya

Dalam sebuah pidato yang diucapkan di Jakarta, tanggal 10 Desember 1993, Goenawan Mohammad pernah mengatakan bahwa Marsinah adalah sebuah petunjuk, atau mungkin saja sebuah lambang yang terang dan perih. Kematian Marsinah tanpa disadari juga mengisahkan hadirnya di Republik ini sebuah "ideologi" (dan jalinan kepentingan) yang bisa begitu sewenang-wenang terhadap segala anasir yang selama ini sudah berada dalam posisi marginal, yakni kaum buruh dan perempuan.

Tentang buruh, kita bisa secara fasih bertutur tentang lemahnya kedudukannya dalam kehidupan sosial-ekonomi Indonesia yang sekarang ini semakin kapitalistik. Tentang perempuan, kita tahu betapa terpinggirkannya posisinya dalam sebuah lingkungan budaya yang memuja "Patriakalisme-Maskulinisme". Kita tidak tahu pasti siapa yang membunuh Marsinah, tetapi kita tahu mengapa Marsinah dibunuh. "Ideologi" seperti itulah yang sebenarnya membunuh Marsinah, Suciati dan seterusnya.

***

Bagi negara-negara Kapitalis Pinggiran *(late industrialising countries)*, kisah buruh sepertihalnya Marsinah, bukanlah sesuatu yang baru sama sekali, bahkan terkesan agak klise, setidaknya hal itu diyakini oleh Gunter dan Schmitter.



Dalam sebuah tulisan yang berjudul *"Still the Century of Corporatism ?"*, Philippe C. Schmitter mengerti betul perbedaan posisi Buruh dalam semesta formasi kelas antara buruh di negara Kapitalis maju dengan buruh di negara-negara Kapitalis Pinggiran. Di negara-negara Kapitalis yang lebih maju, kebutuhan utamanya adalah kestabilan rejim yang didominasi Borjuasi.

Karena kelas-kelas Borjuasi yang kuat dan mapan itu harus menghadapi persaingan dalam ekonomi internasional, maka kebutuhan tersebut dipenuhi melalui menggandeng dan melibatkan *(associating and corporating)* anggota-anggota kelas buruh ke dalam proses politik.

Dengan memasukkan kepentingan anggota-anggota kelas bawah ke dalam sistem politik dan memberikan mereka keuntungan material, kaum kapitalis dapat menjamin berlangsungnya sisitem produksi kapitalistik secara efisien dan karena itu memungkinkan mereka bersaing dengan lebih baik dalam ekonomi internasional.

Proses ini pada gilirannya menyebabkan merosotnya politik pluralistik secara bertahap dan akhirnya menimbulkan apa yang disebut oleh Schmitter sebagai Korporatisme Masyarakat *(society-corporatism)*.

Catatan seorang sejarawan besar dunia, Fernand Braudel, memperlihatkan proses *Associating* dan *Corporating* buruh ke dalam sisitem politik-ekonomi inilah yang kemudian paling berjasa menyelamatkan kapitalisme dari kehancuran.

Sejarah juga mencatat, sekitar awal tahun 1930-an, kapitalisme berhutang budi pada John Maynard Keynes dengan teori Negara Kesejahteraan (*walfare state*). Gagasan Negara Kesejahteraan merupakan awal dari lahirnya konsep ekonomi campuran, dimana kapitalisme tidak perlu malu-malu lagi mengadopsi sistem sosialisme dengan melakukan perubahan pada hakekat kapitalisme, melalui peran negara sebagai instrumen kontrol sosial dan promotor kesejahtaraan umum.

Tidak aneh kemudian, Negara berperan sebagai "superman sibuk" mulai dari memberikan tunjangan pada pengangguran dan keluarga-keluarga miskin, tambahan pendapatan bagi buruh yang berupah rendah, sampai dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis.

Dengan kata lain, kapitalisme sudah mengalami metamorfosis dengan tingkat kelenturan yang tinggi terhadap kontradiksi-kotradiksi internalnya, sehingga

proses pemiskinan (*pauperization*) seperti diramalkan Marx tidak terjadi.

Sejalan dengan pandangan Braudel, ilmuwan sosial sekaliber T.H. Marshall dan Bendix berani memastikan bahwa kapitalisme diselamatkan oleh perluasan status kewarganegaraan, termasuk terbentuknya suatu politik berinspirasi komunitarianisme yang hendak melawan egoisme, keserakahan dan hedonisme kapitalisme. Marshall dan Bendix tidak bercanda melainkan memiliki sederetan panjang bukti pembenar, setidaknya ditunjukkan oleh kemenangan Tony Blair dari Partai Buruh di Inggris.

Perluasan status kewarganegaraan terlihat jelas dari tumbuhnya partisipasi demokratis kelas buruh serta perluasan hak-hak politik Buruh. Dengan demikian melalui Serikat Buruh dan Partai Buruh, buruh memiliki alat politik untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingannya secara fair dan demokratis.

Gejala perluasan hak kewarganegaraan sebenarnya dapat disebut juga sebagi proses demokratisasi, baik dalam pengertian politik maupun ekonomi. Sedangkan politik Komunitarianisme ditegakkan melalui nilai-nilai moral sosial seperti fairness, keterbukaan individual secara kebersamaan sosial.

APABILA PROSES PERLUASAN DAN INSTITUSIONALISASI HAK-HAK KEWARGANEGARAAN DI BIDANG POLITIK MAUPUN SOSIAL EKONOMI, YANG MEMBUKA AKSES HAK-HAK DASAR, TERMASUK PADA KEKUASAAN, BAIK PADA TINGKAT INDIVIDU MAUPUN MASYARAKAT, AKAN BERAKIBAT JAUH PADA PENGINTEGRASIAN GOLONGAN BORJUIS DAN KELAS BURUH DALAM SUATU MASYARAKAT SIPIL DAN LEMBAGA KEKUASAAN.

Menurut Bendix, jika hak-hak individu dan politik masyarakat luas dingkari oleh negara, maka ideologi kelas yang revolusioner akan berkembang. Sebaliknya apabila proses perluasan dan institusionalisasi hak-hak kewarganegaraan di bidang politik maupun sosial ekonomi, yang membuka akses hak-hak dasar, termasuk pada kekuasaan, baik pada tingkat individu maupun masyarakat, akan berakibat jauh pada pengintegrasian golongan borjuis dan kelas buruh dalam suatu masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan.

Proses penggabungan seperti itulah yang terjadi di negara-negara industri maju yang bersistem ekonomi kapitalistik, sehingga menyebabkan redupnya kesadaran kelas yang revolusioner.

Perluasan hak-hak kewarganegaran yang dimaksud diatas adalah: kemerdekaan berbicara dan persamaan di muka hukum yang tergolong dalam hak-hak sipil, hak yang tergolong dalam hak berpolitik antara lain; untuk memilih dalam pemilihan umum dan menghimpun diri dalam serikat buruh dan Partai Politik, serta hak ekonomi untuk memperoleh kesejahteraan dan jaminan sosial yang dilembagakan dalam lebaga-lembaga organisasi buruh, perundingan secara kolektif antara buruh dan majikan, sistem asuransi dan berbagi kebijaksanaan pemerintah yang melindungi golongan miskin dan meningkatkan kesejahteraan umum.

Dalam proses korporatisme masyarakat juga terjadi apa yang dimaksud sebagai pelembagaan konflik. Bagaimanapun, konflik potensial muncul dan meluas pada masyarakat industri karena terjadinya penggusuran terhadap nilai-nilai tradisional, ikatan-ikatan sosial pra industri dan peraturan normatif. Yang kesemuanya berjalan bersamaan dengan proses tumbuh serta kematangan nilai-nilai dan kerangka kelembagaan baru yang mengatur dan bersifat integratif.

***

Sebaiknya di Negara-negara Kapitalis Pinggiran seperti Indonesia, kelemahan kaum Borjuasi yang antara lain ditunjukkan dengan ketergantungannya pada faktor-faktor eksternal (kapitalis komprador), serta kurangnya sumber-sumber daya yang bisa digunakan oleh negara untuk menggerakkan roda-roda pembangunan ekonomi, berakibat jauh membatasi kemampuan negara untuk menjawab secara memadai tuntutan-tuntutan kelas bawah.

Di luar itu, dalam rangka pelaksanaan strategi peningkatan produktivitas ekonomi (sering dibahasakan dengan pembangunan), menimbulkan konsekuensi pengistimewaan peranan beberapa aktor ekonomi besar, seperti borjuasi domestik dan kaum oligopolistik global. Dengan kata lain, negara membutuhkan aliansi tangguh untuk mendukung strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan yakni dibangun dari kolaborasi militer, birokrasi, dan aktor-aktor ekonomi besar.

Tentu saja, pilihan kawan seiring ini sepenuhnya dapat dirasionalisasi bahwa aktor-aktor ekonomi besar tersebut merupakan mitra yang dapat diandalkan untuk proyek akumulasi kapital tersebut. Wajar saja kemudian, negara bersikap longgar dalam menangani aktor-aktor ekonomi besar dan oligopolis, yang nampak jelas dari berbagi kebijakan ekonominya.

Pilihan kawan seiring ini, tentu saja menimbulkan pengabaian pada sektor populer, agar mereka tidak banyak "mengeluh". Karena bagaimanapun, merekalah yang paling dirugikan oleh strategi pembangunan yang menganakemaskan kaum borjuasi, mulai dari tawaran upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif sampai pembebasan tanah. Oleh karena itu, negara memandang perlu untuk menciptakan ketentraman sosial *(social peace)* bukan dengan menggandeng memasukkan kelas bawah ke dalam sistem politik, melainkan sarana represif dan menutup kemungkinan artikulasi tuntutan kelas bawah secara bebas.

Proses ini menyebabkan munculnya "Korporatisme Negara" *(state-corporatism)*. Dengan bahasa yang lebih benderang, hadirnya bentuk pemerintahan Korporatisme Negara diskenariokan sebagai tanggapan *(respons)* terhadap kepentingan perkembangan Kapitalisme Pinggiran untuk menciptakan suatu aransemen politik yang mendukung pembangunan ekonomi.

Dengan meminjam pendapat Ricard Gunter tentang Korporatisme, sedikitnya dapat membuka "selubung ideologis di balik Korporatisme". Bagi Gunter, gagasan pokok korporatisme adalah suatu usaha eksplisit untuk

meredam konflik kelas atau kelompok kepentingan. Sehingga, korporatisme merupakan penolakan terhadap pandangan liberal yang berargumentasi bahwa perbedaan kelas dapat diselesaikan melalui konflik antara kelompok sosial dan wakil-wakil politik mereka.

Karena itu, Gunter mendefinisikan korporatisme sebagai, *pertama*, penciptaan organisasi Buruh secara vertikal yang menjadi wabah bagi Buruh maupun pimpinan perusahaan. *Kedua*, bekerjanya Korporatisme Negara dengan tujuan eksplisit untuk menekan konflik kelas dan menciptakan harmoni, solidaritas dan kerja sama dalam hubungan perburuhan. Pengertian penindasan terhadap konflik kelas ini sangat penting untuk menciptakan usaha memahami suatu rejim dalam menyalurkan perwakilan kepentingan dengan cara-cara yang dapat menghindari ketidakstabilan (atau dalam bahasa rejim Orde Baru: mengancam kestabilan nasional). Dan yang *ketiga*, terhadap kedua hal tersebut negara menerapkan pengaruh yang besar, langsung dan diakui secara hukum.

Dengan rajutan konseptual di atas, maka dapat dijelaskan mengapa pada bulan Maret 1974, pemerintah Orde Baru hanya mengakui organisasi FBSI (sekarang FSPSI) sebagai satu-satunya serikat buruh yang sah di Republik ini, serta menganjurkan perusahaan-perusahaan untuk mendirikan FSPSI di tempatnya masing-masing.

Organisasi yang dibuat tunggal merupakan sarana resmi dan monopolis bagi buruh untuk menyalurkan kepentingannya serta mengalami kerentanan yang amat sangat dalam menghadapi intervensi pemerintah, baik dalam artikulasi kepentingan maupun penentuan pimpinannya.

Korporatisme organisasi perburuhan dengan berdirinya wadah tunggal serikat pekerja ini berbanding terbalik dengan keadaan tahun 1950-an. Pada tahun 1950-an sampai sekitar tahun 1969, jumlah serikat buruh sama banyaknya dengan jumlah partai politik. Di luar itu, keanggotaannya sangat independen serta dikendalikan oleh partai politik yang ada.

Untuk meredam konflik perburuhan, Orde Baru juga mengkonstruksi sebuah wacana baru dalam bidang perburuhan yang disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam teori HIP ini adalah menjaga keselarasan, keseimbangan serta keharmonisan hubungan antara buruh dan majikan, dimana kedua belah pihak mempunyai tanggungjawab bagi kelangsungan produksi perusahaan. Keseimbangan hubungan perburuhan yang damai ini dijamin oleh forum permusyawaratan *tripartie* pada tingkat nasional dan regional, oleh lembaga *bipartie* di setiap industri, perjanjian perburuhan kolektif dan mekanis pengadilan khusus perburuhan.

UNTUK MEREDAM KONFLIK PERBURUHAN, ORDE BARU JUGA MENGKONSTRUKSI SEBUAH WACANA BARU DALAM BIDANG PERBURUHAN YANG DISEBUT DENGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP).

***

Di tengah bekerjanya strategi Korporatisme Negara, kita juga masih menjumpai lautan subyek-subyek kreatif yang sangat sadar akan haknya, baik tentang kebebasan berserikat maupun menuntut sekedar hal yang normatif. Walaupun seringkali stigma politik ditudingkan ke arah mereka mulai dari ditunggangi, komunis sampai dengan mengganggu ketertiban umum. Bukankah hal itu merupakan suatu pelajaran bahwa tidak selamanya korporatisme negara bisa meredam "resistensi" di kalangan kelas bawah, meskipun sudah ada Marsinah, Suciati dan seterusnya...❑


Swadhesi

Pembangunan Ekonomi dan Masalah Perburuhan di Bawah Orde Baru

(Sebuah Telaah Politik)

Muhammad AS Hikam


Dunia perburuhan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan dinamika yang cepat dan bernuansa politik yang diperkirakan akan bertambah penting artinya dalam konstelasi kehidupan politik di masa-masa yang akan datang. Salah satu indikasi dari cepatnya dinamika kaum buruh di Indonesia, tak pelak lagi, adalah maraknya aksi-aksi pemogokan buruh di wilayah-wilayah yang selama ini mengalami proses akselerasi industrialisasi tinggi, seperti di kawasan Jabotabek, Surabaya, Semarang, Medan, serta yang lainya. Aksi-aksi tersebut ada yang dimulai dan diorganisasikan oleh kaum buruh sendiri, ada pula yang merupakan kerjasama antara kaum buruh dan pihak luar seperti para aktivis mahasiswa, LSM atau campuran antara keduanya.

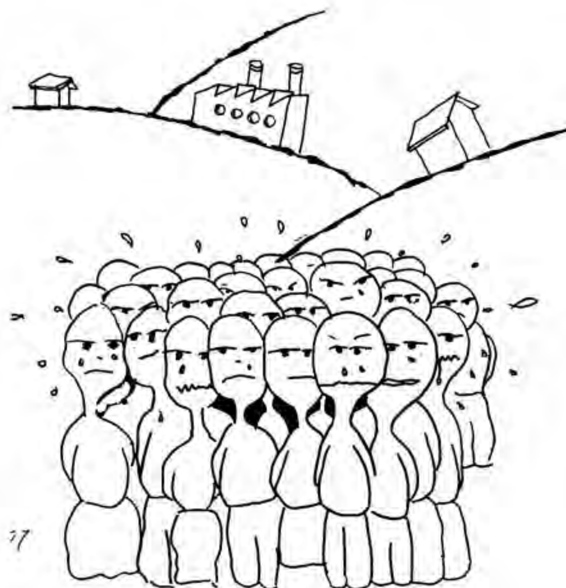
Aksi-aksi kaum buruh pada lima terakhir ini, tampaknya kian menuntut perhatian yang semakin serius baik dari pihak pemilik perusahaan maupun pemerintah karena implikasi-implikasi ekonomi dan politik yang dihasilkannya, khususnya apabila pendekatan dan penyelesaian yang diambil tidak memberikan peluang bagi kaum buruh untuk menikmati perbaikan kondisi. Kasus protes buruh pabrik arloji di Sidoarjo pada 1993 yang lebih dikenal dengan kasus Marsinah, umpamanya, adalah pelajaran yang baik. Kasus ini telah menghasilkan ekspose media massa yang sangat luas dan, pada gilirannya, menimbulkan perbincangan politik di dalam dan luar negeri mengenai masalah perburuhan di negeri ini. Demikian juga halnya dengan pemogokan buruh di Medan pada 1994 yang, konon, mula-mula diorganisir oleh para aktivis SBSI. Pemogokan yang kemudian berubah menjadi kebringasan massa -- dan sempat menelan korban tewas -- itu, telah menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi gerakan buruh di Indonesia dan sempat dinilai oleh pihak luar sebagai bukti bahwa iklim politik di negeri ini kurang mendukung bagi investasi. Hal ini tentu sangat merugikan pihak pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan kampanye menarik investor asing dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi yang sedang berjalan.



Meningkatnya dinamika kaum buruh di Indonesia, tak pelak lagi, telah mengundang berbagai respon yang berbeda-beda dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan perkaitan denganya. Dari sisi kepentingan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kelancaran bisnis maka respon terhadap maraknya aksi-aksi kaum buruh tersebut cenderung negatif, karena ia dianggap menjadi variabel pengganggu dan karena itu harus dilenyapkan atau ditundukkan dengan kontrol yang semakin ketat. Dari sisi kepentingan negara yang menginginkan terjaminnya stabilitas politik untuk menopang kelangsungan pembangunan, aktivisme kaum buruh juga labih banyak dilihat sebagi suatu hal yang berpotensi destabilisasi politik. Di pihak lain, dari kaca mata kaum pro-demokrasi, aktivisme kaum buruh akan ditanggapi secara positif dan akan terus didorong sebagai salah satu wahana yang bagi berlangsungnya proses demokratisasi, khususnya di kalangan lapis bawah, yang selama lebih dari seperempat abad selalu pasif di arena politik resmi. Bagi kalangan buruh sendiri, respon terhadap aktivisme rekan-rekan sekerja tentu saja umumnya positif, karena ia mewakili apa yang menjadi harapan dan keinginan mereka. Terlepas dari apakah aksi-aksi tersebut memiliki tujuan politik yang jelas dan berlingkup jauh atau hanya dimotivasi oleh tuntutan kepentingan yang sifatnya

segera *(immadiate interests)*, bagi kaum buruh yang dipentingkan adalah bahwa sebagian dari mereka telah mencoba menyuarakan aspirasi dan berani menanggung segala resiko yang akan terjadi.

Dengan adanya berbagai respon tersebut, maka diharapkan bahwa signifaksi politik kaum buruh akan bertambah tinggi. Harapan tersebut dilandasi oleh asumsi-asumsi sebagai berikut. Pertama, buruh akan tampil sebagai aktor atau agent yang aktif dalam arena politik politik yang mampu mempengaruhi struktur dan proses-proses di dalamnya. Kedua, sebagai aktor politik dengan segala kemampuan yang dimilikinya, kaum buruh tentu akhirnya akan memiliki kekuatan tawar-menawar *(bargaining power)* ketika berhadapan dengan aktor politik yang lain, termasuk elemen-elemen politik dalam masyarakat maupun negara. Ketiga, apabila kapasitas politik kaum buruh kemudian semakin dapat dikelola dengan baik dan terlembaga, bukan tidak mungkin ia akan dapat menjadi salah satu aktor penting di dalam proses yang demokratisasi di negeri ini. Kaum buruh akan menampilkan dirinya sebagai salah satu kelompok strategis yang harus diperhitungkan di dalam wacana dan kiprah politik di Indonesia sebagaimana di beberapa negara maju seperti Inggris, Belanda, Italia, Austaralia, dsb.



Untuk melihat apakah harapan di atas dapat terpenuhi, penting bagi kita untuk mengkaji lebih dalam dinamika politik kaum buruh serta arahnya di dalam perpolitikan Orde Baru . Salah satu caranya adalah dengan mengkaji politik kaum buruh Indonesia dalam konteks historis perubahan struktural yang terjadi pada tiga dasawarsa terakhir bersamaan dengan proses akselerasi modernisasi dan pembangunan ekonomi melalui industrialisasi. Untuk itu, salah pendekatan yang tepat adalah dengan menempatkan buruh sebagai aktor dalam proses politik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural dan kultural. Dengan cara demikian, akan bisa diidentifikasi kekuatan dan kelemahan kaum buruh di Indonesia dalam mempengaruhi proses politik dan berperan sebagai salah satu agen demokratisasi, serta halangan dan kesempatan yang akan dihadapinya secara struktural dan kultural, berikut berbagai kemungkinan strategi untuk mengatasinya.

Buruh dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Orde Baru

Munculnya Orde Baru ditandai dengan dicanangkan dan dilaksanakannya proses akselerasi modernisasi, terutama pembangunan ekonomi berjangka panjang dengan tujuan terbentuknya sebuah masyarakat modern yang berbasis industri sebagaimana yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu maju. Orde Baru dengan sengaja memilih model pembangunan kapitalis yang dianggap paling tepat oleh para arsiteknya serta menjadi model pembangunan paling dominan pada dasawarsa 60-an. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur paling penting di dalam model Rostowian tersebut, demikian juga akselerasi industrialisasi baik yang menggunakan strategi ISI *(Import Substitution Industrialization)* maupun kemudian EOI *(Export Oriented Industrilization)*. Dalam model seperti ini, tak pelak lagi, stabilitas politik yang berjangka panjang adalah *conditio sine quo non* dan karenanya, sebuah format politik yang dapat menjamin tercapainya hal itu harus diciptakan.

Baik model pembangunan yang berorientasi pertumbuhan melalui akselerasi industrialisasi maupun format politik yang berorientasi stabilitas melalui penguatan sektor negara tampaknya telah berhasil dirancang dan dilaksanakan oleh para arsitek Orde Baru. Hasilnya adalah sebuah proses pembangunan berkesinambungan dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bahkan, khusus di bidang industri pengolahan, Indonesia termasuk negara yang mengalami percepatan pertumbuhan yang paling tinggi di Asia, yaitu rata-rata 12,5% pertahun dari 1965-1991 (Hill, 1994, Szimai,,1993). Produk Industri pengolahan pun kemudian menjadi andalah ekspor Indonesia setelah menurunnya harga minyak dan, bahkan, sejak akhir dasawarsa delapan puluhan, telah mencapai 50% dari toral ekspor (Thee,1992).

Dalam pada itu, di bidang politik, Orde Baru berhasil mengukir prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu stabilitas internal yang berhasil dipertahankan selama lebih dari tiga dasawarsa. Salah satu instrumen yang paling efektif adalah menggunakan strategi korporatisasi, melalui mana kontrol terhadap kekuatan-kekuatan politik dan dan kelompok kepentingan yang ada di dalam masyarakat dilakukan. Dalam hal ini, penggunaan jaringan birokrasi dan pengorganisasian kelompok-kelompok kepentingan di bawah supervisi negara sangat berperan. Kekuatan-kekuatan masyarakat masyarakat seperti partai politik, organisasi buruh dan petani, ormas sosial dan keagamaan, disubordinasikan oleh pemerintah, sementara massa dilepaskan dari kiprah politik melalui kebijaksanaan massa mengambang agar tidak dapat dimoblisasi oleh kekuatan di luar negara yang bisa mengganggu stabilitas.

Dengan strategi korporatisasi lembaga-lembaga dan organisasi politik dan depolitisasi sektor populer itulah maka kaum buruh yang pernah menjadi salah satu aktor politik penting dapat didomestikasikan sehingga ia tidak

menjadi salah satu sumber ancaman terhadap proses akselerasi industrialisasi. Melalui penyatuan organisasi buruh dalam FBSI pada awal tujuh puluhan, yang kemudian diubah menjadi SPSI dan yang terakhir FSPSI, maka kepentingan kaum buruh hanya mungkin diartikulasikan melalui salauran resmi yang berada di bawah kontrol pemerintah. Fakta bahwa pengurus SPSI harus mendapatkan "restu" dari pejabat pmerintah menunjukkkan posisi subordinat organisasi buruh yang tidak berbeda dengan posisi parpol dan kebanyakan ormas di negeri ini. Lebih jauh, pembentukan SPSI pada level lokal atau perusahaan sangat diwarnai oleh campur tangan pemilik modal yang kadang-kadang sangat jauh sehingga bisa menggagalkan proses pembentukan organisasi buruh sendiri.

Oleh sebab itu, upaya kaum buruh untuk mengartikulasikan kepentingan mereka melaui lembaga resmi seperti SPSI senatiasa lebih banyak mengalami kegagalan ketimbang keberhasilan. Mungkin saja terdapat kasus-kasus dimana pengurus SPSI mencoba memainkan peran sebagai penyambung lidah para anggotanya. Tetapi hal seperti ini harus ditebus dengan ketidakpopuleran mereka baik di mata perusahaan maupun aparat pemerintah sehingga terjadi dilema: di satu pihak, mereka harus membela kepentingan anggota, tetapi di pihak lain mereka khawatir akan terancam kedudukannya. Untuk menghindari dilema tersebut acapkali pengurus SPSI memilih mengikuti kehendak perusahaan di dalam konflik perburuhan. Hal ini membawa resiko yang lain yaitu tidak populernya pengurus SPSI di mata anggotanya, sehingga efektivitas organisasi menjadi terganggu.Walhasil, organisasi buruh kemudian hanya merupakan sebuah formalitas belaka karena memang tidak memiliki daya dan juga tidak didukung oleh anggota-anggotanya.

Karena rendahnya kemandirian SPSI di segala level dan kurangnya kemampuan organisasi tersebut di dalam meperjuangkan kepentingan kaum buruh, maka pada akhirnya kaum buruh lebih cenderung untuk menyalurkan aspirasi politiknya diluar organisasi resmi. Salah satu outlet yang mungkin adalah partai politik, LSM-LSM yang bergerak dalam bidang advokasi buruh atau aktivis mahasisiwa. Kepada merekalah kemudian kaum buruh dapat mengadukan nasib dan mencoba menyarakan tuntutan mereka. Namun seperti diketahui, dalam hal ini kemampuan partai dan lembaga politik yang ada tidak jauh berbeda dengan SPSI, sehingga jika terjadi masalah perburuhan pihak parpol melalui perwakilannya di parlemen juga tidak banyak dapat mengatasi. Oleh karenanya, kecenderungan kaum buruh saat ini adalah menggunakan jalur advokasi LSM atau para aktivis mahasiswa. Resiko poltik yang akan ditanggung dengan jalan ini tentu saja lebih besar. Sebab, pemerintah akan menganggap kaum buruh yang beraliansi dengan LSM dan mahasiswa sebagai keluar dari ruang yang telah ditetapkan. Mereka akan dengan mudah dicap sebagai kelompok pembangkang dan bahkan tidak tertutup kemungkinan dikategorikan sebagai kelompok yang berada di luar sistem atau berperilaku subvesif.

Posisi politik dari kaum buruh di Indonesia yang pelik itu, semakin dipersulit lagi dengan dengan rentannya kohesivitas internal mereka karena sebagai faktor.. Kerentanan ini telah mengakibatkan sulitnya kaum buruh untuk membentuk kelas yang menjadi wahana artikulasi kepentingan politik mereka sebagaimana terjadi di masyarakat modern. Dalam paradigma Marxian, kaum buruh telah diidealkan sebagai aktor dan sekaligus pelopor bagi proses perubahan revolusioner di dalam masyarakat karena terjadi kontradiksi-kontradiksi dalam cara poduksi kapitalis. Dalam kenyataan di negara-negara kapitalis maju (*advance capitalist states*) prediksi Marx tak seluruhnya benar.Kaum buruh, misalnya, ternyata tidak memandang revolusi sebagai keharusan dan bahkan sampai saat ini kapitalisme masih dianggap sebagai sistem yang diakui dan diterima setelah terjadi berbagai perubahan di dalamnya.

> NAMUN PEMBENTUKAN KELAS (*CLASS FORMATION*) YANG TEJADI DI KALANGAN BURUH DI INDONESIA MASIH DIHADANG OLEH PERSOALAN INTERNAL, YAITU MASIH KUATNYA TARIKAN IDENTITAS PRIMORDIAL SEPERTI AGAMA DAN ETNISITAS YANG MENJADI KENDALA BAGI TUMBUHNYA SOLIDARITAS BARU SEBAGAI FAKTOR UTAMA DALAM PROSES TERSEBUT.

Kendati demikian, sulit dipungkiri bahwa kaum buruh berperan penting dalam perubahan sosial dalam masyarakat di negara-negara maju sehingga proses demokratisasi tak mungkin dilepaskan dari peran mereka. Dan hal tersebut mungkin terjadi karena kaum buruh berhasil tumbuh dan berkembang sebagai kelas sosial yang solid sehingga ikut menentukan di dalam pengambilan keputusan penting yang menjadi landasan kehidupan demokratis. T.H. Marshall, upamanya, mengatakan bahwa kelas buruh di Inggris sangat berperan penting dalam proses sejarah kewarganegaraan (citizenship) di negeri itu. Dalam bukunya- *Citizenship and Social Class* (1950), ia menggarisbawahi perjuangan kaum buruh untuk memperoleh hak-hak politik sebagai dasar dari kewarganegaraan. Jauh sebelum itu, kaum buruh Inggris juga menjadi salah satu aktor terpenting dalam meretas jalan bagi munculnya gagasan-gagasan egalitarianisme dan arti penindasan. E.P.Thomson, dalam buku *The Making of the English Working Class in the Nineteeth Century* (1966) dengan jelas menuturkan bagaimana munculnya kesadaran tersebut dengan pertumbuhan kaum buruh sebagai suatu kelas sosial modern. Kasus-kasus yang sama bisa ditemukan di AS, Jerman,Belanda, Italia, dsb.

Di negeri kita, pertumbuhan kaum buruh sebagai sebuah kelas mengalami berbagai permasalahan sehingga sampai saat ini agak sulit untuk berbicara mengenai kaum buruh sebagai kelas sebagaimana yang terjadi di Barat. Harus

diakui bahwa elemen-elemen dasar bagi pertumbuhan itu telah ada, misalnya proses urbanisasi dan industrialisasi yang pesat, jumlah kaum buruh yang meningkat, dan tingkat pendidikan yang cenderung membaik. Pada saat yang sama tekanan-tekanan struktural berupa praktik-praktik eksploitasi yang terjadi di tempat kerja telah sedemikian hebatnya sehingga membuka peluang bagi munculnya aksi-aksi potes yang dapat menyatukan kaum buruh.

Namun pembentukan kelas (*class formation*) yang tejadi di kalangan buruh di Indonesia masih dihadang oleh persoalan internal, yaitu masih kuatnya tarikan identitas primordial seperti agama dan etnisitas yang menjadi kendala bagi tumbuhnya solidaritas baru sebagai faktor utama dalam proses tersebut. Kendala tersebut dapat dengan mudah memecahkan integritas kelas dan memudahkan masuknya kekuatan-kekuatan eksternal yang hendak memanipulasi atau menggagalkan tebentuknya kelas buruh yang solid. Tambahan pula, tuntutan pemenuhan kebutuhan subsisten ternyata masih merupakan tujuan utama bagi mayoritas kaum buruh di Indonesia. Sehingga upaya untuk melakukan penyadaran politik terganjal oleh kepentingan kepentingan yang lebih mendesak itu.

Selain itu, pembentukan kelas juga dihadang oleh faktor eksternal dalam bentuk format politik Orde Baru. Salah satu implikasi dari format politik yang berlaku adalah sempitnya ruang gerak yang memungkinkan kaum buruh untuk mengartikulasikan kepentingan secara independen dalam politik resmi. Selain itu, jaringan-jaringan dalam masyarakat yang dapat dipergunakan oleh kaum buruh untuk mengejawantahkan potensi politiknya juga masih sangat lemah berhadapan dengan dominasi korporatisme negara. Sebagai akibat kedua hal itu, kaum buruh dengan mudah dipinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang sejatinya menyangkut kepentingan mereka. Hal ini pada gilirannya berdampak negatif pula terhadap kehadirannya di dalam ruang politik resmi selama hampir tiga dasawarsa ini, yaitu bahwa kaum buruh seolah-olah tidak dianggap sebagai suatu keompok kepentingan yang mandiri dan memiliki kekuatan tawar-menawar vis-a-vis negara.

> PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERBURUHAN MAKIN MENEMPATKAN KAUM BURUH PADA POSISI SEBAGAI OBYEK KETIMBANG SUBYEK KERJA, DAN INI JELAS BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP HUBUNGAN INDUSTRIAL PANCASILA (HIP) YANG MENJADI LANDASAN NORMATIF.

Kebangkitan Kaum Buruh dan Demokratisasi

Seperti dikemukakan di depan, belakangan ini tampaknya ada upaya-upaya pemberdayaan politik yang dilakukan baik oleh kaum buruh sendiri maupun dengan bantuan pihak luar. Yang pertama dapat dilihat dari maraknya aksi-aksi kaum buruh di wilayah-wilayah pusat industri seperti Jabotabek, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dsb. Umumnya, aksi-aksi buruh yang terjadi memang masih didominasi oleh permasalahan upah (40%) disusul kemudian oleh persoalan pemecatan sepihak (35,84%), tuntutan terhadap perbaikan kondisi pekerjaan (12,14%), kesepakatan kerja bersama (6,36%), dan pembentukan serikat buruh (5,20%) (Index,1996:3).

Kalau diperhatikan, data diatas menunjukkan bahwa kendatipun keadilan ekonomi memang masih merupakan permasalahan utama yang menjadi keprihatinan kaum buruh, tetapi tuntutan terhadap perluasan hak-hak politik juga mulai menjadi perhatian kaum buruh. tetapi tuntutan terhadap perluasan hak-hak politik juga mulai menjadi perhatian kaum buruh. Apalagi kalau kita maklum bahwa tuntutan terhadap keadilan ekonomi seperti tampak dalam masalah penerapan UMR sebenarnya juga berbobot politik. Sebab, ia mengisyaratkan adanya tuntutan pemenuhan hak-hak dasar yang dimiliki oleh buruh dalam hubungan kerja dengan para majikan atau pemilik perusahaan. Aksi-aksi kaum buruh yang marak semenjak akhir dasawarsa delapan puluhan, dengan demikian, dapat dianggap sebagai sebuah kebangkitan kaum buruh di arena politik, kendatipun masih di luar politik resmi.

Selain aksi-aksi protes, kaum buruh juga melakukan kerja-kerja pemberdayaan bersama dengan kelompok non buruh, khususnya LSM dan sebagian aktivis mahasiswa. Mereka mencoba, umpamanya, membentuk serikat-serikat buruh alternatif seperti SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan terlibat di dalam organisasi semacam PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Kendati percobaan melalui organisasi alternatif tersebut belum membuahkan hasil karena langsung mendapat reaksi keras dari pemerintah, hal tersebut tetap merupakan petunjuk bahwa proses pemberdayaan politik melalui kerja sama dengan kelompok luar telah dirintis oleh kaum buruh. Salah satu dampak positif dari upaya demikian adalah kemampuan kaum buruh untuk memperluas ruang gerak mereka yang selama ini hanya berada di dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh format poltik yang ada.

Meskipun kedua model pemberdayaan tersebut harus diacungi jempol, namun sebuah refleksi kritis sangat dibutuhkan agar kita tahu sampai sejauh mana mereka dapat mendorong kaum buruh untuk kembali tampil sebagai aktor politik yang akan menyumbang bagi semakin hidupnya wacana dan kiprah demokratisasi masa depan. Kita secara kritis perlu mempertanyakan apakah maraknya aksi-aksi kaum buruh ini hanya merupakan suatu gerak spontan dan terbatas pada tuntutan kepentingan sesaat dan sempit, ataukah ia mampu berkembang lebih jauh sehingga dapat menciptakan *linkage* dengan gerakan pro-demokrasi yang lain. Demikian juga perlu dicermati bagaimana reaksi negara berhadapan aktivisme kaum buruh ini khususnya dalam konteks struktur politik-ekonomi yang berlaku. Sampai pada batas mana negara akan memberikan toleransi terhadap kativisme kaum buruh dan mengakomodasikan tuntutan mereka sesuai dengan

dinamika yang terjadi di dalamnya. Juga apa saja pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil oleh kaum buruh dalam memperbesar peluang di masa kini dan masa datang, yang tentu saja diharapkan akan dapat pula mendukung poses demokratisasi dalam jangka panjang.

Menurut hemat saya, aksi-aksi kaum buruh sampai saat ini lahir karena keberpihakan perburuhan yang diterapkan oleh pemerintah selama ini semakin dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan. Pelaksanaan kebijakan perburuhan makin menempatkan kaum buruh pada posisi sebagai obyek ketimbang subyek kerja, dan ini jelas bertentangan dengan prinsip Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang menjadi landasan normatif. Model pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan di satu pihak memberikan peluang tehadap pemilik modal untuk melakukan perluasan dan pendalam industri, namun di pihak lain membatasi kemampuan tawar-menawar kaum buruh. Hal ini ditopang pula oleh adanya aturan-aturan yang membuka peluang bagi dipergunakannya tindakan represif untuk mengatasi masalah sengketa perburuhan. Sementara itu, bagi mekanisme perlindungan berhadap buruh masih belum dapat dilaksanakan secara konsisten. Sebaliknya, bagi mereka ditekankan pentingnya kepatuhan, disiplin, dan pengawasan agar dapat mendukung proses produksi.

SECARA POLITIS, NEGARA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI KEMACETAN INI. SEBAB IA DAPAT MENEMPATKAN DIRI SEBAGAI PIHAK PENENTU DALAM PROSES TAWAR-MENAWAR ANTARA PENGUSAHA DAN KAUM BURUH.

Hanya saja, reaksi-reaksi kaum buruh terhadap ketidakadilan yang mereka alami pada umumnya masih lebih merupakan spontanitas perlawanan terhadap rezim produksi di lingkungan kerja, dan belum sampai kepada suatu gerakan yang terorganisasi secara sistematis dan mempunyai stamina yang tinggi. Kendati dalam beberapa kasus seperti PT. Gajah Tunggal, Marsinah, pemogokan di Medan, PT. Great River, dsb, spontanitas buruh terbukti mampu membuat tekanan-tekanan terhadap pengusaha untuk melakukan negosiasi dan perbaikan kondisi kerja, namun hasilnya sangat terbatas dan malahan tidak seimbang dengan pergorbanan yang harus mereka bayar. Secara keseluruhan, perlawanan buruh masih belum berhasil memunculkan suatu model gerakan yang kemudian dapat ditiru atau dikembangkan oleh kaum buruh di tempat lain. Akibatnya, label "gerakan buruh" tampaknya kurang pas untuk perlawanan itu, jika gerakan diartikan sebagai suatu kegiatan yang terpola, sistematis, dan terorganisasi dengan tujuan yang jelas.

Karena itulah respon-respon terhadap konflik perburuhan yang diberikan baik oleh pengusaha maupun pemerintah pada umumnya hanya bersifat parsial dan tidak substansial. Bahkan kebijakan menaikkan UMR secara teratur masih belum bisa dianggap sebagai pemenuhan tuntutan yang substansial, karena beberapa sebab. Yang terpenting misalnya, adalah tiadanya *law enforcement* yang mendukung, serta perkecualian-perkecualian dan *loop-holes* yang dibuat sehingga sulit untuk dilaksanakan. Dengan cara ini, kaum buruh dicoba diyakinkan bahwa kebijakan yang memihak kaum buruh telah dibuat dan kalaupun pada pelaksanaan di lapangan mengalami distorsi, itu sama sekali bukan tanggung jawab si pembuat. Pada saat yang sama, para pengusaha umumnya mengeluh tentang inkonsistensi dalam kebijakan industrial. Misalnya masih tetap tingginya beban di luar ongkos produksi yang harus mereka tanggung sehingga memaksa mereka untuk menunda pelaksanaan UMR kepada buruh-buruh mereka.

Secara politis, negara mengambil keuntungan dari kemacetan ini. Sebab ia dapat menempatkan diri sebagai pihak penentu dalam proses tawar-menawar antara pengusaha dan kaum buruh. Pihak pengusaha tak bisa lain kecuali mengandalkan dukungan negara agar proses produksi tak terhambat oleh aksi-aksi buruh, sementara kaum buruh juga tak mempunyai kemampuan menekan pengusaha. Mereka harus memilih: atau melakukan negosiasi yang diawasi dan diatur oleh negara supaya tuntutan mereka dikabulkan, atau mengambil resiko kehilangan pekerjaan atau malah resiko stigma politik. Jika pilihan pertama yang dipilih, maka pihak buruh akan berada dalam posisi lemah karena negara akan cenderung memberikan prioritas kepada pengusaha yang sangat diperlukan dalam proses akselerasi pembangunan. Walaupun umpamanya, SPSI ikut dalam proses negosiasi tersebut, sulit diharapkan bahwa ia akan mampu memperjuangkan kepentingan buruh secara maksimum, karena posisinya yang subordinat *vis a vis* pengusaha dan penguasa.

Itulah sebabnya dalam banyak kasus, buruh-buruh yang mengalami kekalahan ketika masalah mereka dibawa ke meja perundingan. Biasanya, mereka dianggap sebagai penggerak aksi atau yang vokal akan diisolir dan digantikan oleh wakil-wakil yang telah mendapat persetujuan dari wakil pengusaha dan wakil pemerintah. Akibatnya, perundingan tersebut dengan mudah bisa diatur sehingga cepat terselesaikan dan hasilnya tidak bisa tidak harus diterima oleh para buruh karena telah melalui perwakilan yang mereka sepakati sendiri.

Idealnya, posisi kaum buruh yang lemah ini dapat diperkuat oleh dukungan dari luar seperti partai politik, LSM atau serikat buruh independen. Namun kita sama-sama tahu bahwa partai-partai politik tidak memiliki cukup kekuatan tawar-menawar politik berhadapan dengan pemerintah dan sumber daya untuk melakukan dukungan di lembaga-lembaga resmi seperti DPR/DPRD.

Sedangkan dalam hal LSM-LSM yang bergerak dalam bidang perburuhan juga sangat terbatas kemampuannya untuk dapat terus-menerus melakukan advokasi kasus-kasus perburuhan. Organisasi-organisasi seperti SBSI dan PPBI yang ingin melakukan pemberdayaan langsung kepada kaum buruh lewat organisasi alternatif pada akhirnya gagal karena harus berhadapan dengan kekuatan represi negara --sebab keberadaannya dikategorikan sebagai organisasi yang di luar ruang politik resmi.

Prospek

Dari analisis singkat di atas, tampaknya masih terlalu dini untuk berharap banyak terhadap kemampuan kaum buruh sebagai entitas yang mandiri dan ikut menentukan proses-proses politik di dalam lancah politik resmi. Bahkan untuk berbicara mengenai "gerakan kaum buruh" yang memiliki kemampuan organisasi dan kemandirian yang kuat serta memiliki daya transformatif dalam konteks politik-ekonomi kita saat ini pun, saya khawatir, masih sulit. Hal ini disebabkan masih adanya permasalahan-permasalahan internal yang belum dapat dipecahkan oleh kaum buruh sehingga mereka dapat membentuk sebuah kelas sosial yang memiliki kekukatan tawar-menawar politis sebagaimana yang dimiliki oleh kaum buruh di negara-negara maju. Di samping itu, kendala struktural dari negara dan format politik yang ada belum dapat diterobos dengan kekuatan kaum buruh sendiri maupun bantuan dari kelompok yang bersimpati kepada mereka.

Oleh karenanya, perlu dicari alternatif lain dalam usaha memberdayakan kaum buruh di Indonesia yaitu dengan memperkukuh dan memperluas lebih dahulu *linkage* dan *networking* dengan berbagai kekuatan strategis lainnya sehingga akan bisa memperkuat landasannya. Untuk maksud itu, pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi kaum buruh di Indonesia, dalam konteks struktur politik ekonomi Indonesia sangat diperlukan. Sebab dari sana strategi-strategi pemberdayaan yang tepat bisa dirancang sesuai keadaan sehingga tidak terjebak pada idealisasi-idealisasi yang menyesatkan dan malah menyengsarakan kaum buruh sendiri.

Selain itu, penciptaan *platform* umum yang bisa dipergunakan untuk pemberdayaan kaum buruh juga merupakan pekerjaan rumah yang mendesak. Pada dataran ekonomi, suatu peninjauan ulang atas model pembangunan yang selama ini dipergunakan, yang ternyata telah bertanggung jawab bagi eksploitasi kaum buruh, mutlak perlu diperjuangkan baik oleh kalangan akademis, intelektual dan aktifis. Kendati sistem ekonomi pasar sebagai kenyatan tampaknya tak terelakkan, *toh* perubahan-perubahan masih dapat dilakukan di dalam kinerjanya sehingga bisa dihasilkan suatu perangkat kebijakan pembangunan yang lebih manusiawi dan tidak eksploitatif.

Pada dataran politik, perlu diupayakan perubahan format politik yang dapat memberikan ruang kepada anggota masyarakat, baik sebagai individu maupun kolektifitas sebagai aktor-aktor politik yang mandiri yang dapat mengimbangi posisi dominan dari negara. Ini berarti perlunya suatu *civil society* yang kuat di Indonesia. Dengan terbangunnya *civil society* yang kuat maka dimungkinkan tumbuhnya kaum buruh yang mempunyai kemandirian dan kekuatan tawar-menawar vis a vis penguasa dan pengusaha. Proses pemberdayaan kaum buruh dan lapisan bawah lainnya, akan dapat dilakukan secara lebih bermakna manakala diletakkan dalam konteks pembentukan *civil siciety* di negeri ini.

Meski masih belum kuat, aktivisme kaum buruh akhir-akhir ini setidaknya dapat mendorong kaum pro-demokrasi untuk segera menciptakan *linkage* bagi perluasan pengembangan *civil society* di masa depan. Momentum ini dapat dipakai sebagai wahana bagi proses penyadaran dikalangan kaum buruh akan pentingnya kerjasama antara kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat. dengan kerjasama itu, pemahaman internal kaum buruh dapat di atasi kendatipun mungkin tidak seluruhnya. Sebab pada akhirnya, hanya kaum buruh sendirilah yang akan menentukan nasibnya apakah mereka akan menjadi kekuatan riil dalam perpolitikan mereka ataukah tetap menjadi obyek dan merekayasa politik belaka seperti yang mereka alami sampai saat ini ❐

Tulisan ini pernah dipresentasikan pada sebuah seminar di Yogya

Info sekilas UGM

Terbaik ke-37 Asia

Majalah *Asia Week* beberapa saat yang lalu melakukan penilaian terhadap lembaga pendidikan tinggi di Asia. Universitas Gadjah Mada yang terletak di kampung Bulaksumur yang terkenal dengan kampus *ndeso* menurut majalah itu menduduki peringkat ke-37. Dalam siaran persnya tanggal 20 Mei 1997 *Asia Week* memberi point untuk UGM 46,94. Kriteria yang diajukan meliputi reputasi akademis, sumber daya fakultas termasuk banyaknya tenaga edukatif bergelar S-3(doktor), tingkat gaji dan kesejahteraan para pengajarnya, ketatnya persaingan penerimaan mahasiswa baru dan sumber-sumber keuangan atau pengeluaran universitas untuk kepentingan mahasiswanya.

Sementara itu Universitas Indonesia yang konon mengklaim pembawa nama bangsa, menduduki urutan 32 dengan point 49,45. Sedangkan ITB yang selama ini dikenal hanya memiliki fakultas atau jurusan eksakta (teknik) menduduki rangking 19 dengan point 59,46. Satu tingkat di bawah UGM adalah Unversitas Airlangga Surabaya yaitu urutan 38, sedang Universitas Diponegoro Semarang urutan ke-42□

***(sumber:** Asia Week online)*

Universitas Terbaik di Asia versi *Asiaweek*

SELECTED INDICATORS

UNIVERSITY	Overall Score	Academic Reputation 30%	Faculty Resources 25%	Student Selectivity 20%	Financial Resources 15%	Value for Money 10%	Students per teacher	Teachers with postgraduate degree(%)	Average annual teacher pay and benefits, PPP	Average annual tuition and fees, PPP
1. University of Tokyo	87.52	30.00	14.08	19.89	15.00	8.55	7	88	85,620	3,573
2. Kyoto University	79.86	25.53	15.55	19.92	11.23	7.63	5	88	93,598	3,324
3. University of Hong Kong	77.38	23.97	17.51	19.77	9.51	6.62	10	100	154,520	4,014
4. National University of Singapore	72.01	26.74	16.81	18.96	4.60	4.89	11	93	75,070	3,209
5. Chinese University of Hong Kong	70.23	20.55	17.49	18.39	7.60	6.22	12	100	211,133	4,301
6. University of New South Wales (Australia)	69.78	23.16	14.61	17.88	8.08	6.06	15	81	49,227	2,550
7. Peking University	67.66	23.63	19.39	19.76	1.42	3.45	5	100	4,180	4,291
8. National Taiwan University	67.32	22.07	12.22	19.82	6.75	6.47	8	87	46,707	1,607
9. University of Melbourne	65.44	26.42	12.60	17.68	3.99	4.76	12	81	49,227	2,161
10. Hong Kong University of Science and Technolog	64.76	20.89	13.89	18.35	5.66	5.97	10	100	40,071	4,095
11. University of Malaya	64.25	19.79	15.60	18.76	4.98	5.12	9	100	99,823	120
12. Keio University (Japan)	63.41	22.95	14.46	15.90	6.20	3.91	30	88	277,784	6,805
13. Australian National University	62.97	25.00	11.92	17.29	3.26	5.49	16	90	72,635	1,611
14. University of Sydney	62.04	23.48	13.98	15.75	3.47	5.35	10	88	54,566	823
15. Nanyang Technological University (Singapore)	61.40	18.92	13.22	19.13	3.76	6.37	12	98	83,267	275
16. Seoul National University	61.35	23.16	13.24	19.39	0.84	4.71	17	99	N.A.	789
17. Monash University (Australia)	60.83	22.42	12.10	16.62	4.88	4.81	19	100	63,105	2,032
18. Yonsei University (Korea)	59.69	18.75	13.33	18.84	4.68	4.10	20	95	62,556	4,382
19. Institut Teknologi Bandung (Indonesia)	59.46	17.66	8.42	19.59	10.81	2.98	8	52	10,318	1,318
20. National University of Malaysia	59.45	17.30	11.98	19.18	4.68	6.31	7	73	65,873	893
21. University of Queensland (Australia)	59.23	21.85	12.68	17.16	2.07	5.46	13	94	62,148	340
22. University of Auckland (New Zealand)	59.07	20.17	11.43	19.56	3.13	4.78	14	88	45,467	1,739
23. National Tsing Hua University (Taiwan)	58.62	19.74	13.59	19.29	2.27	3.73	8	98	46,921	6,143
24. University of Adelaide (Australia).	56.44	21.48	12.98	12.22	3.96	5.80	13	82	59,574	1,392
25. University of the Philippines	55.43	19.11	10.69	17.44	3.56	4.64	8	60	4,740	1,671
26. Waseda University (Japan)	54.82	21.53	10.52	15.86	4.26	2.65	41	88	104,900	4,950
27. Victoria University of Wellington (New Zealand)	52.37	16.12	11.11	18.76	1.82	4.57	16	93	44,130	1,744
28. Fudan University (China)	51.98	20.21	4.62	19.93	2.03	5.20	7	73	5,371	999
29. University of Delhi	50.55	18.65	16.46	15.45	N.A	N.A	15	100	N.A	N.A.
30. Universidade de Macau	50.07	12.94	14.99	16.50	1.32	4.33	11	69	45,901	2,222
31. Korea University	49.46	18.39	14.66	16.41	N.A	N.A.	24	98	N.A.	N.A.
32. Universitas Indonesia	49.45	17.66	7.94	17.96	1.10	4.79	7	63	17,317	818
33. Zhongsan [Sun Yatsen] University (China)	49.20	14.91	10.36	18.32	0.63	4.99	5	56	6,282	509
34. University of Colombo	49.15	13.70	9.00	19.82	1.11	5.52	16	64	24,992	15
35. Doshisha University (Japan)	47.94	14.06	10.59	16.24	1.80	5.26	35	94	91,987	444
36. Thammasat University (Thailand)	47.63	15.60	7.98	19.12	0.26	4.66	15	N.A.	41,639	753
37. Universitas Gadjah Mada (Indonesia)	46.94	16.74	6.40	18.80	0.77	4.23	12	63	16,179	1,533
38. Universitas Airlangga (Indonesia)	45.96	12.49	8.33	19.27	0.99	4.87	10	66	18,462	765
39. Ateneo de Manila University (Philippines)	45.87	14.06	11.04	16.51	0.81	3.45	18	69	29,344	3,814
40. Aoyama University (Japan)	44.87	14.46	10.07	15.61	1.23	3.49	45	88	76,088	3,606
41. De La Salle University (Philippines)	44.72	14.46	9.32	16.31	0.90	3.73	26	74	56,462	3,024
42. Universitas Diponegoro (Indonesia)	43.77	12.09	8.18	17.95	0.70	4.85	13	37	10,318	591
43. University of Santo Tomas (Philippines)	38.02	15.14	4.70	13.33	0.55	4.29	33	45	18,965	1,256
44. Chulalongkorn University (Thailand)	21.63	21.63	-	-	-	-	-	84	-	-
45. Qinghua University (China)	21.31	21.31	-	-	-	-	-	-	-	-
46. University of Western Australia	20.55	20.55	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Jawaharlal Nehru University (India)	19.03	19.03	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Nanjing University (China)	18.59	18.59	-	-	-	-	-	-	-	-
49. Science University of Malaysia	18.49	18.49	-	-	-	-	-	-	-	-
50. University of Bombay	17.55	17.55	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Asiaweek on line

Kisah 1,2 Juta di BEM UGM

Ketika semua sistem yang mengontrol tidak berlaku maka yang terjadi adalah salah paham, *missunderstanding* dan saling tuding.



Gedung BEM UGM
Dari sini semua berawal

Dimulai pada tanggal 23 November 1996 lalu, salah satu biro BEM yaitu Biro Radio Kampus melakukan pencairan dana di rektorat sebesar 1,2 juta dengan menggunakan cap dan kop BEM UGM, tanpa sepengetahuan Ketua dan Bendahara Umum BEM. Pada tanggal 24 November 1996 kemudian diadakan pertemuan dengan PR III UGM untuk mengkonfirmasikan masalah keberadaan dana Radio Kampus.

Pada tanggal 25 November, diketahui adanya tanda tangan atas nama Anang Kurniawan (Ketua I

Anang Kurniawan:

"Penyimpangan prosedur itu biasa!"

Anda diduga melakukan melakukan kesalahan prosedur dari sebuah mekanisme kerja BEM, anda merasa tidak?

Kalau keyakinan saya tidak ada peyimpangan, karena semakin Ketua BEM (Heni) mengatakan ada penyimpangan atau sebuah kesalahan saya justru makin heran betapa dia menjadi seorang pimpinan tidak obyektif dan terkesan tendensius. Ada apa? Begini seperti yang saya pahami dari mekanisme yang dulu kita susun, dalam kapasitas saya sebagai Ketua I dalam kondisi tertentu bisa mengambil kebijakan lalu dipertanggung jawabkan pada Ketua BEM. Artinya sekalipun belum diketahui sebelum, itu nggak masalah menandatangani atas nama.

Tapi khan ketua BEM punya alibi mengenai keterlibatan anda?

Ah itulah saya lihat dia sangat tendensius di situ. Anda bisa memaknai sendirilah, yang jelas secara politis sampai 'gegeran' kemarin ia tetap mengungkapkan alibi yang tidak tahu kegiatan itu.

Kenyataanya?

Saya masih punya argumen yang sampai saat ini belum saya ungkapkan .Begini sangat aneh ketika saudara ketua umum belum tahu kegiatan ini. *Biro Radio Kampus* khan melakukan uji coba siaran, salah satu kegiatannya melakukan dialog yang waktu itu dihadiri Purek III, ketua senat (Nasrullah), ketua BEM (Heni), kadep pendidikan dan penelitian (Rita), dan saya ingat moderatornya Rizal. Jadi lucu jika saat ini dia tidak tahu sedang dia terlibat kegiatan itu. Kan aneh kesannya Heni ingin melempar tanggung jawab dan cuci tangan dari masalah ini.

Terus dana itu sendiri sekarang di mana?

(Terdiam) Sebenarnya anda tidak tepat bertanya pada saya, seharusnya anda bertanya pada pihak yang secara struktural terkait

BEM-red) dan pemalsuan terhadap tanda tangan Ketua Departemen Pendidikan dan Penelitian BEM Rita Novianti. Maka pada saat itu juga diadakan klarifikasi dengan Rektorat.

Pada saat klarifikasi, Rektor menyatakan telah terjadi pencairan dana untuk Biro Radio Kampus, yang berasal dari dana taktis rektorat. Menurut PR III Bambang Kartika, dana taktis adalah dana yang sewaktu-waktu dapat dikeluarkan oleh rektorat dengan memperhatikan aspek urgensi suatu kegiatan. Mengenai masalah penggunaan cap dan kop BEM, Bambang Kartika menyatakan itu hal biasa, meski pertanggungjawabannya langsung pada rektorat. Sehingga dana 1,2 juta tersebut adalah dana yang diperuntukkan bagi radio kampus dari rektor, dan bukan untuk BEM.

Menarik untuk dicermati bahwa Anang sebagai ketua Biro Radio Kampus, dianggap telah melakukan korupsi terhadap dana tersebut dan melakukan pemalsuan tanda tangan. Bahkan pada kampanye Pemilu Raya UGM tanggal 22 April di Fakultas Ekonomi, Anang sebagai salah satu kandidat telah diprotes mahasiswa atas kasus dana 1,2 juta tersebut.

Mengenai adanya anggapan tersebut, Pak Bambang menyatakan bahwa hal itu adalah urusan intern BEM, karena pihak rektorat menganggap bahwa pencairan dana tersebut tidak ada masalah.

Heni Yulianto sebagai ketua BEM, menyatakan bahwa setelah berbicara dengan pihak rektorat, yang terjadi adalah "salah prosedur". Apakah ada usaha untuk menutup-nutupi kasus ini, PR III ketika dikonfirmasi reporter *Balairung* mengatakan tidak ada yang ditutupi, yang terjadi adalah hanya "kesalahan prosedur biasa".

Secara struktural di BEM sendiri ada kelemahan sehingga fungsi kontrol dari mahasiswa tidak dapat menyentuh langsung pada senat, meski sudah ada perwakilan

Permasalahan kemudian terus berkembang, tidak hanya masalah kesalahan prosedur, tetapi adanya pemalsuan tanda tangan atas Ketua BEM dan Ketua Departemen Pendidikan dan Penelitian BEM.

Heni sendiri ketika ditanya mengenai hal tersebut menjawab, "Tanda tangan saya tidak dipalsu melainkan di A.N sedangkan tanda tangan Rita, memang bukan tanda tangan dia tapi kita tidak mau menuduh secara sembarangan."

Amir Amirulloh Ketua Biro radio Kampus meyatakan, "Pemalsuan itu bukan saya atau Anang yang melakukan, karena dia bersama saya seharian." Lebih lanjut Amir memberi kemungkinan bahwa yang melakukan orang-orang dalam Biro. "Ketika saya tanyakan pada teman - teman, mereka tertawa. *Lho*, jadi masalah *tho*," katanya.

Agam Fathurroman anggota Senat Mahasiswa UGM, ketika dihubungi *Balairung* tentang kasus ini menyatakan bahwa ia sudah mencium kasus itu sejak lama, yaitu sekitar bulan November dan Desember. "Mengapa ini menjadi berlarut-larut, mungkin karena kesibukan masing-masing pihak yang dalam hal ini ketua Senat, ketua BEM, Kabiro dan Kadep.

Lho anda khan yang tanda tangan proposal itu? Bahkan ada pemalsuan tanda tangan segala?

E....Saya nggak mau mengulang-ulang masalah kadep. Itu dianggap tidak ada pemalsuan. Rita sendiri sudah mengetahui dan dia nggak keberatan. Jadi secara subtansi tidak terjadi pemalsuan cuma secara fisik saja gitu.

Oke .. kalau menurut anda itu hanya masalah politis ketika akan ada pemilu raya. Apa mungkin dulu juga ada kesalahan serupa tidak diungkap?

Mengenai masalah itu, saya pernah mendengar komentar salah satu aktifis fakultas: 'ah, sebenarnya masalah penyimpangan prosedur untuk melancarkan kegiatan itu biasa, kita khan perlu praktis'. Saya berani katakan hal seperti itu di BEM banyak. yang penting kita melihat niatnya. Lha apakah semua tanda tangan ketua BEM itu asli?! Sebuah tanda tanya dan tanda seru saya taruh dibelakangnya.

Sebenarnya ada kaitannya tidak mundurnya anda dengan kasus ini?

Wah nggak ada itu kalau ada yang mengaitkan dia itu ada maksud jahat, dalam rangka Pemilu raya ini. Jadi tolong anda membacanya dari kaca mata politik ya. Sangat mudah dipahami, dalam konteks pemilu ini kan ada pihak-pihak yang menginginkan menang.

Dengan asumsi BEM tadi, apa nggak salah jika anda mencalonkan dalam pemilu sementara anda telah dicap salah?

Justru itulah imej yang sengaja dibangun. Sebenarnya saya yakin dalam nuraninya tahu ini benar atau salah , tapi mereka punya kepentingan menjegal saya. Tapi saya menganggap mereka juga bermasalah. Aku menyerang moral mereka, aku mempertanyakan mereka menyerang moralitas sementara mereka melakukan tanpa moral.

Bagaimana dengan pemberitaan di media massa?

Jadi begini tolong dipahami bahwa press release itu sangat kontroversial, bahkan banyak pihak yang mengancam ketua umum BEM disidang istimewakan karena kesalahan fatal yang dilakukan. Press release itu manipulatif sekali dan terkesan tendensinya kemana. Dan lagi press release ditolak oleh senat maupun rektorat. Semua yang memberatkan saya diungkap sementara yang membebaskan saya tidak□

Hery Trianto

terkait," ujar Agam.

Lebih lanjut Agam menambahkan bahwa kasus ini adalah kasus korupsi. Alasannya karena ia melihat itikad tidak baik dari Anang dalam mencairkan dana 1,2 juta tersebut.

Korupsi terjadi, lanjut Agam, ketika ada *miss*-alokasi sumber daya dari organisasi, yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi dan tidak ada catatan yang jelas mengenai sumber daya tersebut.

Tambahnya lagi, Anang telah menandatangani proposal yang ada dengan tanda tangan palsu dan tidak memberitahu pengurus BEM yang lain. Padahal seharusnya, BEM sebagai pihak yang mengajukan, dalam pembukuan BEM seharusnya ada catatan tentang pengatasnamaan Heni. Dan hal itu anehnya, tidak ada.

Radio kampus sendiri merupakan salah satu rencana kegiatan BEM, keberadaanya telah direkomendasikan pada Kongres VI KM UGM dan dilanjutkan pada raker BEM UGM dimana fungsi dari radio ini adalah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan BEM UGM di kalangan mahasiswa.

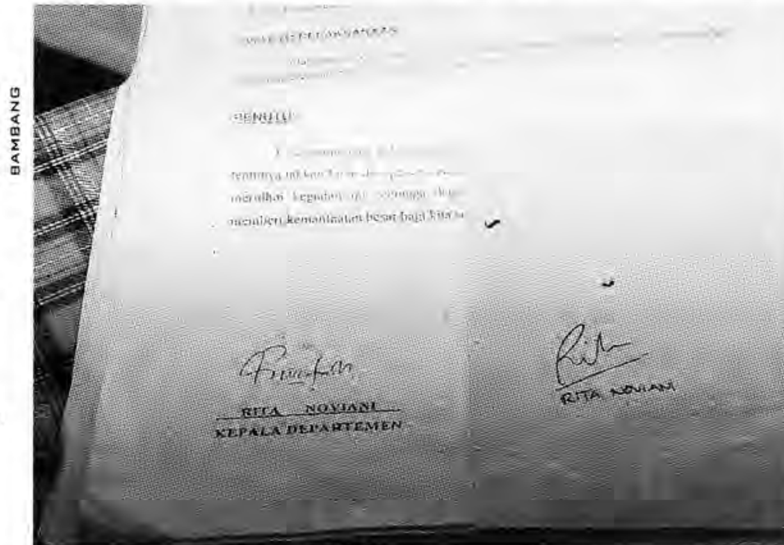
Pada tingkat pelaksanaanya, dibentuk suatu tim khusus yang menangani radio kampus. Dan pada tingkat BEM dibentuk pula Biro Radio Kampus, dengan Mohammad Amirullah sebagai ketua bironya.

Idealnya, masih lanjut Agam, dengan adanya kasus ini maka uang 1,2 juta seharusnya dikembalikan karena jelas hal itu adalah pengeluaran yang tidak sah. Dan karena menyangkut dana mahasiswa dan menyangkut nama lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas maka semua badan kelengkapan di tingkat fakultas dan universitas mesti ikut peduli dengan masalah ini.

M. Amirulloh ketika dihubungi *Balairung* menjelaskan, "Yang mengakibatkan merebaknya isu korupsi itu karena keterlambatan LPJ-nya saja. Keterlambatan ini dikarenakan kerja di Biro yang panjang," papar Amir.

Pihak Dewan Mahasiswa UGM, menilai bahwa dalam kasus ini tidak terjadi korupsi melainkan pemalsuan tanda tangan dan tidak berlakunya mekanisme kerja suatu organisasi yaitu BEM. Menurut fungsionaris Dewan Mahasiswa UGM, Titok Hariyanto, yang patut dipertanyakan adalah mengapa ketika ada pemberitaan di media massa baru ada rapat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia mengganggap kasus semacam ini bisa saja terjadi lagi, jika melihat struktur yang ada di BEM saat ini di mana mahasiswa terlepas dari lembaga tersebut.

"Secara struktural di BEM sendiri ada kelemahan sehingga fungsi kontrol dari mahasiswa tidak dapat menyentuh langsung pada senat, meski sudah ada perwakilan," ungkap Titok.



Pemalsuan tanda tangan itu
Antara Rita dan "Rita"

"BEM sebagai lembaga reprensentasi mahasiswa tidak dapat bersikap transparan terhadap masalah yang sekarang dihadapi."

Ketika ditanya mengenai adanya unsur kesengajaan dalam pembeberan kasus ini, sehubungan dengan Pemilu Raya UGM 1 Juni, Titok menyatakan bahwa akan lebih baik ketika ada perlawanan politik yang seru, sehingga aktor - aktor politik yang mencalonkan untuk BEM dan Senat benar-benar dibuka. Sebab jika ini dibiarkan, selain memungkinkan adanya penyelewengan-penyelewengan lebih jauh, juga untuk menguji para calon apakah mereka benar-benar pantas dan layak disebut wakil mahasiswa.

Ketika ditanya apakah Dema turut dalam kesengajaan ini dengan tujuan untuk menggembosi pemilu raya, Titok menyangkal hal tersebut.

Anang sendiri, ketika ditanya *Balairung* menolak seluruh tuduhan yang diarahkan padanya. Ia melihat adanya usaha-usaha untuk menjegal kepentingannya. "Saya yakin tidak ada penyimpangan," ungkapnya membela diri.

Tentang pemalsuan tanda tangan tersebut, Anang mengatakan bahwa hal itu telah dinyatakan tidak ada pemalsuan dan Rita sendiri tidak keberatan. Sedangkan Rita sendiri ketika dikonfirmasi *Balairung*, tidak tahu menahu mengenai proposal yang dikirim ke rektorat dan ini memang mengindikasikan adanya pemalsuan tersebut, "Saya tahunya hanya draftnya saja," kata Rita.

Menindaklanjuti santernya isu tentang korupsi oleh Anang, pihak BEM telah melakukan *public hearing* pada hari Rabu tanggal 30 April 1997 di Hall Gelanggang Mahasiswa UGM. Tapi sayangnya, menurut Heni, tidak banyak mahasiswa yang muncul --hanya beberapa orang-- sehingga hanya terjadi omong-omong secara informal dan belum sampai pada detil pertanggungjawaban.

Padahal berdasar rakor BEM UGM tanggal 24 April, Anang diminta untuk berhenti secara formal atau pemecatan oleh BEM, tetapi pada saat BEM mengetahui secara detail, secara kebetulan Anang telah mengundurkan diri dari kepengurusan BEM.

Disinggung adanya usaha cuci tangan dari Anang, Heni tidak melihat adanya usaha tersebut karena konteks Anang mundur dari ketua I BEM berkaitan dengan penolakan atas ambisi Anang yang mencalonkan diri sebagai Sekum BEM.

Dana Radio

Berdasar Proposal Radio Kampus diketahui jumlah yang diajukan sejumlah Rp 2.000.000,00 untuk dua proposal, yang masing - masing terdiri dari RP 1.275.000,00 dan Rp 800.000,00. Proposal pertama, dianggarkan untuk tiga kegiatan yaitu teknis, program, promosi dan kerja sama. Tetapi pihak rektorat hanya memberikan sejumlah RP. 1.200.000,00. Mengenai sisanya yang Rp. 800.000,00 masih berada di rektorat.

Berdasar keterangan yang diberikan M. Amirulloh diketahui, bahwa dana 1,2 juta digunakan untuk "bertemu" dengan Dirjen Postel dan Dirjen RTF serta pihak swata yang hendak membantu Biro. Berdasar proposal yang diperoleh *Balairung* sehubungan dengan studi kelayakan, dana tersebut terpakai Rp 850.000.00.

Sedangkan P.R III Bambang Kartika juga menegaskan, dana 1,2 juta telah digunakan untuk studi kelayakan ke Jakarta guna memperoleh perijinan dan keberadaan radio kampus. Sebab pada rencana awal diharapkan radio kampus ini menjadi radio pendidikan non komersial sehingga konsekuensinya, seluruh biaya operasional ditanggung oleh pihak rektorat dan biro. Padahal total untuk semua peralatan dan kelengkapan radio kampus diperkirakan 500 juta.

Tetapi hasil studi kelayakan di Jakarta menunjukkan rencana tersebut tidak dapat dilaksanakan. Karena keberadaan radio pendidikan yang non komersial tidak terdapat dalam peraturan tentang penyiaran.

Di tengah cacat moral

Anang sebagai pihak yang terkait langsung dengan kasus ini, pada Pemilu Raya tanggal 1 Juni kemarin tetap mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat BEM dan SM UGM. Dan inilah yang kemudian memancing kontroversi. Ketika seseorang dianggap cacat secara moral, patutkah ia tetap mencalonkan diri?

Kiranya inilah yang mendorong pertanyaan dari salah satu mahasiswa FE, ketika Anang sedang berkampanye. Laikkah seorang wakil mahasiswa yang notabene mewakili aspirasi mahasiswa dari berbagai fakultas dan angkatan, mempunyai cacat moral. Bila ditinjau kembali hal ini tentu cukup fatal.

Anang menegaskan ia tetap mencalonkan diri sebagai kandidat untuk menghindari *image* yang dibangun tentang dirinya. "Aku menyerang moral mereka, aku mempertanyakan mereka, menyerang moralitas sementara mereka melakukan tanpa moral," jawab Anang tanpa menerangkan lebih lanjut siapa "mereka".

Merespon pencalonan ini, Heni sangat menyayangkan. Tetapi sebagai ketua BEM, ia tidak punya otoritas untuk mencegah karier kemahasiswaan seseorang karena pada dasarnya pencalonan ini bersifat terbuka. Pada akhirnya, lanjut Heni, mahasiswa sendirilah yang harus menentukan penilaian dan pilihannya.

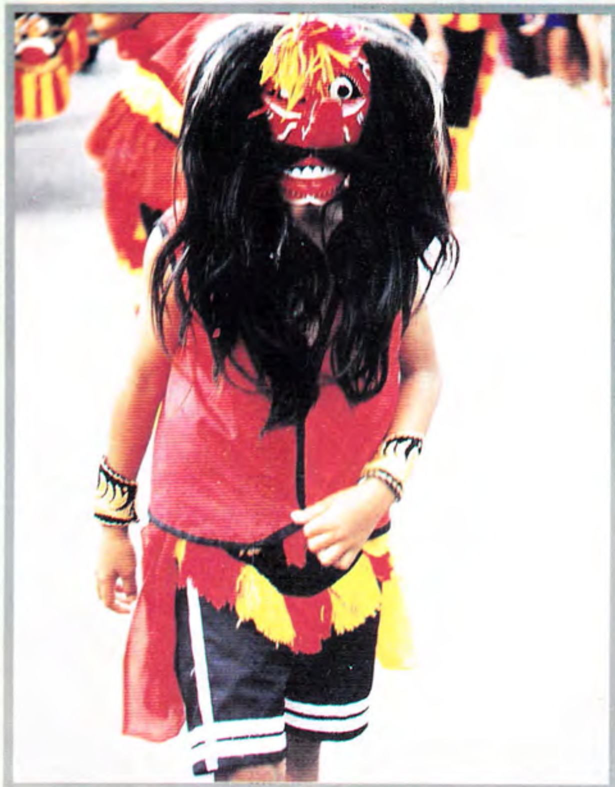
Meski akhirnya Anang tetap terpilih sebagai anggota formatur BEM UGM dan pihak rektorat menyatakan kasus ini telah selesai, ada satu pelajaran yang dapat kita tarik bersama.

Kondisi ini cukup memprihatinkan. Ternyata sebagai mahasiswa, kita tidak dapat mengontrol wakil-wakil di badan eksekutif mahasiswa. Ketika pada sistem yang kecil saja fungsi kontrol dan transparansi tidak berjalan, bagaimana pada sistem yang lebih besar?□

Melanie

Heri, Sarwo, Nursanti


SENI
REOG
PONO
ROGO
Reog
Ponorogo


FERNANDO BESTRAL


FERNANDO BESTRAL


FERNANDO BESTRAL

FERNANDO BESTRAL


Sisipan Majalah *Balairung* UGM
edisi No. 1/TH. I/1997

GeBeR

edisi 3 / juli 97



KULDESAK & GENERASI KITA



FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL



Geber, dua edisi di belakang ini adalah **Geber** yang diterbitkan mengiringi acara pemutaran film dengan tema-tema tertentu. Yang pertama adalah pemutaran film dalam rangka Communication Expo, dan yang kedua adalah Sepekan Film Quentin Tarantino. Sebuah kelompok apresian film ternyata tidak bisa berhenti dengan hanya melakukan pemutaran film belaka. Dibutuhkan sebuah ruang yang bisa menampung obrolan tentang hal ikhwal dari apa yang menjadi sasaran apresiasi. Ketika ***Balairung*** membuka kesempatan untuk menyisipkan salah satu edisi kami di antara halaman-halamannya, maka kami menyambut tawaran itu. Maka boleh dibilang bahwa edisi kali ini adalah edisi sisipan Majalah *Balairung* UGM.



Akan halnya **Geber** edisi ini adalah edisi pertama yang melibatkan kegiatan reportase. Beberapa orang d mi berangkat ke Jakarta dan mencegat orang-orang yang kami butuhkan sebagai narasumber.

Di luar itu, ternyata ada hasil yang lain. Obrolan kami dengan kawan-kawan IKJ membuahkan rencana yang tampaknya menarik untuk dilaksanakan. Bulan September nanti, bila tak ada aral melintang, Kine Klub Komako dan kawan-kawan IKJ akan mengadakan Workshop Penulisan Skenario. Acara ini diperuntukkan untuk publik, walaupun kelas yang dapat disediakan amat terbatas.

Kami juga menawarkan acara pemutaran film-film pendek produksi mahasiswa IKJ. Dan gayung bersambut.

Film pendek, sesuai namanya, adalah film-film berdurasi pendek, biasanya kurang dari dua puluh menit. Film-film semacam ini menawarkan ruang yang luas untuk bereksperimen dan mengeksplorasi idiom-idiom artistik yang membentuk sebuah film. Film pendek, adalah sebuah tontonan yang lain di luar bioskop komersial.

Sebelum itu, kami juga berencana untuk mengadakan Sepekan Film Steven Spielberg. Di samping "jualan" teknologi, Spielberg ternyata juga handal membuat film-film drama. Dua yang bisa disebut adalah Schlinder's List dan Empire of the Sun. Mungkin itu yang tidak banyak dilihat oleh publik kita.

Demikianlah, semua itu adalah usaha kami untuk mengisi kemerde kaan den

cover story

Portrait of Catrina Hooghsaet.
Dilukis oleh Rembrandt van Rijn (1606-1669).
Rembrandt dikenal sebagai maestro gelap terang. Ciri lukisannya ditandai dengan kontras yang amat tinggi. Nuansa itu memberikan roh terhadap lukisan-lukisannya. lukisannya yang terkenal antara lain: Th Night

GEBER

Geber diterbitkan oleh Kine Klub KOMAKO (Korps Mahasiswa Komunikasi) Universitas Gadjah Mada. Terbit dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan peduli pada film dan kebudayaan. Dicoba terbit berkala.

Pemimpin Redaksi
Dirmawan Hatta
Redaktur
Kurniawan Adi
Alexandra Evi Mariani
Redaktur Tamu
Hary Prabowo (BALAIRUNG)
Reporter
Sita Dewi, Shanti, Thomas Franky, Dicky, Nur Hidayati
Tim Artistik
Imambang Ali
Fahmy Asa
Perusahaan
Setyorini
Anjar

ALAMAT
Kine KluB Komako
Jl. Sosio Yustisia No.1 UGM
Bulaksumur - Yogyakarta
55281
KONTAK PERSON:
Titok Hariyanto 62-0274-514749
Evi Mariani 62-0274-515265



momentum itu

Ketika Garin mengatakan sinema Indonesia bangkit, ia mengandaikan bahwa telah muncul generasi anak industri multi media. Dikatakannya, generasi itu muncul dari lingkungan budaya multi media yang ada di sekitarnya.

Tekanan teknologi yang luar biasa dan rapatan-rapatan perubahan pada lingkungan budaya seperti ini akan memunculkan jenius-jenius baru dalam hal mencipta. Dengan asumsi seperti ini akan tiba saatnya ketika sineas-sineas dengan bahasa baru yang tumbuh dalam situasi itu akan muncul. Tahun 1997 ini produksi perfilman di Indonesia mencatatkan pola produksi baru yang menarik untuk dibaca. Fatahillah, misalnya, telah menyedot dana tak kurang dari 3 milyar dengan dukungan penuh dari BP2N (Badan Pembinaan Perfilman Nasional).

Di sisi lain, ada film semacam Kuldesak yang dikerjakan dalam sebuah produksi yang independen di bawah nama Day For Night. Pembuatnya (ada 4 sutradara di situ:Nan Triveni Achnas, Riri Riza, Mira Lesmana dan Rizal Mantovani) bantingan dulu untuk mewujudkan keinginannya. Bahkan ada peralatan yang diusahakan gratis. Demikian juga pemain. "Maunya sih jadi kayak Zoetrope," kata Mira Lesmana, salah seorang sutradara yang terlibat dalam Kuldesak. Zoetrope adalah perusahaan film independen milik Francis Ford Coppola.

Apapun itu, tapi fenomena bikin film "kerja bakti" itu menggambarkan semangat anak-anak muda yang terlibat dalam Day For Night. Kenyataan lain yang cukup mengejutkan juga adalah bahwa film Kuldesak mendapatkan kesempatan untuk didistribusikan oleh jaringan mayor bioskop Indonesia, 21. Menyimak gejala-gejala baru tersebut, ada anggapan bahwa akan muncul sineas-sineas baru yang bisa jadi karya-karyanya akan menjadi momentum bagi bangunnya sinema Indonesia.

Perkembangan yang terjadi di dunia multi media ini yang demikian pesat dan rapat melahirkan Rizal Mantovani yang "tiba-tiba saja" mampu mengerjakan video klip dengan selera yang paralel dengan kecenderungan global. Atau juga Mira Lesmana. Generasi semacam inilah yang menurut Garin akan mampu membaca kecenderungan baru di dunia film, dan melalui korespondensi

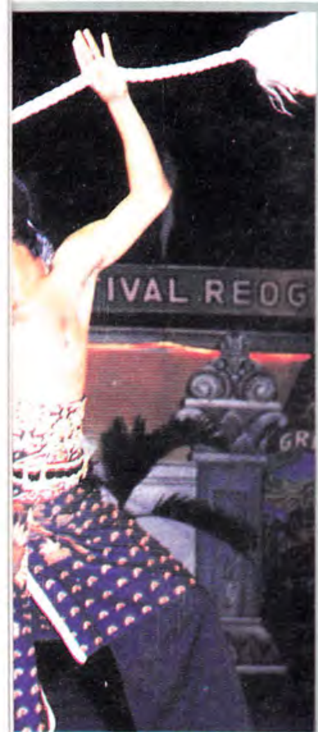


baca resensi film crash hal.16

FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL





kuldesak kita

Tapi, film macam apakah sebenarnya *Kuldesak* itu?

Tak seorangpun bisa memastikannya, kecuali orang-orang yang terlibat di dalamnya. Film itu direncanakan baru pada bulan Juli 1997 masuk ke bioskop grup 21. Meskipun Shanty Harmain, *co producer Kuldesak*, belum bisa memastikannya, tapi bila terealisir, ini disebut-sebut sebagai kerja sama terbesar pihak distributor film di Indonesia dengan pihak independen.

Tentu saja ini merupakan catatan tersendiri, mengingat selama ini hanya film-film Barat (baca:Hollywood) dan Hongkong yang menjejali layar 21. "Kami memang jualan nama-nama beken, mungkin itu yang membuat kami optimis bahwa kami bisa menembus 21," tambah Shanty.

Nama-nama populer memang bertebaran dalam film ini. Sebut saja: Ryan Hidayat(alm.), Tio Pakusadewo, Sophia Latjuba, Oppie Andarista, Iwa K, Paquita Wijaya..."Ini memang cerita tentang anak-anak muda di perkotaan...anak-anak urban..." papar Mira Lesmana, salah satu sutradara *Kuldesak*.

Dari nama-nama itu, sudah bisa dibayangkan segmen penonton film ini: remaja, anak-anak muda, generasi muda. Ini jadi menarik bila kita mengingat bahwa keempat sutradara film itu juga merupakan anak-anak muda. Termasuk juga kru dan pemainnya.

Lalu, jalinan teks macam apa yang akan tercipta tentang anak-anak muda yang bicara tentang diri mereka sendiri? Generasi yang *confuse* (Baca: Ini Generasi *Confuse*), kata Riri Riza, sutradara yang lain.

Kuldesak adalah sebuah film yang digarap oleh empat orang sutradara yang masing-masing mengerjakan satu bagian dari empat bagian yang menyusun film itu. Cerita-cerita itu tidak saling berhubungan satu sama lain.

Cara semacam itu pernah dikerjakan oleh Quentin Tarantino, seorang pemberontak radikal yang sekarang jadi anak emas Hollywood. Quentin Tarantino dikenal di Indonesia lewat *Pulp Fiction* (1994) yang memenangkan *Palm d'Or* di Cannes, masuk dalam beberapa nominasi Oscar, dan juga masuk box office bioskop-bioskop Amerika.

Filmnya yang lain, *Four Rooms* (1995), bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam empat kamar yang berbeda dalam sebuah hotel yang masing-masing peristiwa itu -tentu saja-tidak saling berhubungan. Dan masing-masing "kamar" itu disutradarai oleh sutradara yang berbeda-beda pula.

Kembali ke *Kuldesak*, Garin Nugroho menggambarkan anak-anak muda sutradara Kuldesak itu sebagai anak-anak muda yang keranjingan Tarantino, terlibat dalam korespodensi global, kosmopolit dan bagian dari generasi anak-anak industri multimedia. Lalu, bila sebuah karya artistik tidak pernah jatuh dari sebuah ruang hampa dan merupakan *output* dari proses pencernaan kultural yang terjadi dalam individu kreatornya, apakah yang bisa kita baca dari *Kuldesak* dan penciptanya? (**g**)



Ryan Hidayat (alm.) dalam salah satu adegan Kuldesak



ereka datang dari
sama sekali denga
demikian kata
kritikus film. Di n
yang melahirkan
adalah generasi y
gambar. "Mana
tontonan seperti
televisi kita sek
istilah Garin, me
jamannya adalah
keutuhan. Se
menonton televisi
dari kanal ke kana
fragmentasi yar
perhatian.

izal Mantovani
muda yang besar d
Ia adalah seor
Demikian juga h
Entah ini berkait
beberapa potonga
Kuldesak yang se
bisa dibilang n
gambar-gambar y
video klip. Gera
coloring, editing
visualnya.

Bila Anda pernah
Born Killers, And
pada gambar-gamb
lihat di televisi. F
Oliver Stone dan sk
Quentin Tarantino
idiom-idiom yang
akan tiba-tiba mel
yang muncul begit
wajar yang tiba-tiba
perpindahan dari w
bahkan adegan-ad
seakan-akan itu a
serial di televisi
untuk membedakan
b
ataukah da
tidak



hal. 5

Mereka datang dari generasi yang berbeda sama sekali dengan para pendahulunya, demikian kata Marselli Sumarno, kritikus film. Di mata Marselli, generasi yang melahirkan keempat sutradara itu adalah generasi yang mengalami polusi gambar. "Mana ada dulu keberagaman tontonan seperti yang bisa didapati di televisi kita sekarang?" Meminjam istilah Garin, menonton televisi pada jamannya adalah menonton sebuah keutuhan. Sedangkan sekarang, menonton televisi adalah perpindahan dari kanal ke kanal, dari fragmentasi ke fragmentasi yang paling menarik perhatian.

Rizal Mantovani sendiri, adalah anak muda yang besar dalam industri televisi. Ia adalah seorang pembuat klip. Demikian juga halnya dengan Mira. Entah ini berkaitan atau tidak, tapi beberapa potongan dari adegan awal Kuldesak yang sempat ditonton Geber bisa dibilang mengingatkan pada gambar-gambar yang sering dilihat di video klip. Gerakan kamera, pilihan coloring, editing serta idiom-idiom visualnya.

Bila Anda pernah menonton Natural Born Killers, Anda akan segera ingat pada gambar-gambar yang sering Anda lihat di televisi. Film yang disutradarai Oliver Stone dan skenarionya ditulis oleh Quentin Tarantino itu penuh dengan idiom-idiom yang tidak biasa. Anda akan tiba-tiba melihat animasi kartun yang muncul begitu saja, coloring tidak wajar yang tiba-tiba mendominasi layar, perpindahan dari warna ke hitam putih, bahkan adegan-adegan yang digarap seakan-akan itu adalah sebuah drama serial di televisi . Anda akan kesulitan untuk membedakan apakah Anda sedang b at televisi ataukah dalam sebuah tidak segera melepas

wawancara garin hal. 13

duga ... a film ya ... erti yang ... Anda

Se ... a rental video, ... umbuh dalam ... to ... yang memenuhi kepalanya. "Hidup memang seperti film. Pulp adalah antiformula. Seutuhnya mengantar kejungkirbalikan, ketidakacuhan dan segalanya, tapi kita tidak bisa menetapkan apa yang akan terjadi sampai peristiwanya terjadi," demikian katanya dalam sebuah wawancara tentang Pulp Fiction.

Tentang Kuldesak, Riri Riza mengatakan, bahwa begitu banyak yang terjadi, begitu banyak pilihan, begitu banyak peristiwa dan nilai-nilai, dan kita berada pada kejenuhan yang membuat kita tak tahu apa yang kita inginkan sebenarnya. Dan itu membawa kita pada kebuntuan, pada kuldesak. Sebagai sebuah hasil semangat dan kerja keras sekumpulan anak-anak muda Indonesia, mungkin kita bisa berharap melihat titik cerah perfilman kita di masa depan dari Kuldesak. Tapi sebagai sebuah pesan seorang anak muda tentang generasi mereka, ada baiknya kita beranjak ke cermin, siapa tahu wajah kita retak di sana. *(g)*

generasi itu

FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL





Gaya penggarapan Kuldesak akan mengingatkan orang pada *Four Rooms*-nya Tarantino. Kenapa Anda suka Tarantino ?

Mira Sebenarnya dia juga generasi baru di Holywood. Nah kebetulan kita berlima di sini selalu mengikuti. Film apa aja kita telan. Pada saat Tarantino memberi gaya baru yang berbeda tentu kita tertarik. Tetapi kita nggak bilang bahwa filmnya Tarantino itu alternatif. Dia itu nggak cuma ABCDE. Dia itu bisa dari Z dulu lalu tiba-tiba ke F terus ke A, lompat terus...Dan kita terpana dengan pemikiran dia yang seperti itu. Dikacaubalaukan pikiran dan emosi kita. Kita nggak bisa menebak lagi. Lho kok hidup lagi si John Travolta ini (dalam *Pulp Fiction-red*). *Cleverness*-nya itu yang membuat kita terpana. Gila, mereka pintar mencari hal-hal yang *fresh*, padahal ceritanya biasa.

*) SCORSESE

ENG TAY

*) JOHN WOO

WOODY ALLEN

lu aja yang bilang gua orisinil *)

Riri Kita tuh kurang lebih sama dengan Tarantino. Quentin Tarantino tidak hanya menyebut dirinya pembuat film. Dia pecinta film. Dia maniak film. Dia mencari film-filmnya tidak cuma di Amerika. Dan itu adalah orang-orang yang kayak kami, yang punya kesempatan untuk ngeliat banyak film. Kalau kita lihat Tarantino, dia belajar dari John Woo, dari *Sam Pek Eng Tay*. Jadi kalau generasi sekarang ngeliat Tarantino sebagai sesuatu yang baru, sebenarnya film-filmnya juga berangkat dari film-film yang telah ada. Dan itu keluarbiasaan Tarantino. Dia mendekonstruksi sistem narasi yang dilakukan orang lain. Dia bilang, dia tuh vandalis sejati. Dia mengkopi apa yang dia lihat. Terus dia bilang, mau apa lu, memang itu mau gue. Lu aja yang mengklaim gue orisinil. Dan juga itu makanya mereka bisa berkumpul bikin *Four Rooms*, yang inspiratif buat orang yang kayak mereka aja. Kayak Tarantino yang besar yang masih bilang gue butuh temen, yang bisa jadi *back up* dan jadi bagian dari gerakan gue.

VANDALIS

*) JOHN WOO

ENG TAY

*) RINGO LAM



Ada yang bilang, bah... lompatan-lompatan bu... terasa dengan berke... dalam kehidupan kita... usaha untuk menggamb... dalam Kuldesak ?
Riri : Kita tuh mas... Maka, wajar saja... berkomentar kayak gi... masyarakat kita yang m... batu, sementara kita y... minta dibukain pagar... handphone. Masyara... masyarakat yang melo... terima aja. Kita t... Khususnya, kaum mu... sudah melompat jauh, t... sama mereka masih b... kode sosial orang Ind... lahir dari situ adalah... kadang-kadang bingun... gue kok bisa hidu... sedemikian rupa, sedan... ada kekerasan yang ab... di dekat kita. Genera... yang kita potret. Gene... Generasi yang ingin... tetapi jalan buntu yang... kalau di Jakarta,... sebenarnya hidupnya... lain mereka nggak ta... mau.



Ada yang bilang, bah
lompatan-lompatan bu
terasa dengan berkem
dalam kehidupan kita s
usaha untuk menggambar
dalam Kuldesak ?
Riri : Kita tuh masya
Maka, wajar saja k
berkomentar kayak gi
masyarakat kita yang m
batu, sementara kita ya
minta dibukain pagar a
handphone. Masyarak
masyarakat yang melom
terima aja. Kita te
Khususnya, kaum muda
sudah melompat jauh, teta
sama mereka masih be
kode sosial orang Ind
lahir dari situ adalah
kadang-kadang bingung.
gue kok bisa hidup
sedemikian rupa, sedangka
ada kekerasan yang absurd
di dekat kita. Generasi
yang kita potret. Gener
Generasi yang ingin n
tetapi jalan buntu yang
kalau di Jakarta, a
sebenarnya hidupnya
lain mereka nggak tah
mau.

Ada yang bilang, bahwa kita mengalami lompatan-lompatan budaya. Itu makin terasa dengan berkembangnya televisi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada usaha untuk menggambarkan fenomena itu dalam Kuldesak ?

ini ririza

Kita tuh masyarakat yang unik. Maka, wajar saja kalau ada yang berkomentar kayak gitu. Ada bagian dari masyarakat kita yang masih hidup di jaman batu, sementara kita yang di Jakarta mau minta dibukain pagar aja sekarang pakai handphone. Masyarakat kita memang masyarakat yang melompat-lompat. Kita terima aja. Kita tertarik pada itu. Khususnya, kaum muda yang hidupnya sudah melompat jauh, tetapi pada saat yang sama mereka masih berada pada kode-kode sosial orang Indonesia.

generasi confuse

Apa yang lahir dari situ adalah confusion. Kita kadang-kadang bingung, buntu. Tiba-tiba, gue kok bisa hidup di kemapanan sedemikian rupa, sedangkan di sebelah kita ada kekerasan yang absurd, tapi tetap ada di dekat kita. Generasi yang kayak gini yang kita potret. Generasi yang confuse. Generasi yang ingin mendapat sesuatu, tetapi jalan buntu yang didapat. Apalagi, kalau di Jakarta, anak-anak yang sebenarnya hidupnya wealthy, tapi di sisi lain mereka nggak tahu apa yang mereka au.(g)

ririza

FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL





kopi tubruk dan proses kreatif



Visi artistik apa yang mempertemukan keempat sutradara itu ?

Riri: Visi artistik ? Sebenarnya sih visi pertemanan. Ha ha ha...

Kenapa empat ?

Mira: Jadi, sebenarnya...Kenapa yah, Ri ?

Riri: Yah.. Kalau bikin sendiri-sendiri agak nggak mampu kayaknya. Kalau kita bikin berempat, ada kerjaan yang bisa kita bikin rame-rame. Jadi, sebenarnya, ada empat segmen di sini. Saya punya skenario, Mira juga, Rizal, juga Nan. Memang tak ada konteksnya secara langsung. Walaupun benang merahnya tetap ada.

Ada empat sutradara yang masing-masing membuat cerita yang berbeda-beda. Apa yang mendorong *Kuldesak* dibikin dengan penggarapan macam itu ?

Riri: Panjang prosesnya. Kita mulanya kumpul ngopi berempat. Terus, kita saling dengar mimpi masing-masing. Apa sih mimpi lu sekarang ? Terus terang ada hubungannya dengan fenomena *independent film making* di Amerika. Tarantino itu bukan yang pertama. Sebelumnya, Woody Allen, Scorsese, dan Coppola penah bikin dan itu adalah gerakan yang memang punya tujuan artistik tertentu. Mungkin gerakan semacam itu yang lebih penting karena sudah lama banget nggak ada apa-apa di sini. Nggak ada anak-anak muda yang bikin film. Nah, habis itu, dalam proses berkumpul itu, kita memikirkan bentuk apa yang paling ideal dan bentuk segmen semacam itu yang kita rasakan paling memerdekakan.



Bagaimana k

Mira: Masi

Kurang lebih
tanyakan dulu
apa yang lu m
beda. Trus ki
ternyata kepe
persepsi, bah
ngomongin so
dengan kita.

Riri: Pada s

film-filmnya
Rodriguez.. K
terus sampai k
foto dulu. Su
Karena kita ti
mau bentuk vi
Bahwa masin
beda, tetapi y
Dalam penge
kumpulin em
dengan kita.
(*Avant Garde*
shoot itu gi
kuning itu gim
itu kayak ap
keseluruhann
shooting ben
memang a
mengembangk



Bagaimana kerangka penyusunan konsepnya ?

Mira: Masing-masing tahu yang lain suka nonton film apa. Kurang lebih kita punya selera yang sama. Pertama, kita tanyakan dulu, kalau elu dapat kemungkinan bikin film, film apa yang lu mau bikin ? Kita tulis dan ternyata memang beda-beda. Trus kita berpikir, kita mau mulai dari mana nih kalau ternyata kepenginnya lain-lain. Tapi ada satu persamaan persepsi, bahwa kalau kita disuruh bikin film, maunya ngomongin soal anak muda. Ngomongin hal-hal yang deket dengan kita.

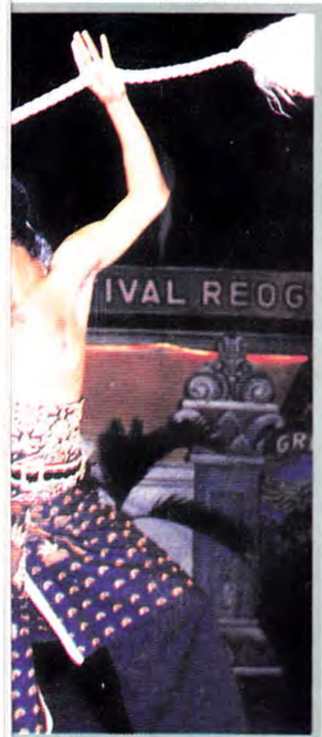
Riri: Pada saat kita bikin ***Kuldesak***, kita banyak ngomongin film-filmnya John Woo, Quentin Tarantino, Roberto Rodriguez.. Kita tuker-tukeran video dan buku. Itu berlanjut terus sampai kita menerjemahkan film. Sebelum jadi, dengan foto dulu. Sudah itu, kita bikin yang namanya *test camera*. Karena kita tidak ingin hanya sekedar langsung *shoot*. Kita mau bentuk visual yang namanya *the look* itu benar-benar ada. Bahwa masing-masing segmen itu penafsiran idenya beda-beda, tetapi yang namanya *look* itu kita maunya sama. Dalam pengertian tata fotografinya sama. Jadi, kita kumpulin empat cameraman yang mau kerja sama dengan kita. Kita bikin gambar di studionya Rizal (*Avant Garde*). Misalnya, kita bikin neon itu kalau di-*shoot* itu gimana, filter hijau kalau ketemu filter kuning itu gimana. Darah kalau di-*shoot* dengan ini, itu kayak apa. Jadi kita udah tahu duluan keseluruhannya kayak apa sebelum *shooting* benar-benar dimulai. Jadi, memang ada waktunya untuk mengembangkan itu semua.



FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL





Empat cerita dalam kuldesak itu terpisah-pisah, tapi kenapa kemudian ditaruh di bawah judul itu ?

Karena itu adalah generasi yang confuse yang akhirnya menemukan kuldesak dalam hidupnya.

Pesimis, gitu ?

Kalau mau bilang pesimis, siapa dulu yang melihat. Apa gitu aja ? Apa nggak bisa lu lewat sini ? Kalau kita ketemu jalan buntu, jalan keluar kita apa ? Kalau nggak mundur, balik lagi cari jalan lain kan ? Jadi, apa yang kita mau bilang, **confuse generation** ini apa iya nggak ada jalan lain ? Apa iya memang buntu ? Itu yang mau kita potret.

Sebenarnya kita hidup di bawah sistem masyarakat yang sangat memungkinkan kita mendapatkan jalan buntu. Memungkinkan kita berada di sebuah titik kejenuhan sementara yang membuat kita merasa sudah mapan, enak. Tapi apa betul begitu. Jadi Kuldesak itu satu judul yang memungkinkan banyak asosiasi. Dan itu yang kita pilih. Empat cerita itu bercerita tentang generasi yang mengalami kebingungan. Dan judul itu kita harapkan membuat orang datang dan ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Lalu menimbulkan dialog.

mira

kiri

empat cerita jalan buntu



Filmmaker yang suda
jalan sendiri-sendiri. Ka
sama. Day For Night a
orang itu berkumpul dal
menyebut Day for Nigh
kerja ini lebih banyak ter
memberi support pada
Sebab, kalau mereka la
sinetron aja nggak bisa
jadi uang itu dicari bers
pait, ditutupin pintu.
Kekuatan itu yang sebe
Kuldesak baru awalnya
Kita udah memikirkan
karena kalau kita saling
dijalani. Kenapa kita ng
gue mau bikin sinetron d
Kita nggak nggak mau
Kita nggak mau geraka
begitu saja. Kita mau b
pembuat pembuat film
konsep, terus pengen ta
ternyata kita bisa bela

*)Ba





Kita nggak mau dianggap mau jadi hero buat perfilman nasional. Kita nggak mau gerakan ini heboh di satu waktu tapi lalu habis, hilang begitu saja...

PAIT-PAIT DITUTUPIN PINTU

(ditulis berdasarkan obrolan dengan Mira Lesmana, Riri Riza, dan Shanty C. Harmayn, co-producer Kuldesak)

Filmmaker yang sudah berjaya di Indonesia tiba-tiba kayak **single fighter** karena jalan sendiri-sendiri. Karena itu kita menganggap bahwa kita perlu berdiri bersama-sama. Day For Night adalah semua orang yang bekerja dalam film Kuldesak. Orang-orang itu berkumpul dalam kelompok kerja yang namanya Day for Night (orang jarang menyebut Day for Night, Mereka lebih sering menyebut-nyebut Kuldesak). Kelompok kerja ini lebih banyak terdiri dari **software** dan bukan **hardware**. Maksudnya, kita mau memberi **support** pada orang-orang kreatif yang nggak tahu mau pergi kemana. Sebab, kalau mereka lari ke produser, mereka akan dibilangi: aduh, gue mau bikin sinetron aja nggak bisa gue dapet duit dari film. Day for Night nggak punya uang itu, jadi uang itu dicari bersama. Kemungkinan besar dicari ke produser-produser ini. Pait-pait, ditutupin pintu. Tapi, karena kita banyak, kita bisa serang ke mana-mana. Kekuatan itu yang sebenarnya mau kita bangun.

Kuldesak baru awalnya saja. Kita berniat habis ini ada kelanjutannya. Kita udah memikirkan ide-ide yang lain. Day for Night akan berlanjut, karena kalau kita saling **support** seperti ini, hidup akan lebih mudah untuk dijalani. Kenapa kita nggak kembali? Bukan habis ini terus selesai, terus: gue mau bikin sinetron dulu yah....

Kita nggak nggak mau dianggap mau jadi hero buat perfilman nasional. Kita nggak mau gerakan ini heboh di satu waktu tapi lalu habis, hilang begitu saja. Kita mau bikin film aja. Kita mau membuka pintu bagi pembuat pembuat film muda, siapa saja yang mau bikin film, punya konsep, terus pengen tahu gimana semua itu bisa jalan. Dari Kuldesak ternyata kita bisa belajar suportif satu sama lain.**(g)**

***)Baca:Lu Aja yang Bilang Gua Orisinil**

FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL





Pada titik pertemuan Willard dan Kurtz, tiba-tiba kita tampak bisa memaafkan Kurtz. Kurtz, si desertir yang telah membantai sekian banyak orang (tak cuma Vietcong, tapi juga orang-orang sipil Kamboja, dan lain-lain) itu lebih mirip seorang yang kesepian, amat sangat kesepian, daripada seorang pembunuh berdarah dingin.

Ia bernostalgia tentang sungai Ohio dalam pertemuan pertamanya dengan Willard. Ia dibesarkan di tepian sungai itu. Ada sebuah perkebunan dekat situ, begitu katanya, dan sewaktu kecil, ia sangat suka bersembunyi di sana, seharian. Percakapan yang terjadi pertama kali antara seorang prajurit yang mendapat perintah *terminate with extreme prejudice* dengan buruannya adalah percakapan tentang kampung halaman. Dan masa kecil.

Willard terdiam. Laki-laki itu lebih tampak butuh pertolongan, seekor kijang yang terluka, dibanding seekor ular yang mengancam. Tapi pertolonganm macam apakah yang dapat ia berikan? Willard dan Kurtz adalah sisi yang berbeda dalam koin yang sama. Ia juga telah demikian muak oleh Vietnam, oleh perang yang ia tak tahu apa yang ia bela. Ia melihat kekonyolan-kekonyolan. Ia melakukan kekonyolan-kekonyolan. Ia membunuh seorang perempuan desa yang telah dibikin sekarat oleh anak buahnya dengan alasan yang sangat jelas bagi seorang tentara, tapi juga seperti tak membela apa-apa, kecuali misinya. Dan misi itu, astaga, demi apakah?

Menghukum seorang desertir yang mengobarkan perangnya sendiri di seberang perbatasan demi sebuah tujuan yang bisa jadi mulia: memperpendek perang?

You must made friend of horror, kata Kurtz setengah bergumam.. Sebab bila tidak, ia akan jadi musuh yang sebenarnya. Dikatakannya itu, karena ia pernah melihat lengan anak-anak yang dipotong dan ditumpuk seperti seonggok sampah oleh Vietcong. *I.. I remember I..I cried and then I realized like I was shot, like I was shot with a diamond, a diamond bullet right through my forehead, and I tought, my God, the genius of that, the will to do that ---perfect, genuine, complete, crystal, pure!*

Itulah peristiwa apokaliptik yang membawa Kurtz pada kesimpulan tentang tujuan mulia sebuah pembantaian. Memperpendek perang, dengan membantai dan membantai, mengesampingkan belas kasihan, mempersetankan rasa keadilan demi rasa keadilan itu sendiri.

Maka ***Apocalypse Now*** adalah sebuah cerita **Francis Ford Coppola** tentang ironi yang tumbuh dalam tokoh Kurtz. Tentang tokoh yang demikian mendendam pada kekejaman dan pembantaian sampai kemudian demikian mencintainya untuk melawannya. Atau, setidak-tidaknya, menyikapinya.

Dengan rasa pedih tentu saja. Tapi ia tampak tak punya pilihan lain. Pembantaian yang ia lihat telah jadi peristiwa pencerahan untuknya. Dan pada titik pertemuan Willard dengan Kurtz, kita terhenyak, karena tampaknya ada keadilan yang lain, yang membuat kita tidak segera memojokkan Kurtz ke sisi hitam. *You had the right to kill me, you had the right to do that. You had the right to call me a murderer, but you had no right to judge me....*

KURTZ DANPE MBAN TAIAN

Dan Willard membunuhnya atas alasan untuk membebaskannya dari rasa pedih itu. Ia paham, bahwa manusia juga disusun dari ketakutan-ketakutan yang tiba-tiba bisa membuatnya menghunus dan menikamkan belatinya. **(dirmawan hatta)**



"Papa, Pa
telepon da
demikian sa
terdengar sua
gadis kecil
saluran, diting
suara ketukan
Minggu pagi
Itulah awa
wawancara Ge
Garin Nugroh
beberapa deti
sebuah su
kedengaran
terdengar di tele

"Oke, di kant
besok, jam
demikian jawa
basa-basi sejen

Terlambat seten
yang dijanji
melayani p
Geber deng
diselingi tawa
Kantornya d
Fatmawati bi
amat sederha
white board,
berkas-berkas
dengan bebera

**Di *Bulan Tertusu*
Angin Rumput S
menempatkan d
(Barat) pada pos
cukup penting.
dijelaskan?**

Banyak kritikus
mengatakan bahw

G A

NU



WAWANCARA



GARIN NUGROHO

"Papa, Papa, ada telepon dari Jogja!" demikian sayup-sayup terdengar suara seorang gadis kecil di seberang saluran, ditingkahi dengan suara ketukan pintu. Hari Minggu pagi waktu itu. Itulah awal janjian wawancara **Geber** dengan Garin Nugroho. Selang beberapa detik kemudian, sebuah suara yang kedengaran masih serak terdengar di telepon.

"Oke, di kantor saya saja besok, jam sebelas!" demikian jawabnya setelah basa-basi sejenak.

Terlambat setengah jam dari yang dijanjikan, Garin melayani pertanyaan **Geber** dengan santai, diselingi tawa di sana-sini. Kantornya di bilangan Fatmawati bisa dibilang amat sederhana, dengan *white board*, rak berisi berkas-berkas dan meja dengan beberapa pesawat

Di *Bulan Tertusuk Ilalang* dan *Angin Rumput Savana* Anda menempatkan dua lagu pop (Barat) pada posisi yang cukup penting. Bisa dijelaskan?

Banyak kritikus luar yang mengatakan bahwa ciri film

FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL





TIDAK ADA GERAKAN YANG

saya seperti itu, dimana budaya pop dan tradisi saling hidup bersama dan saling menghidupi. Itu mencerminkan ketumpangtindihan budaya kita. Tumpang tindih antara banyak hal sekaligus.

Bagaimana bila itu dikaitkan dengan pemahaman tentang generasi multimedia yang Anda munculkan?
Ya, menurut saya akan muncul generasi seperti itu akibat tekanan teknologi yang luar biasa. Yang mempengaruhi cara mencipta, cara menayangkan dan seterusnya. Dan pasti akan timbul dengan sendirinya generasi yang lahir dari lingkungan kebudayaannya sendiri. Ketika multimedia muncul, akan lahir suatu generasi dengan bahasa multimedia itu sendiri.

Untuk konteks Indonesia, tidakkah itu merupakan lompatan yang, katakanlah, ahistoris?
Ya, itu problem yang kita alami. Kita akan hidup dalam satu lompatan-lompatan, bukan dalam cara linier. Tentu saja generasi yang lahir dari situasi semacam itu juga berbeda dengan negara-negara lain. Konsekuensinya adalah bila terjadi lompatan yang luar biasa, maka akan terjadi ketimpangan dan ketertinggalan yang luar biasa. Juga keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Ada orang-orang yang begitu *genial* tapi ada juga orang-orang yang tidak mendapatkan akses dari kejeniusan itu sendiri.



Bagaimana Anda menghubungkan Tarantino dengan masyarakatnya?
Yang penting dari Tarantino adalah keberanian dia dalam menceritakan bahasanya sendiri, dimana gaya-gaya dipermainkan. Ini adalah contoh pendekatan yang timbul dari masyarakat yang sudah punya bahasa film. Di Amerika, film sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahasa itu dipermainkan oleh Tarantino. Tapi problemnya adalah bahwa orang melihat pertumbuhan Tarantino tanpa memahami kenapa ia bisa hadir dalam masyarakat Amerika dan dunia.

Bisa nggak kalau dikatakan bahwa narasi yang amat fragmentatif dalam karya Tarantino itu dipengaruhi oleh kultur televisi?
Ya, Tarantino itu tumbuh dari skill generasi televisi. Tontonan Spielberg itu sebenarnya juga tontonan televisi. Ada mobil meledak, jatuh dari pohon, dijatuhi dinosaurus, tapi orangnya nggak mati-mati. Nah itu kan esensi kartun saja. Mereka



BER

membuat ... dengan TV ... dengan bahasa TV ... film.

Adakah kemu... Tarantino meman... Hollywood?
Orang sering sa... Amerika hanya terj... yang statis. Ba... pernah mengalami ... kaprah. Bicara te... adalah bicara ... membangun ... mengadopsi ... perlawanan di sek... menjadi formula m...

Kuldesak mengi... pada *Four* ... Tarantino...
Yang jelas tidak ... alternatif yang tida... ide suatu gerakan... wajar-wajar saja ... mengadaptasi d... sebelumnya. En... **Rooms**-nya Taran...



BERANGKAT DARI NOL



membuat penonton yang telah jenuh dengan TV mau nonton film mereka dengan bahasa TV yang diadaptasi ke film.

Adakah kemungkinan bahwa Tarantino memang 'diorbitkan' oleh Hollywood?
Orang sering salah paham bahwa Amerika hanya terjadi dari satu formula yang statis. Bahwa mereka tidak pernah mengalami krisis. Itu 'kan salah kaprah. Bicara tentang film Amerika adalah bicara bagaimana mereka membangun industrinya dan mengadopsi perlawanan-perlawanan di sekitarnya untuk menjadi formula mereka lagi.

Kuldesak mengingatkan kita pada *Four Rooms*-nya Tarantino...
Yang jelas tidak ada gerakan alternatif yang tidak timbul dari ide suatu gerakan lain. Jadi wajar-wajar saja kalau mereka mengadaptasi dari gerakan sebelumnya. Entah itu **Four Rooms**-nya Tarantino entah itu yang lain. Jadi kita berikan dukungan karena tidak ada gerakan yang berangkat dari nol.

Secara implisit, Anda memprediksikan *Kuldesak* sebagai semacam momentum kecil yang akan jadi tonggak buat perfilman kita...
Ya, kita harus berani menciptakan tonggak di tengah situasi semacam ini. Saya berani menyebut tonggak karena tahun ini ada kebangkitan, **Kuldesak, Fatahillah**, Marcelli (Marcelli Sumarno-**Red**) katanya juga mau bikin film. Ada perlawanan dari suatu keadaan Ya saya berani mengatakannya, karena dari tinjauan historis itu harus terjadi. Kalau tidak, berarti ada yang salah dengan negeri ini. Semua itu bergantung pada bagaiman kita menanggapi momentum kecil ini.

Dengan cara bagaimana?
Dengan cara meyakini bahwa film seharusnya memiliki peran baru. Romantisme lama mati sudah. Ketoprak, wayang, pernah mengalami krisis. Dia hidup karena punya peran baru. Wayang ditanggap para pejabat karena mengantarkan *image* kemapanan sosial dan kultural. Macam-macam peran baru wayang yang dulu tidak pernah terjadi. Jadi, wayang hidup karena peran barunya.**(g)**



FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL









Crash menampilkan dunia yang kering, tanpa emosi, letih, hampa. Digambarkan dalam screen yang didominasi warna biru, perak, dan kadang sedikit semburat merah. *Crash* bergulir dalam alur yang hanya menampilkan permukaan, tidak pernah diceritakan motif kesamaan obsesi para karakter, ataupun kesakitan mereka dalam memahami obsesinya.

Begitulah Crash menceritakan sekumpulan karakter dari sub-culture yang aneh, yang terobsesi untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang cukup ajaib, tabrakan mobil ! Mulai dari 'hanya' sekedar menonton klip-klip tabrakan, percintaan dalam mobil di tempat umum, sampai saling menabrakkan diri untuk mendapatkan rangsangan seksual.

***1996 Cannes Awardspecial jury prize for oriiginality, daring, audacity ***

CRASH

JAMES SPADER HOLLY HUNTER ELIAS KOTEAS DEBORAH KARA UNGER ROSANNA ARQUETTE written/producer/director DAVID CRONENBERG

Ketika tubuh dihadapkan pada kemungkinan hidup dan mati, ia menciptakan semacam *chemistry* yang menimbulkan perasaan nikmat (ekstase) yang sulit diungkapkan. Dan apabila pada saat itu diiringi kegiatan seksual yang juga memunculkan ekstase tertentu, tentu akan menimbulkan sensasi yang luar biasa..ah



Cerita berlanjut dalam dialog-dialog metafora, adegan-adegan seronok, dan *angle* kamera yang unik. Diangkat dari novel J.G. Ballard, Crash menampilkan karakter-karakter aneh yang tidak saling terlibat dan tidak peduli dengan dunia sekeliling mereka. Pun adegan persetubuhan digambarkan secara mekanis, tidak membicarakan cinta, bahkan jarang bertatapan.

Imambang Ali





FERNANDO BESTRA



FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL



FERNANDO BESTRAL





Lidi yang Berserakan

Ternyata gajah bukan hewan pemberani seperti halnya ular atau buaya yang menyerang dan memangsa korbannya selalu sendirian. Gajah selalu hidup dengan kelompoknya. Pindah dari satu tempat ke tempat lain selalu berkumpul. Saya yakin mereka tak kenal pepatah Jawa *mangan ora mangan kumpul,* tetapi mereka harus hidup seperti itu, tak dapat dipisahkan dengan kelompoknya ibarat anak ayam yang selalu dekat induknya.

Lain dengan semut yang memang kecil dan perlu bersatu, setiap saat dalam hidup mereka selalu bermasyarakat dan bekerja sama. Bisa jadi semut selalu was-was akan terinjak gajah atau makhluk lain yang lebih besar darinya. Namun hakikatnya keduanya adalah hewan yang selalu berkumpul dan berbagi tugas. Seperti halnya lebah atau kumbang.

***

Pada era serba cepat dan terus berkembang saat ini, kita benar-benar dihadapkan pada ketatnya lomba kehidupan dan pertandingan untuk mewujudkan tujuan masing-masing tanpa memperdulikan kepentingan bahkan penderitaan orang lain. Manusia bisa menjadi seperti gajah yang dapat menginjak-injak segala sesuatu. Atau seperti semut yang bisa berjalan dan merayap berbondong-bondong melewati ranting sebesar lidi. Manusia juga dapat berubah menjadi macan atau harimau yang setiap saat memangsa makhluk lain. Sehingga manusia nyata-nyata sebagai *homo homini lupus,* memangsa sesama. Agaknya kepedulian untuk berkumpul dan hidup bersama dengan yang lain sedikit demi sedikit hilang. Benarkah manusia kini cukup mampu untuk hidup sendiri?



Manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial memiliki kecenderungan berserikat dan berkumpul. Manusia hidup perlu bergaul, berinteraksi, dan menjalin hubungan dengan unsur di sekitarnya. Sebab, manusia akan lebih berguna bila berada dalam kelompoknya, siapapun orangnya, di mana pun dan kapan pun. Dia akan dapat melihat diri sendiri dengan berinteraksi dengan orang lain seperti apa yang dinyatakan Charles H. Coolley sebagai *Looking Glass Theory.* Tarzan pun tidak bisa hidup tanpa bergaul dengan penghuni rimba yang lain.

Beberapa waktu lalu saya sempat heran menyaksikan banyak kegiatan teman-teman urung disebabkan oleh sebuah pesta demokrasi. Mulai dari seminar tingkat nasional, rapat perkumpulan daerah, diskusi kelompok, sampai ngobrol di warung pun tidak nyaman lagi. Semua serba hati-hati dan was-was. Apakah pesta demokrasi kita benar-benar menghambat kebebasan berserikat dan berkumpul. Teringat pula peristiwa seorang WS Rendra untuk bertemu dengan Emha Ainun Najib pun harus berurusan dengan aparat keamanan.

Melihat fenomena terakhir mengenai kecenderungan massa pendukung Mega-Bintang, aksi mereka merupakan salah satu keinginan untuk berserikat.Adalah keinginan mereka untuk menjadi lebih baik dengan berserikat kepada kelompok yang dianggap bisa menyalurkan aspirasi dan sesuai dengan harapannya Sebab kelompok mereka sendiri sudah tidak mampu lagi berbuat banyak atau bahkan digembosi pihak luar sehingga mereka bergabung dengan kelompok yang lebih bisa diharapkan. Dengan berserikat mereka berharap banyak hal dapat diperbaruhi atau diperbaiki. Setidaknya mampu menyalurkan pendapatnya.

Sebenarnya berkumpul bukan barang baru sebab kita sudah sering menjumpainya ---kehidupan di desa, paguyuban, kelompok tani, perserikatan berdasar profesi, daerah asal, atau peserikatan yang muncul karena kepentingan dan kesadaran.

Semut berbondong-bondong meski mengangkat secuil roti atau gajah yang selalu bersama saat makan dan minum. Ternyata kini malah dibatasi. Kalaupun beberapa waktu lalu bermunculan, itu hanya berdasarkan kepentingan tertentu saja atau lebih merupakan arogansi dan primordialisme semata, misalnya ICMI, dan sejenisnya. Bahkan tatkala menjamur organisasi massa malah dianggap OTB. Kalau pun terbentuk organisasi atau perserikatan yang diakui, itupun tak luput dari campur tangan dari penguasa.

Memprihatinkan memang bila berserikat dan berkumpul nyata-nyata dibatasi, dikekang apalagi sampai dilarang. Sekumpulan mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi justru dituduh subversif.

Kebebasan berserikat berkumpul dan menyampaikan pendapat bisa jadi hanya khayalan belaka sebab telah banyak aturan yang membatasi dan mengekang. Satu sisi digemborkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan, tatapi pada sisi yang lain malah memberangus perkumpulan yang ada. Bagaimana hidup kita nanti kalau untuk berkumpul saja sudah tidak boleh?

Bagaimana bisa terbentuk iklim keterbukaan bila masih ada campur tangan atau dominasi pihak luar. Apakah masyarakat komunikatif yang didamba akan terbentuk bila tindakan komunikatif sudah diberangus. Padahal tindakan komunikatif menuntut adanya komitmen bagi keterbukaan dan keadaan yang bebas dari dominasi atau campur tangan seperti yang dipaparkan **Habermas** dalam *Knowledge and Human Interest* □

Aris Purnomo

Golput, Pemilu, dan Frustasi Politik



A. Wisnuhardana
Sekjen Komite Independen Pemantauan dan Pendidikan Pemilu(KIPP-Pemilu) Yogyakarta.

Sebelum Pemilu 1997 berlangsung, ramai-ramai para aktivis menggelar polling tentang sikap politik mahasiswa terhadap Pemilu 1997. Dari sekian puluh *item* pertanyaan yang disebarkan, satu pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu jawabannya oleh penyelenggara polling adalah jawaban atas pertanyaan "apa sikap Anda dalam Pemilu mendatang? Memilih salah satu kontestan, memilih ketiganya atau golput? Semakin besar prosentase responden yang menjawab golput, semakin senanglah yang mengadakan polling. Dalam konteks Pemilu, golput secara sadar seakan-akan menjadi simbol perlawanan, simbol keberanian. Dan dengan demikian, golput dianggap sebagai tolok ukur meningkatnya kesadaran politik si responden.

Tatkala banyak lembaga tersebut mengumumkan hasil penelitiannya, semuanya pasti langsung menilik beberapa persen mahasiswa atau anak muda yang akan (waktu itu) golput pada Pemilu. Media massa pun hanya melirik satu item ini. Persoalannya karena pertanyaan lainnya barangkali sekedar basa-basi politik yang tidak *lher* secara politis. Kita melihat tidak ada penelitian yang tidak terekspos di media massa yang menunjukkan angka golput dalam sekian puluh polling yang diselenggarakan itu lebih rendah dari 30 persen. Bahkan di Malang, angka golput menurut polling mencapai 90 persen. Kota-kota lain seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, angka golput di atas 40 persen.



Lantas, kalau hasil akhir Pemilu kali ini menunjukkan bahwa angka golput tidak lebih dari 15 persen, di manakah salahnya? Pertama, karena polling itu hanya difokuskan pada mahasiswa atau anak muda saja, yang notabene merupakan bagian teramat kecil dari masyarakat yang *melek* politik. Kedua, polling itu sendiri dalam masyarakat kita belum menjadi batu uji yang ketepatannya bisa dipercaya. Oleh karenanya banyak yang berpandangan sinis bahwa polling semacam itu tidak lebih dari sekedar upaya menarik perhatian publik atas aktivitas kelompok tertentu. Tentu saja mereka yang beranggapan seperti itu terlalu sempit penilaiannya, untuk hanya memaknai niat baik itu dengan tuduhan eksistensialis. Mereka yang tidak percaya dan sinis kepada polling semacam itulah dalam konteks yang lebih luas menjadi problemnya. Jadi masalahnya adalah tidak adanya lagi atau susahnya menemukan kepercayaan.

Kepercayaan menjadi barang langka karena setiap orang sudah terlanjur saling curiga. Dan dalam kecurigaan itu mereka menggulirkan cara-cara untuk melindungi kepentingan mereka. Berbeda dengan polling di Amerika misalnya. Polling yang ingin mengukur popularitas calon senator atau presiden yang diadakan oleh lembaga polling semacam GALLUP, *margin* kesalahannya tidak melebihi 5 persen. Polling dengan akurasi memadai itu juga menunjukkan bahwa mereka tidak berpura-pura dengan sikap politik mereka. Apa yang mereka inginkan itulah yang mereka katakan. Dengan demikian, akurasi penelitian dapat dipertanggungjawabkan karena masyarakat menjawab secara jujur. Apakah dengan demikian masyarakat kita tidak jujur? Bukan tidak jujur tetapi takut!!

Maka tulisan ini pun melihat bahwa polling yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga itu sebenarnya merupakan riak yang ingin mengerosi sistem dan kultur politik kita yang kedap masukan dan kedap kritik, yang senantiasa menumbuhkan budaya takut dan malu dalam mengekspresikan sikap politiknya. Polling tersebut dalam kacamata penulis lebih memiliki bobot kualitatif ketimbang nilai kuantitatifnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa bobot kualitatif polling semacam itu?

Pertama adalah fokus penelitian yang mengangkat isu golput. Sudah menjadi rahasia umum bahwa golput secara sadar merupakan pilihan terbaik kaum intelektual kritis. Mengapa, karena sistem politik yang dijadikan basis legitimasi untuk menyelenggarakan Pemilu tidak pernah memberikan peluang bagi terciptanya kedaulatan rakyat tetapi justru menjadi mesin politik yang membunuh kedaulatan rakyat. Bahwa ada rakyat yang teriak-teriak terjadi kecurangan, bahwa ada lembaga pemantau yang

memberi bukti kecurangan, semuanya tidak bermakna apa-apa. Pemilu sudah selesai jauh sebelum hari pemungutan suara dilakukan.

Pemilu kali ini memang mengajarkan kearifan dengan caranya sendiri. Bagi Soerjadi dan rejim kepemimpinan PDI yang berada di bawahnya, misalnya, Pemilu telah memberi bukti bahwa ia adalah tokoh yang tidak saja gagal secara politik tetapi juga secara moral. Apa yang dikatakannya sebelum pemilu bahwa suara PDI tidak bakal berpengaruh dengan konflik yang terjadi, ternyata hanya merupakan *boomerang* yang kini balik menghampirinya. Bagi PPP, Pemilu kali ini pun memberi pelajaran penting bahwa sudah saatnya partai ini tidak selalu menjadi kepanjangan tangan suara pemerintah di tubuh OPP melainkan menjadi kepanjangan tangan dari suara masyarakat yang mendukungnya.Lihatlah data di daerah-daerah, betapa mereka menaruh harapan besar di pundak PPP untuk berbuat sesuatu bagi perubahan.

Tetapi Pemilu kali ini pun memberi lelucon politik yang tak kalah *ndagel*-nya dengan srimulat. Tiba-tiba saja Harmoko yang juga menjadi juru mudi utama dari mesin politik bernama Golkar harus lengser dari jabatan menteri penerangan yang sudah diembannya sejak tahun 1983. Itu tidak hanya berarti bahwa tiap bulan ia tidak lagi tampil di muka televisi mengumumkan berapa inflasi bulan ini, berapa ekspor-impor dan lain-lain. Tetapi itu berarti pula bahwa baru kali ini dalam sejarah pemerintahan Orde Baru seorang menteri tidak mengepalai departemen atau membawahi sebuah kantor setingkat departeman (misalnya saja seperti Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup). Padahal dalam undang-undang ditegaskan bahwa seorang menteri bertugas membawahi departemen.

Fonemana semacam itu hanya dapat dijelaskan melalui prakiraan politik. Benarkah Harmoko akan menjadi ketua DPR/MPR, benarkah ini yang akan duduk di kursi itu, benarkah dia yang akan menduduki jabatan itu, semuanya hanya bisa dibaca melalui analisis politik, yang sama sekali tidak pernah melibatkan rakyat kebanyakan. Sungguh lucu bahwa tatkala Pemilu berlangsung rakyat betul-betul menjadi entitas politik yang luar biasa dahsyat dari diperebutkan oleh setiap kelompok, hanya dalam waktu sependek itu mereka berubah menjadi kerumunan manusia yang hampir-hampir tidak tahu apa yang terjadi.

Banyak orang menduga bahwa kekerasan pasca Pemilu tidak lalu bertambah surut. Ketidakpuasan dan frustasi di kalangan rakyat tampaknya kian menjadi-jadi. Sungguh malang nasib sebuah kata bernama kekerasan dan sungguh malang orang yang menjadi kambing hitam untuk kata tersebut. Kalau kita lihat *track record* kekerasan yang terjadi menjelang Pemilu lalu, hampir sebagian besar akar permasalahannya tidak pernah bisa kita temukan. Segala hal bisa menjadi pemicu ledakan sosial. Apapun bentuknya dan siapapun yang melakukannya.□



J. Sudrijanta
direktur LSM Yayasan Sosial Sugiyopranoto (YSS), tinggal di Yogyakarta

Kekerasan, Kambing Hitam, dan Negara Teror

Kalau masyarakat terus-menerus dilanda kekerasan, ia akan dipaksa mengembangkan mekanisme kambing hitam. Demikian hipotesis Rene Girard (1972) ketika bicara tentang rivalitas mimetik dan mekanisme kambing hitam.

Mekanisme kambing hitam ini sudah berumur tua. Girard berhasil merekonstruksi dari mitos, dan tradisi Yunani dan ritus-ritus masyarakat suku-suku dunia. Girard yakin peran fundamental agama adalah menjauhkan kekerasan dalam masyarakat dengan membeloknya ke korban pengganti. Korban ini kemudian diruwat (disucikan) dalam pembersihan ritual yang akan mengembalikan tatanan sosial masyarakat.

Tidak asing teori ini dalam hidup kita sehari-hari. Kita ingat nama-nama seperti *wadal, tumbal, landesan, bebanten, tawur* (Rahmat Subagyo: 1981). Semuanya menunjukkan salah satu bentuk korban manusia. Itu memperkuat pandangan Girard.

Kita juga menyaksikan mekanisme kambing hitam ini telah bergulir, terutama semenjak drama 27 Juli tahun lalu hingga kini. Maka muncul nama-nama "kambing hitam", "dalang", "pihak ketiga", "die hard", "setan gundul", dst. dalam diskursus politik kita.

Sebagai teori, mekanisme kambing hitam menyimpan ambiguitas; sebagai realitas, menyembunyikan mekanisme sosial paling buruk dalam sejarah. Bagaimana dan mengapa kita harus memahaminya secara kritis? Tulisan ini akan memperlihatkan apa mekanisme kambing hitam itu sesungguhnya dalam teori dan realitas.

***

Kita dibuat heran, mengapa mekanisme ini selalu menjadi sejarah berabad-abad? Girard menerangkan mekanisme kambing hitam potensial tumbuh subur ketika masyarakat tersebut mengalami kekerasan dan krisis berkepanjangan.

Lalu bagaimana mekanisme ini menjanjikan jalan keluar dari krisis. Kekerasan, menurut Girard, pertama-tama berawal dari hasrat orang untuk meniru (*mimetic desire*). Hasrat meniru ini pada akhirnya membawa ke agresi terbuka, karena ada rival yang menginginkan satu obyek yang sama. Bagaimana mengembalikan harmoni sosial? Jalan keluar terbuka dengan mencipta mekanisme yang sama, yaitu menetapkan kambing hitam. Tujuannya untuk mengosongkan kekrasan kolektif timbal-balik yang tidak karuan ke tindakan kolektif melawan satu (kambing hitam). Jadi, motif dasarnya adalah "kuratif": mengatasi kekerasan dalam masyarakat.

Ritus pengorbanan ini bisa suskes, bisa gagal. Tergantung sejauh mana pengulangan dan pengenagan kambing hitam bisa dibangun untuk menyerap rivalitas kekerasan kolektif masyarakat.

Kalau sukses, si kambing hitam sungguh dialami sebagai "basis", "pondasi", dan "thelos" masyarakat dan kebudayaan. Mengapa? Karena agresi timbal balik dan lingkaran balas dendam terpatahkan, dan relasi-relasi sosial kembali berjalan normal.

Akan tetapi, mekanisme ini bisa menciptakan damai palsu dan menyembunyikan ketidakadilan, kekerasan, dan hubungan sosial yang tidak beres. Sekurang-kurang dua asumsi dasar teori ini menunjukkan ambiguitas tersebut.

Pertama, tentang kriteria korban. Menurut Girard, mereka biasanya orang/kelompok "lemah", "asing", "*marginal*", "abnormal" bagi masyarakat itu. Misalnya, dari kalangan tahanan, gelandangan, budak, buruh, anak-anak, dll. Semakin jelas *image* abnormalitas si kambing hitam (misalnya di masyarakat kita atribut "PKI", "kiri", "makar", "subversi", "ekstrim", "fundamentalis"), daya pikat penggalangan unanimitas kekerasan makin besar. Lalu makin intens dan efektiflah aksi penghantaman dan pembunuhan kurban.

Betapapun membawa sukses, sesungguhnya substansi kekerasan akar rivalitas kekerasan masih di tempat semula. Dan aksi penghantaman itu sendiri sudah merupakan kekerasan yang lain.

Kedua, tentang fungsi si kambing hitam. Apakah betul si kambing hitam itu bersalah? Bersalah atau tidak, tidak bermakna menurut teori ini. Sebab, penentuan siapa yang jadi kambing hitam itu sewenang-sewenang hakekatnya

dari pihak yang kuat. Pokoknya, si korban harus menanggung semua kesalahan dan target pembunuhan. Tidak ada keadilan buat si kambing hitam. Titik.

Apa yang terjadi kalau gagal? Tinggal dua pilihan: harus mencari kambing hitam baru atau menintensifkan upaya semula. Orang yang tidak terkena bius ini bisa mendadak berdecak heran: bukankah tindakan ini alias jatuh pamor jadi sebuah teror terbuka? Si kambing hitam bukan lagi "korban" (*sacrifice*) esensinya, tetapi "korban" (*victim*).

Nasib PRD (Partai Rakyat Demokratik) adalah contoh paling nyata. Mereka menegaskan, "Kami tidak rela TPHKI (Tim Pembela Hukum dan Keadilan Indonesia) tercemar oleh persidangan sandiwara yang tidak fair, biarlah cukup kami saja yang menanggunya." (*Kompas* 22 April 1997).

Betapapun kuatnya posisi pengadilan dan negara, PRD toh mampu membuat langkah dekonstruksi. Mengapa dekontruksi bukan destruksi? Karena, struktur pengorbanan tetap dibiarkan ada tetapi sekaligus dibuka kedoknya agar kelihatan belangnya, sehingga struktur itu sendiri kehilangan kredibilitasnya.

Maka, makna "kematian PRD" harus diolah bukan berdasarkan ideologi pengorbanan, melainkan berdasarkan isi historisnya. Yaitu, kematian seseorang atau sekelompok orang tanpa salah yang diakibatkan oleh tindak kekerasan suatu institusi.



Persis di sinilah kritik paling mendasar terhadap teori Girard. Apakah mekanisme kambing hitam sungguh menjadi kunci survival masyarakat (*Survival of the society*)? Ataukah tidak lain sebuah teror esensinya demi survival kelompok kuat (*survival of the most progressive class*)? Dalam kenyataan, mekanisme ini gampang dijadikan alat kelompok kuat lawan kelompok lemah, atau dalam sebuah negara teror, antara negara melawan rakyatnya.

Mengapa negara-teror?

Mengikuti Michael Stohl, ada dua sindrom yang menghirkan negara teror: sindrom militeristik (*military-state syndrom*) dan sindrom ideologis (*ideological mission syndrom*). Sindrom ini bisa menciptakan mekanisme negara yang paling buruk, yaitu totaliterisme. Lepas dari macam apa ideologi yang dianut suatu negara, Hannah Arendt sudah lama mengajak kita waspada terhadap gejala-gejala atau tendensi-tendensi totaliterisme yang bisa menyusup ke berbagai bentuk pemerintahan dengan variasi ideologinya.

Karena sindrom inilah negara bisa tanpa malu-malu melanggar hak-hak warga negara, HAM, dan melakukan pembunuhan tanpa memperhitungkan jumlah korban. Bukan saja tidak memberi ruang kritik dan partisipasi tetapi mematikan seluruh kekuatan kritik dan partisipasi. Mengontrol, mengawasi, memata-memati, mengendalikan perilaku dan aktivitas warga masyarakat terutama yang vokal dan tidak disukai.

Dalam hal ini, apapun yang dilakukan negara terhadap rakyat, pun kalau harus melakukan pembantaian seluas-luasnya ipoleksosbudhankam, dianggap sah-sah saja. Mengapa? Negara punya dasar. Semua itu dilakukan demi ideologi bangsa. Pada tahap awal, teror masih berfungsi melayani ideologi yang ditetapkan. Dalam perkembangan belakangan, teror itu menjadi ideologinya sendiri. Kalau sudah demikian kekerasan naik pamor jadi panglima diskursus politik kemasyarakatan.

Titik lemah negara teror pertama-tama justru terletak pada fanatisme ideologis dalam proses-proses politik yang meremehkan semua pertimbangan *real-politic*. Pengawasan dan penguasaan total negara untuk mengendalikan rakyat membuat rakyat justru tidak berdaya mendukung negara dalam mencapai janji utopisnya. Pengendalian, kontrol dan monopoli informasi malah menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat luas. Ideologisasi menyeluruh membuat rakyat muak. Teror membuat rakyat takut dan malah berbalik bukan melegetimasikan kekuasaan, tetapi melahirkan *counter-productive*. Mekanisme balas dendam merebak dan kekerasan berantai terus bergerak.

Kekerasan dam kerusuhan akhir-akhir ini, dalam perspektif Girard dan horison H. Arendt, tentulah merupakan rentetan lingkaran kekerasan yang melanda masyarakat kita -- barangkali mulai tiga dasawarsa lalu.

Memang mekanisme kambing hitam justru membawa petaka yang lebih mengerikan dari pada hasil yang semula dijanjikan. Inilah kesaksian Jules Henry, seorang etnolog yang yang membuat penelitian di tengah penduduk Indian Kaingang yang miskin di Santa Katarina, Brasil "Dengan sekali membunuh, pembunuh terjebat dalam sistem terkunci. Ia harus membunuh dan membunuh lagi. Ia harus merencanakan pembunuhan besar-besaran kalau-kalau satu yang tersisi tetap akan menutut balas dendam atas sanak keluarganya (Julles Henry,1964).

"Haus darah" di Kaingang ini bisa jadi ada dalam pribadi ataupun institusi-institusi di masyarakat kita. Sudah terlalu banyak korban dari mekanisme macam ini. Aktifis PRD ataupun Mocthar Pakpahan, Sri Bintang Pamungkas, Megawati dan PDI-nya hanyalah contoh korban-korban itu.

Lingkaran kekerasan sudah terlanjur bergulir. Pada saat yang sama kita melihat solidaritas yang makin berkembang di antara rakyat dan para korban kekerasan institusi negeri ini. Kalau ingin masyarakat kita terbebas dari lingkaran kekerasan dan kerusuhan ini, sudah saatnya kampanye pembunuhan, pendepakan, penggusuran, peminggiran rakyat itu --oleh poleksosbud-hankam--- dipungkasi. Dan sikap-sikap mencari-cari kambing hitam sudah tidak relevan lagi❑

Steam Flooding:

"Mengubah" Air Menjadi Minyak

Minyak bumi sebagai bahan bakar fosil, tidak pernah bisa diperbaharui lagi. Sekali dieksploitasi dan dibakar, selamanya tidak bisa dijadikan minyak lagi. Sementara di sumur-sumur pengeboran, minyak tidak pernah dapat terpompa tuntas. Dengan Steam Flooding kini ada harapan untuk menuntaskan pemompaan minyak dari sumur-sumur itu. Efisienkah?

Minyak bumi memang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat manusia. Selain sebagai sumber energi, berbagai produk dari minyak bumi sudah menjadi kebutuhan vital kita sehari-hari. Mulai dari plastik, furniture, bahkan sampai pakaian.

Semenjak berhasil dikeluarkan oleh Drake pada tahun 1859 di Titusville, Pennsylvania, industri minyak bumi melesat cepat sebagai suatu industri baru. Dan hal itu tentu saja tak lepas dari teknologi minyak bumi sebagai penunjangnya.

Minyak bumi sendiri -- paling tidak beberapa komponennya -- sudah dikenal orang jauh sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya aspal sebagai bahan perekat bangunan-bangunan kuno di sepanjang aliran Sungai Euphrat, Irak lebih dari 6000 tahun yang lalu. Juga di beberapa kota kuno seperti Babylonia dan Niniveh, beberapa komponen dari minyak bumi sudah digunakan sebagai bahan perekat kapal, pelapis bak mandi, dan bahan pewarna.

Para Ilmuwan memperkirakan minyak bumi terbentuk dari tumpukan plankton yang tertimbun di dalam tanah dan mengalami proses degradasi alamiah di dalam kondisi tekanan serta temperatur yang sangat tinggi. Proses itu memerlukan waktu jutaan tahun sebelum akhirnya terbentuk minyak bumi. Minyak yang terbentuk merupakan kumpulan senyawa yang sangat komplek. Penelitian menunjukan bahwa jumlah senyawa yang terdapat di dalam minyak bumi mencapai ribuan dengan penyusun utamanya adalah Paraffin.

Bangsa Indonesia patut bersyukur karena di dalam bumi pertiwi ini terkandung minyak bumi dalam jumlah yang cukup besar. Dan tentu saja kekayaan alam ini didayagunakan oleh negara sebagai sumber penghasilan yang cukup besar. Dan, tak dapat dipungkiri bahwa kita masih menggantungkan pendapatan dari sektor minyak untuk kelangsungan pembangunan.

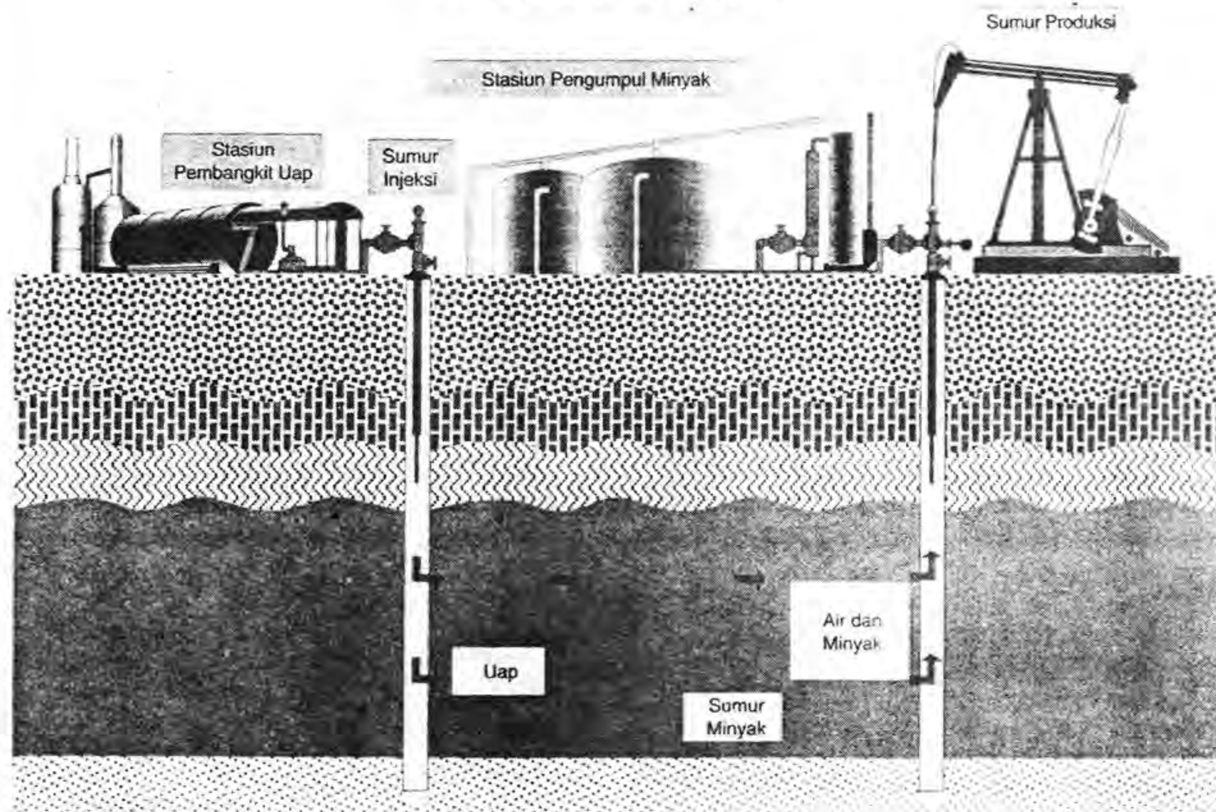
Untuk mendapatkan minyak dari dalam bumi, pada pengeboran awal biasanya digunakan pompa penghisap yang dimasukkan kedalam reservoir minyak bumi.Untuk beberapa sumur minyak tertentu, minyak dapat keluar sendiri tanpa bantuan pompa penghisap. Tekanan yang dimiliki minyak bumi dalam reservoir cukup besar guna mendesak minyak untuk naik keatas permukaan tanah. Biasanya ini terjadi untuk sumur minyak yang mengandung gas cukup besar dan mempunyai kedalaman dangkal. Cara perolehan awal ini lazim disebut *Primary Recovery*.

"Tapi biasanya *Primary Recovery* hanya dapat mengangkat sekitar 35-60% dari total *reserve* yang ada. Sedangkan sisanya tak dapat diangkat karena terjebak dalam pori-pori batuan yang ada. Dan *recovery* ini sendiri sangat tergantung dari sifat fisis minyak. Bahkan untuk minyak yang sangat kental *recovery*-nya bisa sangat rendah ", ungkap Ir.Suryo Purwono M.Sc., Ph.d. staff pengajar Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik UGM.

"Dengan cadangan minyak yang ada, produksi minyak bumi kita akan berhenti sekitar tahun 2010. Oleh karena itu dikembangkan suatu teknik baru yang dapat dipergunakan untuk mengambil sisa minyak yang masih tertinggal. Dan teknik itu kerap disebut Perolehan Tahap Lanjut atau *Enhanced Oil Recovery* (EOR)", tambahnya lagi.

Sebenarnya EOR itu sendiri tidak terbatas pada suatu cara tertentu saja. Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan perolehan Dua diantaranya adalah dengan penambahan bahan kimia sebagai Surfaktan dan menggunakan *Thermal Injection*.

Fungsi dari penambahan Surfaktan, biasanya polymer turunan Petroleum sulfonat, adalah untuk menurunkan tegangan permukaan minyak bumi yang terdapat dalam lapisan batuan *(Bedrock)*. Bahan yang sering dipakai misalnya *Alkyk Benzene Sulfonat Poly Akrylamid* ataupun *Xanthan* yang dihasilkan oleh bakteri *Xanthomonas Campentris*. Namun metode ini hanya dapat meningkatkan *recovery* sampai 15 % saja sehingga masih banyak minyak yang belum terangkat. Lagipula



untuk minyak yang mempunyai kekentalan tinggi, cara ini tidak begitu memuaskan.Selain Surfaktan yang digunakan harganya masih mahal, juga masih harus diimpor karena belum dapat dihasilkan di dalam negeri. Kelemahan lainnya adalah bahan kimia yang digunakan umumnya tidak dapat terurai secara alami.

Sedangkan metode kedua, *Thermal Injection*, lebih menjanjikan karena dapat meningkatkan *recovery* hingga 50-65%. Sampai saat ini hampir 80% dari usaha Perolehan Tahap Lanjutan difokuskan pada cara ini khususnya injeksi dengan menggunakan uap panas (*Steam Injection*).

Selain tingkat *recovery* yang lebih tinggi dibandingkan cara-cara lainnya, metode *Thermal Injection* ini dapat digunakan untuk minyak dengan kekentalan tinggi dan dapat memperpanjang usia produksi sumur minyak.

Pada awal mula perkembangannya, cara *Thermal Injection* ini dilaksanakan dengan cara menginjeksikan secara langsung uap panas bersuhu 250 derajat Celcius kedalam sumur penghisap dan didiamkan selama beberapa hari.

Selama masa penungguan itulah sumur penghisap ditutup. Uap panas akan memanaskan minyak dalam sumur sehingga kekentalannya menurun dan mudah dihisap keatas.

Pemompaan dapat dilanjutkan lagi sampai minyak mengental atau terjebak kembali dikarenakan panas yang diinjeksikan telah hilang. Pada saat itulah kembali dilakukan injeksi uap. Cara ini disebut juga *Huff and Puff Method*. Namun cara ini mempunyai kelemahan, yakni seringnya sumur penghisap ditutup selama penginjeksian.

Belakangan mulai dikembangkan suatu modifikasi dari metode *Huff and Puff*. Uap panas yang mulanya diinjeksikan langsung kedalam sumur, sekarang diinjeksikan kedalam reservoir secara terpisah dari sumur penghisap dengan menggunakan pipa. Metode ini sering disebut *Steam Flooding*.

Biasanya pipa penginjeksi terletak di tengah beberapa sumur penghisap. Perbandingan banyaknya pipa injeksi terhadap sumur penghisap tergantung dari struktur geologi dari reservoir dan sifat dari minyaknya.

Secara umum semakin kental minyak semakin banyak pipa penginjeksi yang dibutuhkan. Ada beberapa pola yang sering digunakan sebagai konfigurasi antara pipa penginjeksi dan sumur penghisap. Misalnya *five-spot pattern*. Konfigurasi ini berbentuk satu pipa penginjeksi yang dikelilingi empat sumur penghisap. Konfigurasi lainnya misalnya *seven-spot pattern* dan *nine-spot pattern*.

Uap yang diinjeksikan berasal dari air yang dipanaskan unit pembangkit panas (*Steam Generator*). Sebelum diubah menjadi uap, air yang digunakan terlebih dahulu diolah untuk menghilangkan zat pengotor yang terlarut. Kotoran dihilangkan dengan menambahkan garam Zeolite kedalamnya serta penambahan *softener* berupa tawas untuk menghilangkan kandungan ion Magnesium dan Kalsium.

Setelah air bersih dari kotoran barulah kemudian diproses menjadi uap panas bersuhu sekitar 300 derajat Celcius dengan tekanan 50 kali tekanan atmosfer. Uap itu

didistribusikan keseluruh pipa penginjeksi.Uap yang diinjeksikan akan mendorong minyak kearah sumur penginjeksi dan memperbesar tekanan minyak dalam reservoir sehingga memudahkan minyak untuk naik keatas permukaan tanah.

Tentu saja karena uap panas yang diinjeksikan kedalam sumur minyak membentuk campuran emulsi dengan minyak, hasil yang terangkat keatas permukaan tanah adalah campuran antara minyak, gas, dan air hasil kondensasi uap panas.

Berbeda dengan metode *Huff and Puff*, pada metode *steam flooding* uap panas diinjeksikan tidak cukup hanya beberapa hari tapi secara terus menerus selama beberapa tahun. Semakin banyak kandungan minyak yang diperkirakan, maka waktu penginjeksian akan semakin lama. Setelah penginjeksian uap panas selesai kemudian dilanjutkan dengan penginjeksian air panas ke reservoir sebagai pengganti uap selama beberapa tahun. Memang ada jeda waktu antara awal penginjeksian dengan peningkatan hasil minyak yang dihasilkan oleh injeksi minyak.

Namun selama penginjeksian ini sumur penghisap tidak perlu ditutup sehingga produksi minyak dapat terus berlangsung.

Kadang struktur geologi reservoir yang unik ditambah dengan jarak antara pipa penginjeksi dengan sumur penghisap yang berbeda dapat mengakibatkan pendistribusian panas yang tidak merata. Hal ini akan menyebabkan minyak pada salah satu sumur akan terhambat karena minyaknya mengental lagi. Peristiwa ini disebut *Scaling* atau penyumbatan. Barulah metode *Huff and Puff* dapat digunakan.

Kelemahan metode *Steam Flooding* adalah sumber daya yang diperlukan adalah sangat besar. Sumur minyak Duri, yang pertama kali menggunakan metode *Steam Flooding* di Indonesia, dengan sekitar 2000 sumur injeksi memerlukan 1,2 juta barel air perhari untuk diinjeksikan dalam bentuk uap. Dan itu tentu saja memerlukan energi cukup besar agar supaya panas yang disuplai tidak hilang dalam perjalanan ke reservoir.

Namun seiring dengan perbaikan metode, penggunaan bahan bakar untuk mensuplai panas dapat dikurangi. Penggunaan panas buang yang dapat digunakan ulang dan pengisolasian pipa penginjeksi dapat mengurangi penggunaan bahan bakar. Sedangkan air untuk penginjeksian diperoleh dari hasil fraksinasi pemisahan minyak mentah dengan air.

Tapi apakah bila minyak disedot habis dari dalam bumi tak membahayakan? Memang masih ada anggapan awam apabila minyak disedot habis dari dalam bumi akan meninggalkan rongga besar didalam bumi yang dapat mengakibatkan tanah menjadi amblas.

Mengenai kekhawatiran itu, Suryo Purwono menjelaskan, "Minyak itu sebenarnya terjebak didalam batuan berpori dengan porositas antara 0.1 sampai 0.4. Jadi apabila minyaknya diserap tak akan meninggalkan lubang sebesar yang dikira. Lagi pula minyak yang terserap akan digantikan tempatnya oleh uap yang terkondensasi menjadi air. Sehingga struktur batuan dalam reservoir itu sendiri tetap kokoh."

Namun ia tak mengelak adanya pengaruh terhadap lingkungan. "Setiap buatan manusia tentu ada pengaruhnya. Namun kalau tanah longsor yang disebabkan oleh pengeboran minyak saya kira belum pernah terjadi", ujarnya menolak kemungkinan tanah longsor.

Memang, semakin canggih teknologi yang dapat digunakan, kemungkinan untuk mengeksploitasi alam itu semakin terbuka lebar. Namun teknologi hanyalah sebagai alat bantu belaka. Yang paling penting adalah mental dari manusianya❑

M.Arifin
M.A.Fitrianto

Trend Hobi Burung

Cermin Masyarakat Modern yang Alienatif?

Belakangan ada fenomena baru muncul di kota-kota besar. Kalangan kelas menengahnya banyak yang meminati hobi burung. Konon, ada kepuasan yang dicari. Adakah ini cermin masyarakat modern yang kian alienatif ?

Erich Form dalam bukunya *Masyarakat yang Sehat* mensinyalir bahwa kehidupan modern yang sangat rasionalistik dan materialis telah membuat manusia kehilangan keseimbangan dalam kehidupannya. Dikatakannya, bahwa manusia bukan saja tidak lagi mengenal lingkungannya, tetapi bahkan tidak mengenal dirinya sendiri. Ia tercerabut dari akar kehidupan pribadinya.

Model kehidupan yang demikian agaknya juga telah melanda manusia Indonesia. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Ujung Pandang, dan lainnya, fenomena seperti itu telah menimpa sebagian warganya.

Aktivitas yang beragam dan mobilitas kerja yang begitu tinggi telah menjadikan manusia asing dengan sekelilingnya. Yang ada adalah kerja, kerja, dan kerja. Atau, target, target, dan target untuk mencapai jenjang puncak prestasi.

Hal itu kemudian menjadikan pincang salah satu dari bagian kehidupan mereka. Ada yang sesuatu yang hilang yang mereka rasakan. Itulah yang dalam psikologi dikenal dengan istilah alienasi (keterasingan).

Dunia kerja yang sangat kompetitif telah membuat hubungan antarmanusia lebih bersifat tendensius dan transaksional. Hubungan komunikasi antara orang per orang adalah hubungan sepanjang apabila hal itu menguntungkan, baik untuk diri pribadi maupun perusahaan. Pihak yang diperkirakan tidak memberikan keuntungan tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Bila perlu diacuhkan. Kehidupan kota telah membuat nilai ketulusan sebuah hubungan menjadi sirna.



Menikmati anggungan perkutut
Masyarakat kota yang teralienasi

Di kota, yang namanya tetangga - misalnya- adalah orang yang jarak rumahnya puluhan kilometer jauhnya. Rumah di kanan kiri bukanlah tetangga karena mereka tidak pernah saling kenal ataupun menyapa. Tidak ada komunikasi antar mereka meskipun secara fisik mereka sangat dekat. Tetapi, sesungguhnya mereka sangat berjauhan. Bahkan, untuk merasa tahu dengan kepentingan rumah sebelah pun mereka tidak merasa perlu.

Back To Nature

Proses seperti itu lama-kelamaan akan mencapai titik jenuh. Naluri kodrati manusia yang ingin selalu mendapatkan sesuatu yang murni, tulus, dan betul-betul manusiawi akan selalu muncul ke permukaan. Jiwa mereka tetap menuntut untuk dipenuhi kebutuhannya.

Sebagian mereka mewujudkan hal itu lewat kegiatan-kegiatan *adventure*. Tak heran kawasan Puncak misalnya setuap akhir pekan selalu kebanjiran manusia-manusia kota yang ingin menikmati indah dan damainya alam pegunungan selama satu atau dua hari. Tempat-tempat wisata pada saat yang sama juga berjibun manusia yang datang untuk menikmati kealamiahan dan kemurnian suasananya.

Orang merindukan hal-hal yang alamiah yang tidak lagi didapatkan di kota. Hijaunya pepohonan, kicau burung, gemercik air, lenguh kerbau, sejuknya udara, keceriaan yang tulus

dari anak-anak desa, mereka temukan kembali kala mereka "turun" kota.

Fenomena seperti itu kemudian dikaitkan dengan fenomena *back to nature*, kembali ke alam. Sebuah upaya di mana manusia ingin mencari kembali bagian dari kehidupannya yang hilang karena hiruk-pikuk dan bisingnya kehidupan kota.

Hobi Burung

Sebagian yang lain mewujudkan pelampiasannya lewat hobi memelihara burung. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara sempurna mengapa ke arah itu kompensasinya.

Yang jelas fenomena memelihara burung ini belakangan semakin trend saja di kalangan kelas menengah orang-orang kota. Untuk yang satu itu mereka kadang tidak berhitung lagi dengan uang. Berapapun besarnya akan mereka bayar asalkan kebutuhan hobinya bisa dipenuhi.

Maka jangan kaget kalau ada yang mengatakan harga seekor burung sekian puluh juta rupiah. Perkutut *Susi Susanti*, misalnya, harganya sampai Rp 280 juta karena anggungan suaranya yang begitu merdu dan lebih dari sepuluh kali menang di lomba.

Atau, jangan bengong juga kalau mendengar cerita ada seseorang berani menukar mobilnya terbaru dengan seekor burung. Ini bukan isapan jempol, tetapi memang begitu kenyataannya.

Orang boleh berpikir untuk apa berbuat semacam itu? Bukankah itu seperti orang gila? Bagaimana mungkin itu terjadi dan apa logikanya?

Jawabannya ternyata mudah. Dalam soal hobi, orang ternyata tidak bisa bicara angka. Untuk sebuah kesenangan, untuk sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan batinnya, apapun akan dipertaruhkan.

"Saya sudah menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membeli perkutut-perkutut ini. Tapi, satu tidak pernah berhitung itu. Yang penting saya senang, puas, dan tenteram batin saya. Mendengarkan anggungan perkutut, rasanya hilang stres saya. Semua persoalan kerja rasanya selesai hari itu juga," aku Djauhari, penghobi burung asal Jl Yos Susarso 19 Solo kepada *Balairung*.

"Selain bonsai, saya juga mengoleksi banyak bekisar. Tak perlu saya sebut berapa besar yang saya habiskan untuk kesenangan seperti ini," tambah Ismail Saleh, mantan Menteri Kehakiman, yang juga tokoh KEMARI (Keluarga Penggemar Bekisar Indonesia).

Sebuah upaya dimana manusia ingin mencari kembali bagian dari kehidupannya yang hilang karena hiruk-pikuk dan bisingnya kehidupan kota

Adi Andojo, Jaksa Agung MA yang diberhentikan gara-gara membongkar kasus kolusi, kini juga asyik dengan perkutut-perkutut piaraan di kediamannya. Bahkan, ia juga sudah mulai beternak. Indukan-indukan perkututnya tentunya berharga jutaan.

Mereka adalah sebagian yang bisa dicontohkan di sini. Masih banyak yang lain yang melakukan hal yang sama. Jika ingin lebih yakin, datang saja ke lomba-lomba burung yang diadakan setiap minggu yang bergilir dari satu kota ke kota lain.

EBD



Menghias rumah dengan aneka sangkar & burung
Menunjukkan gengsi untuk pemiliknya

PBI (Perhimpunan Burung Indonesia), P3SI (Persatuan Pelestari Perkutut Seluruh Indoneia), PPDSI (Paguyuban Pelestari Derkuku Seluruh Indonesia) atau KEMARI mempunyai jadwal reguler pelaksanaan lomba-lomba yang mereka selenggarakan sepanjang tahun.

Uniknya, lomba-lomba yang mereka gelar tidak pernah sepi dari peserta. Arena lomba sesak dengan lautan manusia yang datang dengan burung andalan masing-masing. Lomba burung kicauan di Malang beberapa waktu diikuti lebih dari seribu peserta.

Mereka datang dari hampir seluruh kota di Jawa. Bisa dibayangkan berapa ongkos yang harus dikeluarkan para peserta dari Jakarta atau Bandung misalnya, baik untuk transportasi, penginapan, lomba, akomodasi, dan sebagainya. Mereka harus membayar mahal hanya untuk sebuah kesenangan atau hobi. Tetapi, mereka datang memang tidak sekedar untuk mengikuti lomba. Lebih dari itu adalah bertemu dengan sesama penghobi untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya tidak transaksional, tidak tendensius, tidak bermuatan bisnis. Mereka bicara seputar hobi atau kesenangan lainnya.

Pertemuan seperti itu adalah pertemuan dan perbincangan yang sulit mereka temukan di hari-hari kerja, di mana semua harus dihitung berdasarkan prinsip untung rugi.

"Kehidupan modern memang telah menyebabkan manusia jadi terasing. Secara psikologis mereka membutuhkan pelampiasan, " ujar Mohammad As'ad, psikolog dari UGM, dalam sebuah kesempatan.

Lantas, apakah hobi burung benar-benar kompensasi dari keterasingan (*alienasi*) itu? Sulit untuk menjawabnya secara pasti. Tetapi, paling tidak, itu adalah cermin bahwa manusia modern tidak cukup puas dengan apa yang dicapainya. Ia masih membutuhkan hal lain untuk memenuhi kebutuhan batiniahnya❑

Among K. Ebo

ISO 14000:

Bisnis Berwawasan Lingkungan?

Standar manajemen mutu menjadi tuntutan pasar global. Dengan ISO 14000 aspek lingkungan menjadi perhatian. Seberapa jauh standarisasi ini menopang laju bisnis Indonesia dalam percaturan internasional? Sejauh mana kelestarian lingkungan mempengaruhi kesinambungan kehidupan?

Sering kita menemukan logo unik bertuliskan *environmental friendly, saved ozon* dan sejenisnya pada produk-produk tertentu. Kemudian kita juga mendengar tentang bisnis berwawasan lingkungan sebagai suatu bentuk bisnis yang bermutu dan bergengsi.

Memperbincangkan bisnis berwawasan lingkungan, maka isu tentang ISO 14000 tidak dapat dipisahkan darinya.

ISO 14000 adalah standar lingkungan yang menjadi alat konsumen, merupakan perubahan dari sistem perintah dan pengawasan pengelolaan lingkungan melalui *goverment regulations* ke *market insentif.*

Pada era perdagangan bebas di kawasan Asean (AFTA) tahun 2003, APEC 2005 atau kawasan global 2020, tarif bea cukai, otoritas pemerintah, tidak bisa lagi digunakan untuk menghambat masuknya berbagai produk ke wilayah suatu negara.

Namun kekuasaan untuk menyaring itu beralih dari badan-badan pemerintah ke standarisasi yang diterapkan konsumen. Tuntutan konsumen ini dituangkan dalam bentuk peraturan sukarela. Apabila para produsen, penjual atau eksportir tidak memenuhi ketentuan yang dikehendaki ini, sebagai sanksi dari konsumen, produknya tidak laku.

Dapat dikatakan standarisasi manajemen lingkungan internasional ini lahir sebagai kontribusi masyarakat Eropa. Ini berawal dari hutan-hutan yang ditebangi, air dan udara yang terkontaminasi limbah kimia, cerobong asap industri manufaktur yang mengepul sejak 200 tahun lalu di Eropa dan pada akhirnya lubang Ozon sebesar dua kali benua Eropa.

Disadari bahwa kerusakan lingkungan berjalan sangat cepat, bersifat *irreversible* (tak dapat dipulihkan) dan global, akibat yang ditimbulkan melewati batas-batas negara dan menjangkau batas-batas generasi. Gangguan terhadap keseimbangan alam menjadi ancaman bagi kelanjutan kegiatan hidup manusia.



REPRO KOMPAS

Akumulasi penggunaan hak untuk mencemari lingkungan, mengakibatkan petaka

Kenyataan ini menyadarkan masyarakat dunia akan arti penting kelestarian alam dan meningkatkan kepedulian mereka terhadap lingkungan yang sehat. Gerakan *green consumer* merebak di seluruh dunia. Bisnis berwawasan lingkungan -yakni kegiatan ekonomi yang memiliki kesetimbangan yang sehat dan dinamis dengan ekologi, sumber daya alam dan manusia- berkembang pesat.

Terdorong oleh kesadaran akan pentingnya kesetimbangan ini maka dunia usaha mengembangkan konsep manajemen mutu dan manajemen lingkungan (*Total Quality Management & Total Quality Environmental Management*).

International Organization for Standarditation (ISO), sebuah badan internasional yang independen, berkedudukan di Jenewa, membakukan standard ISO 9000 untuk sistem manajemen mutu pada tahun 1987. Menyusul kemudian sejak awal 1990-an, ISO membentuk *Technical Committee* 207 untuk membuat standarisasi manajemen lingkungan yang dinamakan ISO 14000. Standarisasi ini resmi dilaksanakan pada bulan Juni 1996.

ISO telah menghasilkan ribuan standar yang disepakati dan dipakai oleh dari 99 negara di dunia.

Mengingat bahwa standar kualitas produk menjadi satu-satunya 'tiket masuk' pada pasar bebas, banyak negara kini mengembangkan standar

...asional. Di bidang lingkungan, ...tandar ini antara lain ...diimplementasikan dengan *ecolabelling*.

Keuntungan yang diharapkan dari ISO 14000 antara lain adalah menjadi muara dari ekolabel yang banyak dibentuk pemerintah berbagai negara, perusahaan dan lembaga konsumen.

ISO 14000 secara teknis meliputi sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, ekolabel, evaluasi kinerja lingkungan, analisis daur hidup produk, terminologi & definisi serta standar produk dari aspek lingkungan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan, ISO 14000 adalah perubahan sistem pengolahan limbah pada akhir pipa pembuangan ke sistem pencegahan polusi. Ini berarti keseluruhan proses produksi, sejak awal pemilihan bahan mentah hingga pengemasan hasil produksi dirancang sedemikian rupa untuk tidak menyisakan limbah yang merugikan lingkungan.

"Barang atau jasa yang dihasilkan harus bisa didaur ulang, diminimalisasi polusinya, digunakan kembali atau di-*design* ulang," demikian diterangkan oleh Drs. Wakhid Slamet Ciptono, MBA., MPM., peneliti serta pengajar di Fakultas Ekonomi dan Program Magister Manajemen UGM.

Sistem penanganan limbah yang sebelumnya biasa digunakan, yakni penanganan pada akhir proses produksi saja *(end of pipe)* memang sudah seharusnya ditinggalkan. "Itu konsep yang sudah sangat kuno dan tidak efektif digunakan," demikian Dr. Shalihuddin Djalal Tandjung, M.Sc, Dosen ilmu lingkungan UGM ini menandaskan.

Selama ini konsep *end of pipe* melahirkan *poluter pays principle*, yakni prinsip membayar ganti rugi bagi yang mencemari. Ini mengakibatkan industriawan memilih untuk membayar ongkos ganti rugi daripada membiayai lebih mahal untuk memasang alat pengolahan polutan. "Akhirnya berkembang menjadi lebih jelek lagi, tercipta hak untuk mencemari", lanjut Pak Djalal saat ditemui *Balairung* di kantornya.

ISO 14000 SECARA TEKNIS MELIPUTI SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN, AUDIT LINGKUNGAN, EKOLABEL, EVALUASI KINERJA LINGKUNGAN, ANALISIS DAUR HIDUP PRODUK, TERMINOLOGI & DEFINISI SERTA STANDAR PRODUK DARI ASPEK LINGKUNGAN.

Lebih jauh beliau menerangkan, bahwa peraturan menetapkan suatu bahan pencemar sisa produksi tidak boleh lebih dari batas tertentu, telah menjadikan banyak produsen mengambil selisih terakhir dibawah batas yang masih dibolehkan tersebut. Masing-masing pabrik memang tidak melanggar ketentuan, tetapi akumulasi dari limbah kegiatan sejenis akan melampaui nilai ambang batas.

Pengolahan polusi yang efektif hanya dapat dilakukan bila diperhitungkan sejak persiapan proses produksi. Pola ini dinamakan pencegahan polusi yang diterapkan dalam ISO 14000. Penerapan itu dilakukan antara lain dengan menghemat bahan baku dan energi lewat teknologi yang bersahabat

Drs. Wakhid S. Ciptono, MBA. MPM.

"Perguruan Tinggi perlu menerapkan ISO 14000"

Sementara di negara-negara industri pola *green consuming* gencar dikampanyekan, dalam masyarakat awam di Indonesia produk-produk sehat lingkungan belum populer. Kesadaran konsumen ini antara lain terkait erat dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki dan profesionalisme produsen.

"Sebagai indikasi, dari 85.000 sarjana teknologi di Indonesia hanya 1% yang *go international*. Filipina dan Singapura bahkan jauh di atas itu. Karena itu ISO juga perlu bagi Perguruan Tinggi agar produk intelektual bisa kompetitif," tutur Drs. Wahid Slamet Ciptono.

Perguruan Tinggi harus meningkatkan kualitas dan bertanggung jawab pada lingkungan dengan tidak mencetak sarjana pengangguran. "Limbah intelektual lebih berbahaya daripada limbah pabrik, karena manusia punya cipta, rasa, dan karsa, tapi tidak mendapat tempat," lanjutnya.

Dalam rangka peningkatan kualitas, mahasiswa jangan hanya diarahkan untuk mencapai IPK tinggi. "IPK tinggi cenderung mengalami inflasi dan bisa menjebak," kata salah satu pendiri Program Pengembangan Usaha Kecil UGM ini.

Lebih lanjut ia melihat bahwa usaha semata-mata mencapai IPK tinggi sering membuat mahasiswa menjadi individualistis, memiliki ego kelewat tinggi. Hal ini mengakibatkan produk Perguruan Tinggi menjadi tidak peka lingkungan dan tidak memiliki kemampuan kerjasama yang baik. "Perusahaan yang berpikir *ecolabelling* tidak hanya menuntut sarjana ber-IPK tinggi," ungkapnya.

Sistem di Perguruan Tinggi seharusnya mencetak IPK baik yang dicapai melalui proses kewirausahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif yang dinilai dari kreativitas dan ketrampilan tambahan yang dimiliki, tanggung jawab, profesionalisme, kepekaan lingkungan, dan kemampuan bekerja sama.

Sistem ini menuntut dosen agar tidak berhenti belajar. "Dosen yang catatan materinya dari tahun ke tahun sama titik-komanya, itu tidak mengarahkan mahasiswa peka lingkungan, lingkungan kan selalu berkembang," ungkap dosen muda yang tengah menyusun disertasinya❑

Nur Hidayati

dengan lingkungan.

Dalam jangka pendek, membangun teknologi yang sehat lingkungan memang memerlukan investasi yang tidak sedikit. Namun, teknologi yang peduli terhadap kelestarian alam itu, dalam jangka panjang justru menguntungkan produsen. Di samping itu akan membuka peluang untuk merebut pasar dunia dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah eko-efisiensi.

Salah satu perwujudan dari eko-efisiensi adalah penerapan ISO 14000. Di sini prinsip ekonomi dan keseimbangan lingkungan sama-sama ditegakkan "Jangan gunakan kata *atau* antara kepentingan ekonomi dengan lingkungan, pakailah kata *dan*, di situ gunanya ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Prof Dr Koesnadi Hardjasoemantri, pakar Hukum Lingkungan UGM.

Menyoal teknologi sehat lingkumgam, salah satu imbasnya berefek pada pada harga produk di pasar. Produk yang berlabel ramah lingkungan sering dikatakan lebih mahal.

Menanggapi hal ini, Dr. Djalal Tandjung menerangkan bahwa masyarakat mesti memandang lebih jauh ke depan. Bahwa, proses produksi dan produk yang tidak sehat pada dasarnya selalu mengakibatkan biaya eksternal yang tidak disadari. Sebab biaya kuratif untuk memperbaiki kerusakan selalu lebih mahal dari biaya preventif.

Namun demikian, tak sedikit kalangan yang menilai bahwa penerapan standarisasi lingkungan sering digunakan sebagai proteksi atau pun bagian dari politik dagang negara-negara industri, seperti yang disampaikan PL Coutrier, Deputi Bidang Amdal dan Pembinaan Teknis BAPEDAL *(Kompas, 12/2/97)*.

Banyak kasus dapat dijadikan contoh 'kecurangan' politik dagang tersebut. Antara lain kayu tropis Indonesia sering dcurigai sebagai proses produksi yang mengeksploitasi hutan tropis. Begitu juga tudingan negatif terhadap produk rokok kretek Indonesia yang sebenarnya telah dinetralisir kadar nikotinya dengan ramuan rempah.

"Produk ikan Tuna kita juga termasuk *watchlist* USA," contoh Dr. Ir. Sri Rahardjo, pengajar Fakultas Teknologi Pertanian UGM.

Lebih lanjut, Dr. Raharjo berpendapat bahwa untuk meningkatkan kredibilitas, kita harus membuktikan bahwa produk-produk kita mampu memenuhi ketentuan standarisasi yang ditetapkan pasar dunia. "Dengan memperoleh ISO 9000 & ISO 14000, berarti kualitas produk kita diakui," ujarnya.

Senada dengan itu, Dr. Djalal Tandjung menjelaskan bahwa dilihat dari sejarah terbentuknya, ISO tidak dibuat sekedar sebagai politik dagang untuk menekan negara-negara berkembang. "Justru kecurangan itu mestinya membuat kita lebih memperhatikan lingkungan, antara lain dengan menerapkan ISO 14000," tandasnya.

Ia juga menegaskan bahwa sistem yang dituntut oleh ISO 14000 merupakan pola penanganan lingkungan yang cukup efektif.

Namun, ISO 14000 tidak bisa dilihat dari aspek standarisasi saja, tetapi lebih sebagai alat pengelolaan lingkungan secara bertahap.

Drs. Wakhid S. Ciptono mengemukakan, " Hakekat konsep ISO itu kembali ke fitrah manusia, kembali ke alam, bahwa *time is not only about money*".

Lebih jauh, ia memaparkan bahwa perkembangan waktu harus berarti perkembangan kreativitas untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dengan menekankan kemitraan serta bertanggungjawab pada generasi selanjutnya.

Setiap kegiatan manusia selalu berkaitan dengan lingkungan. Menjaga lingkungan, berarti menjamin kelangsungan hidup manusia. Karena kehidupan bukan hanya ada hari ini, maka kelestarian alam dan masa depannya menjadi tanggung jawab bersama ❐


REPRO

Memenuhi tanggung jawab dengan membangun kawasan sehat lingkungan

Nur Hidayati
Irma Hidayana

Berita Singkat Lingkungan

6 Jam Bebas Emisi Carbon, sebuah pesan moral

Untuk kali kedua mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM mengadakan aksi unik, sadar lingkungan. Acara yang diberi label Jaringan '97 (Kerja Seiring Lingkungan), dikemas dalam bentuk penutupan jalan utama masuk kampus UGM Bulaksumur dari semua arah untuk semua jenis kendaraan bermotor.

Acara ini dilangsungkan dengan mengambil momentum Peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 1997. Sejak jam 06.00 BBWI dengan diresmikan oleh rektor UGM, acara dimulai. Udara Yogya khususnya kampus Bulaksumur benar-benar segar dan bersih. Acara baru selesai setelah jam 12.00 BBWI.

Acara ini tidak berarti terus menjadikan langit kian biru. Sangat kecil artinya bagi sebuah gerakan lingkungan, tetapi itu adalah sebuah pesan moral. Dari event kecil inilah paling tidak kita mempunyai komitmen untuk lingkungan hidup kita, untuk bumi kita satu-satunya ❐

LA.

Kedokteran Kehakiman:

Mendeteksi Kasus *Dark Number*

Kasus-kasus kematian atau pembunuhan kadang diliputi misteri. Kasus Udin, Marsinah, atau TKW Atie sebagian contohnya. Sampai kapan kematian 'gelap'-nya harus menggantung? Tidak adakah keadilan bagi mereka? Tidak adakah perangkat untuk menguak tabir misteri kematian mereka? Bagaimana kedokteran kehakiman menunjukkan perannya ?

Dark Number! Istilah ini digunakan untuk menyebut kasus-kasus yang tidak terselesaikan hingga tuntas. Kasus yang masih kabur atau "dikaburkan". Dan kasus semacam ini, tidak satu dua kasus terjadi.

Tentang kasus yang *dark number* ini, ada beberapa contoh yang mudah kita ingat. Kita tentu masih ingat dengan beberapa kasus peradilan yang masih belum terbongkar di bawah ini. Kasus *Marsinah*, *Langenastran*, TKW *Atik*, sampai yang masih segar yaitu *Udin-Marsiyem*.



Mengapa kasus *dark number* bisa terjadi? Benarkah kasus-kasus semacam itu direkayasa? Atau, faktor apakah yang bisa membuat sebuah kasus di "peti-es" kan? Benarkah karena alasan politis, karena alasan keamanan, atau karena ketidakmampuan aparat kepolisian dalam mengungkap suatu kasus?

Terlepas dari pertanyaan-pertanyaan di atas, bila dicermati kasus-kasus itu akan terlihat ada kesamaan karakternya. Yakni, tidak terlacaknya jejak keadilan karena saksi utama telah terbunuh, atau berusaha "dibunuh kehidupannya".

Siapa, apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa mereka terbunuh? Ini pertanyaan yang kerap tidak mudah dijawab dan sangat sulit pembuktiannya.

Saksi Ahli

Tidak jarang, pembuktian sebuah kasus memerlukan keterangan para ahli atau pakar di bidangnya. Di antara para ahli yang kerap dibutuhkan perannya itu antara lain Psikolog, Pengacara, Konsultan, ABRI, Dosen, dan Dokter. Khusus dokter yang dibutuhkan bantuannya untuk membantu pembuktian tadi biasanya populer dengan sebutan kedokteran kehakiman atau *Medical Forensik* (MF).

Dilihat dari posisinya sebagai kedokteran kehakiman (MF) maka ruang lingkup kewenangannya meliputi dua aspek sekaligus: aspek medis dan aspek hukum.

Aspek medisnya meliputi seluruh ilmu kedokteran mulai ilmu dasar sampai ilmu klinis dengan dasar etika dan sumpah dokter. Sedangkan aspek hukumnya meliputi hukum pidana, perdata, serta administrasi, baik peradilan umum maupun militer.

Menurut dr. R. Soegandhi, Kepala *Medical Forensik* RSUP Dr. Sardjito yang juga staf pengajar senior di Fakultas Kedokteran UGM, dalam posisinya sebagai saksi ahli, dokter berhadapan dengan jaksa, hakim, penasihat hukum, dan terdakwa.

"Seorang dokter datang sebagai saksi ahli atau saksi biasa itu berdasar permintaan penyidik, sesuai Pasal 120 dan 133 KUHP," ujarnya.

Namun, tidak dalam semua kasus peran dokter dibutuhkan. Perannya baru dibutuhkan dalam kasus-kasus peradilan yang berupa kriminalitas, kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, kecelakaan olah raga (berkaitan dengan asuransi), serta kasus-kasus misterius semisal kematian mendadak

Alat Bukti

Untuk pengungkapan dan pembuktikan sebuah kasus

dibutuhkan alat-alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa sebuah kasus itu terjadi.

Dalam Pasal 184 KUHP disebutkan bahwa yang dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah adalah sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat keterangan, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Mengapa keberadaan saksi ahli dibutuhkan dalam sebuah peradilan? Ini karena peradilan membutuhkan keterangan sesuatu hal oleh orang yang memiliki keahlian khusus atau mempunyai kepakaran dalam bidangnya. Keterangan dari saksi ahli ini berguna untuk kepentingan pemeriksaan, baik perkara pidana maupun perdata.

Bila saksi ahli yang dibutuhkan adalah seorang dokter, maka keterangan yang bisa didapatkan darinya antara lain surat keterangan sakit, surat keterangan sehat, surat keterangan sakit jiwa, dan *Visum et Repertum* (VR).

Visum et Repertum ini sesungguhnya adalah laporan tertulis dari dokter tentang hasil pemeriksaan barang bukti atas permintaan penyidik dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan.

Dasar hukumnya adalah KUHAP No. 8 Th. 1981 dengan nama Surat Keterangan Ahli sebagai saksi ahli. Yang berhak meminta VR adalah semua petugas atau penyidik kepolisian yang berada di wilayah kerjanya serta pada saat jam tugas. Ini mengacu pada Pasal 6 dan Pasal 10 KUHAP dan penjelasannya.

Tentang dokter yang berhak memberikan VR, seperti dijelaskan dr. R. Soegandhi, adalah semua dokter dan dokter ahli yang telah mempunyai ijin praktek dokter, dokter puskesmas, rumah sakit, dan dokter pribadi.

Barang bukti yang dimintakan VR bisa benda mati atau makhluk hidup. Benda mati misalnya jenazah, atau mayat hasil penggalian kuburan. Sedangkan bukti makhluk hidup misalnya, korban penganiayaan, perkosaan, atau pelaku yang dicurigai mengalami gangguan jiwa.

Materi VR yang berisi data objektif medis kondisi pasien ini bersifat rahasia. Tetapi, berdasar UU No. 8 KUHAP 1981 dan lembaran Negara No. 350 tahun 1937 untuk kepentingan peradilan, maka rahasia ini boleh dilepas dan diberitahukan dalam bentuk alat bukti., keterangan saksi ahli ataupun Surat Keterangan Ahli.

Menurut dr. R. Soegandhi, bila ada surat permintaan dari penyidik, --hakim atau jaksa-, ia dapat membuat surat keterangan atas permintaan tersebut. "Tetapi sebaiknya SK itu dibuat bukan *per person* karena bisa sangat subyektif dan bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan buruk," tegasnya.

Pembuatan Surat Keputusan sudah seharusnya dibuat per instansi, misalnya rumah sakit, karena keterangan yang diberikan bisa lebih obyektif dan lebih kuat di pengadilan.

Kasus Udin-Marsiyem

Untuk mengetahui kerja dari Kedokteran Kehakiman kita dapat mengambil contoh kasus Marsiyem. Kasus Marsiyem berawal dari peristiwa Udin (wartawan Harian *Bernas*) yang mati misterius. Kebetulan dalam kasus ini, Marsiyem,

Kasus Marsiyem:
Skor Depresi Macral

Dalam buku *Forensik Psychiatri di Forensik Med. For Lawyers*, Macral (1988) mengatakan bahwa dokter ahli jiwa dalam Kedokteran Kehakiman mempunyai tiga tugas. *Pertama*, mengidentifikasi siapa yang menderita mental. *Kedua*, menyarankan pengadilan mencari jalan penyelesaian terbaik. *Ketiga*, rehabilitasi pasien.

Depresi adalah kasus yang paling banyak ditangani oleh para dokter ahli jiwa dalam kasus-kasus kriminalitas. Depresi adalah gangguan afeksi (nada perasaan seperti gembira, kecewa, kasih sayang) dan emosi (manifestasi afek) pada seorang pasien.

Gangguan jiwa atau neurosis ini berbeda dengan sakit jiwa atau psikosis. Dalam neurosis, tilikan diri masih bagus, sedang pada psikosis terdapat gangguan tilikan diri, yaitu penderita tidak mampu lagi mengenali dirinya sendiri (gila).

Dr. Soemardi menjelaskan bahwa depresi dapat timbul dari stresor-stresor yang terus menerus. Bila depresi didiamkan bisa timbul gejala histeris dan akhirnya penderita dapat mengalami psikosis.

Gejala psikologis depresi adalah pendiam, sedih, pesimis, putus asa, lekas lupa, sukar konsentrasi. Sedangkan gejala badaniah adalah gangguan tidur (*insomnia*), gangguan makan (*anorexia*), kelihatan lelah, tak bersemangat, apatis, dan gangguan buang air besar (*konstipasi*).

Stresor psikososial kehilangan pasangan hidup ternyata mempunyai skor paling tinggi lebih dari 60. Berturut-turut urutannya sebagai berikut: perceraian, perpisahan, masuk penjara, kematian keluarga terdekat. Sedangkan yang berurusan dengan hukum mempunyai skor 29.

Menurut penelitian Holmes dkk, jika seseorang dalam waktu tertentu mempunyai skor lebih dari 300 maka kemungkinan 80% akan menderita sakit serius dalam dua tahun mendatang, bila mekanisme adaptasi dirinya tidak baik dan ia tidak mendapat bantuan dari orang lain.

Menurut daftar skor pada stresor psikososial Holmes tersebut, maka diperkirakan stres Marsiyem melebihi skor 266. Jadi, logis bila dr. Soemardi benar-benar mengkuatirkan kesehatan jiwanya. Apalagi lingkungan sekitar Marsiyem sepertinya memposisikan ia agar tidak sembuh□

Wuwun Widiawati Pr.

...kusaan, atau pelaku yang dicurigai ...ngalami gangguan jiwa.

...Materi VR yang berisi data objektif ...edis kondisi pasien ini bersifat ...hasia. Tetapi, berdasar UU No. 8 KUHAP 1981 dan lembaran Negara No. 350 tahun 1937 untuk kepentingan peradilan, maka rahasia ini boleh dilepas dan diberitahukan dalam bentuk alat bukti., keterangan saksi ahli ataupun Surat Keterangan Ahli.

Menurut dr. R. Soegandhi, bila ada surat permintaan dari penyidik, --hakim atau jaksa-, ia dapat membuat surat keterangan atas permintaan tersebut. "Tetapi sebaiknya SK itu dibuat bukan *per person* karena bisa sangat subyektif 'dan bisa dipengaruhi oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan buruk," tegasnya.

Pembuatan Surat Keputusan sudah seharusnya dibuat per instansi, misalnya rumah sakit, karena keterangan yang diberikan bisa lebih obyektif dan lebih kuat di pengadilan.

Kasus Udin-Marsiyem

Untuk mengetahui kerja dari Kedokteran Kehakiman kita dapat mengambil contoh kasus Marsiyem. Kasus Marsiyem berawal dari peristiwa Udin (wartawan Harian *Bernas*) yang mati misterius. Kebetulan dalam kasus ini, Marsiyem, istri Udin, menjadi saksi peristiwa itu. Karena rasa kehilangan dan tekanan psikis yang dialaminya, Marsiyem terkena depresi.

Menurut dr. Soemardi Prawirodiprodjo, pengajar Ilmu Kedokteran Kehakiman FK UGM dan psikiater RS Puri Nirmala, yang menjadi dokter jiwa Marsiyem, menyatakan bahwa Marsiyem menderita *Anxiety Depression*. Karenanya, sebagai saksi utama ia tidak boleh ditekan dalam proses pengadilan. Bila itu dilakukan dikuatirkan gangguan jiwanya akan semakin berat dan menyebabkan kegilaan.

"Kalau saksi utama sudah dinyatakan gila atau meninggal maka bisa dikatakan "selesailah" kasus Udin sebagai kasus Dark Number," ujarnya.

Untuk menghindari kekuatiran seperti itulah mengapa LBH, selaku kuasa hukum Marsiyem, meminta dr. Soemardi untuk merawat Marsiyem secara khusus. Dalam penanganan terhadap Marsiyem, aku dr Soemardi, ada dua cara yang dilakukan, yaitu Psikofarmaka (obat-obatan) dan Psikoterapi.

Penanganan Psikofarmaka dilakukan dengan memberikan obat-obatan anti cemas, anti depresi, dan vitamin. Sedangkan pengobatan Psikoterapinya dilakukan dengan cara membantu Marsiyem bergaul dengan lingkungannya.

"Kesembuhan seseorang dari depresi itu berasal dari dalam diri sendiri dan lingkungan. Mungkin ia sendiri mau sembuh, tapi kalau lingkungannya tidak mendukung depresi itu datang lagi. Misalnya tiba-tiba ada panggilan dari kejaksaan, diinterogasi, atau disidang lagi, ia akan kembali ketakutan kalau orang-orang di sekitarnya tidak membesarkan hatinya atau mendukung secara moral," ungkap dr. Soemardi.

Karena itulah dalam kapasitasnya sebagai saksi ahli dalam kasus Marsiyem, dr. Soemardi mempunyai hak untuk mengatakan bahwa seorang saksi belum bisa diajukan ke pengadilan untuk dimintai kesaksian karena alasan medis.

Disitulah terletak nilai penting peran saksi ahli dalam proses peradilan. ❑

Wuwun Widiawati
Aprilina, Mora Claramita

BUKU

PARTAI, PEMILU DAN DEMOKRASI

PENULIS: ARBI SANIT

CETAKAN: PERTAMA, 1997

PENERBIT: PUSTAKA PELAJAR, YOGYAKARTA

TEBAL BUKU: 253 + XXX HAL

Pemilu dan Parpol:

Alat Legitimasi Orde Baru

Di tengah suhu politik yang kian memanas --ditandai dengan munculnya beberapa fenomena kekerasan yang terjadi di berbagai daerah-- merupakan catatan menarik pada pemilu tahun ini.

Pertempuran antar OPP di berbagai daerah, penghadangan terhadap PDI Soerjadi, pemboikotan kampanye di Yogyakarta, serta munculnya "Mega-Bintang" merupakan beberapa hal yang menjadi fenomena menarik pada Pemilu kali ini.

***

Berbicara mengenai pemilu, sama halnya memperbincangkan demokratisasi. Artinya, pemilu merupakan salah satu indikator bagi kehidupan demokrasi sebuah negara. Karena, Pemilu adalah cermin kebebasan setiap warga negara.

Berangkat dari asumsi itulah kemudian Arbi Sanit --dalam buku ini-- mencoba menjelaskan tiga gagasan dasar dalam sebuah negara, yakni partai politik, pemilu dan demokrasi.

Di awal buku ini, Arbi Sanit menjelaskan bahwa sejarah perpolitikan Indonesia, terutama sejak pemilu tahun 1971, telah terjadi kemerosotan partisipasi politik secara kualitas maupun kuantitas. Walaupun harus diakui, pembangunan ekonomi bangsa Indonesia membawa kemajuan pesat, tetapi hal tersebut tidak menafikkan adanya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dengan kehidupan politik sehingga mengakibatkan terjadi budaya politik yang tidak sehat dan semakin menjauhkan esensi demokrasi itu sendiri.

Dalam buku ini, Arbi Sanit mengatakan bahwa ada tiga pilar kekuatan Orde Baru yang sangat kuat dan otoriter, yakni militer, birokrasi dan teknokrat yang menunjukkan kekuatannya sejak tahun 1970-an. Sehingga, muncul gerakan-gerakan radikal sebagai akibat *mandeg*nya pewadahan partisipasi politik rakyat, yang puncaknya meletuskan peristiwa Malari tahun 1974.

Pada bagian tulisan tentang pemilu, penulis yang juga pengamat politik UI ini, secara tegas mengatakan bahwa di setiap pemilu yang dilaksanakan di negara ini telah terjadi korupsi politik. Orde Baru telah membentuk sistem yang membuat partai politik tidak leluasa dalam melakukan geraknya. Hal ini terjadi karena pemilu belum diwujudkan sesuai mekanisme konstitusional yang saling berbagi kekuasaan antar partai. Pemilu lebih terlihat sebagai pemberi legitimasi bagi kelangsungan orde kekuasaan. Akibatnya, pemilu hanyalah sebagai mesin politik saja.



Dalam buku ini juga diusulkan untuk mengubah format pemilu dari sistem yang proposional menjadi sistem distrik --yang dengannya dianggap dapat mendorong pertumbuhan demokrasi yang lebih luas. Bila dilihat situasi politik kita, sangat sulit untuk melakukan perubahan tersebut karena masih besarnya dominasi salah satu partai yaitu Golkar.

Penulis juga menyoroti peranan militer dalam proses pemilu. ABRI sebagai salah satu pendukung utama berdirinya Golkar, selama beberapa pemilu terlihat sangat sulit untuk menunjukkan sikap netral. Hal ini menimbulkan kecemburuan partai-partai lainnya. Hanya dalam pemilu tahun 1992 saja ABRI sedikit bersikap netral. Itupun harus dibayar mahal dengan merosotnya perolehan suara Golkar di tiap-tiap daerah.

Harapannya tentang pemilu, penulis yang mantan aktivis mahasiswa ini sangat mendambakan suatu bentuk demokratisasi pemilu yang memberi peran aktif pada masyarakat sipil. Artinya, dominasi pemerintah kiranya dapat dikurangi sedikit demi sedikit sehingga dapat tercipta masyarakat politik (*political society*) yang aktif. Demokratisasi dalam pemilu penting artinya demi revitalisasi parpol dalam konstelasi perpolitikan kita. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini masyarakat lebih percaya pada lembaga-lembaga non pemerintah, --seperti LSM dan mahasiswa-- ketimbang parlemen yang sering dianggap sebagai mitos dan alat legitimasi kekuasaan negara.

Dalam buku ini, Arbi Sanit cukup cermat menganalisa setiap fenomena perpolitikan di Indonesia, sehingga buku ini sangat layak dibaca setiap kalangan, terlebih yang sangat merindukan perubahan sosial politik di Indonesia□

Ajianto
Mahasiswa Fisipol UGM, staf Forum Kajian Sosial Humaniora (FKSH)

Orkes Sumpek:

Merayakan Potongan-Potongan *Cengengesan*

Ada yang selalu melibat dalam penampilan Djaduk. Satire, ...uhan dan *cengengesan*. Juga ...tisasi di wilayah perwajahan ...etiknya yang di*plintir-plintir* secara ...as dagelan Mataram. Maka jadilah ...lu penjungkirbalikan makna, bahwa ...i adalah konser orkes sumpek, ...ahwa ini bukan pentas politik, tapi ...entas seni asli. Tapi di sana dipergelarkan komposisi *Komedi mBantul, Jam Malam, Nebak Janji, Minggu Tidak Tenang*.

Dan, kesempurnaan akrobatik malam itu digenapi dengan tampilnya gambar dua mendiang pelawak kondang Basiyo dan Gepeng -- dalam petitah-petitih kocak-- *sak begja-begjane wong kuasa luwih begjo wong ndagel, luwih begja maneh wong kuasa tur ndagel.*

Memahami proses kreatif Djaduk, untuk yang kedua kali ini tampil bareng dengan kelompok Kua Etnika, tidaklah terlalu rumit. Berbasah kuyup dengan kesenian tradisi, ia seperti ber-ibu-kan gamelan. Bapaknya adalah teater, tempat ia berkecimpung, baik sebagai aktor maupun ilustrator musik. Keduanya, kemudian menjadi semacam sinergi kreatif, dan melahirkan dirinya secara fenomenal di dunia musik Indonesia.

Djaduk adalah fenomena teater-musik, atau sebaliknya, satu karakter khas dia. Di situlah ia berdiri, di suatu titik ordinat sendiri, yang berbeda dengan titik-titik lain tempat Slamet A. Syukur, Sapto Raharjo, I. Wayan Sadre atau Suka Hardjana bermukim.

Maka barang siapa yang suka tetirah semadi di hutan lebat sana, janganlah kiranya mencicipi makanan gado-gado macam "orkes sumpek" ini. Agar keseriusan permenungan tak pecah dan meleler cair. Sebab warna-warni dari komposisi yang digelar malam itu, memang dikemas secara agak ugal-ugalan.

Sesekali musik mengalun pedih-perih, sebelum berkelanjutan dalam cekikak-cekikik seperti goro-goro di tengah pentas pewayangan. Satu saat berlari bersama nang-ning-nong musik gaya Bali, sebelum kembali ke laras pakem gamelan Jawa kembali, dan menggelitik sukma karena bikin orang rindu pada jaman kala masih bocah dulu; yakni sekumpulan anak, di pelataran di bawah sepuhan sinar terang rembulan, bermain dolanan dengan memanfaatkan instrumen apa saja yang ada. Panci, kentongan, tempolong ringsek, ember pecah, ditabuhi sekenanya digerakkan secara instingtif, bermain dan bermain dengan sangat cair, bebas dan merdeka.

MUSIK

PEMENTASAN MUSIK KONTEMPORER
DJADUK FERIANTO
PURNABUDAYA JUNI 1997

Pluralitas, boyongan renik-renik berbagai instrumen etnik, dari yang tradisional maupun modern, dari yang besar dan kecil, hadir bersama malam itu. Gamelan pamurba Jawa bertemu dengan gamelan Bali yang ritmis-lincah, ditingkahi saksofon, perkusi, biola, dan seperangkat komposisi instrumen elektrik. Eksplorasi bunyi dari berbagai alat musik yang dibawa (yang kecil-kecil itu) melahirkan bunyi-bunyian baru, menciptakan kemeriahan tersendiri dalam 9 komposisi yang diturunkan.

Aksentuasi masing-masing instrumen, disengaja menyelaraskan judulnya. Seperti pada komposisi *Jam Malam*, biola yang ditiup Fafan sangat mendominasi, ditemani perkusi dan keramaian ritmis instrumen elektrik dan alat-alat kecil, menciptakan nuansa ketegangan --di mana detak-detak jarum jam seperti sabeti keheningan yang mencekam. Konser *Nebak Janji*, gong-gong ditabuhi menirukan pesta janji para jurkam, yang bunyinya besar namun kenyataannya cuma denting kecil. Ting!

Komedi mBantul, dengan mudah orang mengaitkan kasus Udin dari Bantul, yang dinarasikan Djaduk dengan memukuli tuts-tuts mesin ketik, mendendangkan irama vokal yang diperlirih dengan bunyi seruling seperti pada galibnya orang menangis.

Demikian pula pada nomor *Blues Jeans Biru*. Mengambil *setting* suatu kompleks pelacuran, imajinasi pendengar seolah dibawa pada lorong-lorong sempit, sesak, binal -- yang dilagukan dengan suara langkah-langkah hidung belang yang celingak-celinguk, pada suatu malam❏

Prabowo



Konser Orkes Sumpeg Djaduk Ferianto
Menerobos sekat-sekat estetika seni

BUKU

JUDUL BUKU : JAMAN BERGERAK, RADIKALISME RAKYAT DI JAWA 1912 - 19(?)
PENGARANG : TAKASHI SHIRAISHI
PENERBIT : PUSTAKA UTAMA GRAFITI, JAKARTA, 1997

Petani di Antara Kapital dan Modal

Wacana mengenai gerakan rakyat di Indonesia dewasa ini secara historis sering mengalami pemenggalan. Seolah ada kewajiban untuk membuat periodisasi sejarah terhadap gerakan massa di Indonesia ke dalam masa setelah kemunculan Orde Baru saja.

Ketidaktahuan ini sering memunculkan pesimisme di kalangan aktivis gerakan. Ketika diskursus pemogokan atau gerakan massa dilontarkan, ada kecenderungan untuk lari pada referensi - referensi peristiwa di luar negeri misalnya *people power* di Filipina, gerakan mahasiswa Korea dan Cina, Teologi Pembebasan (*Misterium Liberations)* di Peru atau Che Guevarada Dom Helder Camara di Amerika Latin. Peristiwa di dalam negeri sendiri, misalnya pemogokkan buruh kereta api di Semarang relatif lebih jarang disebut karena pesona peristiwa-peristiwa di luar negeri itu.

Kemungkinan "minimisasi" itu ada dua. *Pertama,* ada kesengajaan politik untuk memproduksi kesadaran sehingga orang hanya terpaku pada peristiwa yang menyangkut kekuasaan politik yang sedang berlangsung. Banyak orang berkata, sejarah itu milik orang yang menang. Artinya, sejarah yang seharusnya sebagai sebuah kajian ilmiah sering terkontaminasi oleh bias politik yang diciptakan oleh struktur politik yang sedang berkuasa. Sejarah tidak sekedar menjadi peristiwa yang dingin dan temporer tapi bisa juga diusung ke masa berikutnya demi kepentingan politik.

Kedua, memang orang hanya perduli pada peristiwa penting saja karena peristiwa itu disebut sebagai *milestone.* Tonggak sejarah inilah yang seringkali mengubur peristiwa yang lebih kecil di belakang tonggak itu.

Demikian pula halnya dengan Sumpah Pemuda 1928. Sedemikian kelihatan pentingnya Sumpah Pemuda, sehingga peristiwa-peristiwa di rentang 1912-1926 menjadi sisi yang samar dalam sejarah Indonesia. Padahal, periode itu adalah periode ketika pergerakan Indonesia mulai mengenal nasionalisme lewat PNI tahun 1924, nyanyian dan lain-lain. Jadi bisa dibayangkan bagaimana semangat perlawanan pada periode itu. Meskipun demikian, pertanyaan mendasar yang penting untuk diajukan adalah siapakah yang dilawan?

Secara garis besar ada dua kekuatan yang dianggap merugikan petani waktu itu yaitu pemerintah dan kepitalisme. Dua kekuatan inilah yang dianggap menindas petani. Kapitalisme tidak disukai petani karena terus menghisap, sedang pemerintah karena seenaknya membebani petani dengan pajak dan membungkam suaranya. Ajaibnya, dua kekuatan ini saling menolong dalam menindas, seperti tergambar dalam karikatur ciptaan Misbach. Jadi kalau sekarang buruh tertindas lewat model HIP, petani waktu itu tertindas juga karena pertemanan pemerintah dan kapitalis. Pemerintah membungkam suara petani --"Kamoe pegang jang kras ' bijar kami moedah mengisepnya"-- bukan saja karena pemerintah kapitalis tapi karena pemerintah sendiri mau menghisap dengan pajak yang digambarkan dengan *datjinan,* alat timbang Jawa. Kemudian pemerintah memerintahkan petani, "Djangan kamoe boeka soera. Angkatlah datjinan jang kamoe pikul itoe" (hal. 200).



Pribadi - pribadi yang ditampilkan dalam uraian Siraishi dalam buku ini, berada dalam *range* karakter yang luas. Moralitas Dr. Cipto, Misbach sang mubalig plus agitator ulung serta kekerasan Mas Marco, bisa hadir secara utuh dalam buku ini. Dan lagi, ada garis yang tak terputus antara karakter pribadi itu dengan model organisasi mereka.

Buku terjemahan dari judul asli *The Age ini Motion* terbitan *Cornell University Press* tahun 1990, ini terdiri dari delapan bab. Kelihatannya kita tidak bisa memenggal bab per bab karena kuatnya keterkaitan antar bab. Diawali dengan bab pertama yang sudah menjanjikan kedalaman data seputar *setting* kota Surakarta sebagai tempat kejadian utama, bab-bab selanjutnya akan dipenuhi dinamika-dinamika yang ditampilkan dengan sangat detail dan komprehensif. Adapun, pemilihan kota Surakarta sebagai tempat utama, menurut Shiraishi, karena seluruh wakil gerakan yang ada di Jawa ada di kota itu. Di Surakarta ada priyayi Jawa, petani, intelektual Islam, pemilik pabrik, buruh, pedagangan Cina, pegawai administrasi Belanda, kaum Indo yang dalam kisah gerakan ini masing - masing akan saling berkawan atau bermusuhan. Buku ini sangat layak dibaca karena mengulas pola pola gerakan yang masih aktual sampai saat ini□

R. Kristiawan,
Mahasiswa Ilmu Komunikasi UGM,
Wakil Pemred Majalah *Sintesa*

Manusia tak Sadar dengan Permainannya Sendiri

Lampu siluet menyala menyinari layar putih yang menutup bagian belakang panggung. Bersamaan dengan munculnya suara musik, bayangan tarian muncul dan berputar-putar dari belakang layar. Dua sosok bayangan menari bak sebuah boneka di dalam kotak jam yang akan berputar menari begitu kotak tersebut dibuka.

Sesaat kemudian lampu utama

TEATER

JUDUL : ARIA DA CAPO
KARYA : EDNA ST. VINCENT MILLEY
SUTRADARA : ARA YOGASWARA, ANINDITO, SIDIQ PURNOMO
PURNA BUDAYA YOGYAKARTA 11-12 JUNI 1997

menyala dan musik berganti lebih keras. Dua "boneka" di belakang layar menghentikan tariannya dan berubah jadi boneka yang hidup. Dengan berlari-lari mereka muncul ke panggung sebagai seorang badut. Badut itu bernama *Pierrot* dan *Columbine*. Mereka berdua sedang jatuh cinta dan --tentu saja-- tidak romantis. Dialog antara Pierrot dan Columbine terjadi secara berseling antara pertengkaran dan kemanjaan columbine. Pierrot menginginkan sebuah keseriusan sedangkan Columbine menghendaki sebuah permainan.

Babak berikutnya muncullah *Thyrsis* dan *Coridon* serta *Cothurnus* sang sutradara. Dalam upayanya untuk membangun sebuah permainan, Thyrsis dan Coridon membangun sebuah tembok pembatas yang membagi wilayah kekuasaan mereka masing-masing dan keduanya sepakat untuk tidak saling melewati batas tersebut. Alhasil, kedua tempat itu ternyata memiliki perbedaan. Di tempat Thyrsis, air begitu melimpah, sementara di tempat Coridon, tak setetes airpun bisa digunakan untuk minum.

Namun tanpa sengaja Coridon menemukan bongkahan-bongkahan emas ketika sedang berusaha mencari air.

Dari sinilah konflik muncul di mana sifat keserakahan manusia muncul untuk bisa menguasai segalanya. Baik Coridon maupun thyrsis berencana untuk saling membunuh agar bisa



menguasai kesemuanya.

Secara umum pementasan ini sudah lumayan baik mengingat pentas ini sebagian besar prosesnya dilakukan oleh awak baru teater GAMA. *Setting* dan kostum yang sederhana agaknya masih disebabkan oleh kendala dana. Faktor dana ini pulalah yang menjadi problem besar pementasan ini. Ini bisa dilihat dari tidak adanya sponsor yang mendukung pementasan ini. Dari segi publikasi juga kurang sekali sehingga tak banyak menyedot penonton.

Penggunaan Sinar siluet sebagai latar yang meniru konsep wayang memang bagus untuk sebuah penggambaran, meski tampak sekali teknis pengaturan cahaya yang sangat lambat begitu mengganggu.

Persoalan teknis yang lain adalah adanya kebisingan dalam sound sistem yang cukup mengganggu selama pertunjukan.

Pada malam kedua dari pementasan ini tampak sedikit ada perbaikan-perbaikan yang bersifat teknis dan non teknis. Akting Pemain tampak lebih matang dibandingkan dengan pementasan malam pertama.

Manusia adalah pemimpin di muka bumi, yang dilahirkan dengan membawa kebebasan terhadap apa yang dilakukannya. Melalui kebebasan ini, manusia membuat sistemnya sendiri yang terkadang justru menyulitkan dirinya sendiri.

Itu semua dapat dimaklumi dalam suatu kerangka permainan yang dibuat atau terbuat secara sendirinya, demi mengisi arus kehidupan yang terus mengalir.

Tema tentang permainan inilah yang diangkat oleh teater GAMA dalam pentas mandirinya di Purna Budaya Yogyakarta tanggal 11 dan 12 Juni 1997.

Seperti pentas-pentas tahunan sebelumnya, produksi yang ke-108 teater GAMA ini juga masih berpijak terhadap karya-karya asing. Hal ini nampaknya sudah menjadi tradisi tersendiri karena untuk pentas-pentas non-mandiri, biasanya mereka mementaskan karya-karya lokal.

Melalui pemain-pemain muda, hasil pementasan ini memang belum maksimal. Tetapi agaknya pementasan ini diupayakan pula sebagai proses regenerasi. Ini terlihat dari tiga sutradara sekaligus yang menangani produksi pementasan **Aria Da Capo**, dengan tingkat senioritas yang berbeda□

Mustajab

Sasak yang Bermetamorfosis

Potret Pribumi, Islam, dan Hindu dalam Mozaik

Sasak adalah sebuah mozaik kehidupan. Benturan nilai dan kultur dari berbagai etnis mengharuskannya melakukan metamorfosis. Ada tradisi animis, mitologis, Islam Jawa, dan Hindu Bali yang kemudian menyusun struktur nilai dan membentuk identitasnya.



KIISEN & UD'N

Lumbung padi di Bayan Lombok Barat

Kental dengan tradisi Hindu Bali

Lombok adalah potret sebuah mozaik. Ada banyak warna budaya dan nilai menyeruak di masyarakatnya. Mozaik ini terjadi antara lain karena Lombok masa lalu adalah perebutan dominasi berbagai budaya dan nilai. Antara Sasak yang pribumi yang harus berhadapan pula dengan pengaruhnya Hindu Bali yang dominan di Lombok Barat dan pengaruh Islam Jawa yang kuat ekspasinya di Lombok Tengah dan Timur.

Dari sisi geografis, Lombok juga mozaik dari berbagai kondisi. Lombok Barat adalah daerah yang dikenal paling subur. Karenanya, di masa lalu Lombok Barat menjadi salah satu sasaran Bali dalam mengembangkan pengaruhnya. Tak aneh, kalau di tempat ini pura-pura tempat persembahyangan kaum Hindu masih banyak bisa dijumpai. Orang Hindu dari Ampenan, Mataram, dan Cakranegara datang ke Lombok Barat untuk melakukan ritual keagamaan.

Dua kawasan lainnya, yakni Lombok Tengah dan Lombok Timur juga diwarnai kondisi yang berbeda. Lombok Tengah adalah daerah miskin yang kondisi tanahnya kurang subur. Sedangkan Lombok Timur terhitung sedikit lebih subur jika dibanding dengan Lombok Tengah karena kawasannya yang terletak di dataran tinggi Gunung Rinjani. Dua kawasan inilah yang di masa lalu menjadi benteng Islamisasi kerajaan Islam Jawa di kawasan timur nusantara.

Sampai saat ini Lombok masih menyisakan kampung-kampung tradisionalnya. Tiga kampung tradisional yang sampai saat ini masih bertahan dengan segala tradisinya adalah Kampung Bayan yang ada di Lombok Barat, Kampung Sembalun Bumbung di Lombok Timur sekitar Gunung Rinjani, dan Kampung Sade yang terletak di Lombok Tengah.

Kampung Sade yang masih kental dengan adat dan tradisinya adalah potret Lombok masa lampau yang bisa menjadi petunjuk metamorfosis pergulatan orang pribumi Sasak dalam menghadapi perputaran waktu. *Balairung* yang selama beberapa waktu sempat bermukim di sana mencatat beberapa hal menarik dari kehidupan suku Sasak yang kemudian dikemas dalam dua tulisan berikut.

Islam Wetu Telu

Salah satu "keunikan" yang bisa dijumpai di sini adalah apa yang dikenal dengan istilah Islam Wetu Telu. Secara sederhana bisa dikatakan Islam Wetu telu adalah sebuah varian dari agama Islam. Varian karena secara substansial mempunyai kesamaan visi dengan ajarannya yang murni, tetapi dalam beberapa hal mereka mempunyai "penyimpangan" karena mereka tidak menerima ajaran secara utuh.

Dalam beberapa apa yang tampak di sana mirip dengan varian agama Islam seperti yang pernah diungkap Geertz dalam *Religion of Java* (1960). Oleh Geertz varian agama Islam di Lombok ini diberi nama "Wetu Telu".

Yang lebih "unik" lagi ternyata tata cara ibadah Wetu Telu ini berbeda-beda antara daerah satu

gan lainnya. Di Sembalun, erah dingin-lereng Gunung Rinjani, ereka hanya menjalankan sholat Ashar pada hari Kamis, sholat Dhuhur ada hari Jum'at, sholat Maghrib-Isya' elama bulan Ramadhan, dan sholat Idul Fitri.

Di Bayan, Lombok Barat bagian utara, mereka hanya menjalankan sholat Dhuhur pada hari Jum'at, sholat janazah, dan sholat hari raya Idul Fitri.

Di Rembitan, daerah dekat pantai-Lombok Tengah, mereka hanya menjalankan sholat Maghrib-Isya' selama bulan Ramadhan dan sholat Subuh pagi hari menjelang hari raya Idul Fitri.

Di samping itu Wetu Telu juga menganggap beberapa hari besar Islam sebagai hari ibadah dan hari mulia. Hari-hari yang dimuliakan antara lain hari-hari pada Muharam dan Syafar, Maulid Nabi pada Rabiul Awal, Ruwah pada Sya'ban, Idul Fitri pada Syawal, dan Idul Adha pada Dzulhijah.

Ciri lain penganut Wetu Telu adalah mereka memandang keramat angka tiga. Puasa Ramadhan hanya dilakukan tiga hari, yaitu: awal, tengah, dan akhir Ramadhan. Sedangkan Idul Fitri jatuh pada 3 Syawal. Mereka menghormati kitab suci al-Qur'an dengan menempatkannya di tempat yang tinggi dan hanya diturunkan pada waktu-waktu tertentu.


KUSEN & UDIN

Rumah adat di kampung tradisional Sade, Lombok Tengah
Menjadi "Benteng Islam" di masa lalu

Interpretasi Ganda

Tentang istilah Wetu Telu sendiri sampai sekarang tidak pernah jelas asal mula pemunculannya. Akibatnya, banyak spekulasi interpretasi muncul memberi pemaknaan istilah ini. Baik peneliti luar negeri, sejarawan Indonesia, maupun warga setempat memiliki tafsiran yang berbeda-beda.

Meskipun begitu, ada satu kesepakatan dari para pengamat, bahwa penamaan Wetu Telu adalah penamaan orang luar terhadap penganut Islam di Lombok yang tata cara ibadahnya berbeda dengan ajaran Islam murni ("Wetu Lima") yang menjalankan sholat lima waktu.

Penyebutan itu sekedar untuk membuat klasifikasi varian agama yang sifatnya hanyalah sebuah kategori sosial yang didasarkan pada tata cara ibadah yang dilaksanakan.

Sepanjang sejarahnya antara penganut Wetu Telu dan "Wetu Lima" ini selalu terlibat konflik, (Cederroth, 1982: 2).

Konflik mulai meruncing pada masa penjajahan Belanda (Perang

Paradoks Manusia Sasak:

Potret Kejantanan yang Melankolis

Jika Anda bukan orang Sasak dan kebetulan bertamu ke rumah penduduk, jangan heran jika Anda tidak langsung dipersilahkan masuk ke ruang tamu. Tetapi, dipersilakan ke 'Berugaq' (semacam gardu di Jawa), sebuah bangunan kecil di depan rumah tempat menerima tamu atau berbincang santai lesehan.

Berugaq dimaknai sebagai keterbukaan, dengan filosofi apa saja harus terbuka, tidak sembunyi-sembunyi. Disitulah keterbukaan muncul sebagai simbolisme watak sosial suku Sasak yang demokratis dan jantan.

Keterbukaan itu antara lain terwujud dalam cara berbahasa mereka yang 'lugas'. Bahasa Sasak yang merupakan bahasa mayoritas di Pulau Lombok tidak mengenal tingkatan. Sebagai contoh mereka mengatakan *kamu* dengan *side*. Kata side adalah sapaan umum bagi siapa saja. Anak kecil memanggil sebayanya atau yang lebih tua sekalipun, ia akan tetap memanggil side (mirip 'you' dalam bahasa Inggris). Bandingkan dengan bahasa Jawa yang mengenal *kowe, siro, sampean, panjenengan,* dan *sinuwun* untuk memanggil seseorang sesuai dengan kelasnya.

Ekspresi Merariq

Selain keterbukaan, kejantanan adalah sifat lain yang melekat dalam kehidupan mereka. Contoh yang paling menarik dari watak sosial semacam tadi sangat jelas diekspresikan dalam adat perkawinan Merariq yang masih ada hingga sekarang.

"Kelihatan pengecut dan kurang berani kalau tidak Merariq!" tandas H. Rumedi, tokoh di Kampung Sasak. Intihan Taufan juga menambahkan bahwa orang tua Sasak tidak suka kalau gadis perawannya diminta lantas diberikan begitu saja tanpa menempuh 'batu ujian' penculikan tadi.

"Justru perkawinan Merariq adalah perkawinan yang demokratis dan tidak feodal. Kalau di Jawa atau ditempat lain, orang tua bisa diajak si pemuda untuk 'berkolusi'

Dunia II). Gerakan pembaharu Islam "Wetu Lima" mendapat perlawanan keras dari pribumi Sasak yang penganut Wetu Telu. Konflik ini semakin parah karena campur tangan Belanda. Setelah kemerdekaan RI (1950-1955), sebagian Wetu Telu yang di bawah naungan PKI dan sebagian Wetu Telu yang di bawah naungan PIR (Partai Indonesia Raya) mendapat tekanan hebat dari Wetu Lima yang di bawah naungan Masyumi (Monograf Daerah NTB Jilid I). Karena kedua kubu ini selalu berkonflik maka setelah peristiwa G-30S PKI, Wetu Telu dinyatakan dilarang sebagai agama oleh pemerintah.

Secara hukum, sejak saat itu, penganut Wetu Telu telah habis. Namun di beberapa tempat, secara sembunyi-sembunyi praktek Wetu Telu masih dijalankan. Perkembangan terakhir menyebutkan bahwa Wetu Telu telah mengalami reinterpretasi. Wetu Telu tidak lagi berfungsi sebagai agama, namun hanya berfungsi sebagai adat semata.

Wetu Telu menjadi kekayaan Pulau Lombok yang mempunyai nilai-nilai adiluhung, seperti adiluhungnya nilai-nilai kejawen di masyarakat Jawa. H. Rumedi, Kepala desa di Sembalun Bumbung, mengatakan, "Kalau kita berbicara Wetu Telu, bukan agamanya yang dimaksud di sini, tetapi manusianya. Manusialah yang Wetu Telu karena manusia hidup di tiga dunia. *Pertama,* di alam Nur yang dimulai dari alam roh sampai alam kandungan. *Kedua,* alam dunia yang dimulai sejak manusia lahir dari rahim ibu sampai ia dikuburkan. *Ketiga,* alam kubur dan alam akhirat."

WETU TELU MERUPAKAN SINKRETISME AJARAN ASLI PULAU LOMBOK -- BAIK ITU YANG BERSIFAT KEHINDUAN, ANIMISME-DINAMISME, MISTIK, MAUPUN YANG BERSIFAT SUFISTIK -- DENGAN AJARAN ISLAM YANG MULAI MASUK PULAU LOMBOK PADA AKHIR ABAD 15.

Wetu Telu merupakan sinkretisme ajaran asli Pulau Lombok --baik itu yang bersifat kehinduan, animisme-dinamisme, mistik, maupun yang bersifat sufistik-- dengan ajaran Islam yang mulai masuk Pulau Lombok pada akhir abad 15. Menurut beberapa lontar dan cerita rakyat, pembawa ajaran Islam itu adalah Sunan Giri Perapen anak Sunan Giri dan beberapa pengikut Sunan Kali Jaga. Setelah berhasil mengislamkan raja-raja dan beberapa orang di Pulau Lombok, penyebar-penyebar agama Islam itu meneruskan misinya ke tempat lain.

Sementara para penyebar agama Islam meneruskan misinya, raja-raja di Lombok membuat konsep 'sistem berantai tiga' untuk mengembangkan Islam lebih meluas. Murid-murid yang telah mendapat pendidikan Islam diharuskan mengambil tiga anak didik dan jika anak-anak didik itu telah dianggap mampu diharuskan pula memiliki tiga murid, begitu seterusnya.

Akan tetapi, penerapan sistem tersebut putus karena konsolidasi kekuasaan Bali pada awal abad 18. Ekspansi kekuasaan Bali inilah yang menyebabkan timbulnya dua golongan, yaitu golongan Kyai dan golongan awam (abangan). Golongan Kyai menjalankan sholat, puasa, dan berbagai syari'at agama Islam yang lain, sedangkan golongan masyarakat awam tidak menjalankannya.

Sebuah literatur menyebutkan, meskipun Wetu Telu adalah sinkretisme ajaran pra-Islam, Hindu, dan Islam, namun unsur yang terkesan dominan adalah agama Islam. Unsur agama Islam bercitra menonjol terutama ditunjukan oleh kegiatan ritual yang selalu diselenggarakan di

keterbukaan orang Sasak adalah sifat melankolis yang juga lekat pada pribadi orang Sasak. Antara lain itu tercermin dari ekspresi kesenian dan mitos-mitos kosmogonis Sasak yang tragik.

"Pakem seni dan sastra Sasak adalah cerita tentang kesedihan dan tragika. Dalam musik etnis ciri itu muncul dengan dominannya suara seruling dari beberapa personil yang berpakaian serba hitam. Identik dengan suasana mistis. Seruling yang ditiup seakan mengembalikan manusia dalam dekapan kosmos kehidupan yang harmoni," kata Drs Cukup Wibowo, pengamat sosial yang asal Jawa.

Tradisi Nyale

Ada lagi mitos kosmogonis suku Sasak yang tragis yang menjadi legenda. Cerita tentang Putri Mandalika dari negeri Eberu yang punya kecantikan luar biasa, baik rupa maupun budinya, sehingga mengundang banyak pangeran ingin menyuntingnya. Putri Mandalika bingung menentukan pilihan. Akhirnya ia sadar bahwa dirinya milik massa, milik semua. Tidak seorang pun dapat memilikinya. Cintanya terlalu suci untuk diberikan pada seorang saja.

Sebuah keputusan diambilnya dengan menceburkan diri ke samudra sambil berteriak," Hai. ayahanda dan ibunda tercinta, para pangeran, dan rakyat Eberu. Hari ini ditetapkan bahwa diriku milik kalian semua. Aku tidak dapat memilih salah satu dari para pangeran karena inilah takdir yang menghendaki aku menjadi Nyale yang bisa kalian nikmati."

Tubuh Putri Mandalika kemudian lenyap ke tengah samudera. Raja dan permaisuri menangis. Yang tampak di hadapan mereka hanya ribuan Nyale (cacing laut). Orang-orang lantas berlomba-lomba menangkapnya untuk dijadikan santapan dan obat kuat.

Sekarang, kebiasaan menangkap Nyale menjadi ritual orang Sasak, dengan nama Bau Nyale. Setiap Febuari di sepanjang pantai Selatan Pulau Lombok tradisi itu masih dapat kita jumpai□

Sholahuddin, Kusen

Masjid Tua.

Pesta Alip yang dalam beberapa hal mirip upacara bersih desa di pulau Jawa, merupakan pesta penyucian tempat-tempat sakral. Penganut Wetu Telu membersihkan makam nenek moyang pembuka desa, Masjid Tua, dan tempat-tempat yang dianggap angker. Semua kegiatan tadi berporos di Masjid Tua.

Sekarang, ketika Pemda Lombok giat mengembangkan sektor pariwisatanya, Wetu Telu menjadi salah satu komoditas pariwisata yang menjadi suguhan unggulan bagi para wisatawan. Menanjung sektor itu, dalam hal prasarana fisik, Pemda Lombok juga membangun jalan lingkar yang menghubungkan kampung-kampung etnis Sasak sebagai basis terakhir ajaran Wetu Telu.

Pengikut Wetu Telu di sana telah melakukan ibadah sholat lima waktu dan melakukan syariat-syariat agama Islam yang lain. Peninggalan para penganut Wetu Telu yang paling tampak sekarang hanyalah Masjid tuanya saja, tempat yang menjadi simbol betapa sebuah ajaran tertentu pernah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Sasak.

Demokrasi Kawin Merariq

Jika di daerah lain di nusantara ini banyak ditemui perkawinan "model Siti Nurbaya", di Lombok terdapat adat perkawinan yang memberi kebebasan seluas-luasnya bagi si anak untuk mencari pasangan. Dominasi orang tua dalam perkawinan, tidak mendapatkan tempat di Lombok. Adat perkawinan etnis Sasak ini disebut Merariq.

Merariq berasal dari kata bahasa Sasak "berari" yang berarti berlari. Ada dua arti terkandung dalam kata itu. Pertama, Merariq dalam makna yang sebenarnya, pergi, yakni melarikan atau membebaskan gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya. Kedua, Merariq sebagai penamaan dari keseluruhan proses upacara perkawinan tersebut.

Budayan Lombok, Imtihan Taufan, kepada *Balairung* mengatakan bahwa Kawin Merariq hanyalah prosesi saja. "Semacam legalitas hukum adat sehingga bukan sesuatu yang mengejutkan atau aneh di Lombok," jelas Imtihan.

Merariq biasa dilakukan seorang pemuda ketika senja hari tiba, tepatnya antara waktu Maghrib sampai Isya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan dilakukan pada siang hari. Peristiwa Merariq menyimbolkan bahwa seorang pemuda memiliki jiwa ksatria. Mereka yang tidak berani melakukan dianggap pengecut dan



KUSEN & UDIN

Mesjid Kuno "Wetu Telu"
Di sini segala aktivitas penduduk bermuara

dipandang sebelah mata oleh kaumnya.

Seorang pemuda yang berhasrat merariq, mula-mula ia membuat janji dengan sang gadis buah hatinya atau bila keduanya belum saling mengenal, sang pemuda mulai memeriksa jadwal kegiatan sang gadis. Bila telah matang segala perhitungan maka diculiklah sang gadis. Orang tua dari kerabat gadis akan kebingungan dan berusaha mencari tahu ke mana perginya bunga yang sedang mekar itu. Tetapi bila perhitungan itu meleset, bisa-bisa satu jurus setelah penculikan si pemuda akan dikejar-kejar bagai seorang "maling"

"Dahulu, jauh dekatnya jarak membawa gadis mempengaruhi besar kecilnya *sorong serah* (mas kawin) yang harus diberikan pemuda," kata H.Rumedi. Ukuran jarak yang dipakai adalah batas-batas alam seperti sungai, bukit, dan pohon besar. Setiap kali melewati batas alam tersebut bertambah besarlah sorong serah yang harus diserahkan.

Gadis yang telah diculik mempunyai hak untuk berkata "Ya" atau "Tidak". Jika tidak, sesegera mungkin ia dipulangkan kembali ke rumahnya. Dan jika ya, ia akan dititipkan ke rumah salah seorang kerabat pemuda. Baru kemudian dimulailah tahapan selanjutnya, yaitu pemberitahuan oleh duta sang pemuda kepada keluarga sang gadis bahwa bunga yang sedang mekar miliknya telah diculik dan hendak dipersunting. Dalam keadaan seperti ini, orang tua gadis tidak kuasa menolak kehendak anaknya.

Setelah tahapan di atas selesai, untuk dapat mengambil gadis secara utuh dilaksanakanlah tawar-menawar sorong serah sebagai tahap akhir.

Sorong serah juga ditentukan oleh nilai gadis yang diukur berdasarkan kecakapan sebagai wanita dan kelas sosial. Kecakapan sebagai wanita diketahui saat ia dititipkan di rumah kerabat pemuda. Bagaimana ia berperilaku, bersopan santun, dan mengerjakan pekerjaan rumah selama berada di sana sangat mempengaruhi besar sorong serah.

Kelas sosial gadis dalam adat Sasak dibagi dalam tiga lapis. *Pertama,* golongan Menak (ningrat) ditandai dengan gelar *Raden Nuna* bagi laki-laki dan *Denda* bagi wanita di depan namanya. *Kedua,* golongan Jajar Karang yang ditandai dengan gelar *Lalu* bagi laki-laki dan *Lale* bagi wanita di depan namanya. *Ketiga*, golongan Bulu Ketujur yang hampir mirip kasta Sudra di Bali.

Semakin tinggi kelas sosial gadis, semakin besar sorong serah yang harus diberikan pemuda. Tetapi, dalam Merariq ini, perkawinan antar kelas sangat menyulitkan, apalagi bila kelas sosial lelaki lebih rendah dibanding kelas sosial wanita.

Tahapan terakhirnya prosesi Merariq adalah sebuah pesta syukuran, merayakan kebahagiaan perkawinanan. Simbol suka cita itu selama beberapa hari ditunjukkan dengan pemajangan janur yang dibentuk beraneka rupa, makanan berbagai rasa, dan atraksi hiburan□

Sholahuddin, Kusen

Koran Politik Kaoem Boeroeh Se-Indonesia

(Menjawab Beberapa Kecenderungan LSM-LSM Perburuhan)

Faisal R. Syah
Mahasiswa Jurusan Sejarah aktif di Majalah Mahasiswa Dian Budaya Fakultas Sastra UGM

Setelah peristiwa 27 Juli, hampir semua kekuatan demokratik --tentu saja kaum demokrat palsu, picisan dan cengeng-- di Indonesia, kecuali PRD yang dituduh dalangnya, menghentikan aktifitas-aktifitas politiknya karena beranggapan bahwa situasi sedang tidak menguntungkan. Sekali lagi penulis katakan-- layaknya seorang pedagang-- situasi sedang tidak menguntungkan.

Tapi, tidak bagi kaum buruh. Hidup mereka yang dari menit ke menit dalam setiap harinya bertabur penindasan dan penghisapan telah membuat mereka sadar untuk bertahan dan berencana melawan. Pemogokan-pemogokan dan perang terhadap kaum kapitalis mereka lancarkan untuk upah mereka yang sangat murah.

Ketika Bandung, Tasikmalaya, Rengas dengklok, Pekalongan, Temanggung dan lain-lain dilanda kerusuhan-kerusuhan dengan isu anti agama dan anti cina, buruh-buruh tetap melancarkan aksi mogok di mana-mana dengan tuntutan yang masih normatif. Hampir tiada hari tanpa aksi mogok dan demonstrasi.

***

Kampanye pemilu menjadi ajang legal bagi rakyat untuk bisa muncul dengan aspirasi politiknya. Munculnya fenomena Mega-Bintang-Rakyat --yang lahir dari rahim spontanitas massa-- dengan berbagai kerusuhan-kerusuhan seperti di Pekalongan dan Pasuruan menjadi bukti bahwa rakyat terus-menerus mencari kemungkinan-kemungkinan untuk memaksa pemerintah memenuhi tuntutan-tuntutan demokrasi. Mega-Bintang-Rakyat dan kerusuhan telah menjadi kendaraan politik massa rakyat untuk menuangkan aspirasi politiknya --yang sudah lama dibungkam penguasa-- dan makin meluas ke daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai daerah sepi politik, yang paling besar terjadi di Banjarmasin.

Begitu juga dengan kasus pembubaran kampanye PDI Pro Soerjadi. Massa yang menginginkan perubahan politik dan bersimpati pada Megawati Soekarnoputri --pimpinan PDI yang sah dan disingkirkan oleh pemerintah-- tetap melancarkan perjuangan mereka. Setiap ada kesempatan mereka gunakan untuk konsolidasi dan berkumpul. Sebelumnya, mereka menggunakan media pengadilan-pengadilan untuk tujuan itu. Dan ketika masa kampanye, sekalipun Megawati tidak berkampanye, mereka tetap memanfaatkan ajang kampanye untuk unjuk kekuatan dengan cara mengganggu kegiatan kampanye PDI Pro Soerjadi. Sehingga tidak ada kampanye PDI Pro Soerjadi yang tidak didatangi dan diganggu oleh massa pendukung Megawati. Dengan bersemangat mereka membubarkan acara-acara yang diselenggarakan PDI Pro Soerjadi dan atau menculik kader-kader PDI Pro Soerjadi yang menjadi caleg.

Apakah kaum buruh turut serta dalam kegiatan-kegiatan politik menjelang pemilu itu? Buruh-buruh tetap bekerja dan melanjutkan perjuangannya di sekitar pabrik dengan tuntutan yang juga belum beranjak dari persoalan upah dan hak-hak normatif lainnya. Mereka sama sekali tidak terseret untuk menyatakan solidaritasnya terhadap kasus-kasus politik seperti yang terjadi pada saat kampanye. Tiada inisiatif untuk menggerakkan pemogokan-pemogokan sebagai solidaritas kaum buruh terhadap persoalan-persoalan yang menghimpit kaum demokrat. Namun demikian, cukup banyak buruh-buruh yang aktif menjadi korcam atau kordes PDI atau PPP dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan politik yang diselenggarakan kedua parpol tersebut.

Pemilu telah berlangsung dengan bermacam kecurangan di sana-sini. DPP-PPP menyatakan protes terhadap setiap kecurangan yang terjadi dan menuntut pemungutan suara di beberapa daerah diulang. PDI Soerjadi juga tidak ketinggalan untuk menyatakan protes terhadap pemerintah dengan ancaman tidak akan menandatangani berita acara pemungutan suara selama kecurangan-kecurangan yang terjadi belum diselesaikan. Tetapi yang paling penting adalah protes yang dilakukan oleh rakyat di Sampang, Indramayu, Jember, dan Bangkalan yang tidak

puas karena kecurangan-kecurangan yang terjadi dan sementara saluran politik yang ada tersumbat. Protes terhadap kecurangan itu akhirnya memanifestasikan dirinya dalam bentuk kerusuhan-kerusuhan massa dan pemerintah tidak berhasil mencegahnya.

Hawa panas dari letupan politik di daerah-daerah perkotaan ternyata tidak dihirup oleh kaum buruh yang letaknya di pinggiran kota. Sekalipun pemogokan-pemogokan terus meningkat --karena UMR yang dinaikkan pada 1 April kemarin belum juga dipenuhi oleh pengusaha-- tuntutan kaum buruh belum juga beranjak dari persoalan-persoalan sekitar pabrik dan kepentingan perut mereka. Sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka bahwa kesejahteraan akan terpenuhi apabila mereka bersatu menuntut pemerintah di bawah panji-panji serikat buruh yang bebas dari intervensi pemerintah.

Pemogokan-pemogokan dan bahkan pengrusakan-pengrusakan pabrik tidak akan membebaskan mereka dari belenggu kapitalisme selama kesadaran mereka untuk bersatu dalam serikat buruh bebas tidak pernah terlintas dalam kepala mereka. Begitulah, seakan-akan persoalan-persoalan buruh menjadi persoalan yang berdiri sendiri dan sama sekali tidak berhubungan dengan realitas politik yang sedang berlangsung, kaum buruh terisolasi dari dunia politik yang lebih besar.



***

Beberapa waktu yang lalu, pemerintah mengeluarkan RUU Ketenagakerjaan yang hampir seluruh isinya menempatkan kaum buruh sebagai pengganti dari tenaga hewan yang tidak mempunyai keahlian lain kecuali hanya bekerja dan bekerja.

Seluruh LSM yang menangani persoalan-persoalan perburuhan menyatakan protes terhadap RUU itu dan mereka mencoba menggalang semua kekuatan demokratik untuk menolaknya. Pamflet-pamflet diterbitkan, diskusi-diskusi diselenggarakan dan delegasi-delegasi keprihatinan dikirim ke Komnas HAM dan lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan persoalan ini.

Mereka berkampanye agar buruh-buruh menolak RUU yang pasti akan membuat kaum buruh lebih sengsara lagi. Adakah hal ini akan membuat kaum buruh bisa menjadi kekuatan politik yang bisa mendesak pemerintah untuk memenuhi tuntutan demokrasi?

Untuk keterlibatan LSM perburuhan ini, penulis menyatakan kritik, yaitu jangan menjadikan persoalan-persoalan buruh sebagai komoditi yang bisa diperjualbelikan melalui kertas-kertas proposal. Jangan hanya karena ada persoalan yang bisa diangkat ke lembar proposal lalu keinginan berjuang untuk demokrasi bersama kaum buruh timbul.

Sebelum ini, sangat jarang LSM perburuhan yang serius mengajarkan kaum buruh bagaimana cara melawan yang efektif. Bahkan dalam beberapa kasus mereka malah mendorong kaum buruh untuk tidak melakukan mogok kerja dan menuduh bermacam- macam bila ada aktifis-aktifis yang terlibat dalam pemogokan-pemogokan. Ini berlawanan dengan keinginan mereka untuk berjuang bersama kaum buruh.

Jika kemudian RUU Ketenagakerjaan mendorong mereka untuk menyuarakan persoalan-persoalan buruh itu tak lebih hanya untuk kepentingan mengalirnya sejumlah dana dari *founding agencies* ke dalam kantong mereka.

Kalau mereka benar-benar ingin kaum buruh menolak RUU Ketenagakerjaan maka sasaran pamflet, bulletin dan diskusi mereka adalah pada kaum buruh dan bukan pada kaum mahasiswa atau intelektual. LSM-LSM ini harus berani menyelenggarakan diskusi dan menyebarkan informasi langsung ke tengah-tengah buruh. Dan bahkan mereka harus mempelopori munculnya pemogokan-pemogokan buruh secara besar-besaran untuk menolak RUU ini dan bila ada buruh yang mogok kerja mereka harus mendukungnya.

Bertolak dari kritik terhadap LSM tersebut, marilah kita mencoba menelusuri apa akar persoalan yang harus lebih dulu dipecahkan dari kehidupan kaum buruh. Tanpa mengetahui akar persoalan yang sebenarnya maka usaha-usaha berjuang bersama kaum buruh tidak akan menghasilkan gerakan buruh yang lebih radikal, independen, serta tidak lagi tergantung pada belas kasihan dan uluran tangan kaum sekolahan.

***

Jika berbicara mengenai radikalisme, maka kaum buruhlah jawabannya. Dan apabila menggagas tentang konsistensi perjuangan maka kaum buruhlah satu-satunya sektor masyarakat yang tanpa henti melawan. Tapi apakah dengan modal keberanian saja kapitalisme akan berbaik hati dan represi militer Orde Baru akan berhenti? Tentu saja tidak!

Tokoh kaum buruh sedunia pernah mengatakan bahwa kaum proletar tidak punya senjata lain untuk berjuang kecuali organisasi. Hanya dengan organisasi --seperti SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia)-- maka kaum buruh akan menemukan kunci yang bisa membukakan pintu kesejahteraan mereka. Sebesar apapun pemogokan yang dilancarkan kaum buruh akan sangat gampang dipatahkan oleh rejim yang diktator ini bila tidak bersatu dalam satu kepemimpinan organisasi buruh. Apalagi dipimpin oleh LSM-LSM yang pasti sudah takut duluan sebelum tentara

menghadang.

Persoalan kaum buruh bukan hanya persoalan RUU Ketenagakerjaan. Persoalan kaum buruh jauh lebih besar dari itu. Dan hanya dengan persatuan kaum buruh maka semua persoalan dapat diselesaikan. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas tentang keberhasilan-keberhasilan kaum buruh melawan kekejian dan kebrutalan kapitalisme yang terus mengintai kehidupan mereka setiap ada kesempatan.

Keberhasilan itu hanya --dan sekali lagi hanya-- dapat diwujudkan dengan senjata kaum buruh yaitu organisasi. Bahkan keberhasilan kaum buruh mendirikan negara buruh di Rusia dan Cina adalah karena mereka bersatu dibawah payung organisasi buruh yang mempunyai program-program perjuangan untuk membebaskan buruh dari ketertindasan politik dan ekonomi. Dan tak mungkin orang-orang yang duduk di LSM tidak mengerti apa yang saya maksudkan dengan organisasi bagi kaum buruh ini.

Serikat buruh-serikat buruh yang berdiri di Hindia Belanda pada permulaan abad ini, berhasil memaksa Belanda untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Mereka berhasil memaksa Belanda untuk melakukan konsesi-konsesi politik seperti pemberlakuan politik etis dan pemberian volksraad (Dewan Rakyat) bagi kaum pergerakan saat itu.

...karena mereka terus menyebarkan informasi ke kalangan kaum buruh melalui koran-koran politik yang diterbitkan oleh serikat-serikat buruh. Buruh-buruh tidak buta politik dan mengikuti semua perkembangan dari kaum pergerakan melalui koran-koran itu.

Begitulah keampuhan organisasi buruh yang bebas dan berpihak pada kepentingan kaum buruh. Masihkah berkepala batu dengan tidak mendirikan serikat-serikat buruh?

Tapi sebelumnya saya merasa perlu menjelaskan agar serikat buruh yang akan berdiri ini betul-betul menjadi kendaraan politik kaum buruh. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan lebih dulu sebelum serikat-serikat buruh itu berdiri dan sekaligus menyiapkan cikal-bakal berdirinya serikat buruh bebas tersebut.

Pekerjaan tersebut adalah pekerjaan mempertinggi kesadaran politik kaum buruh yang sampai sekarang didominasi oleh persoalan-persoalan normatif buruh. Tidak mungkin kesadaran politik kaum buruh ini akan meningkat jika materi bacaan kaum buruh adalah majalah-majalah dan koran-koran bekas atau kalau tidak mereka akan membaca novel-novel picisan yang ditulis oleh Fredy S. dan buku-buku komik.

Usaha mempertinggi kesadaran politik itu dengan berupaya menyebarkan informasi-informasi melalui koran politik yang harus beredar di kalangan kaum buruh. Memang sebelum ini telah ada banyak informasi yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran kaum buruh tapi hanya beredar di kampus, kalangan LSM, intelektual dan kaum buruh tidak mendapatkannya.

Paling tidak ada dua hal yang bisa dicapai dengan koran politik ini, yaitu kesadaran untuk mendirikan serikat-serikat buruh bebas dan kesadaran mengenai apa yang harus mereka tuntut dari sistem politik dan sistem ekonomi yang membelenggu mereka.

Mereka akan mengerti mengapa mereka harus ikut serta dalam gerak politik yang lebih besar dan tidak merasa minder terhadap kaum intelektual dan politisi seperti yang terjadi sekarang ini. Kaum buruh harus sadar bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam semua proses politik yang berlangsung di negeri ini termasuk menjadi pimpinan parpol atau juga presiden.

Sekali lagi, keberanian melawan saja seperti yang ditunjukkan oleh kaum buruh dalam setiap pemogokan tidak akan mampu meruntuhkan persendian ekonomi dan membuat rejim penindas ini harus memberikan membuka saluran politik agar negeri ini menjadi demokratis.

Mengapa kaum buruh pada jaman pergerakan dapat ikut serta sebagai aktifis? Jawabnya hanya satu, yakni karena mereka terus menyebarkan informasi ke kalangan kaum buruh melalui koran-koran politik yang diterbitkan oleh serikat-serikat buruh. Buruh-buruh tidak buta politik dan mengikuti semua perkembangan dari kaum pergerakan melalui koran-koran itu.

Koran-koran politik itu dapat kita temukan diberbagai kota misalnya di Bandung, Surakarta, Semarang, Surabaya, Magelang, Bogor, dan Manado. Di Bandung misalnya terbit koran *Keras Hati* yang diterbitkan oleh Pegawai Boemipoetra Post, Telegraaf en Telefoondienst di Hindia Belanda. Di Surabaya *Soeara Boemipoetra* dan *Djangkar* yang diterbitkan Sarekat Pegawai Pelaboean dan Laoetan. Sementara di Semarang sedikitnya terbit tiga koran buruh yaitu *Soeara Setalian* (Perhimpoenan Pegawai Negeri Sekolahan Rendah), *Soeara Tamtomo* (Perhimpoenan Pegawai Hoetan Boemipoetra "Wong Tamtomo) dan *Bulletin* (Vakbonden VSTP).

Dengan koran itu, informasi pergerakan terus disebarluaskan ke kalangan buruh secara cepat dan buruh dapat terus dibangunkan kesadarannya untuk terlibat dalam pergerakan kemerdekaan. Sokongan yang diberikan gerakan buruh inilah --dengan dipimpin oleh orang-orang yang radikal seperti Mas Marco, Semaoen, Soerjopranoto dan H. Misbach— yang terus menjaga kaum pergerakan seperti Soekarno dan Sjahrir untuk konsisten menuntut kemerdekaan bagi negeri ini.

Hal ini harus dipahami oleh LSM-LSM yang sekarang bergiat "membantu" kaum buruh. Tugas mereka adalah menerbitkan koran-koran politik dan menyebarkannya ke kalangan kaum buruh dan mengajarkan bagaimana kaum buruh harus mendirikan serikat-serikat buruh dan program perjuangan apa saja yang harus dituntut kaum buruh terhadap pemerintah. LSM-LSM harus berani melakukan ini atau kaum buruh akan tetap terpuruk dalam dunia yang terisolasi dari panggung politik nasional.

Sekali lagi, koran politik bagi kaum buruh se Indonesia!□

Punk : Gerakan Perlawanan Kaum Muda

Taufik Hidayat
Ketua Korps Mahasiswa Sosiologi
Fisipol UGM
periode 1997-1998

Perkembangan zaman kelihatannya tidak pandang bulu dalam melebarkan sayapnya, ia menyerang siapa saja; pria-wanita, tua-muda, miskin-kaya, bahkan yang berpendidikan maupun yang tidak ikut terimbas olehnya.

Kaum muda sebagai salah satu bagian masyarakat yang terdeferensiasi telah menunjukkan gejala tersebut, dimana perkembangan jaman mengisyaratkan adanya suatu perubahan gaya hidup kaum muda baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun politik.



Kaum muda, atau apa yang disebut oleh Simon Frith dengan istilah *Youth Class,* merupakan salah satu strata kelas yang ada dalam masyarakat dan memiliki suatu identitas budaya tertentu yang membedakannya dengan strata kelas masyarakat lain. Mike Featherson menyebutnya dengan *Youth Culture.*

Youth Culture merupakan istilah yang sering digunakan di dunia Akademik untuk memetakan fenomena kaum muda dalam konteks sosial budaya, di mana budaya tersebut merupakan suatu bentuk *antagonis* (budaya tandingan) dari kebudayaan massa *(mass-culture)*. Atau dapat juga dikategorikan seperti suatu bentuk sub-culture dari *mass-culture.* Menurut Featherson, *youth culture* ini mencirikan suatu kegiatan yang mempromosikan suatu gaya hidup konsumerisme. Bourdieu menyebutnya sebagai "kapital sub-kultural", yang merupakan gerakan anti kebudayaan massa, komersialisasi budaya, dan yang jelas berada di luar jalur *mainstream.*

Dengan kata lain, kaum muda dibebaskan untuk melakukan akumulasi modal ekonomi, dimana mereka secara temporal menikmati kehidupan yang bebas dan mewah. Kapital Sub-Kultur yang diakumulasikan secara temporal tersebut dibangun sebagai suatu ekspresi dari kebosanan, sedangkan subjek dari kebosanan mereka adalah kapital budaya orang dewasa. Sub-kultur mencabut batas-batas usia, dan menetapkan dirinya pada posisi pembelaan kaum muda, khususnya laki-laki, membaca, dan membangun dunianya.

Apa yang digambarkan oleh Frith, Fetherson dan Bourdieu di atas menunjukkan suatu gambaran bahwa kaum muda pada saat tertentu berusaha untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan tradisi yang mereka anggap dan rasakan mengekang ekspresi mereka. Dan mereka berusaha mencari identitas baru melalui ekspresi-ekspresi mereka.

Musik dan *Youth Culture*

Dalam perjalanan sejarahnya, ternyata sejarah umat manusia tidak pernah terlepas dari perjalanan dan perkembangan dunia musik. Bahkan dapat dikatakan bahwa musik dapat menjadi ciri khas suatu masyarakat. Demikian pula halnya dengan kaum muda, dunia musik merupakan suatu wadah alternatif pencaharian eksistensi mereka yang tentunya bersifat temporal bagi mereka. Munculnya berbagai jenis dan aliran musik tidak dapat dilepaskan dari bagian sejarah atau fenomena yang menyejarah. Dengan kata lain bahwa tumbuhnya berbagai aliran musik merupakan produk dari sejarah.

Munculnya aliran musik yang dipelopori oleh kaum muda untuk pertama kalinya adalah musik rock. Mengenai di mana dan kapan aliran musik rock muncul, tidak terlepas dari kondisi-kondisi eksternal yang diresponnya. Artinya, munculnya musik rock secara spesifik dipengaruhi oleh faktor sosio-kultural. Sebagaimana yang digambarkan

oleh Lawrence Grossberg terdapat lima kondisi yang memunculkan aliran musik rock ini. *Pertama*, dalam konteks ekonomi-politik yaitu seusai masa perang dunia kedua. Di Amerika Serikat sedang menikmati kemakmuran ekonomi namun, walaupun begitu menimbulkan perang ekonomi yang dapat dilihat melalui defisit pembelajaannya yang dialaminya dan meledaknya sikap hidup konsumerisme. Di tingkat Politik terjadi konflik antara konsep liberalisme yang diterapkan Amerika dengan pengakuan dunia terhadap Amerika sebagai negara kapitalis dunia. Di satu sisi liberalisme menggambarkan harapan-harapan terhadap akses-akses dan percepatan pertumbuhan, di sisi lain, pengakuan terhadap Amerika tersebut menggambarkan kondisi politik Amerika yang tenang, karena dianggap sebagai barometer oleh negara negara lain.

Kedua, secara sosiologis, kemunculan musik rock berasal dari populasi kaum muda yang keluar dari populasi massa (yang mereka sebut dengan istilah *Baby Boom*). Munculnya kaum muda itu menimbulkan reaksi masyarakat dengan mengawasi dan mengontrol mobilitas kaum muda. Hal tersebut yang dilakukan masyarakat dikarenakan harapan mereka terhadap generasi-generasi muda untuk mewujudkan impian-impin Amerika seperti yang disebutkan pada poin pertama.

Ketiga, adanya perbedaan antar generasi yang menciptakan perbedaan dalam masyarakat terutama dalam memperlakukan benda-benda, perbedaan identitas, serta perbedaan praktek-praktek dan hubungan sosial. Kondisi ini diistilahkan oleh Grossberg sebagai "struktur perasaan *Post Modern*". Pada tahap selanjutnya, perbedaan tersebut memunculkan kesenjangan antara benda dan makna, antara organisasi tertentu dan bahasa sosial yang signifikan, serta antara penampilan dan nilai-nilai.

> ada perbedaan antar generasi yang menciptakan perbedaan dalam masyarakat terutama dalam memperlakukan benda-benda, perbedaan identitas, serta perbedaan praktek-praktek dan Hubungan sosial.

Keempat, adanya sejumlah perkembangan dalam arus budaya besar, dalam hal ini adalah teknologi. Perkembangan tersebut mengubah praktek-praktek bermusik dalam setiap proses produksi musik yang menghasilkan perkembangan luar biasa dalam memanipulasi produk-produk musik. Pada saat ini, juga muncul korporasi-korporasi multinasional yang berperan mengontrol kekuatan pasar. Sehingga pasar itu sendiri mengalami perubahan, dimana penekanan utama terjadi pada labelisasi dari pembagian industri musik, dan memperoleh keuntungan dari penjualan musik dan stok kaset-kaset. Konteks kultural ini kemudian mengalami pengkhususan lagi dalam media ekonomi yaitu yang berkaitan dengan dunia *entertainment*, seperti televisi (termasuk film) dan musik (rekaman dan radio). Pemunculan dunia *entertainment* inilah yang digunakan kaum muda untuk mengotentikkan dirinya dalam dunia musik.

Dan *kelima*, dalam konteks kultural munculnya *image* keterasingan pada para musisi pemula sehingga mereka mengalami marginalitas.

***

Hampir sama dengan pemunculan aliran rock, aliran *Punk* merupakan generasi baru dalam dunia musik yang lebih merupakan pemberontakan intelektual dalam musik rock. Kemunculan pertama kalinya adalah pada bulan Desember 1975, di Bouhemian, New York City.

Dalam pertumbuhannya muncul berbagai aliran yang bersumber dari rock, seperti *heavy metal, Hard Core, Trash Metal, Death Metal, Greko*, dan *Grunge*. Perbedaan mendasar di antara aliran-aliran tersebut menurut Dieter Mack adalah terletak pada bagaimana *sound* ditemukan, memanfaatkan fasilitas teknologi melalui teknik-teknik reproduksi suara yang terdistorsi, keunikan produksi vokal, dan tidak memiliki *standard* khusus bahkan cenderung tidak memikirkannya. Namun ada suatu aliran yang mengaburkan pemilahan-pemilahan tersebut diatas yaitu Hard Rock, yang memiliki kekhususan musikal pada kemampuan memainkan *rhytem*.

Menurut Mack terdapat perbedaan pada masing-masing aliran tersebut dalam sejarah. Musik-musik Eropa misalnya, memiliki akar sejarah yang kuat dan bersifat individual, sedangkan pada musik Amerika populasi budaya yang bercampur berdampak besar terhadap bagaimana komposer menempatkan elemen-elemen musiknya.

Menurut Thornton, sebagian besar perdebatan memang diarahkan untuk melawan kekuatan *Mass Media*, kolonialisasi dalam korporasi-korporasi multinasional, atau dengan kata lain adalah ~ perlawanan kaum muda terhadap dominasi mass media serta komersialisasi dan hegemoni industri musik.

Sementara itu, Punk sendiri merupakan sebuah ekspresi gelombang pembebasan kegelisahan kaum muda, sensivitas kecanggungan kaum muda pada dunia. Punk bukan merupakan kekerasan. Agresivitas mereka hanya ketika mereka berada di panggung dan hanya bersifat simbolik.

Dari segi keotentikannya, Punk di masa-masa awal merupakan produk ketajaman ekspresi. Punk mampu merefleksikan kondisi sosial masyarakat --dan bukan pada masalah keorisinalannya atau kekreatifannya. Di sini dapat dilihat bahwa Punk --pada awal masa kemunculannya-- merupakan suatu bentuk perlawanan kaum muda melalui reproduksi simbolik artifisial dan bukan hanya sekedar totalitas kekreatifan musikal.

Akan tetapi pengaruh media massa yang begitu besar dalam proses penyebarluasan dan reproduksi produk musik menyebabkan berubahnya keotentikan suatu ekspresi musik menjadi hanya sekedar pengulangan yang berlandaskan atas kesenangan, yang oleh Grossberg diistilahkan sebagai "Deteritorialisasi"□



Drs. Bambang Cipto, MA
Staf Pengajar Fisipol UMY

Masa Depan Demokrasi Hongkong Pasca Pengembalian

The handover of (pengembalian) Hongkong ke tangan Cina mengundang berbagai pertanyaan berkaitan dengan masa depan demokrasi kawasan tersebut. Sejak 1 Juli 1997 Hongkong memperoleh status baru sebagai Daerah Administrasi Khusus atau *Special Administration Region* (SAR) di bawah pemerintahan Cina. Status ini diberikan mengingat sejarah Hongkong yang sangat berbeda dengan kawasan-kawasan lain yang berada di bawah kekuasaan pemerintah Cina. Sekalipun demikian bayak yang mempertanyakan nasib demokrasi Hongkong yang belum lama berkembang.

Gerakan demokrasi di Hongkong mulai berkembang sepanjang dekade 70-an dan 80-an. Selama dua dekade tersebut masyarakat Hongkong yang berpenghasilan dan berpendidikan tinggi sebagaimana tercermin pada tingkat kemakmuran kehidupan rata-rata masyarakat Hongkong mulai memikirkan cara untuk melanjutkan *The Hongkong Life Style* atau Gaya Hidup Hongkong. Kebutuhan material yang sudah tercukupi menumbuhkan daya kritis pada masyarakat yang 98 % terdiri dari orang-orang Cina.

Gerakan ini kemudian menumbuhkan kelompok "anti-Cina" dan "pro-Cina" (Cina disini adalah *the mainland China* atau Beijing). Mereka yang dekat dengan pemerintah kolonial inggris cenderung pro-Cina sementara kelompok yang lebih mandiri cenderung anti pemerintah Cina di Beijing. Gerakan demokrasi di Hongkong disokong oleh berbagai lapisan masyarakat. Sebaliknya, kalangan swasta dan pemerintah kolonial sendiri tidak sepenuhnya mendukung gerakan-gerakan tersebut.



Bagi sektor swasta hubungan dengan Beijing sangat menentukan masa depan mereka. Sementara pemerintah kolonial Inggris di Hongkong tidak ingin mengambil resiko yang dapat membahayakan masa depan Hongkong sebelum 1 Juli 1997. Oleh karena itu proses demokrasi perlu diperlambat sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kecurigaan Beijing. secara bertahap pemerintah Kolonial Inggris menambah jumlah warga Hongkong ke dalam posisis yang strategis dalan administrasi pemerintahan Hongkong. Tuntutan demokrasi kemudian mendorong pemerintah Hongkong mengeluarkan *The Green Paper* berupa usulan untuk memperluas sistem perwakilan di Hongkong.

Beijing menganggap kemajuan demokrasi ini akan merugikan pemerintah Cina. Untuk menanggapi perkembangan tersebut Beijing kemudian menetapkan bahwa Hongkong akan dikelola dengan prinsip *One Country Two Systems.* (1) Prinsip dasarnya bahwa Hongkong akan diperintah orang Hongkong sendiri kecuali dalam urusan pertahanan (*defense*) dan luar negeri (*foreign affairs*). Beijing juga berjanji akan mempertahankan status baru ini selama 50 tahun ke depan. Jika janji Beijing ini dipenuhi maka Hongkong akan tetap dapat mempertahankan sisterm ekonomi kapitalis, tertib hukum, kebebasan individu, dan gaya hidup Hong Kong. (2) Apakah ada alasan bagi Cina untuk mengkhianati janji tersebut?

Prospek demokrasi Hongkong akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, secara ekonomis Hongkong

sangat diperlukan untuk menambah kawasan paling makmur. Peran ini sudah sejak lama dimainkan Hongkong karena itu mustahil jika ekonomi Hongkong akan diintervensi sedemikian rupa sehingga mengurangi atau menurunkan posisinya sebagai salah satu pusat-kemakmuran terkemuka di kawasan Asia Pasifik.

Argumen bahwa ekonomi Hongkong akan tetap dijaga dan bahkan ditingkatkan didukung oleh pengalaman Cina sendiri yang cukup berhasil menjadikan beberapa kawasan Pantai Timur Cina menjadi pusat-pusat kemakmuran. Oleh karena itu masa depan ekonomi Hongkong relatif akan tetap terjamin. Dalam kenyataan tidak semua warganegara Hong Kong memilih meninggalkan. Sebaliknya, sebagian besar penduduk Hongkong justru memilih tetap tinggal di Hongkong. Kondisi ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap Beijing yang sangat kuat.

Di samping itu, Beijing juga berkepentingan untuk menunjukkan kepada dunia, khususnya Taiwan, bahwa jika Hongkong mampu mempertahankan kemakmuran di bawah bayang-bayang kekuasaan Beijing maka diharapkan Taiwan pun akan mengikuti jejak Hongkong di masa depan. Kalkulasi ini membuat upaya mempertahankan tingkat kemakmuran ekonomi Hongkong yang tinggi menjadi bersifat wajib. Bagaimana pun Cina tidak pernah menghentikan keinginan untuk merebut Taiwan dari tangan Kuominyang.

Kedua, faktor politik mungkin menjadi fokus perhatian utama mengingat kendali politik Cina selama ini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Cina yang sangat tinggi di kalangan negara-negara Asia bahkan dunia. Sebuah penelitian bahkan menegaskan bahwa selama tahun 1996 Cina telah mengalami surplus perdagangan global. oleh karena itu terdapat dua kemungkinan bagi masa depan politik Hongkong. Kemungkinan pertama demokrasi akan tetap dipertahankan dan memberi peluang bagi kekuatan-kekuatan demokrasi (partai politik, media massa, kebebasan individu) untuk mempengaruhi pemerintahan Hongkong.

Kemungkinan kedua Cina akan melakukan intervensi baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Kemungkinan ini dapat diwujudkan dalam pemilihan ketua eksekutif yang pro-Cina (misalnya Tung Chee Hwa) dan konsolidasi kelompok-kelompok pro-Cina di badan legislatif. Dalam kenyataan tidak sulit bagi Beijing untuk menemukan kelompok pro-Cina sebagaimana terpilihnya Tung Che Wa sebagai ketua SAR Hongkong akhir-akhir ini.

Intervensi politik Beijing kemungkinan besar akan mengambil Singapura sebagai model politiknya. Singapura dikalangan negara-negara Asia dipandang sebagai negara otoriter dengan tingkat keberhasilan ekonomi yang tinggi. Artinya, sekalipun secara politik tidak demokratis namun secara ekonomi Singapura dapat dikatakan sangat sukses. Tung sendiri secara eksplisit telah menyatakan kehendaknya untuk menjadikan Singapura sebagi model Hongkong masa depan□

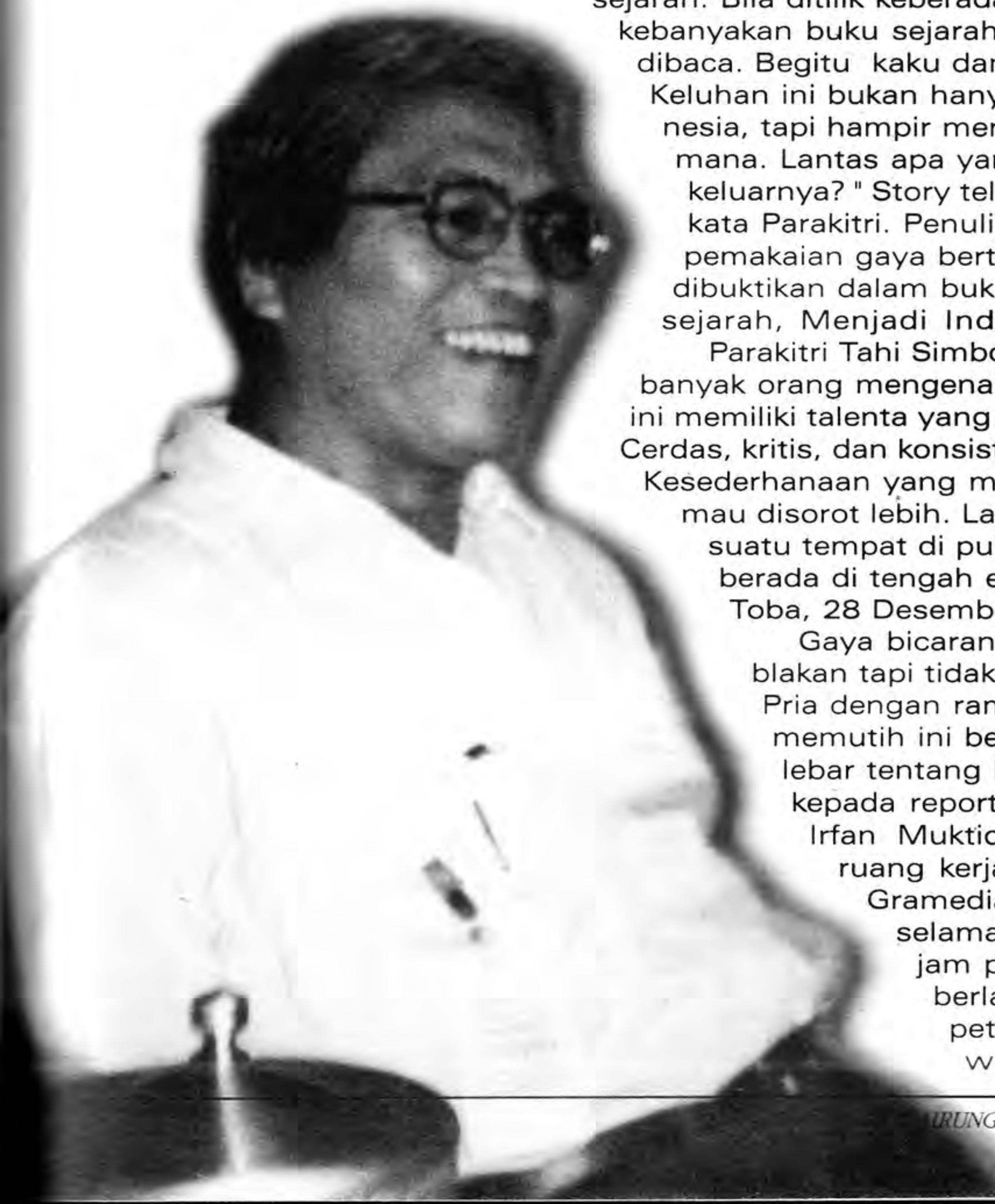
■ **Parakitri Tahi Simbolon :**

Haram Hukumnya Menindas Orang Karena Pikiran

Apa jadinya bila sejarah tidak lagi menjadi pilihan untuk dibaca, dan apa pula sebabnya? Jawabnya adalah *historylessness,* lunturnya pemahaman masyarakat akan arti penting pengetahuan sejarah. Bila ditilik keberadaannya, kebanyakan buku sejarah memang "sukar" dibaca. Begitu kaku dan membosankan. Keluhan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir merata di mana-mana. Lantas apa yang menjadi jalan keluarnya? " Story telling" demikian kata Parakitri. Penulisan dengan pemakaian gaya bertutur. Dan itu dibuktikan dalam bukunya tentang riset sejarah, Menjadi Indonesia.

Parakitri Tahi Simbolon, walau tak banyak orang mengenalnya, sosok satu ini memiliki talenta yang luar biasa. Cerdas, kritis, dan konsisten. Kesederhanaan yang membuatnya tidak mau disorot lebih. Lahir di Riannate, suatu tempat di pulau Samosir yang berada di tengah eloknya Danau Toba, 28 Desember 1948.

Gaya bicaranya lugas, blak-blakan tapi tidak meledak-ledak. Pria dengan rambut telah memutih ini berbicara panjang lebar tentang banyak hal kepada reporter *Balairung,* Irfan Muktiono. Bertempat di ruang kerjanya, kantor Gramedia Group Jakarta, selama dua setengah jam perbincangan itu berlangsung. Berikut petikan wawancaranya.



Banyak buku sejarah mengenai Indonesia, mengapa Anda merasa perlu menulis kembali ?

Sejarah memang harus selalu ditulis kembali. Mengapa? Pertama, sejarah adalah metodologi ilmu pengetahuan. Itu yang tidak dipahami banyak orang. Sejarah itu merupakan metode dasar ilmu pengetahuan. Misalkan tentang penelitian padi unggul. Kapan dimulai, siapa, di mana, bagaimana hasilnya, kegagalan mereka seperti apa, lalu bagaimana diatasi. Bagaimana *sih* problem pertama dirumuskan. *Lha* ini baru sarjana yang betul. Itu sejarah, dan semua pengetahuan selalu mempunyai sejarah. Sejarah adalah *the basic method of science*. Jadi tiap orang itu harus selalu belajar sejarah. Dan belajar sejarah berarti menulis.

Benarkah kebanyakan buku sejarah berisi indoktrinasi, pembenaran atau untuk kepentingan orang tertentu?

Ada. Ada yang malah sengaja untuk membesarkan wibawa penguasa. Misalnya tentang Negarakertagama, Pararaton. Itu *kan* ditulis untuk membesarkan, memuja kekuasaan Hayam Wuruk pada masa Majapahit. Tetapi ada juga yang tak sengaja. Misal, sejarah yang percaya bahwa yang penting dalam sejarah itu tindakan para tokoh terkemuka, seperti raja, jendral, penemu ilmiah, macam itu. Jadi pemusatan diri pada tokoh-tokoh. Itu merupakan satu mazhab sejarah. Ada mazhab lain seperti yang baru-baru ini ditulis Danny Lombard tentang manusia Jawa. Ia tidak percaya sejarah itu terutama tindakan-tindakan orang-orang besar. Malah dia percaya bahwa sejarah terdiri atas peristiwa-peristiwa penting. Dia percaya bahwa sejarah itu semua tindakan manusia yang ada pada jaman itu.

Kalau di negara kita sendiri, adakah semacam pembengkokan sejarah ?

Banyak. Ambil misalnya, penulisan sejarah yang dikepalai Prof. Notosusanto. Itu mereka berantem para penulisnya itu. Coba tanya yang terlibat di situ. Masih ada Pak Sartono kan. Masih ada saksilah. Dulu masih ada Pak Abdurrahman Suromihardjo almarhum. Mereka mengalami perkelahian hebat dalam panitia penulisan sejarah itu. Itu *nggak* mungkin terjadi kalau *nggak* ada unsur-unsur yang menyebabkan perkelahian itu timbul. Dan pastilah terjadi pembengkokan sejarah.

Tentang buku Anda Menjadi Indonesia, *kenapa sasaran pembaca yang dibidik umur 15-45 tahun ?*

Masyarakat kita kelompok umur ini, dari pengalaman dan buku-buku yang mereka baca, kita menarik kesimpulan bahwa mereka tidak akrab dengan sejarah bangsanya. Jadi bukan rahasia lagi, sejarah sudah menjadi mata pelajaran yang tidak disukai. Kalau anak saya sendiri tanya, bagaimana *sih* belajar sejarah, rasanya seperti lewat saja di kuping. *Nggak* ketangkap apapun.

Jadi cara mengajar sejarah pada anak-anak ya *story telling*. Kita berkisah, kita bercerita. Jadi kalau orang bercerita mesti ada jalan cerita. Supaya ada jalan cerita, mesti ada peristiwa

Jika benar begitu, sebetulnya metode apa yang paling pas dalam penyampaian sejarah?

Itu masih bisa jadi perdebatan. Tadinya sudah saya singgung sedikit mengenai sejarah yang ditulis Danny Lombard. Sejarah yang disebut *total history*. Ini merupakan mazhab sejarah yang terkenal di Perancis sejak tahun 1983. Tetapi mereka tidak berhasil menjadikan model sejarah mereka menjadi *textbook* di sekolah-sekolah Perancis. Dalam hal itu mereka gagal. Kenapa? Ya memang susah untuk mengajarkan *total history* pada anak-anak. Jadi cara mengajar sejarah pada anak-anak ya *story telling*.

Kita berkisah, kita bercerita. Jadi kalau orang bercerita mesti ada jalan cerita. Supaya ada jalan cerita, mesti ada peristiwa, *kan* gitu *to*. Jadi seperti wartawan, yang tugas sebenarnya menulis peristiwa dengan jalan cerita. Sebab ada wartawan yang menulis berita tanpa cerita dan jalan peristiwa, berita omongan misalnya. Nah itu sebabnya, *story telling* itu menjadi sangat sukar. Karena harus mengalir sepanjang peristiwa menurut jalan cerita.. Jadi kalau ada data-data yang belum ketemu, ya susah melakukan itu. Nah, menulis Menjadi Indonesia itu rasanya tidak mungkin melakukannya sepuluh tahun yang lalu.

Kenapa ?

Karena beberapa data untuk diceritakan tidak ada. Ambil contoh bukunya Takashi Shiraishi tentang *Java and Move* yang diambil dari surat kabar jaman itu. Bercerita mengenai Jawa bergerak pada awal pergerakan kebangsaan. Kita *kan* hanya tahu Boedi Oetomo didirikan di awal tahun tanggal sekian, Indische Partij tanggal sekian. Tapi ceritanya kita tidak tahu, tidak mengerti. *Lha* penelitian sejarah itu penting agar orang mampu bercerita mengenai sejarah.

Anda lulusan Hubungan Internasional, menyelesaikan S2 dan S3 dengan titik berat keilmuan sosiologi pembangunan, kenapa begitu tertarik mendalami sejarah?

Seperti sudah saya bilang. Sejarah adalah metodologi ilmu pengetahuan. Itu metodologi nasionalisme sebenarnya. Dan saya tertarik dengan epistemologi, yakni filsafat ilmu pengetahuan. Sejak menjadi mahasiswa saya sudah mengenal karya-karya Karl Popper, ketika teman-teman yang lain *nggak* mengenal sama sekali. Jadi ketertarikan saya dengan sejarah pertama-tama karena alasan epistemologis. Tapi kemudian saya *kepengin* mengerti bangsa saya. Bangsa ini *kok* begini, ada apa. Makanya saya suka menulis dari awal, bukan dari akhir. Ini nomor satu, nomor dua, awal 42 sampai Orde Baru, nomor tiga, bayangan ke masa depan (tentang Menjadi Indonesia-red). Saya suka sekali yang awal ini, karena bisa melihat akar-akar dari kebangsaan kita. Ingin memahami bagaimana menjadi warga negara yang layak. Kira-kira begitulah jika mau berslogan, ya. Itu *nggak* bisa naif. Anda berarti terpaksa menjadi warga negara lalu memang *nggak* suka menelusuri sejarah bangsa.

Sebenarnya apa yang paling

...erpengaruh bagi pengembangan ...asa kebangsaan?

Kalau dulu Bung Karno merumuskannya dalam pidato di depan *Dokuritsu Junbi Chosakai*. Rumusannya mengapa ada bangsa, yang diambil dari Ernest Renan. Bangsa itu muncul bukan karena warna kulit, bukan karena satu bahasa, satu suku, bahkan bukan karena berdekatan letak geografis, tidak! Tapi cukup dengan keinginan untuk bersama-sama. *Qu'est-ce qu'uine nation*, itulah rumusan Ernest Renan yang termasyhur.

Berarti bisa disebabkan karena persamaan nasib ?

Itu dari Otto Bauer, ini yang kedua. Karena memang satu nasib dan satu penderitaan, maka menjadi pelatuk munculnya bangsa. Tapi itu munculnya, *lha* bagaimana terpeliharanya? Itu *lho*. Nah, ambillah contoh teori, supaya gampang. Masih ingat bukunya Adam Smith yang terkenal itu. Orang menyebutnya *The Wealth of Nations*. Bukan itu sebenarnya. Judul yang asli *An Inquiry Into The Nature of The Wealth of Nations*. Jadi penelitian terhadap sebab musabab kemakmuran suatu bangsa.

Dalam ilmu ekonomi sampai sekarang ini sering dilupakan. Tak mungkin dimengerti tanpa memahami buku Adam Smith yang ditulis tujuh tahun lebih dulu daripada *The Wealth of Nations*, mengenai moral (*The Theory of Moral Sentimens*-red). Orang heran karena pertumbuhan ekonomi begitu cepat pada pertengahan abad ke-18. Belum pernah *lho*. Gambarannya sejak dulu sampai tahun 1500 pertumbuhan ekonomi paling banter 0,1% per tahun.

Nah pertumbuhan ekonomi dari tahun 500 sampai 1500 itu hanya dicapai dalam 200 tahun pada masa Adam Smith. Wah itu menggemparkan dan mengharu biru pikiran orang pada jaman itu. Kok bisa ya, orang yang mementingkan diri sendiri membangun kemakmuran bersama-sama. Teori moral dari Adam Smith bilang bahwa mementingkan diri sendiri dan bergabung dengan orang lain bersama-sama itu sesuai dengan hukum alam.. Dia berpikir, kalau orang mau mengejar kepentingannya sendiri dia harus lebih mahir. Maka harus ada spesialisasi.

Nah, teori *the division of labour* bertolak dari pengertian moral itu. Jadi harus dari pribadi-pribadi. Mementingkan diri sendiri jika mau bersama-sama harus ada yang disebut *self restraint*, menahan diri. Ini juga yang harus ditopang oleh institusi. *Lha* negara, bangsa membangun institusi untuk *self restraint* dari kepentingan pribadi. Jadi ekonomi di satu pihak dan tata keadilan, lembaga-lembaga, pranata-pranata sosial yang memberikan patokan-patokan dalam kehidupan bersama harus kuat. Kalau *nggak* ada itu *nggak* bangsa. Jadi ekonomi sebenarnya hanya berkembang kalau ada apa yang disebut jaman *the rule of law*, kepastian hukum.

Coba anda lihat kepastian hukum mengenai hak milik. Itu diatur oleh Belanda pada tahun 1870 dengan Undang-Undang Agraria. Itu pengaturan besar selama penjajahan. Jadi kepastian hukum dan apa yang disebut moralitas sosial itu harus kokoh agar perekonomian menjadi kemaslahatan masyarakat bersama. Agar inisiatif pribadi-pribadi itu atau nafsu mementingkan diri sendiri tidak menghancurkan, tetapi membangun *the wealth of nations*, itu sebenarnya teori ekonominya. Jadi bangsa hanya mungkin kalau dua itu dibina dengan sungguh-sungguh dan seimbang. Itu mempertahankan bangsa. Jadi tadi munculnya bangsa, teori Ernest Renan sama Otto Bauer yang dikutip Bung Karno itu sudah kita tahu semua. *Kan* mempertahankan bangsa harus memberi ruang kepada kreatifitas individu. Tetapi bangsa harus memberi *self restraint* institusi-institusi pada kegiatan-kegiatannya.

Makanya masih sangat berat sebenarnya, tugas pemerintah di negeri yang bernama Indonesia. Mereka harus menyadari bahwa demokrasi itu penting.

Kalau melihat tulisan Anda, sepertinya susunan kemasyarakatan dulu dan sekarang tidak jauh beda, seperti penjilatan terhadap atasan dan penginjakan kepada bawahan?

Lha, masalah bangsa ini terus. Itu menjadi pertanyaan sekarang. Kenapa ya setelah lima puluh tahun merdeka pun hal-hal yang temukan dulu bukan hanya selama penjajahan Barat dan Jepang tapi sebelumnya juga dalam kerajaan-kerajaan Indonesia kuno akar itu sudah ada. Bahwa di negeri ini itu korupsi, ya penyelewengan kekuasaaan itu boleh berjalan terus. Bahkan perlawanan pun bukan muncul karena itu. Ambil misalnya, perlawanan Ken Arok, pemberontakan-pemberontakan pada jaman Hayam Wuruk itu tidak bisa kita temukan mungkin *nggak* ada bahan. Tetapi sepanjang ada bahan kita *nggak* pernah temukan bahwa itu sebab keadilan, sebab membela rakyat misalnya. *Lha* ini Indonesia harus sadar bahwa tradisi itu mereka *nggak* punya, kita *nggak* punya. Nah ini harus dibangun. Harus dibangun *by human will* untuk tidak bilang *political will*.

Jadi sebenarnya permasalahan yang mendasar dari bangsa ini apa?

Itu tadi saya bilang, *kan* tadi yang dicari pembangunan ceritanya. Baliklah ke Adam Smith. Itu tidak mungkin prakarsa ekonomi berkembang tanpa institusi-institusi sosial yang menyangkut hukum, rasa keadilan dan moralitas.

Dengan kata lain Anda setuju liberalisasi?

Nggak itu pengertian yang keliru. Itu sama kelirunya dengan Margareth Thatcher, ha ha.. Dia bilang *there's no society*, itu kan dari Margareth Thatcher.

Jika melihat pembangunan di negara kita, Soekarno bilang pentingkan national and character building, sedang Soeharto pembangunan ekonomi lebih dahulu. Menurut Anda mana yang lebih benar?

Pertanyaan itu mungkin harus dipertajam. Bagaimana *sih* sebuah masyarakat bisa menjadi makmur sesuai yang dimaksudkan dalam UUD 1945. Iya *kan*. Soalnya kita *nggak* tahu apakah Soekarno seperti yang anda bilang, apakah Soeharto seperti

yang anda bilang. Ya pak Harto bolehlah mungkin *nggak* tahulah karena masih hidup, bisa lihat pembangunan yang dipentingkan ekonomi. Tapi coba tanya Pak Harto marah barang kali. Saya *nggak* hanya pentingkan ekonomi. *Lha* wong pembangunan aja punya Trilogi ya kan? Jadi belum tentu lho seperti yang Anda bilang tadi. Jadi jangan dipaksa untuk menjawab *the wrong question*.

Kalau mengenai pernyataan Soekarno tentang nation and character buliding?

Bahwa dia punya priorotas lebih dari pidatonya tentang *character building* itu *kan* boleh dibilang. Nah bedakanlah apa yang dikatakan orang dengan apa yang dilakukan. Jadi lebih baik kita gabungkan. Yang dilakukan Pak Karno itu salah satu yang fatal dalam *miss management* tidak hanya seperti ekonomi yang dibilang orang. Saya bilang sih dalam seluruh pekerjaannya.

Materi penulisan dalam buku-buku anda sangat beragam, dan yang terbaru tentang pemikiran Machiavelli, memang diperuntukkan untuk anak-anak ?

Nggak, bukan untuk anak-anak. *Ngaco*, ada resensi kali yang *gitu* ya? he he..Itu buat orang tua sebagai sahabat mereka buat anak-anak mereka. Jadi harapan kita dibeli orang tua untuk dibacakan pada mereka atau disuruh baca oleh anak-anaknya.

Berarti semacam memberikan pelajaran tidak langsung tentang pemikiran kepada anak-anak?

Ya bukan. Ini *kan* sebenarnya Machiavelli ini *kan* seri kembali ke dasar...Itu sehubungan dengan tempat saya bekerja ini mau memberi, apa... meningkatkan sedikitlah melek ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembaca di Indonesia agar bisa memadailah menghadapi abad dua satu. Jadi itu salah satu seri kembali ke dasar memahami basis atau dasar-dasar dari ilmu politik. *Kan* ilmu politik juga ilmu kira-kira *gitu* ya. Kebetulan juga memang sangat menarik. Jadi misalnya sekarang orang berbicara tentang demokrasi contoh ya. Kalau ditanya sekarang orang Indonesia, siapakah yang patut menjaga demokrasi? Itu orang Indonesia rata-rata, pertama mahasiswa seperti anda dan LSM akan bilang rakyat, ya kan. Pokoknya rakyat! Bagaimana kalau tentara? Wah jangan! ya kan. Ini kan namanya ortodoks. Machiavelli tidak kenal itu. Jadi Machiavelli metodenya begini, periksa secara logika dulu lalu periksa secara empirik. Secara logika yang patut menjaga demokrasi ialah mereka yang paling kecil kemungkinannya untuk menyalahgunakan kekuasaan. Itu *lho* logika. Itulah orang yang boleh di percayakan menjaga demokrasi. Itu menurut Machiavelli. Kalau itu sebetulnya semua *to* ya. Sekarang Machiavelli bilang empiriknya.

Di Sparta diserahkan pada tentara karena mereka berdisplin tinggi. *Nggak* mungkin menyalahgunakan kekuasaan itu. Di Sparta memang tentaralah yang menjaga demokrasi. Wah apa *nggak* kaget coba orang Indonesia, *bab* kok bisa begitu. Yang kedua di Roma, itu rakyat. Kenapa? Karena sejak awal di situ ada rakyat yang namanya *Plebeian*, yang diinjak-injak oleh golongan atas, namanya apa tuh, ya bangsawan *Patricia* .Itu kan diinjak-injak.

Jadi mereka menuntut, minta agar dua pemimpin bangsa, satu dari *Patricia* satu dari *Plebeian* disebut *Konsul*. Merekalah yang harus menjaga, karena mereka sangat kecil kemungkinannya menyalahgunakan. Tetapi di Venesia, itu kota dagang *lho*. Jadi di kota dagang ini hanya mungkin berjalan kalau ada kebebasan. Nah yang paling berkepentingan dengan kebebasan itu pedagang, orang kaya. Nah, yang menjaga di situ demokrasi adalah orang kaya.

Bagaimana kalau di Indonesia, apakah ada yang layak?

Nah di Indonesia. Makanya coba dilihat *nih* cara berpikir Machiavelli, fair dia. Analisa dulu di logika baru lihat di empirik. Ah, Indonesia mana? Coba, itu masih harus kita bangun.



Menjadi Indonesia, buku setebal 875 halaman bukan tidak mungkin menunjukkan latar belakang penulisnya. Bercerita tentang proses panjang terbentuknya kebangsaan, lengkap dengan penggalian fakta historis melalui riset yang mendalam. Catatan akhir yang justru lebih banyak dibanding jumlah tulisan utama, semakin memperjelas kapasitas Parakitri sebagai sosok seorang ilmuwan.

Memang, dua tahun setelah menyelesaikan studinya di Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol UGM, pada tahun 1974 Parakitri sempat mengikuti program Stagiaire di Institut d'Administration Publique (IIAP) di Paris, Perancis. Dalam rangka program tersebut, ia mengadakan penelitian lapangan mengenai bantuan luar negeri untuk pembangunan ekonomi di negeri Volta Hulu.

Dengan beasiswa Kompas, program master dan doktornya diselesaikan di Vrije Universiteit te Amsterdam, Nederland (1986-1991). Bidang yang diambil niet westerse sociologie atau sosiologi pembangunan. Tesisnya tentang pembentukan suku-suku bangsa di kota Batavia, "Process of Urban Ethnicity in VOC's Batavia." Sedangkan penelitiannya mengenai hubungan antara pembentukan suku-suku dan kegiatan ekonomi di pasar-pasar, khususnya di Jakarta dijadikan judul disertasinya "Tapping on The Wall, Ethnicity and Marketplace Trade in The Urban Context of Jakarta." Dan itu dipertahankannya pada tanggal 5 Februari 1991.

Belum ada yang layak sekarang yang menjaga demokrasi termasuk nah ini boleh anda catat, termasuk mereka yang memprotes pemerintah. Belum tentu penjaga demokrasi yang baik. Kenapa? Sebab demokrasi itu pertama-tama *way of life*, lain bukan ideologi. Itu *habits* pertama-tama. Kalau Anda lihat di negeri-negeri yang demokrasinya sudah tinggi, itu *habit*. Contoh, pendidikan seks itu orang tua terpaksa mencari metode yang pas, agar bisa bicara masalah-masalah seks pada anak-anak. Di meja makan, misalnya. Coba kalau jorok jorok itu khan norak. Jadi mereka harus berjuang *lho*.

Mereka kan hanya mengatakan apa yang mereka pikir. Jadi haram hukumnya menindas orang karena pikiran. Orang hanya perlu, orang hanya boleh dituduh karena perbuatan. Bukan mengenai pikiran itu lho mengenai PRD.

Jika tadi dikatakan memang belum ada, lantas siapa yang paling potensial menjaga demokrasi di Indonesia?

Yang paling potensial kalau Indonesia saya pikir rakyat. Cuman rakyat itu, ya begitu dari sejarahnya to. Rakyat yang tunduk pada ketidakadilan, yang menutup mata pada ketidakadilan. Mereka masih harus dididik. Makanya masih sangat berat sebenarnya, tugas pemerintah di negeri yang bernama Indonesia. Mereka harus menyadari bahwa demokrasi itu penting.

Tapi siapa yang menjadi pelopornya belum dikembangkan, begitu. Jadi saya berbeda dengan macam - macam orang, bahwa demokrasi menjadi persoalan tiap hari, tetapi metode Machiavelli belum kita pakai untuk menganalisis demokrasi itu. Terlalu banyak orang mengira demokrasi itu lembaga, aturan pemerintahan. Ya, memang akhirnya ke situ.

Tapi pertama-tama, coba kamu lihat sejarah misalnya kalau kita mau lihat demokrasi berkembang, kalau kita mau belajar bagaimana demokrasi berkembang selain dari Machiavelli. Itu ambil saja misalnya, lahirnya *Magna Charta* yang menjadi induk dari demokrasi di Inggris. Itu *kan* hampir bertempur. Jadi pasukan raja diancam oleh orang-orang London, di dataran yang sampai sekarang masih ada, dekat istana *Windsor*. Itu tempat lahirnya *Magna Charta*. Ketika orang-orang di London berani melawan Raja George. Mereka hampir bertempur, sampai Raja mau menandatangani syarat yang diajukan oleh rakyat London itu. Kalau *enggak* perang, dong.

Salah satu pasal yang terkenal itu begini, tidak boleh menghukum orang, menangkap orang tanpa memberi hak-hak untuk ditanyai, diperiksa barang-barang bukti. Jadi, pertama-tama demokrasi itu adalah *everyday habits* dari kehidupan, Nah itu rakyat menagih keseimbangan kekuasaan. Pada intinya, sebenarnya demokrasi itu adalah membatasi kekuasaan negara terhadap rakyat.

Anda bilang orang yang berteriak-teriak belum tentu layak menjaga demokrasi. Nah, kalau fenomena PRD?

Wah, itu sebenarnya *nggak* punya salah apa-apa. Mereka kan hanya mengatakan apa yang mereka pikir. Jadi haram hukumnya menindas orang karena pikiran. Orang hanya perlu, orang hanya boleh dituduh karena perbuatan. Bukan mengenai pikiran itu lho mengenai PRD.

Tapi mereka dijaring karena dituduh menyebarkan pikiran mereka?

Lho, itu khan tidak melanggar ketertiban umum *to*. Orang diskusi, orang kumpul, bikin bendera masa *nggak* boleh. Wah itu sih tegas-tegas lebih parah lagi nih. Ini sih mengadili pikiran. Kalau pikiran dilihat siapa *sih* yang tahu pikiran, kecuali dukun santet ha.. ha..

Jadi memang banyak dukun di Indonesia?

Ya, tapi sebenarnya apa hak dukun sih, untuk menerka pikiran saya. Makanya, itu juga ucapan yang paling hebat dalam perjuangan demokrasi dari orang macam Voltaire. Saya boleh tidak setuju dengan apa yang anda katakan, tetapi saya akan membela hak anda mengatakan itu.

Ada *junct* demokrasi yang luar biasa yang di Indonesia diinjak-injak. Orang punya pikiran masa *nggak* boleh, orang membicarakan gagasan masa *nggak* boleh. Kalau saya nodong bolehlah polisi. Nah, di situlah kepastian hukumnya, harus ada juga *dong*. Nah, korupsi bebas, tetapi mengemukakan pikiran tidak boleh. Ini negara apa?

Kalau mengenai korupsi, menurut



Anda apa yang mendasar sehingga Indonesia menjadi nomor satu?

Korupsi, itu *kan* karena disebut para peneliti luar negeri yang bermarkas di Swiss dan Hongkong. Itu karena disebut. Orang Indonesia mana mau mengakui mereka nomor satu korupsi. Kalau menurut saya *sih* di atas nomor satu nih korupsinya he..he

Ada orang bilang korupsi sudah menjadi budaya. Dari yang paling kecil saja, tukang parkir terkadang meminta lebih dari tarif yang wajar diterapkan...

Saya paling *nggak* mengerti omongan itu, sudah menjadi budaya. Budaya itu *kan* pengertian saya, budi dan daya. Jadi ada budi di situ dan ada daya. Dan konotasinya selalu baik. Jadi korupsi *kok* budi daya, *nipu gitu* ya. Mungkin maksudnya korupsi itu sudah menjadi sesuatu yang dianggap baik di Indonesia.

Dari mana permasalahan korupsi harus dipangkas ?

Karena ini soal negara. Jangan ragu, maka negara yang wajib memangkas. Negara wajib membasmi korupsi, itu tadi Adam Smith.

Sedang penguasa negara tidak terlepas dari masalah itu?

Makanya coba lihat, apakah masih ada bangsa, apakah masih ada negara? Ada satu cerita bahwa di Taiwan lebih kurang sepertiga anggota parlemennya itu sebenarnya kalau bukan ketua, anggota dari mafia Taiwan ha..ha parlemen gila.

Apa penyebabnya?

Macam-macam sebabnya. Kalau kita mau masuk ke situ, kita tidak bisa dengan level-level teori sosial sekarang ini. Sekarang ini ilmu pengetahuan sudah sampai pada batas sintesa yang disodorkan oleh Biologi. Oleh teori *Evolusi*, yang dikenal di situ mengenai *mime*.

Jadi sekarang ada ilmu yang selalu berkembang, sayangnya selalu di Barat. Namanya *memetic* dalam Biologi. Dengan itu sangat terang menjelaskan kenapa korupsi. Jadi tidak soal besar-besar karena *nepotisme* atau apa. Itu karena virus dalam pikiran dan ditiru oleh banyak orang. Dan peniruan itu mendatangkan nikmat. Korupsi merajalela.

Bisa dijelaskan tadi mengenai memetic?

Ini bukan kebenaran *lho*. *Mime* itu model, itu rumusannya. *Mime* itu adalah unit informasi yang ada dalam pikiran dan menimbulkan akibat-akibat dalam perbuatan, termasuk replikasi dari unit itu. Contoh, mula-mula mungkin kita tidak tahu kapan sih korupsi mulai merajalela sehebat ini hingga saat ini di Indonesia.

Dari dulu sudah ada *to*. Waktu jaman Belanda ketangkap, waktu jaman Republik juga seperti itu. Bahkan beberapa tokoh pejabat pernah ditangkap karena dituduh korupsi. Itu *lho* contoh yang paling kongkret. Bapak Ruslan Abdul Gani ditangkap oleh Kawilarang *lho*, Menteri Luar Negeri *lho* waktu itu. Tetapi belakangan ini sejak kapan sih

haram hukumnya menindas orang karena pikiran. Orang hanya perlu dan hanya boleh dituduh karena perbuatan. Bukan mengenai pikiran

korupsi mulai ditangkap.

Coba bayangkan jadi ini *lho mime*. Jadi pasti ada satu kali terjadi. Jelas-jelas orang korupsi bukan hanya ditangkap tapi malah dipuji, malah didatangi untuk diminta. Itu pasti pernah terjadi. Maka begitulah sejarah.

Coba bayangkan misalnya kita harus meneliti kalau perlu bagaimana dulu pemimpin-pemimpin Pertamina pada tahun awal Orde Baru membela tindakan mereka untuk membuat Pertamina dan seluruh karyawannya hidup ekslusif di Indonesia yang masih miskin. Pasti bisa kita temukan ucapan-ucapan Bapak Ibnu Sutowo jaman itu. Dia bilang layak dong Pertamina hidup lebih bagus. Masa sih, orang Pertamina harus ketemu rekan-rekan dari luar negeri naik becak.

Nah, itu muncul yang namanya *mime*. Unit informasi yang masuk di kepala pertama Pejabat Pertamina, kemudian orang-orang yang mendengarnya. Lalu dibawa ke rumah, diceritakan pada istri dan anak-anak. *Mime* itu seperti genetika, menular gitu *lho*. Nah kadang-kadang masalah korupsi yang besar ini, berasal dari hal-hal yang sepele, mungkin hanya pidato. Tapi kebetulan pidato orang yang berkuasa.

Seperti sabda pandita ratu?

Tidak seperti itu, itu lebih ditangkap dan enak buat orang. Bisa saja orang lain yang melakukan itu tetapi lolos, tidak dihukum. Sudah menjadi *habit* dan ada yang bilang menjadi budaya. Keterlaluan kalau dibilang begitu. Kira-kira begitulah korupsi itu mulai.

Sebagai orang yang banyak berkecimpung di dunia pers, bagaimana anda melihat independensi pers?

Apa sih yang kita omongkan tentang independensi pers. Jangankan pers, orang saja *nggak* independen di Indonesia. Apa bisa pers independen orangnya *nggak*. Itu terlalu *lux* untuk di Indonesia.

Kalau Anda melihat AJI (Aliansi Jurnalis Independen-red) ?

AJI *kan* berhasil berjuang. Ternyata tidak semua bisa dikendalikan oleh pemerintah. Dalam hal ini AJI harus dicatat oleh sejarah sebagai salah satu usaha dari masyarakat untuk menghadapi kungkungan atau kekuasaan, katakanlah.

Anda mendalami ilmu sosial, dunia pers sampai masalah sastra. Adakah titik temu yang bisa didapatkan, dan bagaimana anda bisa menuansai banyak hal yang berbeda?

Jadi sebenarnya kegiatan berilmu pengetahuan dan kegiatan yang lain dasarnya semua sama. Yaitu anda bertolak dari soal. Jadi tugas anda itu *to make your problem as clear as possible and to find alternative solutions to that problem*. Setiap orang dari detik ke detik bahkan dari *nano second* ke *nano second* yang dihadapi adalah persoalan, problem. Itulah hidup.

Nah, kontan *dong*. Jadi sebenarnya tugas anda itu membuat jelas persoalan dan mencari penyelesaiannya. Entah anda berilmu, entah anda wartawan, anda berada di masjid atau gereja, entah ada dimana.

Kalau dalam proses penulisan, apakah yang membuat anda lancar dalam menulis?

Saya tidak terlalu lancar, tidak terlalu produktif. Saya itu selalu koreksi terus bahkan sebelum naik cetak. Itulah yang membedakan saya dengan teman-teman dan sebagian besar generasi muda. Mereka mengira sekali *embat* jadi.

Saya selalu bilang pada rekan-rekan yang lebih muda, koreksi lagi. Bahkan lebih keras lagi, hidup ini belajar dari kesalahan. Anda tidak tahu kebenaran, saya juga. Tak seorangpun tahu kebenaran. Yang kita tahu hanya kesalahan dan kita memperbaiki.

Keberanian menghadapi hidup, itukah yang anda sebut sebagai metanoia *(artikelnya dalam* Kalam *edisi 9/1997-red)?*

Metanoia itu *kan* sebetulnya bertobat. Kalau bertobat itu pasti orang yang bersalah, jadi itu problem. Banyak orang mengira problem sama dengan topik. Misalnya sekarang kita mau bekerja apa? Kita mau meningkatkan penjualan. Bukan, apa problemnya? Meningkatkan penjualan itu topik. Problem itu mengenai kesulitan. Contoh, kerja kita sudah keras tapi yang laku *kok* tidak sampai 20%, penagihannya seret lagi.

Jadi rugi, kalau kita mau bekerja lebih hebat lagi tetap *nggak* bisa sudah sampai batas. Itu baru problem. *Let's talk about it.* Jadi orang melihat kesalahan, dia mengerti, lalu bertobat. *Metanoia!* Sudahlah saya *nggak* akan melakukan itu, cari jalan keluar lain.

Berarti kita harus selalu punya alternatif?

Harus jelas dulu problemnya.

Apa yang anda pikirkan sekarang?

Yang saya pikirkan ini sementara bangsa saya sibuk penataran-penataran, sibuk seminar-seminar, saya *pengen* mengerti bagaimana masyarakat dan kebudayaan berubah. Makanya sekarang saya belajar keras untuk memahami *memetic*. Masuk ke sintesa yang ditawarkan Biologi terhadap semua ilmu pengetahuan. Bagaimana *sih* bangsa Indonesia bisa berubah.

Untuk apa ?

Ya untuk tahu saja.

Seseorang pernah menulis bahwa penataran itu banyak gunanya...?

Maling juga banyak gunanya. Kalau nggak ada maling polisi bubar semua. Bangsa Indonesia ahli berguna, *lho*. Patah kaki juga bersyukur. Saya kira semua memang berguna termasuk kesalahan. Tetapi apakah itu yang dimaksud.

Tetapi ada juga *lho honest mistake*, kesalahan yang jujur. Jadi ada malapetaka karena kesalahan yang jujur. Malapetaka *by negligence*, karena keteledoran. Seperti listrik yang mati kemarin. Malapetaka *by mistake*, karena kesalahan. Malapetaka *by malice*, karena kejahatan.

Mana yang paling perlu dihindari?

Disaster by malice itu yang paling jahat. *Disaster by negligence* itu alpa. Itu gawat nomor dua dan nomor tiga masih bisa dimaafkan. Kenapa? Karena ada *honest mistake*. Kalau semua berguna semua tidak berguna.

Ada daya tahan yang liat pada bangsa ini. Makanya hati-hatilah pemerintah. Berkali-kali mereka akan digilas kekuatan yang mendasar, yang liat dari masyarakat.

Saya tertarik pada yang merugikan, kalau sudah berguna, sudah baik buat apa diurus. Lebih penting bicara kesalahan. Sebab semua yang sudah baik *nggak* perlu dipersoalkan. Segala yang berguna *I don't care*, segala yang merugikan *I care*.

Tentang hal yang merugikan ada yang pernah bilang bahwa bangsa kita selalu dibesarkan oleh mitos, misalnya melalui slogan-slogan pemerintah, benarkah ?

Bilanglah itu slogan jangan mitos. Seperti bahwa pembangunan kita berhasil, padahal ada yang gagal *lho*. Kalau orang berantem *nggak* ada yang menang tuh. Ada yang bilang pembangunan kita berhasil, itu bisa dicarikan seribu contoh untuk membenarkan. Ada yang bilang pembangunan kita gagal bisa juga seribu contoh. Ini dua-duanya mitos.

Selama ini banyak pembenaran dari pemerintah ?

Bukan hanya dari pemerintah dari LSM juga.

Jadi imbang, ya ?

Artinya dua-duanya *can not be true*. Kebenaran kan di tengah-tengah.

Yang anda pikirkan tentang bangsa ini ?

Saya nggak bisa menerima kesan-kesan bahwa bangsa ini amburadul. Yang amburadul itu siapa? *Kan* pemerintahnya. Itu rakyatnya masih bagus *lho*. Coba dijajah 350 tahun kuat bertahan. Ambil kehidupan di Jakarta. Begini padat masih banyak yang betah. Itu ada daya tahan yang liat pada bangsa ini. Makanya hati-hatilah pemerintah. Berkali -kali mereka akan digilas kekuatan yang mendasar, yang liat dari masyarakat.

Jangan pernah dari generasi anda yang meremehkan bangsanya. Saya *nggak* setuju. Yang amburadul itu pemimpinnya. Mulailah berubah dari masing-masing. Sampai hari ini saya *nggak* mau masuk dalam sistem. Jadi tidak mau menghormati orang karena jabatan cukup menghormati saja, tidak mau mendekati orang karena uang cukup ramah saja, tidak mau diekspos terkenal, cukup *Balairung* saja.

Bukannya menolak, tetapi misalkan menjadi pembicara dalam seminar-seminar, sudah lama saya menolak. Saya pikir itu kebiasaan dari sistem sekarang ini. Jadi mulai kita kembangkan di lingkungan kita kebiasaan yang tidak bisa dikooptasi, dicaplok oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita suka. Itu juga nggak kalah dengan perjuangan teman-teman PRD.

Apakah kemudian dengan itu proses internalisasi ke masyarakat bisa berjalan dengan sendirinya?

Oh, tidak. Itu mesti ada *organizing*. Tetapi karena saya belajar *memetic* sekarang saya mengerti bahwa itu bukan karena saya mau, tapi karena kita terus menerus berusaha. Ada timbul saat dan peranan orang yang tidak kita duga yang menjadikan sesuatu yang ada itu menjadi sesuatu yang lain. Anda boleh berencana tentu saja sebagai bimbingan bekerja, tetapi rencana bukan jaminan bahwa tujuan itu tercapai. Ini yang dalam ilmu sosial disebut *unintended consequences* □

Irfan Muktiono

Horor Vacui

Satmoko Budi Santoso

Staf Institute for the Study of Indonesian Society, Yogyakarta

Syahdan, pada zaman *greco roman* atau zaman klasik, pada era Yunani dan Romawi, muncul banyak komunitas masyarakat pedalaman yang digelisahkan oleh pencarian bentuk sosialisasi dalam bermasyarakat. Dari kegelisahan itu, masing-masing komunitas menemukan bentuk pergaulan sebagai bagian komunalisme berekspresi; model pertunjukan berupa tari-tarian --diawali dari eksplorasi gerak-- yang akhirnya disepakati sebagai upacara ritual khas komunitas mereka.

Yang menarik, tentu saja, pada proses pencarian bentuk komunalisme berekspresi itu. Tidak jarang masing-masing individu sebagai bagian dari komunitas itu mencoret-coret dinding gua tempat mereka singgah. Atau berteriak-teriak sendiri, melompat-lompat, menari entah dalam bentuk yang bagaimana, dan ada yang mau membentur-benturkan kepalanya ke dinding gua atau pohon-pohon demi sebuah pencarian model sosialisasi.

Pada akhirnya mereka menggabungkan semua percobaan 'pertunjukan' itu sebagai bagian dari ritualisme. Dan mereka pun juga bersepakat -- tentu dalam idiom atau identifikasi khas mereka; sebuah komunitas memerlukan bentuk eksistensi. Jika upacara ritual atau tari-tarian sebagai bentuk yang ideal, tentu itu bukan sebuah kenaifan.



***

Apa yang dapat kita petik dari sejarah berharga masyarakat zaman klasik itu? Kesadaran bahwa manusia mesti menentukan pola sosialisasi? Kemerdekaan bersikap dan berpikir hingga membawa pencerahan meski melalui proses yang bisa jadi gila-gilaan?

Setidaknya, kita bisa menarik beberapa indikasi jika fenomena di atas kita benturkan pada persoalan eksistensial manusia saat ini. *Pertama,* jika kita merujuk Ernst Cassirer, maka ada sebuah *frame* yang disebut ruang dan waktu organis. Artinya, setiap individu ternyata hidup dalam usaha penyesuaian diri dengan lingkungannya.

Di situ, tiap individu tunduk terhadap konteks ruang - waktu tertentu, baik yang menuntut aktualisasi maupun tidak sama sekali. Individu mencoba bergerak dalam idealitas pergaulan; ada kebetuhan eksistensial mendesak meskipun tidak harus dipenuhi secara serentak.

Kedua, setiap individu mencoba menghadirkan satu komitmen tunggal; dalam komunalisme dibutuhkan kejelasan sikap dan statemen demi arah perjuangan dan teratur.

Ketiga, proses berpikir sebagai bagian dari dialektika kritis dan logis, ternyata membutuhkan *frame* referensial lain di luar idealitas komunalisme itu. Benda, jarak, waktu, momentum, dan semua isi alam akan menjadi pijakan referensi yang tepat ketika sebuah pertanyaan krusial menyeruak; bagaimanakah membentuk sebuah kesadaran eksistensi yang sebenarnya?

Dan memang, dalam pola rasionalitas dan pemahaman tertentu, masyarakat modernisme seperti sekarang mencoba bergerak sebagaimana penafsiran masyarakat zaman klasik itu menerjemahkan kegelisahanya; ada kebutuhan cukup mendesak kaitannya dengan sosialisasi dan aktualisasi serta tingkatan eksistensi. Ekstrimitas pilihan bentuk sebagai bagian yang mungkin cukup rasional menjadi sebuah kewajaran tersendiri.

Maka, seperti tanpa dosa, manipulasi, kolusi, rejimentasi, fasisme, kesadaran primordial, pengkelasan, rasionalisasi paham tertentu, menjadi representasi wajar ketika kita menemuinya pada era modernisme -- bahkan postmodernisme? -- ini. Di mana setiap subjek -- individu menjadi teramat penting dan menginginkan peran yang maksimal sebagai bagian dari aktualisasi. Setiap subjek pada akhirnya bergerak mencari idealisasi-idealisasi; mesti menemukan sebuah kekhasan jika tidak menginginkan kepribadiannya hancur lebur.

Horor Vacui, ketakutan terhadap kekosongan itu, mengalami penerjemahan arti bermacam-macam. Kita terus meraba-raba mencari arti diri sendiri. Terkadang juga seperti Sisiphus, senantiasa menemui kekecewaan. Terkadang berwujud kekalahan dan kemustahilan. Kita menandai dan memaknainya dengan maklum, sadar diri, menjaga kesadaran hidup. Dan berulang kali kita mati, tidak menjadi diri sendiri. Kita juga digerus rasionalisasi citra dan kebendaan yang mengepung di luar diri kita. Semua muncul menakut-nakuti, bagai senjata, bagai moncong senapan□

Pengemis

EA. Supriyanto
Anggota FSB Retorika Yogyakarta

Jika Anda sering membaca cerita, komik atau sinetron silat Cina, Anda akan sering menemui tokoh-tokoh *Kay Pang*, yakni gerombolan partai pengemis yang biasanya digambarkan sebagai kekuatan politik penting. Dalam *Kho Ping Ho*-nya Asmaraman Sukowati maupun sinetron *Return of The Condor Heroes* yang sering diputar ulang TV swasta kita, *Kay Pang* justru menjadi afiliasi kekuatan oposisi, menentang rezim lalim sang kaisar. Bahkan dalam cerita silat pop Indonesia semacam Saur Sepuh, tokoh Rawon si pengemis sakti ikut berperan menggembleng Brama Kumbara, si tokoh protagonis.

Tapi saya tidak bermaksud bercerita panjang lebar tentang *Kay Pang* atau figur pengemis dalam jagad persilatan. Saya hanya ingin menunjukkan *Kay Pang* yang bentuknya sama sekali lain. *Kay Pang* yang tidak lagi idealis untuk tetap menjadi kaum papa, apalagi menjadi simbol perlawanan. *Kay Pang* yang telah mengalami metamorfosa mirip dengan *the late capitalism*-nya Frederic Jameson.

Untuk membuktikan ucapan saya, sering-seringlah *jogging* pagi sebelum orang-orang mulai sibuk di jalan melewati perempatan-perempatan strategis dan komplek-komplek perumahan di Yogya. Cobalah juga bermain-main di seputaran Bulaksumur tiap minggu pagi. Jangan kaget kalau Anda melihat para pengemis yang jumlahnya belasan diturunkan dari Suzuki Carry. Selanjutnya, secara bergantian satu-persatu *door to door* meminta-minta. Pernah juga, menurut seorang pemilik rumah di komplek ini, mereka meminta jatah untuk 20 orang sesuai dengan jumlah yang berbaris di depan rumah. Jika kurang, mereka bisa protes. Akibat minimalnya, Anda akan melihat suara ribut antar mereka karena pembagian tidak rata. Seorang rekan lain bahkan mendengar diskusi mereka tentang warung makan yang enak dan murah tempat mereka hendak *lunch* di suatu siang. Konon, mereka dihimpun oleh seorang "bos besar" dan bermarkas diluar kota.

Kompas, 14 Juni 1997 juga memuat feature tentang Lilis, seorang pengemis di jembatan Slipi yang paling apes mendapat seratus ribu rupiah bersih dan rata-rata tiga sampai kali lipatnya perhari. Lilis menginvestasikan penghasilannya untuk membeli sawah-sawah di kampungnya dan mempunyai tabungan cukup besar di bank. Bukan main!



Dengan keyakinan, anda bisa menyikapi dengan pedoman hadis nabi yang menganjurkan anda menghormati dan tidak menyia-nyiakan pengemis. Dalam kitab klasik *Durratun Nasihin* pun diceritakan, syahdan, seorang juragan kaya yang amat pelit dan tidak pernah menyantuni pengemis. Suatu hari, datang seorang malaikat yang menjelma jadi pengemis. Ketika itu si juragan sedang makan semacam apem. Dengan galaknya sang juragan mengusir pengemis itu sambil melemparkan sisa apem yang dimakannya ke keranjang.

Si pengemis tidak pergi, malah menawarkan segenggam emas kepada sang juragan untuk ditukarkan dengan kematian. Sang juragan kaget, darimana pengemis dapat duit. Tapi bukan soal, karena sang juragan tergila-gila dengan harta-benda, suatu *kelangenan* yang membentuk sifat pelit-kikirnya.

Singkat cerita, setelah si juragan berada di dalam kematian, ia mendapat pengalaman alam kubur yang pedih. Ia bukan lagi juragan, tetapi berganti posisi mirip pengemis yang dibencinya di dunia sebelumnya. Tidak punya apa-apa dan tak ada yang menolong, sekedar memberi makan-minum. Untung, dia pernah memberikan (melempar) sisa apem-nya sehingga atas *credit point* itu Tuhan menghindarkannya dari nasib kematian sesungguhnya. Lalu, Ia dikembalikan ke bumi dan memperbaiki perlakuan kepada pengemis.

Mungkin Anda akan ikhlas memberikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Tapi apakah Anda akan berlaku sama pada mereka yang hanya berpura-pura? Ada alasan moral yang dilematis untuk jawaban ini.

Anda yang percaya dengan prinsip-prinsip dasar etika: sikap baik, menganggap tindakan anda sebagai hormat diri sendiri dan menghargai orang lain, apakah tidak merasa tereksploitasi oleh suatu bagian kemanusiawian diri anda yang menyebabkan anda demikian murah hati: perasaan iba dan kasihan sehingga mudah saja memberi sesuatu pada peminta-minta? Ingat, rasa iba-kasihan sering hadir bagai teror. Lain halnya jika anda menganggap bahwa *rule of game*-nya harus begitu. Anda harus menyantuni pengemis karena anda merasa lebih beruntung dan tak mau bertukar posisi dengannya.

Menjadi pengemis, tentu menanggung *social cost* yang berat. Sebagian besar kita masih menganggap mereka berderajat rendah dan musti "ditegai". Melihat *performance* mereka sikap inferior secara sosial juga bisa tumbuh dalam diri orang-orang itu. "Hukuman" masyarakat lebih berat ketimbang keuntungan mereka. Meskipun sebagian mereka mengeksploitir rasa kasihan kita dan membuat geram, tak ada yang mau menjadi mereka jika ada tawaran sebuah pergantian status dan peran sosial bahkan mungkin dalam alur karma. Itu yang harus sadari sehingga anda tak perlu protes dan mereka menjawab: "*Gelem nopo gantian kalih kulo?*"□

Menggugat Generasi X Indonesia

Sebagai *counter culture*, generasi X di Amerika memiliki akar yang jelas. Mereka tidak hanya cuek dengan dandanannya, tapi juga berpengetahauan luas serta menguasai teknologi komputer canggih. Lantas, bagaiamana dengan di Indonesia? Apakah benar generasi X di Indonesia sama seperti di Amerika? Ataukah hanya sebatas ikut-ikutan?

Diawali dari Amerika, muncullah suatu gejolak remaja yang tak bisa dipungkiri lagi sebagai sebuah *counter culture*. Mereka adalah anak-anak usia muda yang merasa tidak puas dengan keadaan sekelilingnya. Kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk menentukan jalannya sendiri. Usut punya usut, generasi *baby boomers*-lah menjadi *pioneer* bagi generasi yang lahir kemudian.

Di Amerika saat ini tengah tumbuh sebuah generasi yang siap menggantikan *baby boomers*, generasi "ledakan bayi" yang dilahirkan oleh perubahan tatanan nilai sosial. Merekalah generasi X yang disebut-sebut sebagai sebuah generasi yang muncul dari refleksi tindakan rasionalisasi struktur kegiatan ekonomi di Amerika. Mereka terlahir pertama-tama dari nilai-nilai yang dipegang orang tua --- dan hal ini sangat dipengaruhi oleh situasi lingkungannya.

Perubahan nilai tersebut dirasakan saat Perang Dunia II dan sesudahnya. Mereka cenderung pragmatis dalam dalam menjalani hidupnya.

"Jika tidak ada jaminan di belakang, mengapa harus melakukan perintah?". Begitulah kira-kira gaya hidup mereka.



REPRO MATRA

Generasi X di Amerika terdidik
Menguasai teknologi dan komputer

Namun demikian, rupanya generasi ini juga memperhatikan lingkungan hidup, dan dikenal sebagai kelompok pecinta alam yang baik. Sebagai contoh, mereka menolak produk-produk yang tak dapat didaur ulang, dan juga menyorot penebangan hutan tropis yang berimbas pada rusaknya ekosistem.

Generasi pemberontak

Sekilas, generasi ini terlihat santai dalam menatap masa depan, namun sebenarnya mereka mempunyai kesungguhan dalam menjalaninya. Mengapa mereka memilih sikap yang demikian? Alasannya sederhana, umumnya mereka berasal dari keluarga *broken home*, sehingga tidak jarang perhatian dari keluarga mereka sangat kurang.

Sebagaimana yang biasa ditemui di negeri bersistem liberal; perceraian, *single parent*, kesepian di rumah, bukan menjadi suatu hal yang aneh lagi. Tidak sedikit seorang ibu yang dituntut untuk mengasuh anaknya seorang diri. Meropel dua atau tiga pekerjaan sekaligus dalam satu hari karena terdesak oleh kebutuhan.

Mengalami kehidupan seperti itu, akhirnya sang anak sadar bahwa hanya dia sendirilah yang bisa mengubah dan memperbaiki hidupnya. Maka tak heran jika lantas remaja berusia 18 atau 19 tahun itu

sudah berani hidup terpisah dari orang tuanya

Kondisi seperti itu mengingatkan kita pada kisah Drew Barrymore, aktris yang melejit lewat *Bad Girls*. Ia sejak umur 14 tahun sudah hidup sendiri. Namun, dalam perjalanan hidupnya, ia kemudian sempat menjadi tokoh yang populer.

Kasus yang sama dapat kita temui pula pada sederetan nama bintang layar lebar yang mencuat lewat film-film bertemakan gerakan anak muda anti kemapanan. Antara lain mereka itu adalah James Dean, Marlon Brando (*The Wild One*), dan Juliette Lewis, aktris yang menghabiskan hampir seluruh masa mudanya di jalanan. Tak boleh dilupakan juga sosok Ethan Hawke, aktor film bertema generasi X, *Reality Bites*.

Film-film yang dimainkan mereka -- di samping beberapa film yang lain, pas sekali sebagai simbol sekaligus media pengungkapan ekspresi jiwa anak-anak muda Amerika pada jamannya yang memunculkan "pemberontakan" terhadap sistem yang berlaku.

Ketidakpuasan terhadap gereja

Menurut analisis Remy Sylado, penyair dan budayawan yang ditemui *Balairung* di kediamannya di Jakarta menjelaskan, jika ditelusuri dari kerangka filosofis, generasi X melakukan ini semua dalam rangka melawan sistem falsafah hidup Barat yang pada waktu itu tercerabut dari paham Kristiani.

" Sebelum pecah PD II kalau kita mau menelusuri sejarah, tersebut nama-nama tokoh seperti Rene Descartes, L. Feuerbach, Nietzsche sampai ke Sartre, mereka sama-sama filsuf beraliran paham anti theisme," jelas Remy.

Mengapa demikian? Pada dasarnya anti-theisme (yang saat itu tertuju pada etika Kristiani) muncul sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap etika kristiani itu sendiri. Sekitar tahun 40-an, saat gencar-gencarnya eksistensialisme, Jean Paul Sartre diterima oleh generasi muda dengan tangan terbuka. Generasi muda semakin tidak percaya terhadap gereja. Gereja dianggap tidak bisa mengekang terjadinya PD I. Bahkan, sempat ada tuduhan kolusi pihak Paus dengan Nazi pada waktu itu. Sejak saat itulah selalu muncul generasi *halai balai* hingga saat ini ---termasuk di dalamnya musik pemuja setan-- yang sifatnya mendunia.

Gaya pemberontakan yang dilakukan generasi yang dijuluki *baby buster* ini patut diacungi jempol. Terhitung sejak kelahirannya 1965-1978, mereka tergolong *the first generation* yang mengenal komputer dan internet serta sebagai generasi pertama yang menghargai perbedaan gender dan ras. Bukan hanya itu, mereka bahkan tergolong mahir dalam jaringan *network*, serta mencintai alam.



Muara Bagja

Sayangnya mereka sangat miskin dengan nilai-nilai baru dan masuk dalam kategori generasi yang *cuek*. Ini ditandai dengan tingkah mereka yang aneh-aneh, pakaian kebangsaannya adalah flanel atau denim dengan ukuran dua kali lebih besar, bertopi bisbol, bercelana lebar atau jeans belel, dengan anting dipasang di mana saja asal mereka suka, dan mengenakan aksesoris sebanyak-banyaknya seperti layaknya dandanan para *boomers*.

Lewat gaya semrawut inilah mereka menunjukan gaya anak muda yang menolak kemapanan, pokoknya gaya *underground*-lah. Dengan penampilan yang lebih independen dan variatif serta kreatif, jadilah *style alternatif* namanya. Bahkan sebuah novel karya Douglas Coupland tahun 1991, mengisahkan kehidupan generasi X baik gaya hidup, filsafat hidup, keluarga, kekasih dan kehidupan sehari-hari mereka. Dan kabarnya novel ini laris di pasaran. Istilah Generasi X pun populer.

Akhirnya, gaya hidup Generasi X mengglobal di seluruh sudut negeri (baca: Amerika). Kemudian bagai arus semakin deras pabrik-pabrik memproduksi barang dengan segmen konsumen generasi X. Terhitung sejak tahun 90-an hingga saat ini, makin banyak saja barang yang diposisikan pada generasi X, dari pakaian dengan aksesorisnya, piringan kompak (CD/VCD), aksesoris motor ataupun mobil, majalah, komputer, sampai pada makanan pun diciptakan khusus bagi anak generasi *hippies* ini.

Generasi X di Indonesia

Lantas bagaimana dengan generasi muda di negeri kita? Yang jelas, gaya hidup seperti anak-anak Amerika di atas sudah banyak ditemui di kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Yang paling menonjol adalah gaya dandanan dan pola hidupnya. Jeans belel yang terakhir dicuci sebulan yang lalu, aksesoris menghiasi sekujur tubuh, serta membubuhkan sedikit *image* kumuh.

Merebak pula di kalangan anak muda Indonesia gaya hidup bebas, termasuk *free sex, grunge, punk, triping*. Atas perilaku mereka yang demikian, sebagian orang menyebutnya sebagai "generasi bingung", yang gamang dalam proses pencarian identitas diri.

Kehidupan jalanan seolah-olah menjadi *trend* anak muda lepas SMA. Secara tidak langsung inilah yang melahirkan karakter dinamis, santai, kontras, tapi juga kreatif. Mereka juga lebih spontan mengungkapkan dirinya. Akan tetapi, kalau toh ada generasi X *beneran* di negeri kita, itupun hanya sebatas meniru. Artinya, hampir semua dari mereka sama sekali tidak mempunyai latar belakang filosofis seperti gerakan di Amerika. Meminjam kata Remy Sylado, mereka hanya terbatas pada *fashion* saja. "Mereka hanya terbatas pada penampilan luarnya, bukan dalam kerangka pemikiran filosofisnya," tegas Remy.

Dan jujur saja, latar belakang pendidikannya pun, formal maupun informal, terbatas sekali. Sedikit memaparkan perbedaannya, jika di Amerika X *Generation* dikenal sebagai generasi pertama yang mengenal dan mampu mengoperasikan komputer

serta tekhnologi internet. Tetapi, yang terjadi di Indonesia, kenyataan yang dijumpai adalah yang dijuluki generasi X itu sebatas penampilan fisiknya saja.

"Saya sih cuman pingin gini aja, masa bodo sama omongan orang, yang penting saya nggak ngganggu mereka," kata Marsi gadis berumur 18 tahun yang bergaya bak X *Generation*.

Lain lagi dengan Shirley 22 th, dia merasa *enjoy* sekali dengan penampilannya yang sembarangan sejak berumur 14 tahun. "Pertamanya, jalanin aja. Mau pakai ini itu, ya pakai aja, ngecat rambut ya oke," ujarnya.

Mahasiswi tingkat akhir salah satu universitas negeri di Yogya ini mengaku mendapatkan ilham dari dirinya sendiri sejak masih di SMP. Hanya saja ide itu baru bisa kesampaian selepas SMA. Kendalanya, saat itu ia harus mentaati peraturan sekolah yang meyangkut cara berdandan. "Akhirnya berhasil juga keinginan saya," ucapnya bangga. Yang jelas orang tuanya tidak mempermasalahkan gaya hidupnya itu.

Hebatnya, apa yang menjadi *trend* di Amerika hari ini, besok sudah mereka tiru. "Generasi muda kita sayangnya hanya bisa meniru," nilai Remy Sylado menyayangkan sikap pasif anak-anak muda negeri kita.

Ungkapan senada dilontarkan pula oleh Muara Bagja, pengamat perilaku anak-anak muda, "Yang dilakukan remaja kita saat ini adalah budaya meniru," nilainya.

Pengamat mode yang juga menulis di beberapa media cetak ini juga mengatakan bahwa pengaruh dari luar, terutama Amerika, terhadap anak-anak muda, sangat kuat dan pengaruh ini berkembang dengan pesat pula.

Kecepatan perkembangan itu semakin ditopang dengan adanya teknologi media elektronik secanggih internet yang memungkinkan transfer informasi global bisa diakses dengan mudah tanpa sensor dalam sekali klik.

Lain halnya dengan Toni, seorang mahasiswa di Yogyakarta. Menurutnya, dandanan seseorang mencerminkan *life style*. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah totalitas. Sementara fenomena yang ada sekarang hanyalah budaya meniru saja. "Saya hanya menawarkan sesuatu dan mencoba sesuatu yang lain. Silahkan bergesekan dengan saya," ungkapnya kepada *Balairung*.

Tetapi, salahkah budaya meniru



DESTI

Generasi X di Indonesia
Pemberontakan terhadap apa ?

mereka itu? Dosen Filsafat UI yang juga kolumnis di banyak media massa, Tommy F Awuy, melontarkan pandangan yang berbeda. Menurutnya, tidak selalu bahwa yang meniru itu berarti buruk.. "*Niru* juga enggak apa-apa kalau memang *niru* kreatif," tegasnya. Hanya saja masalahnya, yang patut kita pertanyakan adalah apakah benar kita telah menjadi pengadopsi budaya yang kreatif? Karena selama ini tampaknya kita hanya menerima sesuatu dari luar, khususnya Barat, tanpa berusaha memunculkan kreativitas sebagai respon terhadap gesekan budaya. Kita selama ini ibarat kerbau rakus yang kelaparan dan melahap apa saja yang didapat tanpa berpikir untuk memilah sebelum mengunyah.

Bersinggungan dengan parabola, komputer, internet, dan benda-benda canggih lainnya, sudah pasti generasi dalam kelas menengah ke ataslah yang bisa menikmatinya.

Jadi kesimpulannya, Generasi X di Indonesia sama seperti Generasi X -nya Amerika, lahir dari kalangan kelas menengah. Sebagian dari mereka masih sama dengan generasi yang ada di Amerika, lahir dari keluarga yang kurang harmonis, dan sebagian lagi berangkat dari kalangan keluarga menengah ke atas yang kehilangan perhatian dari orang tuanya.

Di sini jelas terlihat bahwa peranan orang tua memiliki andil besar bahkan mungkin merupakan faktor utama. Seperti yang dituturkan Irwan Iskandar dari majalah *Hai*, generasi ini lahir karena pengaruh nilai-nilai yang dipegang orang tua.

Lebih jauh Irwan menegaskan, bahwa di Indonesia sendiri, sampai saat ini telah berganti-ganti generasi setidaknya empat atau lima kali yang masing-masing di dalamnya pasti ada gerakan antikemapanan, diawali oleh generasi 45, kemudian 60-an yang gerakan anti kemapanannya dilakukan terhadap sistem yang konservatif-otoriter dalam masyarakat. Kemudian, generasi 70-an, diwujudkan melalui gaya *punk*-nya. Menyusul generasi tahun 80-an lebih cenderung ke musik cadas, dan terakhir generasi 90--an.

Menurut Irwan, sangatlah wajar bila setiap generasi memiliki suatu *style* yang berbeda satu sama lain. Dan memang itulah yang menjadi ciri khas mereka. Buktinya, diawali film *Rebel Without A Cause* yang dibintangi James Dean, kontan anak-anak muda kita meniru habis-habisan gayanya. Film-film yang bertemakan anti-kemapanan dan *counter culture* yang berasal dari Amerika, serta merta ditiru.


IRMA

Tommy F Awuy
Generasi muda kita hanya meniru

Disusul *Flower Generation, Crossboy,* hingga Generasi X kini.

Hanya biasanya antikemapanan tersebut pada awalnya cenderung dimengerti sebagai hal yang negatif. Hal ini wajar karena suatu nilai baru yang masuk biasanya dianggap sebagai satu hal yang negatif, tetapi dalam perkembangannya asumsi itu berangsur-angsur pupus.

Menyepakati pendapat tersebut, Remy mengingatkan kita, "Bahwa sikap kita yang menganut paham "agama suku" telah merambu kita menjadi chauvinistik: Bahwa yang kita punya adalah yang terbaik, dan yang orang punya adalah jelek. Akibatnya bila muncul sesuatu yang baru, apa pun bentuknya, kita selalu bereaksi untuk menolaknya. Padahal siapa tahu ada unsur positif yang bisa dikais dari sana," papar Remy.



Irwan Iskandar
Lahir dari keluarga yang kurang harmonis

Masih berkaitan dengan generasi kelas menengah kita, yang terjadi sekarang adalah pola kehidupan mereka cenderung konsumtif dan menuju gaya hidup hedonis.

Sekilas terasa tak enak didengar memang. Tapi, tunggu dulu, bukankah gaya hidup macam inilah yang tengah menghidupkan roda perekonomian bangsa kita?

"Bahkan remaja-remaja sekarang, saling berburu pekerjaan sampingan yang bisa berjalan bareng sama kuliahnya hanya untuk memenuhi kebutuhan *lux* mereka," contoh Irwan memuji.

Fenomena ini cukup membuktikan, setidaknya tingkat pendapatan rata-rata masyarakat sudah mulai membaik apalagi menghadapi pasar bebas tahun 2020 mendatang. Jadi, wajar apabila kita punya uang lantas kita belanjakan apa saja yang kita inginkan. "Tapi kita merasa *save* enggak dengan membeli barang tersebut," lanjut Irwan mempertanyakan.

Pergeseran Nilai

Menyoal pertumbuhan dari generasi ke generasi, khususnya Generasi X, yang tumbuh di Indonesia dan merebaknya generasi baru adalah wajar di setiap jaman. Muara Bagja menilai, problemnya adalah dari jaman ke jaman terdapat semacam pergeseran nilai-nilai sosial, yang dilakukan anak muda di Indonesia. Segala macam bentuk peniruan yang ada toh nantinya akan mengkristal, tidak semuanya mendapat sambutan. Bisa kita tengok, model pakaian dengan memperlihatkan pusar yang baru-baru ini *ngetrend*, sekarang mulai ditinggalkan. Alasannya singkat saja kurang nyaman dipakai dan sebagian masih merasa risih.

Dari situ dapat disimpulkan, bahwa sebenarnya terjadi juga yang namanya penyaringan budaya. Boleh dikata, generasi kita masih terikat oleh budaya bangsanya. Masih ada *counter culture*. Artinya, meski jaman terus menggilas dengan globalisasi yang membawa perubahan nilai baru, namun sampai saat ini agaknya kita belum perlu terlalu khawatir dengan dampaknya. Sebab, generasi muda kita masih tetap punya ikatan dengan budayanya dan masih memegang nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Mereka hanya mengambil bentuk-bentuk yang dirasa sesuai dengan kultur dan norma di sekelilingnya. Yang dianggap tidak sesuai mereka buang. Paling tidak, perlahan-lahan yang semacam itu makin terkikis□

Irma Hidayana
Imam R, Radyah M

Pak David dan ACICIS

Orang sempat terperanjat ketika di pagar rumah di Blok 10 B Bulaksumur, yang juga depan sekretariat Majalah *Balairung,* itu terpasang papan nama dengan tulisan singkat: Program ACICIS. Kemudian orang pun tidak henti-hentinya bertanya, apa sih ACICIS itu? Lalu juga muncul jawaban yang lucu-lucu. "Acicis itu kepanjangan Aku Cinta Indonesia Cinta Indonesia Sekali", celetuk salah seorang rekan.



Mendengar itu, **DR. David Reeve** pun sontak memberi kartu namanya yang tertera pula kepanjangan kata ACICIS itu. Dan ternyata, ACICIS adalah *Australian Consortium In Country Indonesian Studies.*

Saat ini, pak David dipercaya sebagai pengelola program kerjasama Australia dengan UGM dan Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kantor ACICIS kebetulan ditempatkan di kawasan perumahan dosen UGM Bulaksumur --tepat di depan kantor redaksi *Balairung.*

Doktor kebudayaan ini sebelumnya sudah lama bermukim di Indonesia. Berkait dengan mahasiswa Indonesia, Pak David punya pengalaman unik. "Saya dulu pernah mengajar di UI. Tapi aneh mahasiswa Indonesia itu. Setiap saya mengajar daftar absen selalu lengkap, tetapi orangnya tidak pernah hadir di kelas. Misterius! Di UGM saya belum tahu, tetapi mungkin kondisinya tak jauh beda," paparnya.

Di depan kantornya, terpampang kincir angin yang menggerakkan patung *petruk* dan *gareng* di atasnya.

Setiap hari banyak mahasiswa asal Australia yang belajar di UGM datang ke kantornya. Bahkan pengelola ACICIS yang ada di Australia pun sempat berkunjung.

"Saya mau ke Malang, kamu mau titip pesan untuk Basofi (Gubernur Jatim-red)?" tanyanya kepada *Balairung* saat hendak ke Malang mengurusi mahasiswanya di UMM.

Ditanya tentang mengapa dirinya begitu betah tinggal di Indonesia, ia menjawab, "Saya suka dengan Indonesia yang lengkap ini."

Mau tahu lebih banyak tentang ACICIS ? Silahkan tanya pak David atau kalau Anda seorang *cybersurfer* silakan melayangkan *e-mail* ke acicis@yogya.wasantara.net.id ***

aris pour dan L.A.

Kayaknya, Laki-Laki *Deh...*

Tidak ada hati yang lebih bahagia bagi seorang ibu, kecuali menanti lahirnya sang anak pertama. Hal ini yang dirasakan oleh Ratih Sanggar Wati (33), foto model sekaligus perancang mode.



"Saya sudah delapan bulan *nich* Mas. Dan saya senang banget menanti anak pertama saya ini," ungkap Ratih sambil menunjukkan perutnya yang membuncit.

Kebahagiaan Ratih tersebut tidak tanggung-tanggung. Ia rela meninggalkan kegiatannya lenggak-lenggok di atas *cat-walk* dan merancang mode, hanya untuk menanti sang anak lahir. "Saya pingin bener-bener anak pertama saya ini lahir dengan sehat dan selamat," kata Ratih beralasan.

Walau sedang hamil, Ratih tetap kelihatan cantik dan enerjik. Raut wajahnya tetap segar dan senyum khasnya selalu menyambut setiap orang yang menyapanya.

Hal itu dirasakan *Balairung* ketika menemuinya di sela acara "Pak Kayam Pamit Pensiun" di Purna Budaya beberapa waktu lalu.

Saat dimintai komentarnya tentang pribadi Pak Kayam, ia banyak berujar, "Dia itu bapak saya, bapak bagi semua artis. Dia sangat familiar dan sangat kebapakan."

Tentang pak Kayam yang mau main sinetron, ia menyambut gembira. Menurut Ratih, tampilnya pak Kayam di sinetron diharapkan bisa mengangkat kualitas sinetron Indonesia, sehingga sinetron tidak lagi sekedar berorientasi komersil yang 'amatiran'.

"Pokoknya kita semua harus menyambut gembira atas tampilnya pak Kayam di sinetron. Karena orang seperti pak Kayam merupakan orang-orang yang sangat dibutuhkan dalam kemajuan sinetron Indonesia," jelas Ratih optimis.

Ratih sangat bangga memiliki 'bapak' seperti pak Kayam. Ini terlihat dari harapannya yang berkeinginan agar anak pertamanya itu laki-laki dan menjadi budayawan seperti Umar Kayam. "*Kayak*nya anak pertama saya laki-laki *deh*," ungkap Ratih mengakhiri perbincangannya dengan *Balairung* ***

Imam dan Katam

Pelawak Juga Butuh Informasi

Sejak keterlibatannya dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan (SDAS), pria setengah baya kelahiran karanganyar, yang akrab dengan panggilan Mas Karyo ini, semakin sering muncul di layar kaca membintangi berbagai jenis produk iklan.

Basuki sendiri tidak membantah bahwa saat ini ia sedang memborong sejumlah produk. "Kalau soal iklan, itu *kan* dari pihak yang menawari kita. Jadi saya bersyukur sekali kalau para klien itu menghubungi saya," katanya.

Melawak itu, menurutnya, tak sesukar yang dibayangkan orang, tapi tidak berarti gampang. Selain itu, pelawak juga harus mengikuti perkembangan terbaru.

"Melawak itu tak perlu latihan. Selain bakat, saya selalu mengikuti berita di media cetak maupun elektronik biar tidak ketinggalan informasi," ungkap pelawak yang juga terjun dalam bidang desain interior bersama Rano Karno

"...Dikorek Pelan-Pelan..."

Jawaban itu benar-benar meluncur dari mulut **Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri** --yang biasa dipanggil Mbak Mega-- menanggapi pertanyaan seorang peserta Simposium Nasional di UGM baru-baru ini. Penanya mengeluh kepada Mbak Mega perihal represi dari pihak militer yang begitu mudah membungkam aksi-aksi mahasiswa.

"Kalau tembok dipukul, mungkin bisa hancur. Tapi, tangan kita juga sakit. Maka saya lebih memilih untuk mengoreknya pelan-pelan," ungkap Ketua Umum PDI versi Munas ini.

Selain itu, kesabaran dan teguh memegang peraturan adalah prinsip yang selalu dipegangnya. "Kita harus punya kesabaran. Kalau di sana mukul, kita harus mengelak. Tapi kita jangan berdiam diri," tambah Mbak Mega yang pernah mencicipi kuliah di Pertanian UNPAD dan Psikologi UI ini.

Pada bagian lain, Mbak Mega menegaskan perlunya dialog antar pemuka masyarakat dan kelompok pro-demokrasi lainnya. "Selama ini kita dikotak-kotakkan. Sepertinya ada ruang kaca. Kita bisa saling melihat, tapi seolah-olah sulit sekali untuk saling bicara dan dialog, padahal rasanya visi kita tidak jauh berbeda," katanya.

Mbak Mega menegaskan, dirinya selalu terbuka untuk berdialog dengan pihak manapun. "Selama ini saya sering berdialog dengan Gus Dur. Kebetulan saya belum mencoba berdialog dengan pak Amien Rais," akunya kepada *Balairung* dan wartawan lainnya di jeda simposium.

Lontaran Mbak Mega tentang perlunya dialog ini memang cukup menarik. Sebab, hal ini akan menjadi penting dalam konteks pembentukan 'koalisi bersih' untuk menyokong proses demokratisasi dan penguatan Masyarakat Madani.

Iya *deh*, Mbak Mega. Pokoknya kita tunggu perjuangannya untuk membuka dialog dan --semoga-- bisa membangun koalisi dengan kelompok-kelompok pro-demokrasi ***

Asep

ini.

Mengenai eksistensinya di dunia hiburan, Basuki berujar, "Selama saya masih dipercaya oleh masyarakat, saya akan terus menekuni profesi ini."



Ketika ditemui *Balairung* saat mengisi acara Dies Natalis dan Peresmian gedung Magister Manajemen UGM di auditorium Graha Sabha Pramana, 28 Juni 1997 lalu, Basuki bersama rekan-rekannya yang tergabung dalam SRIMULAT, berhasil mengocok perut sekitar 300 penonton yang mayoritas adalah civitas akademika Universitas Gadjah Mada.

Lantas, bagaimana agar kegiatan keluarga, bisnis dan melawak bisa jalan terus? "Tinggal bisa-bisanya *memanajuminem* eh manajemen agenda saja," kata Basuki ***

nggirma

"Jangan Terlalu Berharap pada Pemerintah..."

Bersih-bersih. Itulah hobby menteri kita yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Menteri Negara Lingkungan Hidup **Sarwono Kusumaatmadja**. Setelah sukses membersihkan sungai dengan Proper Prokasihnya, kini Pak Sarwono bergiat menggelar program Langit Biru demi menjamin kebersihan udara yang kita hirup sehari-hari.



Ditemui *Balairung* saat makan siang seusai Diskusi *Panel Islam dan Lingkungan Hidup* di Fakultas Filsafat UGM, menteri yang dikenal vokal ini menyatakan, Indonesia perlu melakukan reformasi energi.

"Pada tahap pemasyarakatan bisa dikatakan cukup bagus, tetapi pelaksanaanya tidak mudah," tutur menteri yang biasa menulis dengan tangan kiri ini.

Kebijakan tentang transportasi, energi, dan tata ruang harus terintegrasi satu dengan yang lain. Pola transportasi yang digariskan Departemen Perhubungan harus sejalan dengan kebijakan energi yang dikeluarkan oleh Bakoren. Kedua kebijakan tersebut seyogyanya menjadi acuan pembangunan tata ruang daerah yang diatur oleh Pemerintah Daerah dan DPRD setempat.

Untuk membersihkan udara dari tebaran timbal yang berdampak negatif pada kesehatan, pemerintah berupaya memproduksi bahan bakar ramah lingkungan. "Saat ini sudah diproduksi bensin bebas timbal, Super TT. Tetapi, jumlah produksinya masih sangat terbatas," ungkap Pak Sarwono menunjukkan kemajuan yang telah dicapai.

Berhasil tidaknya program bersih-bersih ini tak luput dari peran serta masyarakat dalam pelaksanaanya. Karena suatu masyarakat yang terlalu berharap pada pemerintah berarti masyarakat tersebut masih memelihara keterbelakangannya," demikian Pak Sarwono mengakhiri perbincanganya dengan *Balairung* ***

Pedy dan Mashudi

Pena lebih tajam ketimbang pedang

Pada sebuah pertarungan, Jacky Chan yang canggih itu telah terjebak di sebuah sudut yang kosong. Ia sudah amat sangat kelelahan. Masih untung hanya satu lagi musuhnya.

Tapi ia tidak memiliki apa-apa. Tanpa senjata. Tanpa kursi, ataupun tongkat kayu yang bisa dijadikan senjata --seperti biasanya.

Ketika musuhnya siap mengayunkan pedang, sekelebat tangan Jacky melemparkan pena yang dari tadi tetap menempel di bajunya. Dan... musuhnya benar-benar terkapar. Mati. Pena itu menancap tepat di jidat musuhnya.

"Hmm, Benar kata orang, pena memang lebih tajam daripada pedang," gumam Jacky sambil diam-diam berkerut keheranan.

Asep diolah dari Dayat

Makalah Seminar

Konon, Neils Amstrong bukanlah orang yang pertama mendarat di bulan. Ia bertemu dengan orang Cina dan orang Indonesia yang telah lebih dulu sampai di sana.

"Bagaimana kalian bisa lebih dulu sampai di sini, padahal teknologi kalian masih sangat rendah ?"tanya Amstrong pada orang Cina.

"Lha, kami *kan* punya 1,4 Milyar penduduk. Dengan main pundak-pundakan Kami bisa sampai ke sini,"kata Orang Cina dengan bangga.

"Kalau kamu ?" tunjuk Amstrong pada Orang Indonesia.

"Di Indonesia, kami sangat sering mengadakan seminar. Makalah-makalah seminar itu Kami tumpuk. Dan sampailah saya di sini,"ujarnya seraya terkekeh-kekeh tanpa dosa.

Amstrong : ???

Irfan

Di mana ada jalan tol, di situ ada...

Di sebuah kelas, seorang dosen Bahasa Indonesia sedang mengajarkan peribahasa. Ia kemudian melontarkan pertanyaan kepada seorang mahasiswanya yang sedikit terkantuk-kantuk. "Heri, coba teruskan idiom ini. Di mana ada kemauan di situ ada jalan."

Heri, mahasiswa yang kelewat cerdas itu menjawab, "Di mana ada jalan di situ ada tol, di mana ada tol maka di situ ada...Mb...," Heri kebingungan.

Pak dosen : ???

Asep

Sang Buaya

Seorang anggota dewan marah-marah ke ketua dewan atas terpilihnya kembali eyang presiden.

"Bukankah saudara ketua tahu bahwa presiden terpilih itu adalah seorang yang korup dan telah menguras seluruh kekayaan negeri ini," protesnya dengan geram.

Dengan penuh ketenangan ketua dewan berkata, "Bukankah mempertahankan buaya kekenyangan lebih aman daripada mengangkat macan yang kelaparan? Jika kau pilih macan kelaparan, bisa-bisa Kau orang pertama yang akan diterkamnya."

K. Supriyanto



Interogasi

Seorang demonstran yang tertangkap diinterogasi oleh petugas intel berbadan kekar yang lebih mirip gali.

"Siapa namamu, cepat jawab ?"

"Apa arti sebuah nama."

"Dimana kuliahmu, setan ?"

"Kuliah saya di seluruh alam semesta ini."

"Siapa dosenmu, anjing ?"

"Dosen saya Tuhan."

Dengan penuh emosi ditonjoklah muka demonstran itu lalu dibentaknya,"Tahukah sekarang kamu ada dimana, bajingan?"

"Bukankah sekarang saya sedang berada di Rumah Sakit Jiwa," jawabnya tanpa ekspresi.

K. Supriyanto

Self-suggestion

Seorang ilmuwan yang sedang meneliti di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang tiran, keheranan dengan sikap rakyat kerajaan tersebut.

Walaupun hidup dengan segala peraturan yang mengikat, ternyata rakyat tidak banyak menggugat.

Setelah ditekiti, ternyata sebelum tidur, rakyat kerajaan itu berdiri di depan cermin dan berkata, "Dia bukan raja kami. Dia bukan raja kami. Dia bukan ....".

Arifin